SALINAN

BERITA DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

No.25, 2025 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah provinsi ditetapkan;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 telah difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor B-000.7.5/3324/BAPP/2025 tanggal 10 Juli 2025 Hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang RKPD Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 67);

8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Wali Kota menetapkan RKPD Tahun 2026.
(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
(3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
(4) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam:
    a. penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
    b. penyusunan rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika terdiri atas:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
   c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
   d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
   e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
   f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
   g. bab VII memuat penutup.

(2) Isi dan uraian RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 11 Juli 2025

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 18 Juli 2025
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029, serta merupakan pijakan awal dalam pelaksanaan RPJMD tersebut. RPJMD 2025–2029 disusun oleh kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Penyusunan RKPD 2026 juga mempedomani RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2045 yang menjadi acuan arah pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2026 memiliki posisi penting sebagai landasan awal pelaksanaan visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, sekaligus menjadi instrumen untuk memastikan kesinambungan dan akselerasi pencapaian target pembangunan jangka menengah dan panjang.

Secara umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang secara substansial menjabarkan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029 ke dalam prioritas pembangunan, arah kebijakan, program, kegiatan, dan pagu indikatif tahunan, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
2. RKPD memberikan arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan, yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, serta berbatas waktu, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah secara bertahap;
3. RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tangerang Selatan Tahun 2026, sebagai bagian dari penganggaran berbasis kinerja yang menerapkan prinsip *money follow program*;

4. RKPD berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mencerminkan capaian pembangunan serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya;
5. RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 juga disusun dengan memperhatikan RKPD Provinsi Banten Tahun 2026, untuk menjamin konsistensi dan keselarasan pembangunan antarwilayah serta sebagai bagian dari integrasi perencanaan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di Banten.

Lebih lanjut, penyusunan RKPD Tahun 2026 ini juga memperhatikan berbagai dokumen strategis lainnya, antara lain:

1. Sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan nasional, sebagaimana termuat dalam RPJPN Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029, dalam rangka mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045: “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”;
2. Arahan pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan sebagaimana tertuang dalam RTRW Provinsi Banten Tahun 2023–2043 dan dokumen RTRW Kota Tangerang Selatan;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025, sebagai bahan pertimbangan perbaikan perencanaan dan penguatan efektivitas pelaksanaan program;
4. Dokumen perencanaan lainnya yang relevan, baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun hasil Musrenbang dan konsultasi publik.

Dengan landasan tersebut, RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu mengarahkan pembangunan tahunan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian visi “Tangerang Selatan Unggul, Inklusif, Inovatif, Kolaboratif Menuju Kota Lestari.”

Adapun proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045.

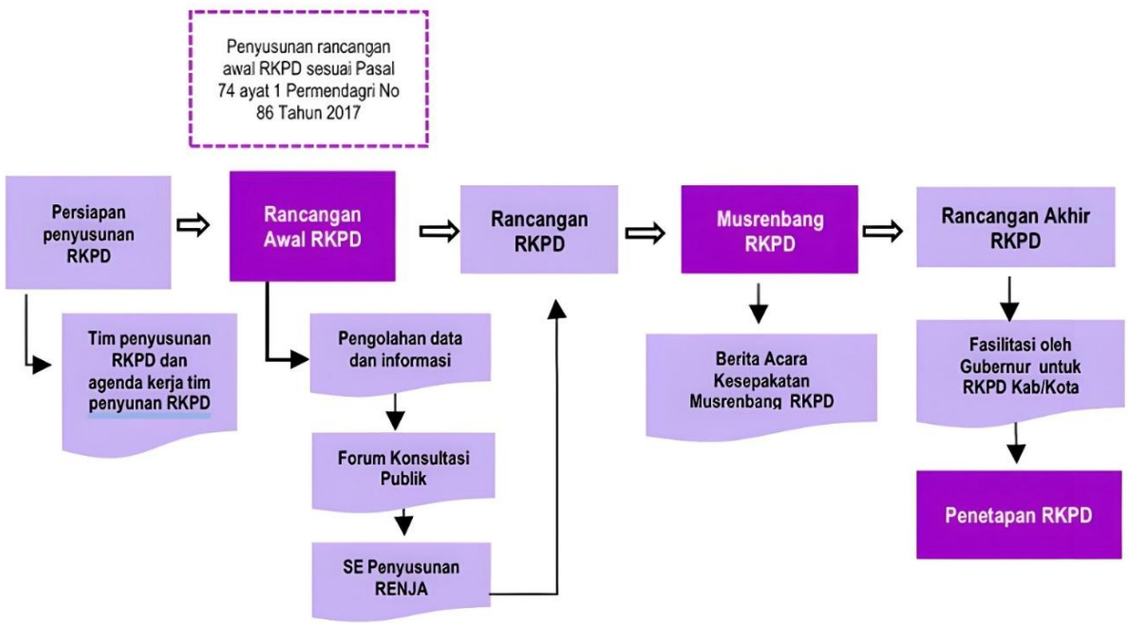
Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2026 mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
3. Penyusunan Rancangan RKPD;
4. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
5. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD;
6. Penetapan RKPD.

Dalam proses tersebut, identifikasi dan analisis permasalahan pembangunan menjadi langkah awal yang penting. Permasalahan dirumuskan melalui pendekatan teknokratik berbasis evaluasi capaian RKPD Tahun 2025, serta memperhatikan:

1. Arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan RPJMN 2025–2029;
2. Arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029;
3. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, perangkat daerah, hingga Musrenbang RKPD;
4. Dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2045, RKPD Provinsi Banten Tahun 2026, serta RTRW Kota Tangerang Selatan.

Dengan pendekatan tersebut, penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu menghadirkan perencanaan yang adaptif, terintegrasi, partisipatif, dan berorientasi pada hasil, sebagai dasar yang kuat dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2026.



Gambar 1.1. Proses Penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Sebagaimana ditunjukkan dalam **Gambar 1.1**, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 dilaksanakan melalui tahapan yang menerapkan pendekatan perencanaan berorientasi pada proses dan substansi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 10 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, meliputi:

1. Pendekatan teknokratik, dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan ini diawali dengan pengumpulan, penelaahan, pengolahan, dan analisis berbagai data dan informasi capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya, serta proyeksi dan indikasi pembangunan tahun mendatang. Pendekatan ini memperhatikan keterkaitan antara pembangunan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan pembangunan nasional dalam kerangka memperkuat pencapaian pembangunan berkelanjutan.
2. Pendekatan partisipatif, dilakukan melalui pelibatan aktif berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) termasuk unsur masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, serta perangkat daerah, dalam setiap tahapan perencanaan. Partisipasi ini diwujudkan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, serta forum perangkat daerah, sebagai wujud perencanaan yang inklusif dan kolaboratif.
3. Pendekatan politis, dilakukan dengan mencermati Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Tangerang Selatan, yang merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, dialog, dan komunikasi langsung antara anggota DPRD dengan konstituen di daerah pemilihan.
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), dilakukan melalui proses integrasi antara usulan masyarakat yang dihimpun sejak tingkat kelurahan dan kecamatan, dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Harmonisasi ini dilakukan dalam forum Musrenbang untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan yang ditetapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan strategis kota.

Selain berorientasi terhadap proses, juga diamanatkan agar berorientasi terhadap substansi (Pasal 9 dan 10 dalam Permendagri 86 Tahun 2017), meliputi:

1. Holistik-tematik, yang berarti perencanaan dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keterkaitan antarsektor, antarpermasalahan, serta antarprogram dan kegiatan, dalam satu kesatuan tema pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan integrasi lintas bidang.
2. Integratif, yakni dengan mengonsolidasikan dan menyelaraskan kewenangan dan sumber daya antarperangkat daerah secara terpadu, serta menghindari tumpang tindih peran dan fungsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. Spasial, yang berarti perencanaan dilakukan dengan memperhatikan dimensi keruangan, karakteristik wilayah, potensi lokal, dan tata ruang kota. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan tersebar secara merata, berkeadilan, serta memperkuat daya dukung dan daya tampung wilayah Kota Tangerang Selatan.

Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, aspiratif, dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Bahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 128);

26. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
27. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 26);

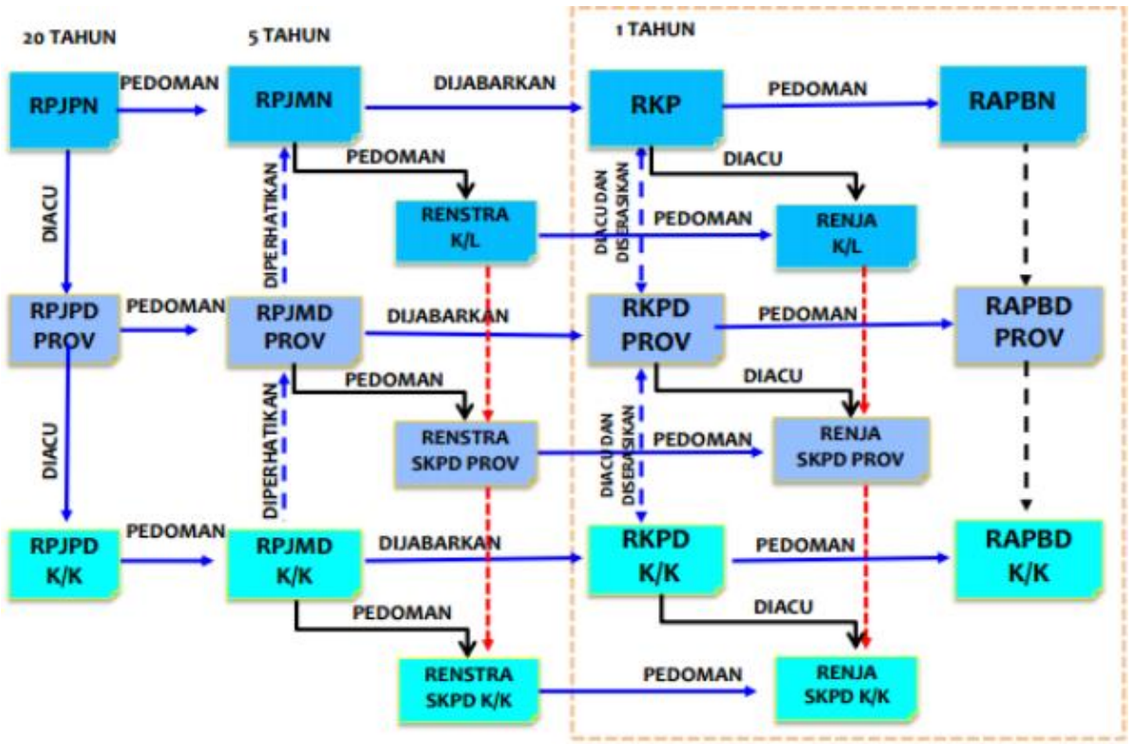
1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Tahun 2026 memiliki keterkaitan dan keterpaduan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. RKPD disusun sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2045 sebagai kerangka arah pembangunan jangka panjang daerah.

Di tingkat nasional, penyusunan RKPD memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Di tingkat provinsi, RKPD juga mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2026 serta RPJMD Provinsi Banten 2025–2029.

RKPD 2026 juga menjadi dasar dalam penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, keterkaitan antara RKPD dan dokumen perencanaan serta penganggaran lainnya menjadi sangat penting dalam memastikan konsistensi arah kebijakan pembangunan, efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya pembangunan.

Dengan memperhatikan hubungan antar dokumen ini, RKPD 2026 disusun secara integratif, partisipatif, dan kolaboratif agar mampu menjawab tantangan pembangunan secara adaptif dan berorientasi hasil. Secara umum, hubungan antara RKPD dengan dokumen lain yang relevan, disajikan dalam Gambar dibawah ini.



Gambar 1.2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Tangerang Selatan

Keterkaitan antar dokumen perencanaan di daerah seperti yang ditampilkan pada **Gambar 1.2,** telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), meliputi:

1. RKPD dan RPJPD
   RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 merupakan tahun transisi perencanaan dari RPJPN dan RPJPD Tahun 2005–2025 menuju RPJPN dan RPJPD Tahun 2025–2045, serta dari RPJMN 2019–2025 dan RPJMD 2021–2026 menuju RPJMN dan RPJMD 2025–2029. Dalam penyusunannya, RKPD ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025–2045, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Dareah tahun 2025-2029.
2. RKPD dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029
   RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 disusun dengan merujuk pada RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029 yang memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Penyusunan RKPD ini diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2045.
3. RKPD dan Renja PD
   RKPD menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat

program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, serta disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD.

4. RKPD dan APBD
   RKPD digunakan sebagai acuan dalam evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD.
5. RKPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi
   Dalam rangkaian proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban sebagai satu kesatuan dalam siklus manajemen pembangunan, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis. RKPD merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. RKPD menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang pada gilirannya disusun berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah masing-masing perangkat daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 dimaksudkan untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan serta prioritas pembangunan daerah tahun 2026 secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029.

Tujuan penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 sesuai dengan prioritas pembangunan, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029;
2. Memberikan landasan operasional dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) masing-masing perangkat daerah Tahun 2026;
3. Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2026;

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 disusun dengan struktur sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan RPJMD dan RKPD tahun n-2 perencanaan, permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis, meliputi:

a. Kondisi Umum Daerah menggambarkan kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
b. Evaluasi pelaksanaan RPJMD dan RKPD terhitung sampai dengan tahun 2024 mencakup capaian indikator makro, indikator kinerja utama dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah.
c. Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan pembangunan daerah dan permasalahan urusan penyelenggaraan daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan tahun 2024 dan target indikator tahun 2026.
d. Isu strategis yang dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta isu strategis.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Kota Tangerang Selatan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Banten.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2026 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2026, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Nasional, dan Provinsi Banten.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang akan dicapai di tahun 2026.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat dan menjelaskan kaidah pelaksanaan umum dan pengorganisasian pelaksanaan agenda pembangunan di Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2026.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembentukan Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom pada tahun 2008 di Provinsi Banten merupakan bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan melalui peningkatan pelayanan pemerintahan, pengembangan potensi daerah, serta pembangunan kota. Kota Tangerang Selatan terbentuk melalui hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kota Tangerang Selatan secara geografis berada pada 06˚13'30"-06˚22'30" Lintang Selatan dan 106˚38'0"-106˚47'0" Bujur Timur. Kota Tangerang Selatan terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan dan 54 (lima puluh empat) kelurahan. Secara rinci batas wilayah Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Larangan, Kecamatan Ciledug, dan Kecamatan Pinang di Kota Tangerang Provinsi Banten

Sebelah Selatan : Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari di Kota Depok serta Kecamatan Gunung Sindur di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

Sebelah Barat : Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Cisauk di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

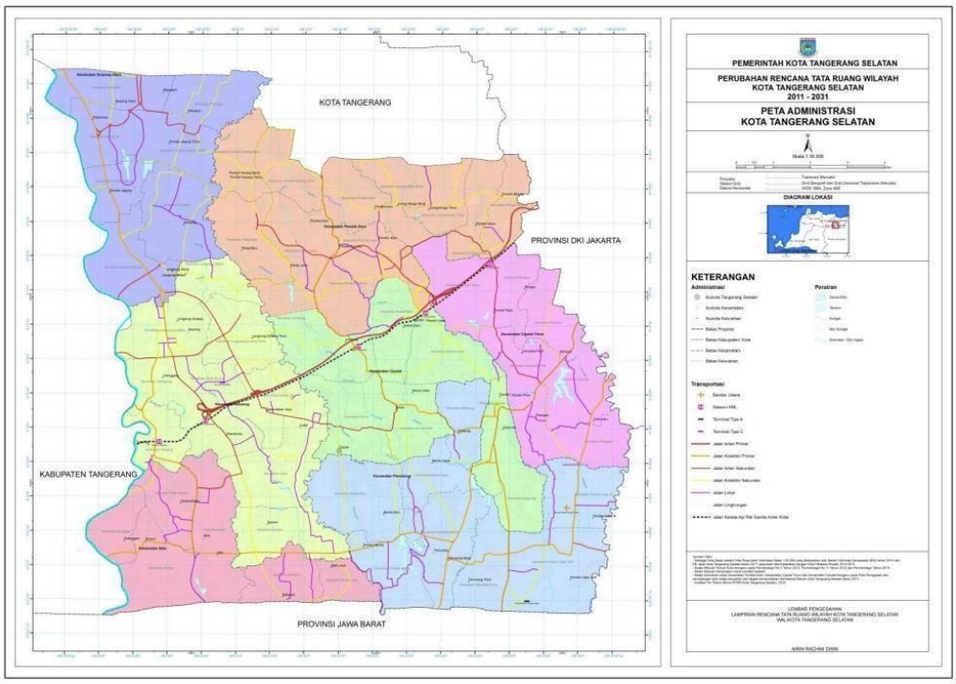
Sebelah Timur : Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Kebayoran Lama, dan Kecamatan Cilandak di Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta Kecamatan Cinere dan Kecamatan Limo di Kota Depok Provinsi Jawa Barat

Kota Tangerang Selatan memiliki total luas wilayah sebesar 164,86 km², dimana wilayah terluas adalah Kecamatan Pondok Aren dengan luas 29,78 km² (18,06%), sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Setu dengan luas 16,73 km² (10,15%). Secara rinci luas wilayah pada setiap kecamatan di Kota Tangerang Selatan disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Daftar Kecamatan di Kota Tangerang Selatan

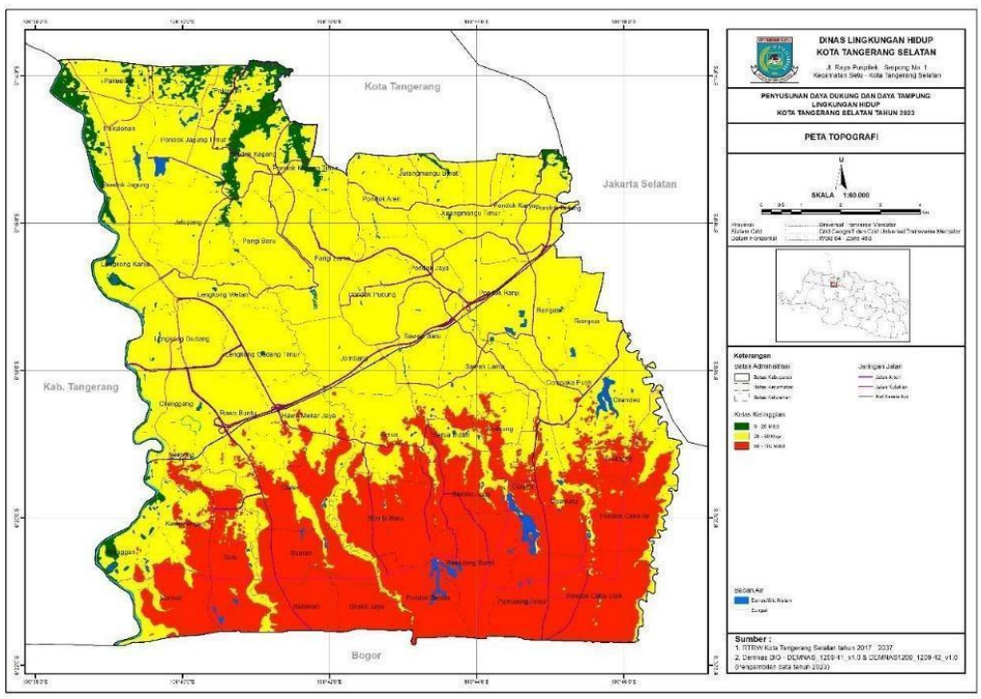
No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km²)	Persentase
1	Setu	Kademangan	6	16,73	10,15
2	Serpong	Serpong	9	28,44	17,25
3	Pamulang	Pamulang Barat	8	28,65	17,38
4	Ciputat	Sawah	7	21,03	12,76
5	Ciputat Timur	Pondok Ranji	6	17,97	10,90
6	Pondok Aren	Perigi Baru	11	29,78	18,06
7	Serpong Utara	Pondok Jagung	7	22,26	13,50
Kota Tangerang Selatan			54	164,86	100

Sumber:BPS Kota Tangerang Selatan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022



Sumber: RTRW Kota Tangerang Selatan 2011-2031
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan secara umum merupakan wilayah dataran rendah dengan dominasi proporsi luas kelas lereng landai/berombak yang diikuti oleh kelas lereng agak miring/bergelombang, kelas lereng datar, dan kelas lereng miring berbukit. Untuk peta topografi Kota Tangerang Selatan dapat di lihat pada Gambar 2.2.



Sumber: Analisis GIS Tahun 2023, Demnas BIG - DEMNAS_1209-41_v1.0 dan DEMNAS_1209-42_v1.0 (Pengambilan Data Tahun 2023)
Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan kelas elevasi wilayah di Kota Tangerang Selatan, sebagian besar wilayah berada pada elevasi 20-50 Mdpl dan 50-100 Mdpl dengan total luas mencapai 11.576,26 ha atau 70.22% dari total luas wilayah

administrasi Kota Tangerang Selatan. Sedangkan untuk kelas kelerengan Kota Tangerang Selatan secara umum merupakan wilayah dataran rendah yang didominasi kelas lereng 0-3% total luas total luas mencapai 16.481,17 ha. Untuk distribusi luas kelas elevasi dan distribusi luas kelas kemiringan lereng dapat di lihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

Tabel 2.2. Distribusi Luas Kelas Elevasi Wilayah Kota Tangerang Selatan menurut Kecamatan

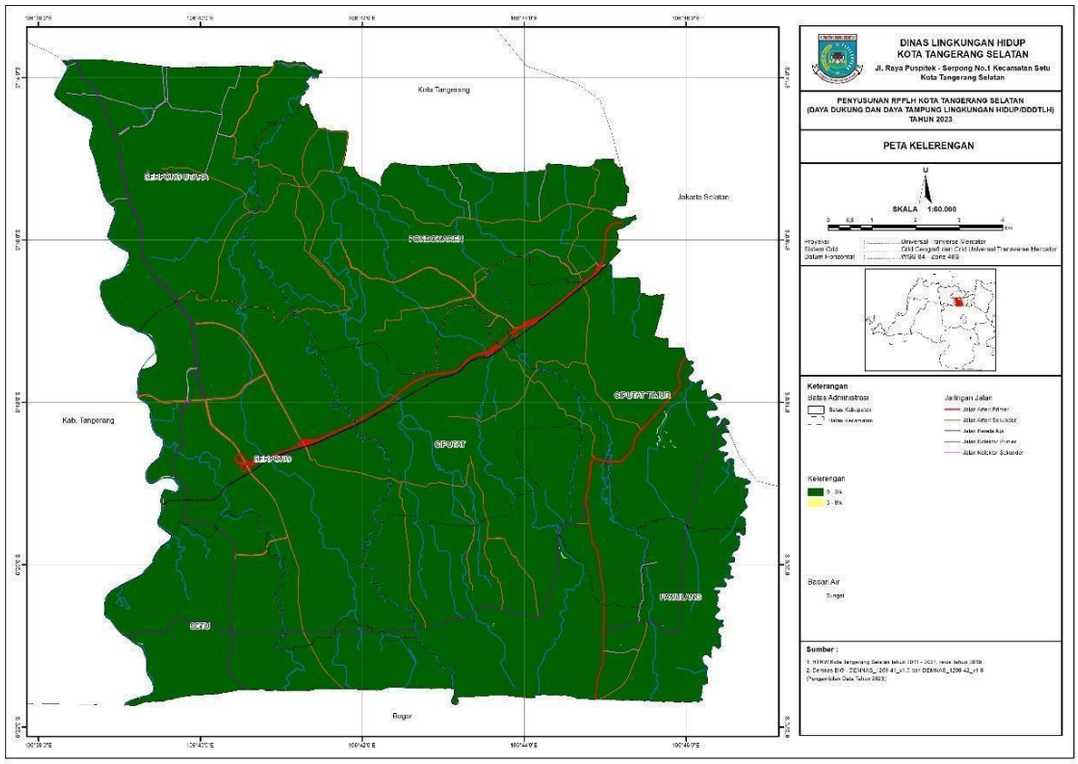
Kecamatan	Elevasi	Luas (ha)
Ciputat	20 - 50 Mdpl	1.624,14
	50 - 100 Mdpl	491,66
Ciputat Timur	0 - 20 Mdpl	0,34
	20 - 50 Mdpl	1.570,18
	50 - 100 Mdpl	213,50
Pamulang	20 - 50 Mdpl	383,06
	50 - 100 Mdpl	2.485,30
Pondok Aren	0 - 20 Mdpl	155,11
	20 - 50 Mdpl	2.822,51
Serpong	0 - 20 Mdpl	35,04
	20 - 50 Mdpl	2.156,08
	50 - 100 Mdpl	652,73
Serpong Utara	0 - 20 Mdpl	353,68
	20 - 50 Mdpl	1.863,87
Setu	0 - 20 Mdpl	63,05
	20 - 50 Mdpl	548,66
	50 - 100 Mdpl	1.066,61
Jumlah		16.485,52

Sumber:Analisis GIS Tahun 2023, Demnas BIG - DEMNAS_1209-41_v1.0 dan DEMNAS_1209-42_v1.0 (Pengambilan Data Tahun 2023)

Tabel 2.3. Distribusi Luas Kelas Lereng Wilayah Kota Tangerang Selatan menurut Kecamatan

Kecamatan	Kelas Kelerengan	Luas (ha)
Ciputat	0 - 3%	2.115,80
Ciputat Timur	0 - 3%	1.782,14
	3 - 8%	1,88
Pamulang	0 - 3%	2.867,63
	3 - 8%	0,73
Pondok Aren	0 - 3%	2.977,62
	3 - 8%	0,00
Serpong	0 - 3%	2.842,53
	3 - 8%	1,32
Serpong Utara	0 - 3%	2.217,33
	3 - 8%	0,21
Setu	0 - 3%	1.678,12
	3 - 8%	0,20
Jumlah		16.485,52

Sumber:Analisis GIS Tahun 2023, Demnas BIG - DEMNAS_1209-41_v1.0 dan DEMNAS_1209-42_v1.0 (Pengambilan Data Tahun 2023)



Sumber: Analisis GIS Tahun 2023, Demnas BIG - DEMNAS_1209-41_v1.0 dan DEMNAS_1209-42_v1.0 (Pengambilan Data Tahun 2023)

Gambar 2.3. Peta Elevasi/Ketinggian Wilayah Kota Tangerang Selatan

Hasil pengamatan distribusi kelas elevasi pada Gambar 2.3 menunjukkan pola gradien ketinggian wilayah yang naik dari arah Utara di Kecamatan Serpong Utara dan Pondok Aren ke arah Selatan di Kecamatan Pamulang dan Setu. Pola ini mengikuti kondisi gradien elevasi bentang alam pada skala yang lebih luas yakni dari arah Utara di wilayah pesisir pantai Utara/Teluk Jakarta ke arah Selatan di wilayah dataran tinggi/pegunungan di Bogor. Informasi pola gradien ketinggian ini juga dapat digunakan untuk memetakan wilayah hulu-hilir suatu daerah aliran sungai (DAS) yang mengalir dari wilayah pegunungan yang tinggi ke wilayah pesisir yang lebih rendah. Wilayah dataran rendah biasanya menjadi wilayah dataran banjir (flood plain) DAS yang tentunya secara alami akan lebih rentan / berisiko terhadap banjir daripada wilayah dengan elevasi yang lebih tinggi. Wilayah Kota Tangerang Selatan itu sendiri dilalui oleh 2 (dua) DAS, yakni DAS Cisadane dan DAS Angke-Pesanggrahan.

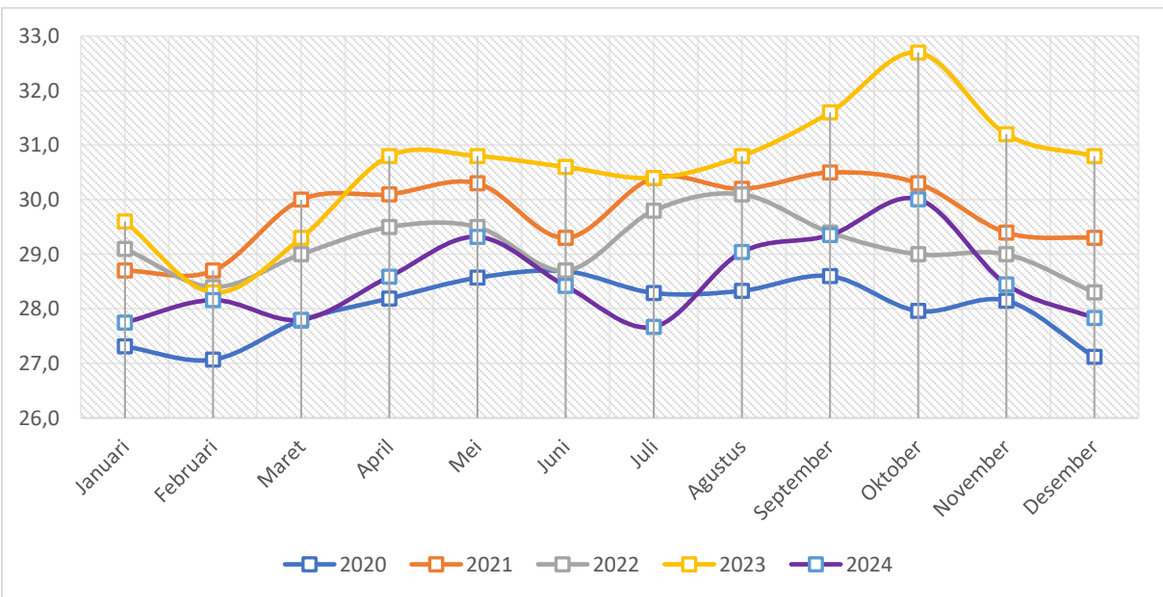
Keadaan iklim Kota Tangerang Selatan diukur dengan parameter suhu, kelembapan, curah hujan, dan hari hujan. Secara umum, rata-rata suhu di Kota Tangerang Selatan selama lima tahun berkisar antara 27,1°C hingga 32,7°C. Suhu tertinggi rata-rata terjadi pada bulan Oktober 2023 dengan 32,7°C, sedangkan suhu terendah rata-rata terjadi pada bulan Februari 2020 dengan 27,1°C. Suhu udara di Kota Tangerang Selatan umumnya lebih tinggi pada bulan Oktober dan November, dan lebih rendah pada bulan Januari dan Februari. Secara umum, rata-rata suhu di Kota Tangerang Selatan mengalami sedikit peningkatan yang fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024. Kelembaban rata-rata di Kota Tangerang Selatan selama lima tahun berkisar antara 60,2% hingga 86,6%. Bulan terbasah di Kota Tangerang Selatan adalah bulan Desember dengan rata-rata kelembaban 83,3 % pada tahun 2022. Bulan terkering di Kota Tangerang Selatan adalah bulan Agustus dengan rata-rata kelembaban 62,7 % pada tahun 2023. Kelembaban udara

di Kota Tangerang Selatan umumnya lebih tinggi pada bulan Desember dan Januari, dan lebih rendah pada bulan Agustus dan September. Secara umum, rata-rata kelembaban di Kota Tangerang Selatan mengalami sedikit penurunan yang fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024. Untuk data detail suhu dan kelembaban di Kota Tangerang Selatan dari tahun 2020-2024 dapat di lihat pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.4.

Tabel 2.4. Rata-Rata Suhu dan Kelembaban di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020–2024

Bulan	Suhu (°C)					Kelembaban (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	27,3	28,7	29,1	29,6	27.8	85,9	76,1	76,6	71,3	82.6
Februari	27,1	28,7	28,4	28,3	28.2	86,6	78,9	78,9	77,0	82.5
Maret	27,8	30,0	29,0	29,3	27.8	83,3	71,3	77,3	75,7	83.1
April	28,2	30,1	29,5	30,8	28.6	82,0	70,5	75,7	69,0	81.8
Mei	28,6	30,3	29,5	30,8	29.3	79,8	70,6	76,6	70,6	76.3
Juni	28,7	29,3	28,7	30,6	28.4	75,6	74,4	78,3	69,0	78.4
Juli	28,3	30,4	29,8	30,4	27.7	73,2	65,5	74,7	65,8	78.0
Agustus	28,3	30,2	30,1	30,8	29.0	73,5	67,5	77,1	62,7	72.8
September	28,6	30,5	29,4	31,6	29.4	73,7	65,8	79,1	60,2	71.7
Oktober	28,0	30,3	29,0	32,7	30.0	78,8	67,7	80,5	60,6	71.6
November	28,2	29,4	29,0	31,2	28.5	79,8	72,1	80,6	70,8	79.6
Desember	27,1	29,3	28,3	30,8	27.8	81,5	75,4	83,3	70,6	80.8
Rata-Rata	28,0	29,8	29,2	30,6	28.5	79,5	71,3	78,2	68,6	78.3

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, 2025



Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan (diolah)

Gambar 2.4. Rata-Rata Suhu di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020–2024

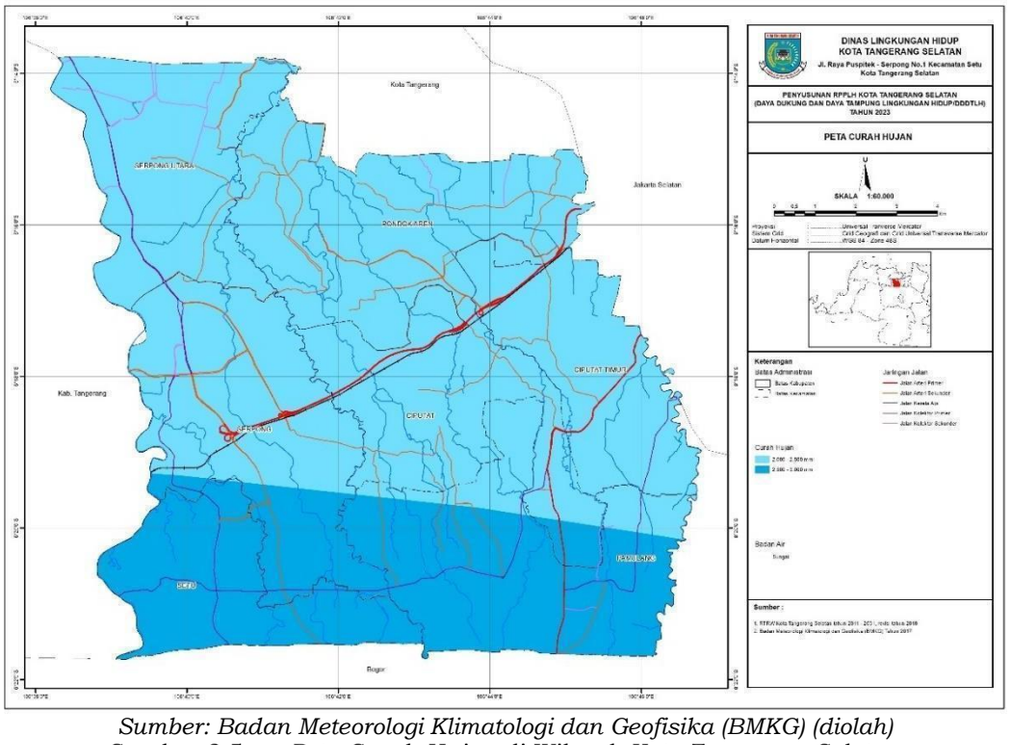
Secara umum, curah hujan di Kota Tangerang Selatan mengalami fluktuasi yang cukup besar dari tahun ke tahun. Bulan terbasah di Kota Tangerang Selatan adalah bulan Januari tahun 2024 dengan curah hujan rata-rata 537,9 mm. Bulan terkering di Kota Tangerang Selatan adalah bulan September tahun 2020 dengan curah hujan rata-rata 0 mm. Curah hujan di Kota Tangerang Selatan umumnya lebih tinggi pada bulan Februari dan Maret, dan lebih rendah pada bulan September dan Oktober. Jumlah hari

hujan di Kota Tangerang Selatan mengalami sedikit penurunan dari tahun 2020 hingga 2024. Bulan dengan hari hujan terbanyak di Kota Tangerang Selatan adalah bulan Agustus, Oktober, dan Desember tahun 2024 dengan rata-rata 31 hari hujan. Bulan dengan hari hujan tersedikit di Kota Tangerang Selatan adalah bulan Oktober tahun 2023 dengan rata-rata 1 hari hujan. Jumlah hari hujan di Kota Tangerang Selatan umumnya lebih banyak pada bulan Desember dan Januari, dan lebih sedikit pada bulan September dan Oktober. Untuk Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Tangerang Selatan dari tahun 2020-2024 dapat di lihat Tabel 2.5 dan Gambar 2.5.

Tabel 2.5. Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020–2024

Bulan	Curah Hujan (mm)					Hari Hujan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	282,0	154,0	143,2	90,4	601.1	23	21	19	13	23
Februari	158,8	537,9	169,1	338,2	230.7	19	22	20	25	22
Maret	145,3	215,9	274,6	161,7	294.0	16	15	18	19	26
April	383,8	118,0	215,7	68,6	420.6	20	16	19	9	22
Mei	171,0	328,6	238,1	143,6	127.4	9	16	17	10	12
Juni	105,2	350,2	288,5	114,9	154.0	6	17	18	12	15
Juli	3,0	54,3	145,5	61,4	239.5	1	8	10	6	29
Agustus	8,4	220,8	144,7	61,7	81.1	2	9	10	5	31
September	0,0	77,7	291,4	27,7	37.2	0	15	17	2	30
Oktober	45,1	88,2	281,2	2,5	79.2	6	15	17	1	31
November	113,2	269,0	347,6	262,6	445.4	15	19	17	19	30
Desember	188,2	226,9	337,6	265,8	166.5	24	22	19	15	31
Rata-Rata	133,7	220,1	239,8	133,3	239.7	12	16	17	11	25

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, 2025



Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) (diolah)
Gambar 2.5. Peta Curah Hujan di Wilayah Kota Tangerang Selatan

Penggunaan lahan kawasan di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh kawasan terbangun, yang digunakan antara lain untuk permukiman,

industri, sarana sosial, perdagangan dan jasa, perkantoran swasta dan pemerintahan. Pemanfaatan lahan di Kota Tangerang Selatan meningkat seiring dengan tingginya aktivitas perkotaan, yang menyebabkan harga lahan tinggi. Penggunaan lahan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan Tabel 2.6.

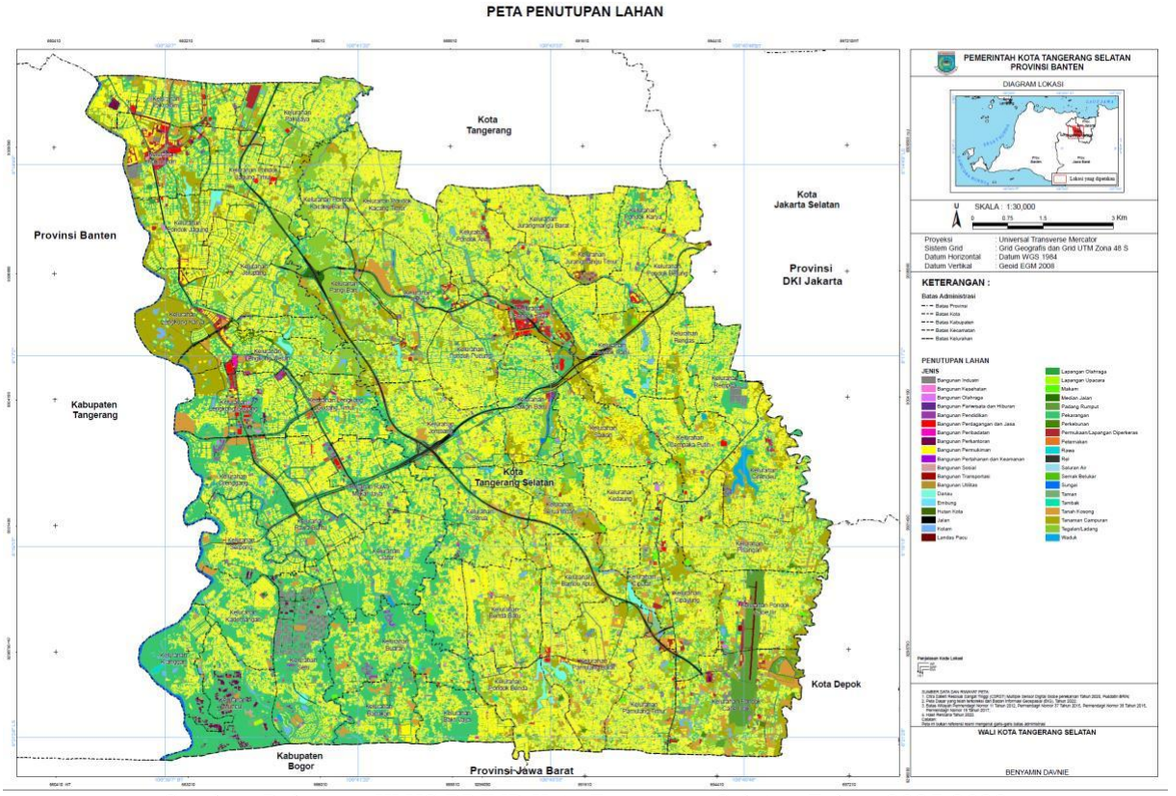
Tabel 2.6. Penggunaan Lahan di Kota Tangerang Selatan tahun 2022

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Bangunan Industri	89,65	0,544%
2	Bangunan Kesehatan	7,64	0,046%
3	Bangunan Olahraga	9,37	0,057%
4	Bangunan Pariwisata dan Hiburan	4,79	0,029%
5	Bangunan Pendidikan	58,63	0,356%
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa	73,38	0,445%
7	Bangunan Peribadatan	31,16	0,189%
8	Bangunan Perkantoran	52,62	0,319%
9	Bangunan Permukiman	5.150,91	31,244%
10	Bangunan Pertahanan dan Keamanan	2,99	0,018%
11	Bangunan Sosial	4,83	0,029%
12	Bangunan Transportasi	6,78	0,041%
13	Bangunan Utilitas	2,63	0,016%
14	Danau	63,29	0,384%
15	Embung	7,99	0,048%
16	Hutan Kota	0,43	0,003%
17	Jalan	1.323,14	8,026%
18	Kolam	102,50	0,622%
19	Landas Pacu	10,61	0,064%
20	Lapangan Olahraga	25,76	0,156%
21	Lapangan Upacara	1,69	0,010%
22	Makam	41,29	0,250%
23	Median Jalan	62,97	0,382%
24	Padang Rumput	135,46	0,822%
25	Pekarangan	6.490,95	39,373%
26	Perkebunan	11,56	0,070%
27	Permukaan/Lapangan Diperkeras	156,95	0,952%
28	Peternakan	0,22	0,001%
29	Rawa	4,82	0,029%
30	Rel	16,72	0,101%
31	Saluran Air	3,68	0,022%
32	Semak Belukar	4,10	0,025%
33	Sungai	125,42	0,761%
34	Taman	87,15	0,529%
35	Tambak	2,01	0,012%
36	Tanah Kosong	487,54	2,957%
37	Tanaman Campuran	1.307,68	7,932%
38	Tegalan/Ladang	483,33	2,932%
39	Waduk	33,29	0,202%
	Total	16.485,52	100

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Berdasarkan penggunaan lahan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022, penggunaan lahan didominasi oleh peruntukan bangunan permukiman sebesar 31,244 persen. Sedangkan Lahan yang belum terbangun di Kota

Tangerang Selatan berupa tanah kosong hanya tersisa 2,957 persen atau 487,54 ha. Untuk detail penggunaan lahan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dalam Gambar 2.6.



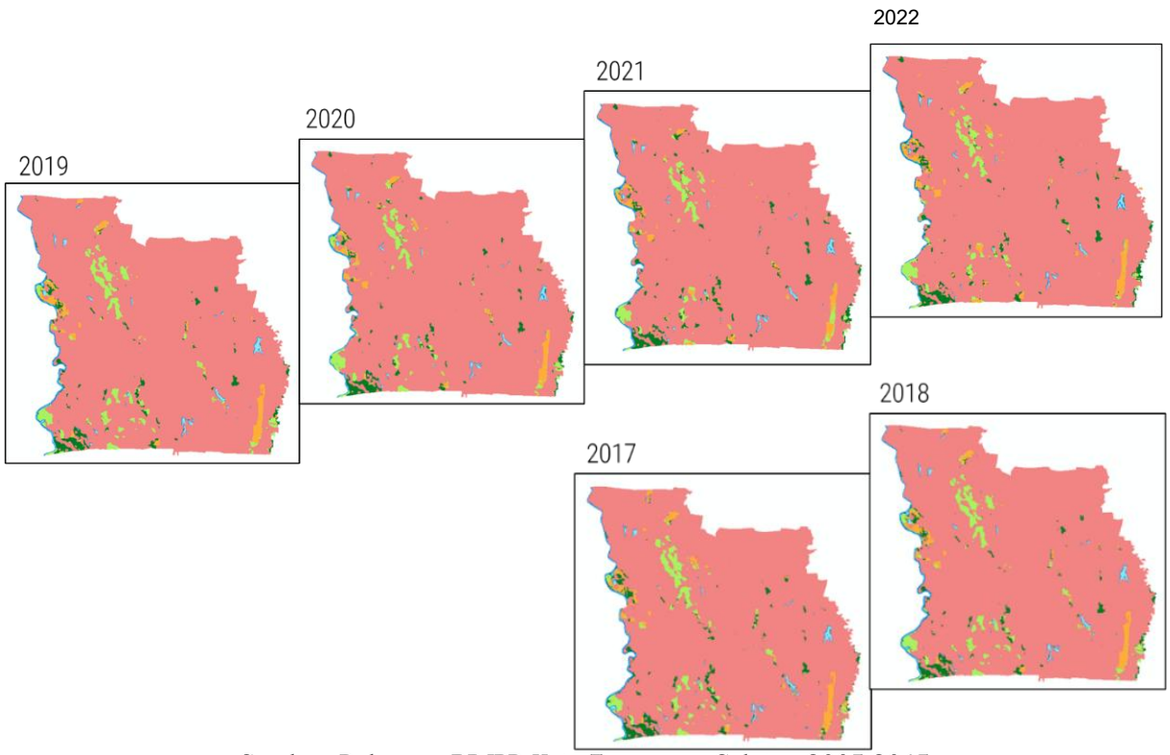
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Gambar 2.6. Peta Penggunaan Lahan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

Penggunaan lahan dalam konfigurasi ruang merupakan salah satu indikator yang banyak digunakan untuk mengukur tingkat perubahan antar waktu dalam perkembangan suatu kota atau wilayah. Jika di lihat secara spasial, data yang diolah dari Sentinel menunjukkan sejak tahun 2017 penggunaan lahan terbangun dan permukiman menempati luas lahan yang tinggi mencapai 90% lebih dari total luas wilayah. Perkembangan luas ini terus meningkat di tahun 2019 dengan laju pertambahan sekitar 30%, sementara lahan pertanian dan tutupan vegetasi cenderung mengalami penurunan luas lahan. Pada tahun 2018, tutupan semak belukar/lahan kering dan lahan terbuka di wilayah Kota Tangerang Selatan semakin berkurang dan digantikan oleh lahan terbangun. Perubahan lahan yang paling mencolok pada tahun 2018 adalah pembangunan jalan tol yang membelah utara-selatan pusat kota bagian barat Tangerang Selatan, yang semula merupakan semak belukar/lahan kering pada tahun 2013. Arah perubahan tutupan lahan yang dibangun oleh Tangerang Selatan berasal dari Kota Jakarta, dari arah timur menuju ke arah barat menjauhi Kota Jakarta dan menuju ke arah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang. Tutupan vegetasi dengan kerapatan tinggi, lahan semak belukar/lahan kering dan lahan pertanian cenderung terus berkurang setiap tahunnya, diiringi dengan bertambahnya luas lahan terbangun.

Gambar 2.7 menunjukkan tingkat perubahan penggunaan dan tutupan lahan di Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu 2017 sampai 2022, yang menunjukkan kecenderungan perkembangan lahan terbangun dan permukiman yang semakin tinggi. Kecenderungan penurunan luas lahan

terbangun di tahun 2020 sampai 2021 sebagian disebabkan intensitas pembangunan yang tidak berjalan, hal tersebut disebabkan kontraksi pembangunan akibat pandemi COVID-19.



Sumber: Dokumen RPJPD Kota Tangerang Selatan 2005-2045
Gambar 2.7. Penggunaan Lahan Kota Tangerang Selatan 2017-2022

Tabulasi hasil klasifikasi tipe tutupan penggunaan lahan di Kota Tangerang Selatan disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.7. Luas Penggunaan Lahan 2017-2022 Kota Tangerang Selatan

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Vegetasi tutupan rapat	403,3	402,3	292,2	350,8	427,5	384,6
2	Vegetasi rawa	0,5	0,5	0,1	0,9	0,4	3,1
3	Lahan pertanian	532,4	530,4	477,4	462,4	411,7	416,8
4	Belukar	0,0	0,0	2,1	0,2	0,2	0,1
5	Lahan pengembalaan	312,6	315,6	267,4	273,5	259,3	357,3
6	Lahan Terbuka dan permukiman	15.015,7	15.015,7	15.240,1	15.200,5	15.184,4	15.162,0
7	Tubuh air	220,5	220,5	205,7	196,7	201,6	161,2
Total Luas (ha)		16.485,0	16.485,0	16,485,0	16.485,0	16.485,0	16.485,0

Sumber: Lampiran Perda No. 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2045

Keadaan hidrologi umumnya berkaitan dengan fisiografi daerah yang berpengaruh langsung terhadap sumber daya lahan dan potensinya. Sistem hidrologi Kota Tangerang Selatan terdiri atas air permukaan, yaitu air yang mengalir atau muncul di permukaan. Aliran air permukaan yang terdapat di Kota Tangerang Selatan berupa aliran air Sungai Cisadane, Sungai Angke dan sebagian wilayah dilewati Sungai Pesanggrahan. Ada juga saluran-

saluran alam yang dialiri air sepanjang tahun sebagai penampung drainase lokal. Saluran semacam ini cenderung meluap pada musim hujan.

Sungai Cisadane menjadi sungai terpanjang yang melewati Kota Tangerang Selatan dengan panjang + 122 Km dengan debit 76,22 m3/dtk. Panjang dan debit sungai di Kota Tangerang Selatan disajikan Tabel 2.8 sedangkan gambaran wilayah kecamatan di Kota Tangerang Selatan yang dilewati oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) disajikan dalam Tabel 2.9dan Gambar 2.8.

Tabel 2.8. Debit Sungai di Kota Tangerang Selatan

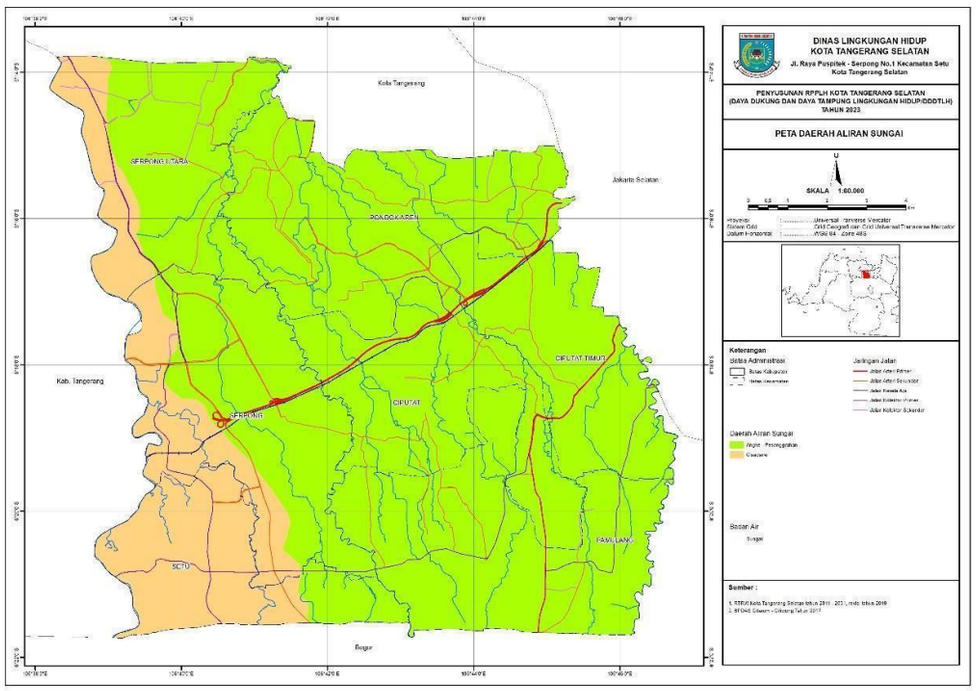
No	Nama Sungai	Panjang (km)	Debit (m^3/dtk)
1	Sungai Kali Angke	+ 62,5	2,62
2	Sungai Cisadane	+ 122	76,22
3	Sungai Pesanggrahan	+ 71,8	1,53

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Tabel 2.9. Data Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Tangerang Selatan

Kecamatan	Nama Daerah Aliran Sungai	Luas (ha)
Ciputat	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	2.115,80
Ciputat Timur	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	1.784,02
Pamulang	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	2.868,36
Pondok Aren	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	2.977,62
Serpong	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	1.950,50
	Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane	893,35
Serpong Utara	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	1.645,75
	Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane	571,79
Setu	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	300,88
	Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane	1.377,44
Jumlah		16.485,52

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Gambar 2.8. Peta DAS di Wilayah Kota Tangerang Selatan

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat TP, dan Fecal Coliform, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Berdasarkan hasil pemantauan air sungai di Kota Tangerang Selatan yang dilakukan pada 25 titik pantau, terdapat sebanyak 20 titik pantau menunjukkan nilai status mutu air dengan kategori memenuhi baku mutu dan sebanyak 5 titik pantau dengan kategori cemar ringan, sebagaimana disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.10. Indeks Pencemar dan Status Mutu Air Sungai Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

No	Nama Aliran	Pij	Kategori
1	Kali Jalentreng Tengah	0,954	Memenuhi BM
2	Kali Jalentreng Hulu	0,800	Memenuhi BM
3	Kali Jalentreng Hilir	0,755	Memenuhi BM
4	Kali Cisalak Hulu	1,084	Cemar Ringan
5	Kali Cisalak Hilir	0,715	Memenuhi BM
6	Sungai Cisadane Hulu	0,709	Memenuhi BM
7	Sungai Cisadane Tengah I	0,746	Memenuhi BM
8	Sungai Cisadane Tengah Ii	0,655	Memenuhi BM
9	Sungai Cisadane Hilir	0,586	Memenuhi BM
10	Sungai Angke Hulu	0,748	Memenuhi BM
11	Sungai Angke Tengah 1	0,755	Memenuhi BM
12	Sungai Angke Hilir	0,765	Memenuhi BM
13	Sungai Pesanggrahan Hulu	0,762	Memenuhi BM
14	Sungai Pesanggrahan Tengah	0,899	Memenuhi BM
15	Sungai Pesanggrahan Hilir	0,725	Memenuhi BM
16	Kali Legoso Hulu	0,946	Memenuhi BM
17	Kali Legoso Hilir	1,073	Cemar Ringan
18	Kali Cirompang Hulu	1,145	Cemar Ringan
19	Kali Cirompang Hilir	1,014	Cemar Ringan
20	Kali Ciledug Hulu	0,741	Memenuhi BM
21	Kali Ciledug Hilir	0,830	Memenuhi BM
22	Kali Kedaung Hulu	1,053	Cemar Ringan
23	Kali Kedaung Hilir	0,893	Memenuhi BM
24	Kali Baru Hulu	0,757	Memenuhi BM
25	Kali Baru Hilir	0,864	Memenuhi BM

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Pemantauan kualitas air selain dilakukan pada air sungai, juga dilakukan pada air danau/situ yang terdapat di Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan memiliki 9 Situ. Hasil pemantauan kualitas air situ terhadap 13 titik pantau air adalah sebanyak 5 titik pantau berkategori status mutu air memenuhi baku mutu dan sebanyak 8 titik pantau berkategori status mutu air cemar ringan, sebagaimana disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.11. Lokasi dan Luas Situ di Kota Tangerang Selatan

No	Situ	Kecamatan	Luas Situ (ha)
1	Situ Legoso/Situ Kuru	Ciputat Timur	0,54
2	Situ Pamulang	Ciputat dan Pamulang	25,8
3	Situ Bungur	Ciputat Timur	2,91
4	Situ Rompong	Ciputat Timur	1,77
5	Situ Parigi	Pondok Aren	4,14
6	Situ Ciledug	Pamulang	23,05
7	Situ Kayu Antap	Ciputat Timur	1,64
8	Situ Pondok Jagung/Rawa Kutuk	Serpong Utara	7,59
9	Bendungan Gintung	Ciputat Timur	22,57

Sumber:Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Tabel 2.12. Indeks Pencemar dan Status Mutu Air pada Situ di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

No	Nama Aliran	Pij	Kategori
1	Situ Ciledug Inlet	1,021	Cemar Ringan
2	Situ Sasak Inlet	1,036	Cemar Ringan
3	Situ Perigi Inlet	0,955	Memenuhi BM
4	Situ Pondok Jagung Inlet	1,047	Cemar Ringan
5	Situ Pondok Jagung Outlet	0,933	Memenuhi BM
6	Situ Bungur Inlet	1,055	Cemar Ringan
7	Situ Bungur Outlet	1,039	Cemar Ringan
8	Situ Rompang Inlet	1,121	Cemar Ringan
9	Situ Rompang Outlet	1,015	Cemar Ringan
10	Situ Gintung Inlet	0,816	Memenuhi BM
11	Situ Gintung Outlet	0,787	Memenuhi BM
12	Situ Kuru Inlet	1,548	Cemar Ringan
13	Situ Kuru Outlet	0,951	Memenuhi BM

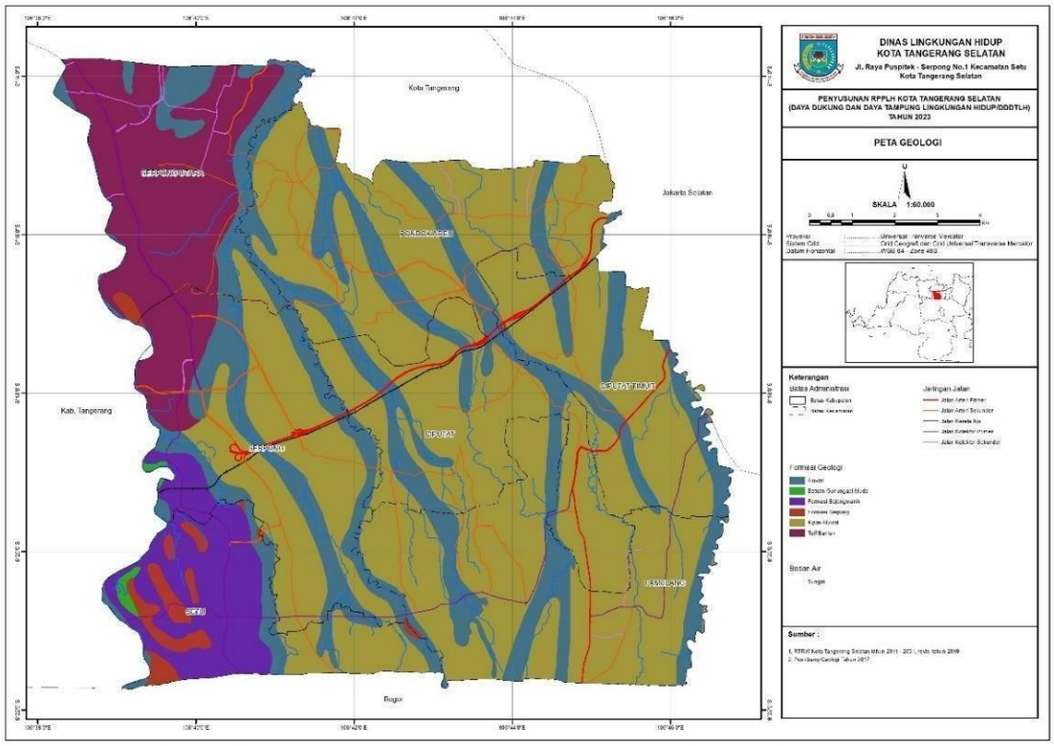
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang relatif datar, adapun pada beberapa Kecamatan terdapat lahan yang bergelombang seperti di perbatasan antara Kecamatan Setu dan Kecamatan Pamulang, serta sebagian di Kecamatan Ciputat Timur. Kondisi Geologi Kota Tangerang Selatan umumnya adalah batuan alluvial, yang terdiri dari batuan lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah. Berdasarkan klasifikasi dari United Soil Classification System, batuan ini mempunyai kemudahan dikerjakan atau work ability yang baik sampai sedang, unsur ketahanan terhadap erosi cukup baik, sehingga wilayah Kota Tangerang Selatan masih cukup layak untuk kegiatan perkotaan. Pada konteks wilayah kota Tangerang Selatan, informasi karakteristik geologi dan jenis tanah berguna untuk menilai kelayakan pembangunan konstruksi infrastruktur permukiman wilayah perkotaan, kelayakan sipil bangunan, serta untuk menekan risiko dan memitigasi dampak negatif dari aktivitas pembangunan yang ditimbulkannya. Peta geologi dan Tabel distribusi luas kelas geologi litologi wilayah Kota Tangerang Selatan dapat dilihat secara lengkap sebagai berikut:

Tabel 2.13. Distribusi Luas Kelas Geologi Litologi Wilayah Kota Tangerang Selatan

Kecamatan	Formasi	Luas (ha)
Ciputat	Aluvial	684,79
	Kipas Aluvial	1.662,20
Ciputat Timur	Aluvial	452,40
	Kipas Aluvial	1.331,62
Pamulang	Aluvial	399,04
	Formasi Serpong	3,42
	Kipas Aluvial	2.234,71
Pondok Aren	Aluvial	809,63
	Kipas Aluvial	2.168,00
Serpong	Aluvial	835,90
	Batuan gunungapi muda	10,37
	Formasi Bojongmanik	155,49
	Formasi Serpong	5,11
	Kipas Aluvial	1.423,48
	Tuff Banten	413,49
Serpong Utara	Aluvial	468,72
	Formasi Serpong	25,83
	Kipas Aluvial	57,08
	Tuff Banten	1.665,92
Setu	Aluvial	229,98
	Batuan gunungapi muda	28,09
	Formasi Bojongmanik	862,83
	Formasi Serpong	229,11
	Kipas Aluvial	328,31
Jumlah		16.485,52

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Gambar 2.9. Peta Geologi Wilayah Kota Tangerang Selatan

2.1.1.2. Potensi Kota Tangerang Selatan

Posisi Kota Tangerang Selatan yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta, menjadikan Kota Tangerang Selatan memiliki peran strategis baik dalam konstelasi regional Provinsi Banten dan konstelasi Nasional. Dalam konstelasi regional Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I dimana arahan fungsi dan peranannya sebagai penyangga kawasan Jabodetabek serta wilayah perbatasan daerah untuk pengembangan kegiatan jasa, perdagangan, permukiman atau perumahan dan pendidikan. Sedangkan dalam konstelasi Nasional, Kota Tangerang Selatan sebagai kawasan perkotaan dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional dan beberapa Provinsi. Kota Tangerang Selatan termasuk dalam kawasan Budi Daya yang memiliki karakteristik sebagai kawasan dengan tingkat pelayanan sarana dan prasarana tinggi.

Kota Tangerang Selatan memiliki akses yang cukup baik. Kedekatannya dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadikan wilayah Kota Tangerang Selatan cukup mudah untuk diakses. Kota Tangerang Selatan dihubungkan oleh Tol Lingkar Luar Jakarta yang menghubungkan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Akses Jalan Tol Kunciran–Serpong, Jalan Tol Tangerang–Merak serta koridor Jalan Kolektor Primer Provinsi Banten menjadikan Kota Tangerang Selatan memiliki aksesibilitas tinggi bagi kegiatan perdagangan dan jasa serta permukiman skala besar di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabek-Punjur.

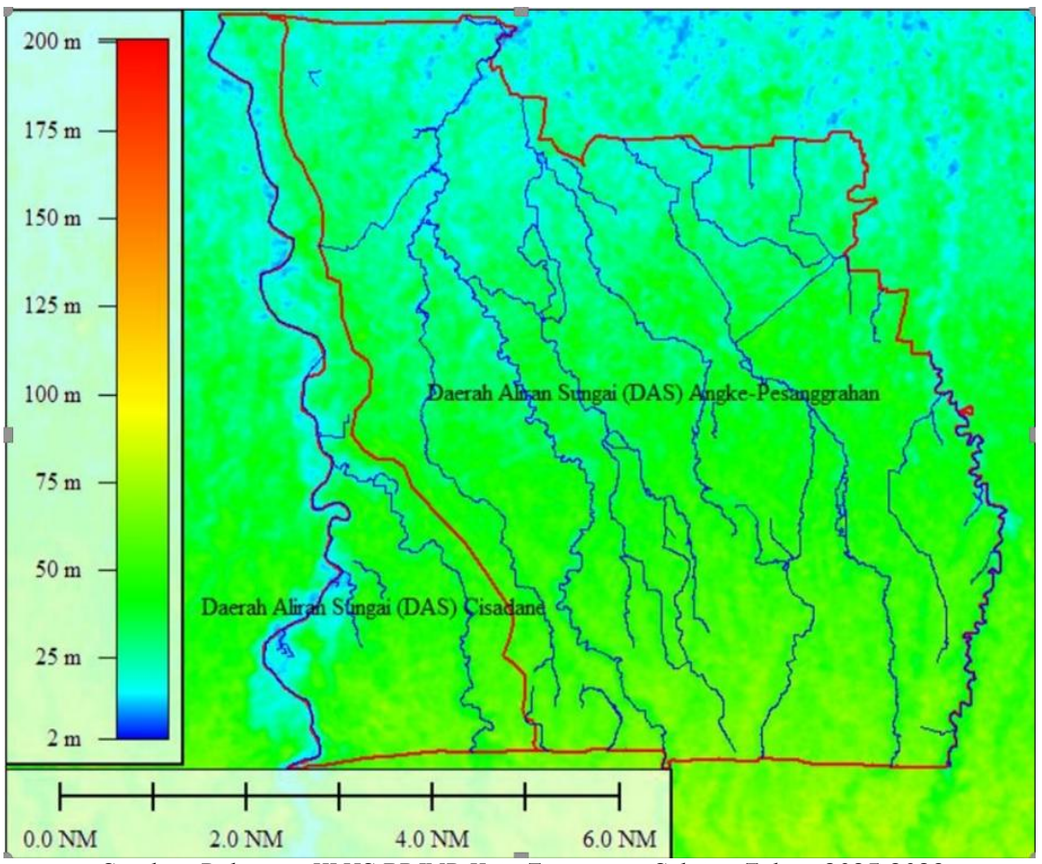
2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)

Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyediakan sumber daya alam (air, udara, tanah, bahan pangan) bagi

populasi makhluk hidup tanpa menyebabkan degradasi, sedangkan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap dan memulihkan diri dari dampak aktivitas manusia (limbah, polusi, kerusakan ekosistem). Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah batas alam yang harus dijadikan acuan untuk pembangunan berkelanjutan.

a. Daya Dukung Air

Secara umum, terdapat 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melewati Kota Tangerang Selatan yaitu DAS Angke-Pesanggrahan dan DAS Cisadane yang terbagi dalam beberapa sub DAS sebagaimana tersaji sebagai berikut.



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Gambar 2.10. Peta DAS di Kota Tangerang Selatan

Tabel 2.14. Pembagian Sub-DAS di Kota Tangerang Selatan

No	Sub DAS	Luas (km²)
1	Sub-DAS Pesanggrahan	17,639
2	Sub-DAS Ciputat	27,259
3	Sub-DAS Cibenda	44,374
4	Sub-DAS Angke	48,592
5	Sub-DAS Cisadane	26,99

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

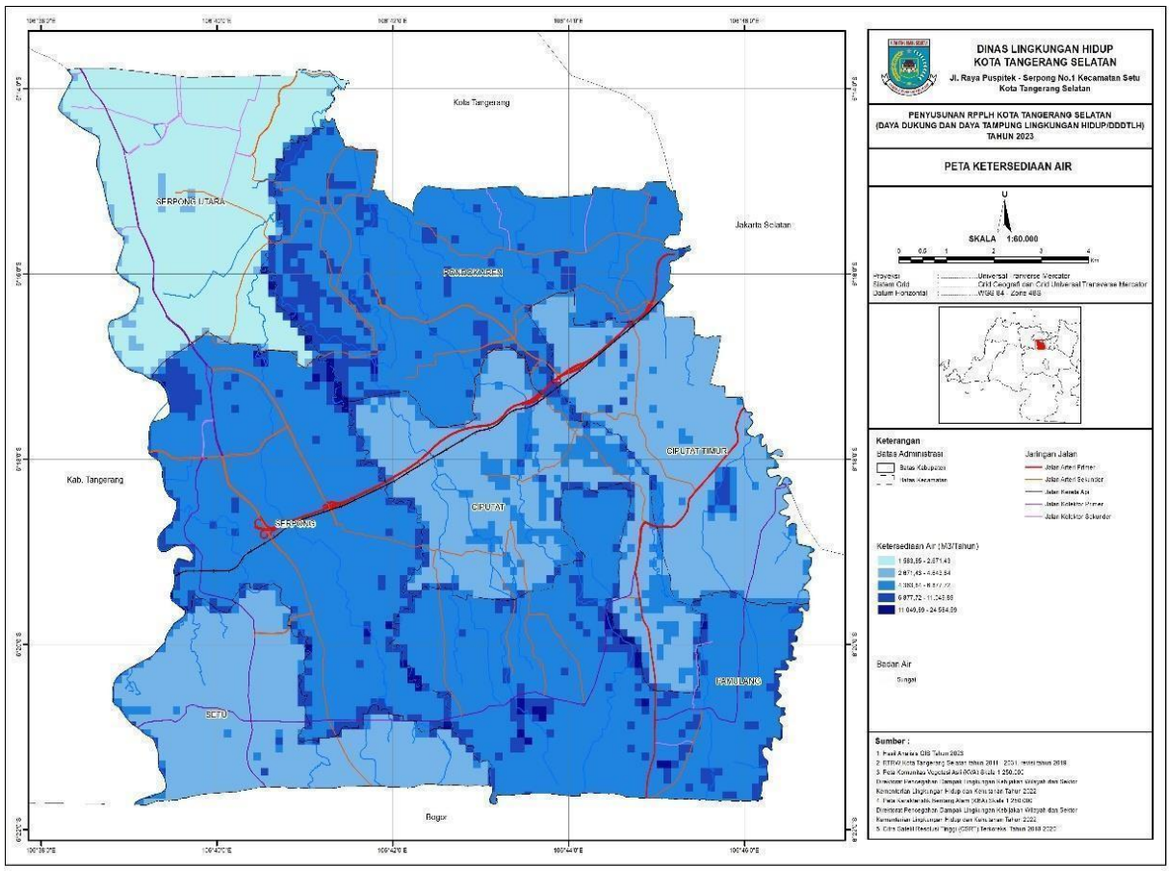
Ketersediaan air di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 sebesar 35.690.389,88 m³/tahun. Jumlah ini memberikan gambaran umum mengenai total volume air yang dapat dimanfaatkan di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan dalam satu tahun. Jika ditinjau ketersediaan air per Kecamatan, terlihat Kecamatan Pondok Aren memiliki jumlah ketersediaan air yang paling tinggi, sementara Kecamatan Serpong Utara memiliki jumlah

ketersediaan air yang paling rendah. Ketersediaan air dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti curah hujan, kondisi sumber air pemukaan (sungai, waduk, situ, tandon) sebagai penyedia air utama, kuantitas dan kedalaman aquifer serta kemampuan tanah menyerap hujan untuk mengisi cadangan air tanah. Ketersediaan air per Kecamatan secara spasial disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.15. Ketersediaan Air di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Kecamatan	Total Ketersediaan Air (m³/tahun)
Ciputat	5.229.120,43
Ciputat Timur	3.208.884,14
Pamulang	7.464.630,43
Pondok Aren	8.089.833,77
Serpong	7.370.828,39
Serpong Utara	1.798.631,56
Setu	2.528.461,16
Jumlah	35.690.389,88

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
Gambar 2.11. Peta Ketersediaan Air Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Kebutuhan air terdiri dari kebutuhan domestik dan kebutuhan berbasis lahan. Perhitungan kebutuhan air berbasis lahan menggunakan data spasial tutupan lahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (produksi). Adapun total kebutuhan air di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dalam Tabel 2.16.

Tabel 2.16. Total Kebutuhan Air Kota Tangerang Selatan (Liter/detik)

No	Kecamatan	Kebutuhan Air Domestik (Liter/Detik)	Kebutuhan Air Berbasis Lahan (Liter/Detik)	Total Kebutuhan Air (Liter/Detik)
1	Setu	123,16	252,26	375,42
2	Serpong	221,22	175,15	396,37
3	Pamulang	432,21	139,99	572,20
4	Ciputat	296,22	143,33	439,55
5	Ciputat Timur	240,43	87,08	337,51
6	Pondok Aren	412,03	262,47	674,49
7	Serpong Utara	189,27	153,40	342,67
Total		1.914,54	1.223,68	3.138,22

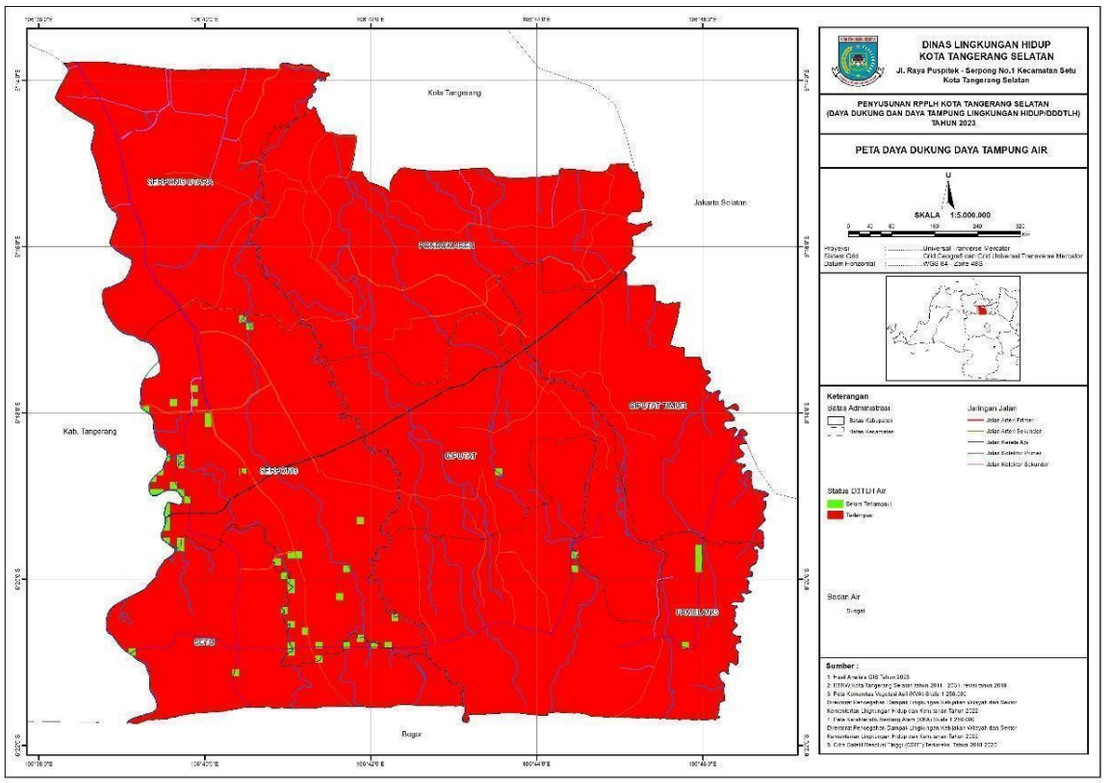
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Data pada di atas digunakan sebagai informasi dasar untuk membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan air sehingga dapat diketahui status daya dukung air pada suatu wilayah. Daya dukung air (water carrying capacity) mengacu pada kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan air bersih yang berkelanjutan bagi populasi dan aktivitas (pertanian, industri, rumah tangga) tanpa mengalami kelangkaan atau kerusakan ekosistem. Berdasarkan status daya dukung air per wilayah Kecamatan di Kota Tangerang Selatan sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.17, terlihat sebagian besar daya dukung dan daya tampung air pada seluruh kecamatan di Kota Tangerang Selatan telah terlampaui, dengan total pelampauan sebesar 99,22% dari luas wilayah Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut mencerminkan bahwa kebutuhan air melebihi dari ketersediaan air. Wilayah Kecamatan Ciputat, Pamulang, Serpong dan Setu, walaupun masih memiliki daya dukung dan daya tampung air dibandingkan wilayah Kecamatan lain, namun persentasenya sangat kecil. Gambaran daya dukung dan daya tampung air per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan secara spasial disajikan dalam Gambar 2.12.

Tabel 2.17. Status Daya Dukung Daya Tampung Air Kota Tangerang Selatan per Kecamatan

Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air	**Kecamatan**	**Luas (ha)**	**Persentase (%)**
BELUM TERLAMPAUI	Ciputat	4,72	0,03
	Pamulang	16,52	0,10
	Serpong	102,02	0,62
	Setu	4,57	0,03
Jumlah		**127,84**	**0,78**
TERLAMPAUI	Ciputat	2.440,94	14,81
	Ciputat Timur	1.795,11	10,89
	Pamulang	2.740,64	16,62
	Pondok Aren	2.951,39	17,90
	Serpong	2.759,57	16,74
	Serpong Utara	2.110,61	12,80
	Setu	1.559,42	9,46
Jumlah		**16.357,68**	**99,22**
Total		16.485,52	100,00

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Gambar 2.12. Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Tangerang Selatan

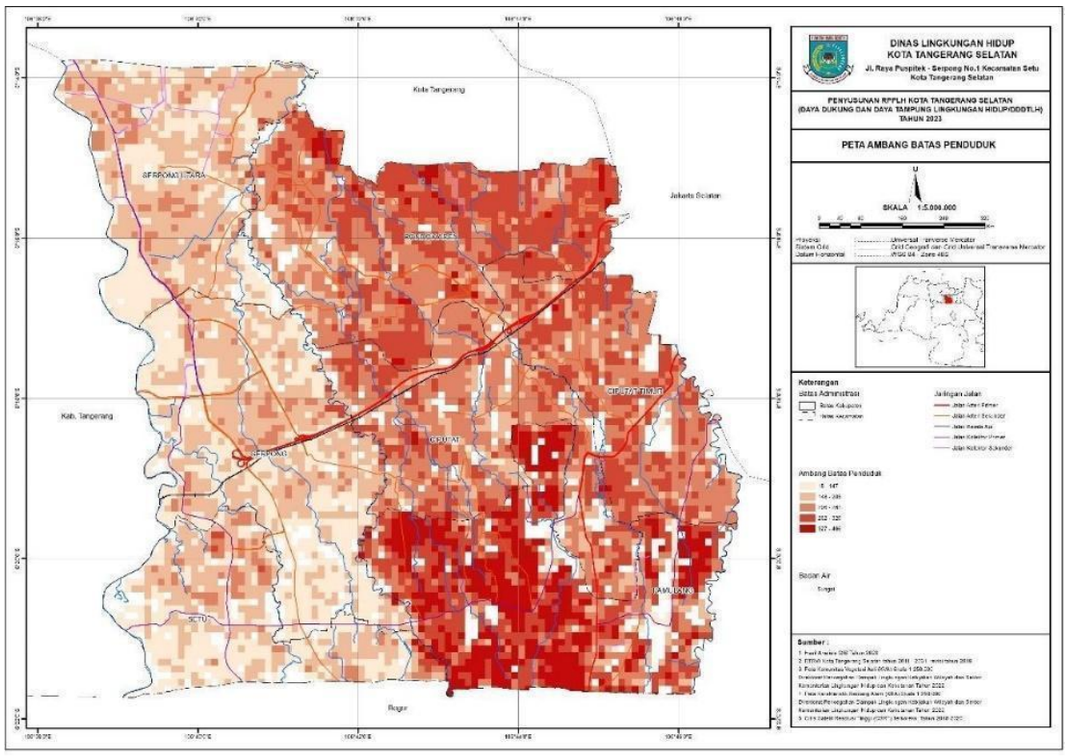
Salah satu faktor yang mempengaruhi daya dukung air pada suatu wilayah adalah penggunaan air yang berhubungan dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas penduduk yang membutuhkan air. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk maka kebutuhan air akan meningkat. Berdasarkan kebutuhan air dan ketersediaan, dapat dihitung ambang batas penduduk Kota Tangerang Selatan yang dapat didukung kebutuhan airnya.

Mengacu pada jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2022 sebesar 1.378.466 jiwa, maka selisih ambang batas penduduk Kota Tangerang Selatan yang masih dapat dipenuhi kebutuhan airnya adalah sebesar 39.001 jiwa. Jika dianalisis terhadap jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2024 sebesar 1.429.530 jiwa maka ambang batas penduduk yang dapat terpenuhi kebutuhan airnya telah terlampaui. Hal ini perlu diwaspadai di masa mendatang dimana kondisi ketersediaan air yang ada tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan air.

Tabel 2.18. Ambang Batas Penduduk Kota Tangerang Selatan Per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	Ambang Batas Penduduk (Jiwa)	Selisih Ambang Batas (jiwa)
Ciputat	213.275	219.060	5.785
Ciputat Timur	173.110	176.551	3.441
Pamulang	311.189	319.094	7.905
Pondok Aren	296.659	305.799	9.140
Serpong	159.281	167.716	8.435
Serpong Utara	136.276	138.163	1.887
Setu	88.676	91.084	2.408
Jumlah	1.378.466	1.417.467	39.001

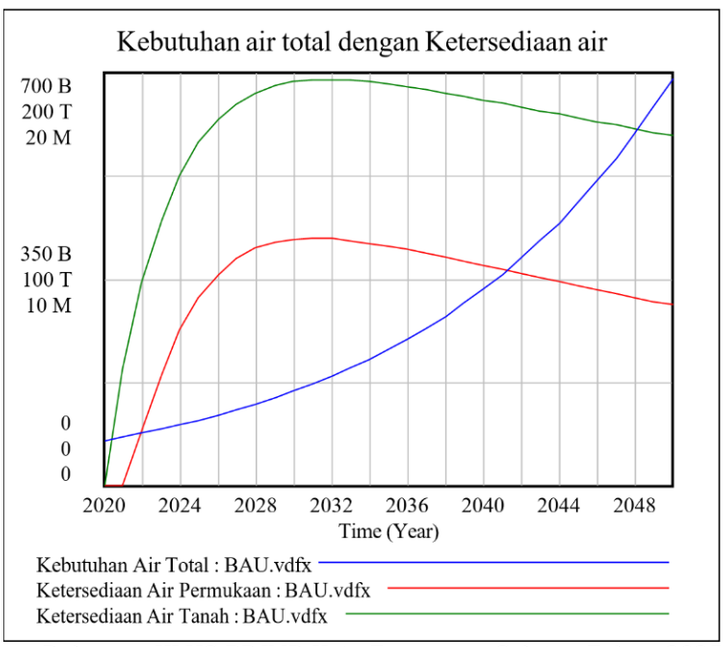
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Gambar 2.13. Peta Ambang Batas Penduduk Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan analisa sistem dinamik dalam KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029, terlihat bahwa kebutuhan air total semakin meningkat di Kota Tangerang Selatan tiap tahunnya hingga tahun 2048. Sementara itu, ketersediaan air tanah dan air permukaan sangat rendah dan cenderung menurun dengan lambat hingga tahun 2048. Dari hasil analisis sistem dinamik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa isu ketersediaan air bersih menjadi isu pokok dalam daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang ke depan.



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Gambar 2.14. Proyeksi Perbandingan Kebutuhan Air Total dengan Ketersediaan Air

b. Daya Dukung Pangan

Banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung ketersediaan pangan salah satunya dengan memanfaatkan nilai kalori seluruh bahan pangan yang dihasilkan di dalam wilayah Kota Tangerang Selatan. Analisis daya dukung pangan dihitung menggunakan pertimbangan kecukupan lahan pertanian yang dikonversikan sebagai potensi produksi beras dan komoditas lainnya. Sedangkan nilai kebutuhan pangan dihitung berdasarkan populasi penduduk yang tinggal di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil konversi bahan pangan, maka ketersediaan pangan berdasarkan kalori bahan pangan di Kota Tangerang Selatan yaitu sekitar 505.101.987 kkal, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19. Ketersediaan Pangan berdasarkan Nilai Kalori Tahun 2023

No.	Jenis Produksi Komoditas	Kalori (kkal/100 gram)
1	Beras	2.878.074
2	Jagung	359.759
3	Kedelai	-
4	Kacang Tanah	215.856
5	Ubi Kayu	57.561.480
6	Ubi Jalar	-
7	Sayur	43.171.110
8	Buah Buahan	1.698.863
Total		505.101.987

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Untuk perhitungan kebutuhan pangan didasarkan pada kalori, dihitung dengan menggunakan Angka Kecukupan Energi (AKE) yang menggambarkan standar minimum gizi dari sisi kalori yang seyogyanya dipenuhi oleh masyarakat Indonesia untuk hidup layak dan sehat seperti terlihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20. Angka Kecukupan Energi Kota Tangerang Selatan

Umur Penduduk	AKE Laki (kkal)	AKE Perempuan (kkal)
0-9	1.650	0
10-14	2.400	2.050
15-19	2.650	2.100
20-24	2.650	2.250
25-29	2.650	2.250
30-34	2.550	2.150
35-39	2.550	2.150
40-44	2.550	2.150
45-49	2.550	2.150
50-54	2.150	1.800
55-59	2.150	1.800
60-64	2.150	1.800
65<	1.800	1.550

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

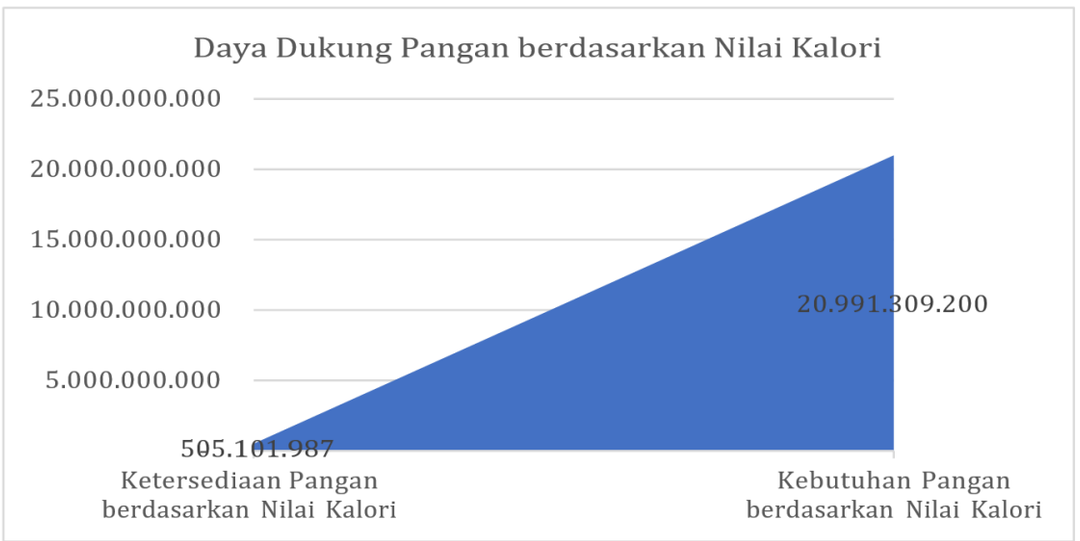
Berdasarkan pada Angka Kebutuhan Energi, kebutuhan pangan berdasarkan nilai kalori di Kota Tangerang Selatan diperkirakan mencapai 20.991.309.200 kkal, sebagaimana disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.21. Kebutuhan Pangan berdasarkan Nilai Kalori Tahun 2023

Kategori	Kebutuhan Pangan (kkal)
kanak-kanak (5-11 tahun)	1.284.605.100
remaja (12-25 tahun)	3.233.367.600
dewasa (26-45 tahun)	8.635.025.000
lansia (46-65 tahun)	7.838.311.500
Total	20.991.309.200

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Gambaran daya dukung pangan berdasarkan ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan disajikan dalam Gambar 2.15.



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
Gambar 2.15. Daya Dukung Pangan berdasarkan Nilai Kalori Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 2.15, terlihat bahwa selisih ketersediaan dan kebutuhan pangan dari sisi kalori menunjukkan defisit pangan atau ketersediaan kalori jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhannya. Hal ini menunjukkan daya dukung pangan Kota Tangerang Selatan dari sisi kecukupan nilai kalori secara indikatif terlampaui. Dengan demikian, perlunya memaksimalkan ketersediaan logistik pangan dari daerah lain untuk memastikan kecukupan pangan di Kota Tangerang Selatan, karena Kota Tangerang Selatan tidak memiliki lahan pertanian. Sebagian besar pasokan komoditi pangan Kota Tangerang Selatan seperti beras, daging sapi dan daging ayam dipasok dari luar daerah. Untuk itu, sangat perlu untuk selalu memastikan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan terpenuhi di Kota Tangerang Selatan.

c. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup

Jasa lingkungan hidup sebagai salah satu metode yang direkomendasikan dalam untuk mengukur dan menentukan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) suatu wilayah. Pendekatan jasa lingkungan hidup ini diadopsi dari Millenium Ecosystem Assessment (MEA) yang diprakarsai oleh PBB/United Nations mulai tahun 2001. MEA bekerja dengan asumsi semakin tinggi jasa lingkungan hidup di suatu wilayah maka akan semakin tinggi pula kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya. Pendekatan jasa lingkungan hidup ini dinilai berdasarkan kondisi ekoregion dan tutupan lahan (land cover) sebagai

penaksir atau proxy penilaiannya. Jenis kelas ekoregion dan/atau kelas tutupan lahan tertentu akan memiliki kaitan nilai/derajat kepentingan yang berbeda dengan setiap jenis jasa lingkungan hidup yang dinilai. Informasi jasa lingkungan hidup yang disajikan merupakan data sekunder hasil analisis dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Jawa. Terdapat 6 (enam) jenis jasa lingkungan hidup, yakni jasa lingkungan hidup penyedia air bersih, jasa lingkungan hidup penyedia pangan, jasa lingkungan hidup pengaturan air, jasa lingkungan hidup pengaturan kualitas udara, jasa lingkungan hidup pengaturan perlindungan banjir, dan jasa lingkungan hidup pengaturan iklim.

d. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga ketersediaannya menjadi penting. Ketersediaan recharge area di suatu daerah akan menjaga stabilitas pasokan air. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air merupakan gambaran kemampuan lingkungan dalam memberikan fungsi penyediaan air permukaan yang sepatutnya dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Indeks jasa lingkungan hidup penyedia air membahas hal-hal dalam kemampuan lingkungan untuk menyediakan air sebagaimana potensi manfaatnya agar dapat berperan dalam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup yang dapat dikategorikan di tiap daerah. Kondisi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air di Kota Tangerang Selatan yang akan dianalisis adalah kondisi kinerja pada Tahun 2018. Kondisi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh wilayah berkinerja rendah seluas 14.335,23 ha atau 89,69% dari total luasan Kota Tangerang Selatan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.22 dan Gambar 2.16. Data kondisi kinerja jasa lingkungan penyedia air per wilayah kecamatan di Kota Tangerang Selatan tersaji dalam Tabel 2.23 dan Gambar 2.17 dimana Kecamatan Serpong memiliki luasan tertinggi yang berkinerja rendah.

Tabel 2.22. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2018

Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Tahun 2018	**Luas (ha)**	**Persentase (%)**
Sangat Tinggi	336,19	2,04%
Tinggi	-	-
Sedang	1.814,09	11,00%
Rendah	14.335,23	86,96%
Sangat Rendah	-	-
Jumlah	16.485,52	100%

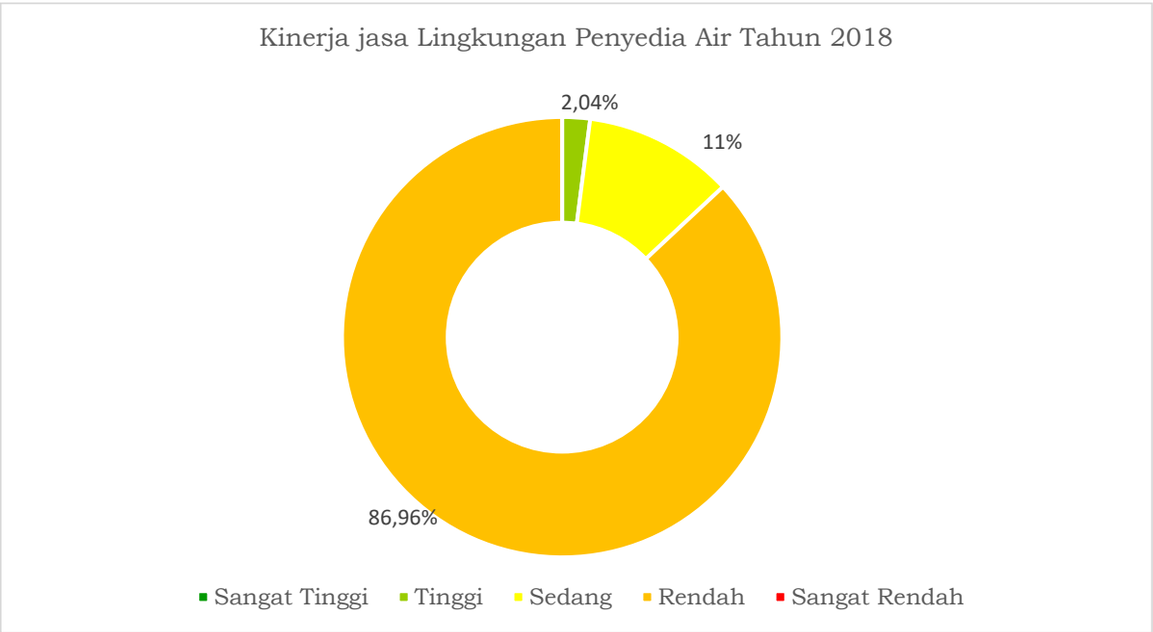
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Tabel 2.23. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	**Satuan**	**Klasifikasi**					**Total**
		Sangat Tinggi	**Tinggi**	**Sedang**	**Rendah**	**Sangat Rendah**	
Ciputat	ha	27	-	264,3	1.824,60	-	2.115,80
	%	0,2	-	1,5	11,1	-	12,8
Ciputat Timur	ha	48,1	-	235,7	1.500,30		1.784,00
	%	0,3	-	1,4	9,1	-	10,8
Pamulang	ha	71	-	334,5	2.462,80	-	2.868,40
	%	0,4	-	2	15		17,4
Pondok Aren	ha	30,9	-	424,7	2.522,10		2.977,60

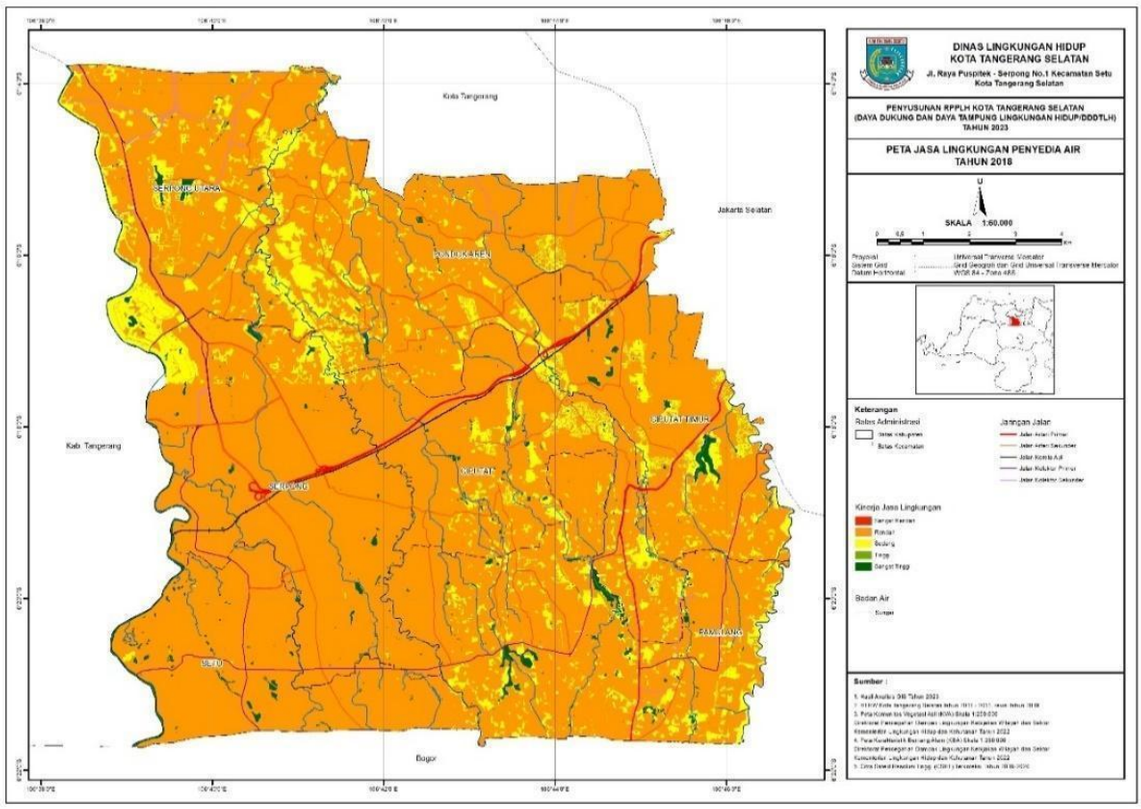
Kecamatan	Satuan	Klasifikasi					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
	%	0,2	-	2,6	15,3		18,1
Serpong	ha	57,6	-	122	2.664,30		2.843,80
	%	3	-	0,7	16,2		17,3
Serpong Utara	ha	53,8	-	424,2	1.739,60		2.217,60
	%	0,3	-	2,6	10,6		13,5
Setu	ha	47,9	-	8,8	1.621,70		1.678,30
	%	3	-	0,1	9,8		10,2
Jumlah Total	**ha**	**336,2**	**-**	**1.814,10**	**14.335,20**		**16.485,50**
	%	2	-	11	87		100

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Gambar 2.16. Proporsi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2018



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
Gambar 2.17. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2018

Kondisi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air yang rendah perlu menjadi perhatian karena konsekuensinya akan terjadi penurunan ketersediaan air permukaan, sehingga masyarakat beralih melakukan ekstraksi air tanah yang berlebihan. Jika air tanah dimanfaatkan secara terus-menerus tanpa melakukan recharge, kondisi tersebut dapat memicu terjadinya penurunan muka tanah/amblesan. Selain itu, air tanah diprioritaskan sebagai cadangan air yang diperuntukkan dalam kondisi kurang mendukung seperti kemarau panjang sehingga eksploitasi air tanah akan mengancam keberlanjutan cadangan air.

e. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Jasa lingkungan penyedia pangan merupakan jasa lingkungan yang menyediakan dukungan pangan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Penyediaan pangan tersebut dapat berupa langsung diperoleh dari alam dan dari hasil budidaya.

Kondisi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia pangan di Kota Tangerang Selatan yang akan dianalisis adalah kondisi kinerja pada Tahun 2018. Kondisi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia pangan di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh wilayah berkinerja rendah seluas 14.335,23 ha atau 89,69% dari total luasan Kota Tangerang Selatan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.24. Data kondisi kinerja jasa lingkungan penyedia air per wilayah kecamatan di Kota Tangerang Selatan tersaji dalam Tabel 2.25.

Tabel 2.24. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Tahun 2018

Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Tahun 2018	Luas (ha)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	293,90	1,78%
Tinggi	1844,39	11,19%
Sedang	11,99	0,07%
Rendah	14.335,23	86,96%
Sangat Rendah	-	-
Jumlah	16.485,52	100%

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Tabel 2.25. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Satuan	Klasifikasi					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Ciputat	Ha	26,9	262,5	1,8	1.824,60	-	2.115,80
	%	0,2	1,6	0	11,1		12,8
Ciputat Timur	Ha	30,2	248,8	4,8	1.500,30		1.784,00
	%	0,2	1,5	0	9,1	0	10,8
Pamulang	Ha	45,9	354,3	5,4	2.462,80		2.868,40
	%	0,3	2,1	0	14,9	0	17,4
Pondok Aren	Ha	30,9	424,7		2.522,10		2.977,60
	%	0,2	2,6	0	15,3	0	18,1
Serpong	Ha	57,9	121,7		2.664,30		2.843,80
	%	0,4	0,7	0	16,2	0	17,3
Serpong Utara	Ha	53,8	424,2		1.739,60		2.217,60
	%	0,3	2,6	0	10,6	0	13,5
Setu	Ha	48,3	8,3		1.621,70		1.678,30
	%	0,3	0,1	0	9,8	0	10,2
Jumlah Total	**Ha**	**293,9**	**1.844,40**	**12**	**14.335,20**		**16.485,50**
	%	1,8	11,2	0,1	87	0	100

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

f. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air

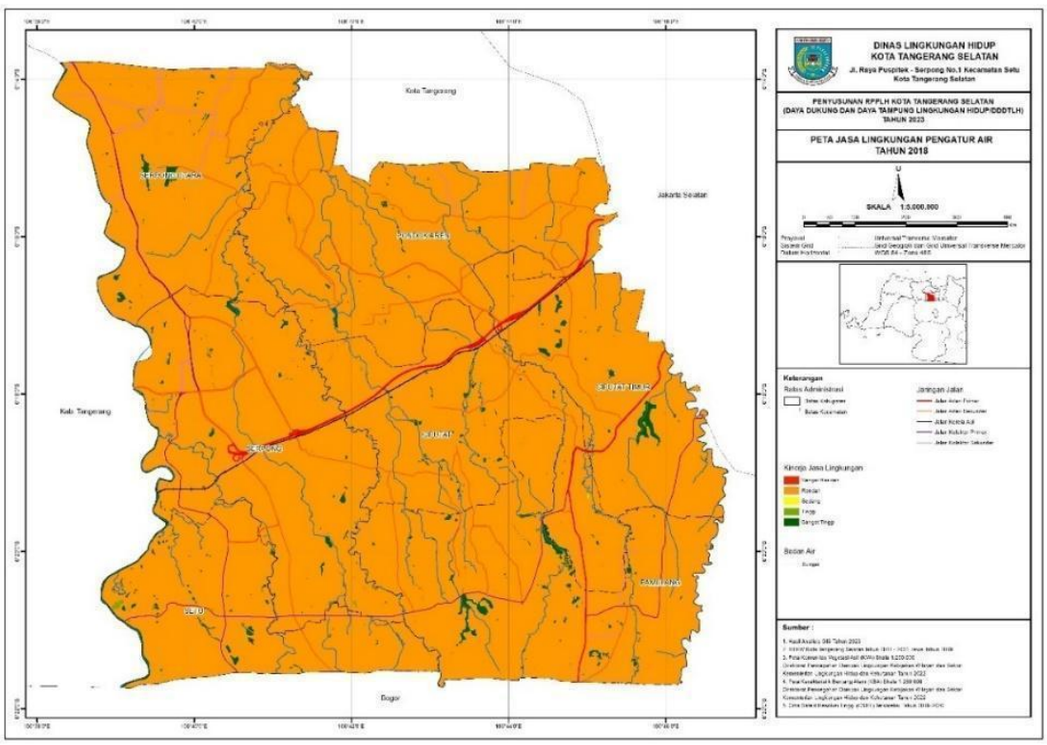
Kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air merepresentasikan peran bentang alam dan penutupan lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala. Infiltrasi berkaitan dengan fungsi peresapan, sementara pelepasan air berkaitan dengan fungsi tata alir air dan discharge. Kondisi kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air di Kota Tangerang Selatan yang dianalisa adalah kinerja tahun 2018, dimana sebagian besar wilayah di Kota Tangerang Selatan memiliki kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air yang rendah, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.26 dan Gambar 2.18 Kecamatan Pondok Aren merupakan kecamatan dengan luasan wilayah tertinggi kategori kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air rendah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.27.

Tabel 2.26. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air Tahun 2018

Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Air Tahun 2018	Luas (ha)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	336,19	2,04%
Tinggi	4,82	0,03%
Sedang	2,47	0,015%

Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Air Tahun 2018	Luas (ha)	Persentase (%)
Rendah	16.142,03	97,92%
Sangat Rendah	-	-
Jumlah	16.485,53	100%

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
Gambar 2.18. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air Tahun 2018

Tabel 2.27. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Satuan	Klasifikasi					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Ciputat	Ha	26,96		0,46	2.088,37	-	2.115,80
	%	0,16	0	0	12,67		12,83
Ciputat Timur	Ha	48,06		0,63	1.735,34		1.784,03
	%	0,29	0	0	10,53	0	10,82
Pamulang	Ha	71,04	0,06	1,38	2.795,88		2.868,36
	%	0,43	0	0,01	16,96	0	17,4
Pondok Aren	Ha	30,88			2.946,75		2.977,63
	%	0,19	0	0	17,87	0	18,06
Serpong	Ha	57,56	0,63		2.785,65		2.843,84
	%	0,35	0	0	16,9	0	17,25
Serpong Utara	Ha	53,81	0,23		2.163,50		2.217,55
	%	0,33	0	0	13,12	0	13,45
Setu	Ha	47,88	3,9		1.626,54		1.678,32
	%	0,29	0,02	0	9,87	0	10,18
Jumlah Total	Ha	336,2	4,82	2,47	16.142,03		16.485,52
	%	2,04	0,03	0,02	97,92	0	100

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

g. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara

Kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan kualitas udara merupakan representasi kapasitas ekosistem untuk menyerap aerosol dan bahan kimia dari atmosfer. Indikator kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan kualitas udara dilihat berdasarkan luas penggunaan lahan yang bervegetasi (ha). Perbedaan tipe vegetasi turut mempengaruhi fungsinya dalam melakukan serapan karbon untuk memperbaiki kualitas udara. Vegetasi mampu menangkap partikel dan menyerap gas penyebab polusi udara, seperti CO2, SO2, NO2, dan sebagainya, terutama bila luas permukaan daunnya lebih besar (pohon lebat dan banyak). Penyerapan CO2 oleh tumbuhan, tentunya juga mampu mengurangi efek perubahan iklim. Diperkirakan taman atau hutan kota mampu menyaring 85% partikel penyebab polusi. Sedangkan pohon besar di pinggir jalan bisa mengurangi 2/3 polusi yang ada (Duniadiny, 2015).

Kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan kualitas udara di Kota Tangerang Selatan yang dianalisis adalah kondisi kinerja tahun 2018, dimana sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan (16.126,40 ha atau 97,82% dari luas wilayah Kota) memiliki kondisi kinerja yang rendah. Kecamatan Pondok Aren merupakan kecamatan dengan luasan wilayah tertinggi yang kondisi kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan kualitas udaranya rendah. Profil kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan kualitas udara tahun 2018 di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 2.28, Tabel 2.29 dan Gambar 2.19.

Tabel 2.28. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara Tahun 2018

Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara Tahun 2018	Luas (ha)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	336,19	2,04%
Tinggi	-	-
Sedang	22,92	0,14%
Rendah	16.126,40	97,82%
Sangat Rendah	-	-
Jumlah	16.485,52	100%

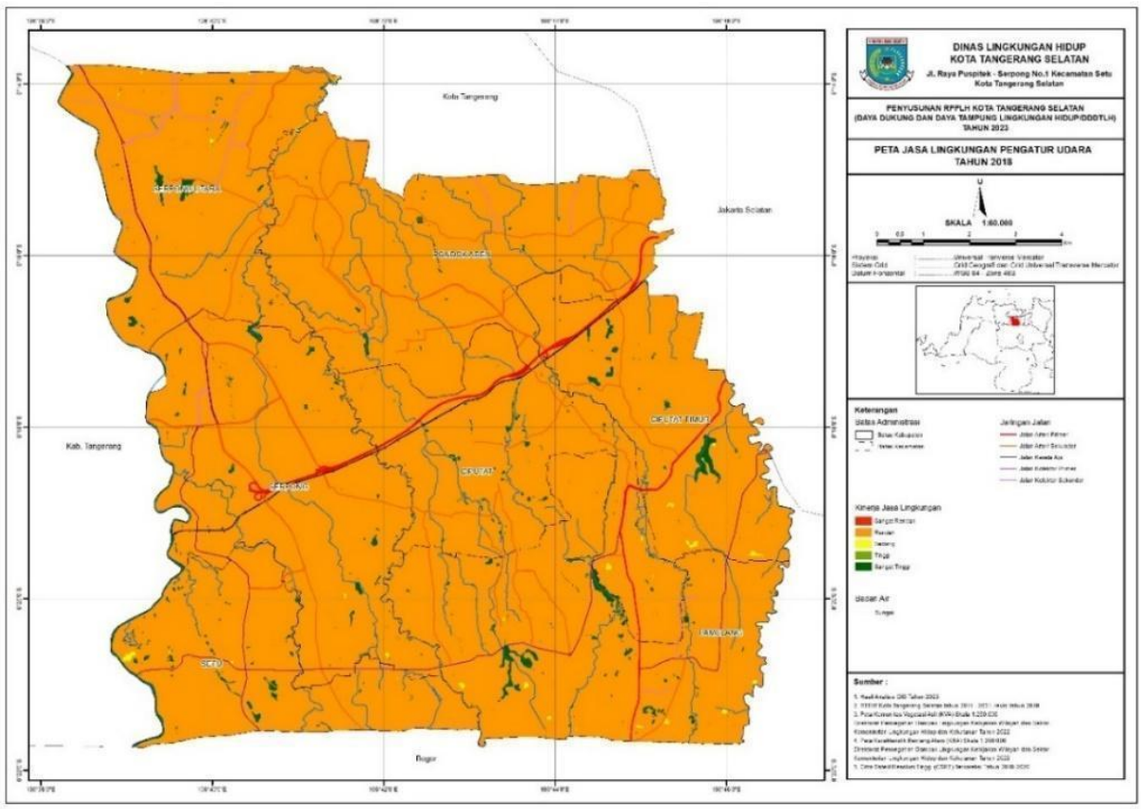
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Tabel 2.29. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Satuan	Klasifikasi					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Ciputat	ha	26,96		1,84	2.086,99	-	2.115,80
	%	0,16	0	0,01	12,66		12,83
Ciputat Timur	ha	48,06		4,78	1.731,18		1.784,02
	%	0,29	0	0,03	10,5	0	10,82
Pamulang	ha	71,04		6,65	2.790,67		2.868,36
	%	0,43	0	0,04	16,93	0	17,4
Pondok Aren	ha	30,88		0,36	2.946,39		2.977,63
	%	0,19	0	0	17,87	0	18,06
Serpong	ha	57,56		0,98	2.785,30		2.843,84
	%	0,35	0	0,01	16,9	0	17,25
Serpong Utara	ha	53,81		3,98	2.159,76		2.217,55

Kecamatan	Satuan	Klasifikasi					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
	%	0,33	0	0,02	13,1	0	13,45
Setu	ha	47,88		4,33	1.626,11		1.678,32
	%	0,29	0	0,03	9,86	0	10,18
Jumlah Total	ha	336,2		22,92	16.126,40		16.485,52
	%	2,04	0	0,14	97,82	0	100

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
Gambar 2.19. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara Tahun 2018

h. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Perlindungan Banjir

Perubahan terhadap bentang alam dari sisi geologi dan minimnya vegetasi, menyebabkan rendahnya tingkat kinerja jasa lingkungan hidup yang berfungsi sebagai pengatur mitigasi bencana banjir di Kota Tangerang Selatan. Hal ini dikarenakan bentang alam dan vegetasi alami telah berubah menjadi lahan hunian dan usaha, namun tidak diikuti dengan pembangunan fasilitas yang dapat menggantikan fungsi mitigasi banjir.

Kinerja jasa lingkungan pengaturan perlindungan banjir di Kota Tangerang Selatan yang dianalisa adalah kinerja tahun 2018 dimana sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan di dominasi kinerja jasa lingkungan rendah, yaitu sebesar 86,97% dari luas kota atau seluas 14.337,24 ha. Kecamatan Serpong merupakan kecamatan dengan luas wilayah tertinggi yang memiliki kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan perlindungan banjir yang rendah. Profil kinerja jasa lingkungan hidup

pengaturan perlindungan banjir tahun 2018 di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 2.30, Tabel 2.31 dan Gambar 2.20.

Tabel 2.30. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Perlindungan Banjir Tahun 2018

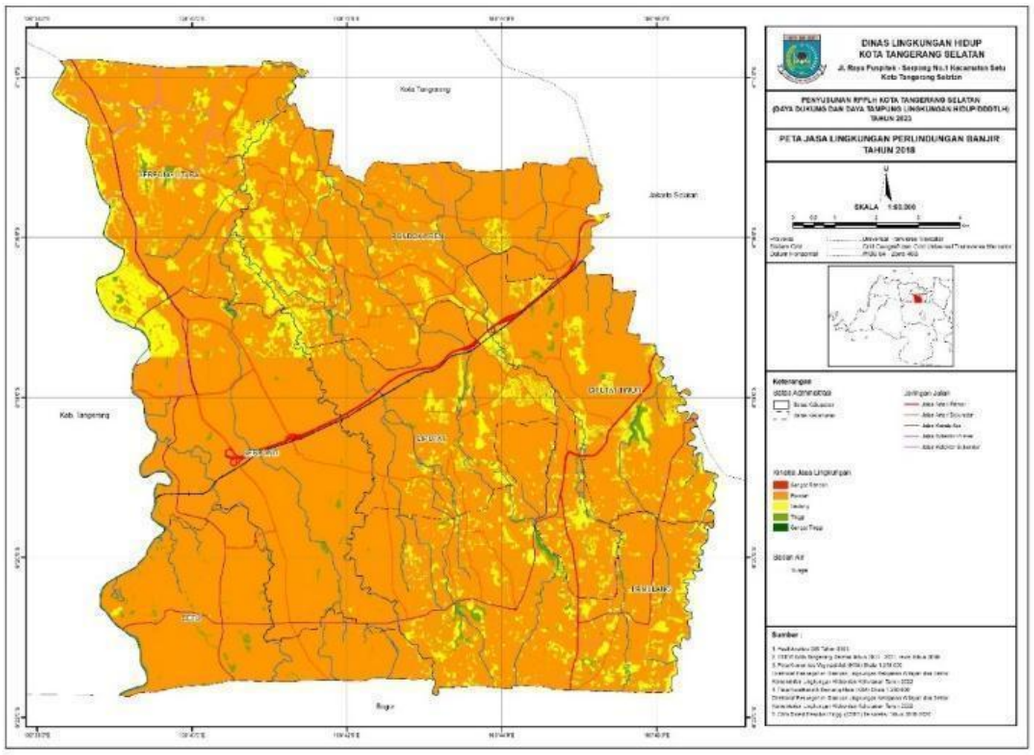
Kinerja Jasa Lingkungan Perlindungan Banjir Tahun 2018	**Luas (ha)**	**Persentase (%)**
Sangat Tinggi	-	-
Tinggi	336,62	2,04%
Sedang	1.811,66	10,99%
Rendah	14.337,24	86,97%
Sangat Rendah	-	-
Jumlah	16.485,52	100%

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Tabel 2.31. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Perlindungan Banjir Tahun 2018 berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Satuan	Klasifikasi					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Ciputat	ha		27,39	263,84	1.824,57	-	2.115,80
	%	0	0,17	1,6	11,07		12,83
Ciputat Timur	ha		48,06	235,67	1.500,29		1.784,02
	%		0,29	1,43	9,1		10,82
Pamulang	ha		71,04	333,32	2.464,00		2.868,36
	%		0,43	2,02	14,95	0	17,4
Pondok Aren	ha		30,88	424,68	2.522,07		2.977,63
	%		0,19	2,58	15,3	0	18,06
Serpong	ha		57,56	121,65	2.664,63		2.843,84
	%	0	0,35	0,74	16,16	0	17,25
Serpong Utara	ha		53,81	424,17	1.739,57		2.217,55
	%	0	0,33	2,57	10,55	0	13,45
Setu	ha		47,88	8,33	1.622,11		1.678,32
	%	0	0,29	0,05	9,84	0	10,18
Jumlah Total	**ha**	**0**	**336,62**	**1.811,66**	**14.337,24**	**0**	**16.485,52**
	%	0	2,04	10,99	86,97	0	100

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Gambar 2.20. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Perlindungan Banjir Tahun 2018

i. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim

Kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan iklim merupakan kinerja lingkungan yang berkontribusi pada iklim lokal maupun global. Kinerja jasa lingkungan ini dipengaruhi oleh tutupan lahan yang bervegetasi diantaranya yaitu hutan, perkebunan, ruang terbuka hijau dan lain sebagainya. Semakin besar luas tutupan lahan yang bervegetasi dan semakin rapatnya vegetasi maka kinerja jasa lingkungan pengaturan iklim semakin baik. Hal ini terjadi semakin luas dan semakin rapatnya vegetasi maka luas bidang dedaunan yang melakukan evapotranspirasi semakin besar yang mana akan menghasilkan oksigen dan uap air. Uap air dan oksigen yang dihasilkan inilah yang menyebabkan lingkungan sekitar menjadi lebih sejuk dan lebih baik kualitasnya.

Kondisi kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan iklim di Kota Tangerang Selatan yang dianalisis adalah kondisi kinerja tahun 2018, dimana sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan seluas 14.333,41 ha atau sebesar 86,95% dari luas kota memiliki kinerja sangat rendah. Kecamatan Serpong merupakan kecamatan dengan luas wilayah tertinggi yang memiliki kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan iklim sangat rendah. Profil kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan iklim tahun 2018 di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 2.32, Tabel 2.33 dan Gambar 2.21.

Tabel 2.32. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Tahun 2018

Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Tahun 2018	Luas (ha)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	44,30	0,27%
Tinggi	294,36	1,79%
Sedang	1.809,62	10,98%

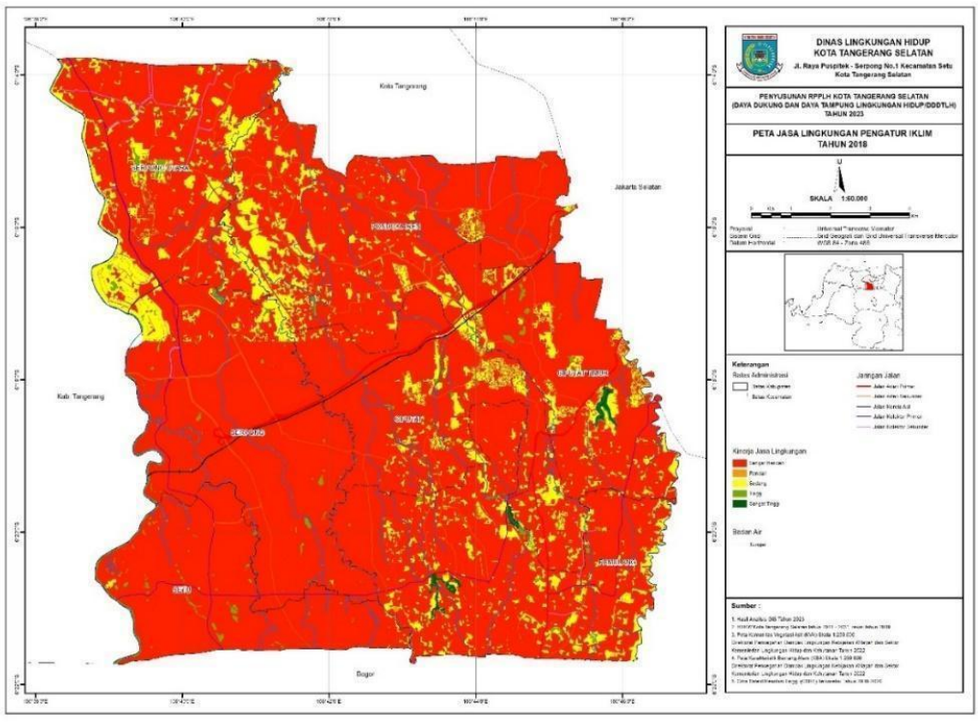
Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Tahun 2018	Luas (ha)	Persentase (%)
Rendah	3,83	0,02%
Sangat Rendah	14.333,41	86,95%
Jumlah	16.485,52	100%

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Tabel 2.33. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Satuan	Klasifikasi					Total (ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Ciputat	ha	0,03	27,4	263,8		1.824,57	2.115,80
	%	0	0,17	1,6	0	11,07	12,83
Ciputat Timur	ha	17,89	30,79	235,04	0,11	1.500,19	1.784,02
	%	0,11	0,19	1,43	0	9,1	10,82
Pamulang	ha	26,37	46,04	331,94	2,94	2.461,06	2.868,35
	%		0,28	2,01	0,02	14,93	17,24
Pondok Aren	ha		30,88	424,68		2.522,07	2.977,63
	%		0,19	2,58	0	15,3	18,06
Serpong	ha		57,56	121,65	0,35	2.664,28	2.843,84
	%	0	0,35	0,74	0	16,16	17,25
Serpong Utara	ha		53,81	424,17	0	1.739,57	2.217,55
	%	0	0,33	2,57	0	10,55	13,45
Setu	ha		47,88	8,33	0,43	1.621,67	1.678,31
	%	0	0,29	0,05	0	9,84	10,18
Jumlah Total	**ha**	**44,29**	**294,36**	**1.809,61**	**3,83**	**14.333,41**	**16.485,50**
	%	0,27	1,79	10,98	0,02	86,95	100

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Gambar 2.21. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Tahun 2018

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita adalah perbandingan antara jumlah penjualan tenaga listrik dibagi dengan jumlah penduduk di suatu wilayah (mengacu pada Statistik Ketenagalistrikan Kementerian ESDM). Akses terhadap listrik sangat penting untuk berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Konsumsi listrik per kapita yang tinggi dapat mengindikasikan akses yang lebih baik terhadap layanan listrik. Indikator konsumsi listrik per kapita dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, bahkan seringkali mengindikasikan tingkat industrialisasi dan urbanisasi yang tinggi di suatu wilayah. Berdasarkan Tabel 2.34, konsumsi listrik per kapita Kota Tangerang Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan membutuhkan pasokan listrik yang besar untuk mendukung kegiatan produksi, transportasi, dan layanan publik karena akses masyarakat terhadap listrik sangat tinggi. Wilayah dengan konsumsi listrik per kapita tinggi biasanya memiliki ekonomi yang berkembang pesat, yang mendorong penggunaan energi yang lebih banyak, baik untuk industri, rumah tangga, maupun sektor lainnya.

Tabel 2.34. Konsumsi Listrik per Kapita Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan	1.354.350	1.365.688	1.378.466	1.404.785	1.429.530
Penjualan Tenaga Listrik (Listrik Terjual)	3.528.809.547	3.532.482.350	NA	4.036.739.986	4.444.366.496
Konsumsi Listrik Per Kapita Kota Tangerang Selatan	2.605,54	2.586,60	NA	2.873,56	3.108,97

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024 (diolah)

b. Ketersediaan Air Baku

Ketersediaan air baku di Kota Tangerang Selatan untuk kebutuhan air minum masyarakat dipenuhi oleh Sungai Cisadane dan Kali Angke. Sungai Cisadane merupakan DAS terbesar yang melewati Kota Tangerang Selatan dan menjadi sumber utama air baku. Sungai ini memiliki panjang sekitar 73 km dengan lebar rata-rata 103,3 meter. Debit maksimumnya mencapai 950.000 liter per detik, sedangkan debit minimumnya sekitar 67.000 liter per detik. Sungai Cisadane merupakan salah satu sungai penting di Provinsi Banten dan Jawa Barat, dengan sumber air yang berasal dari Gunung Salak-Pangrango di Kabupaten Bogor. Aliran sungai ini sangat bergantung pada curah hujan, sehingga debit air meningkat pada musim hujan dan berkurang pada musim kemarau. Air dari Sungai Cisadane diambil melalui beberapa titik Intake yang tersebar di berbagai lokasi. WTP Tirta Traya memiliki kapasitas pengambilan terbesar dari sungai ini, yaitu sebesar 3.500 L/det, yang menjadi sumber utama penyediaan air bagi wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya. Selain itu, WTP Sempora juga menggunakan Sungai Cisadane dengan kapasitas pengambilan sebesar 400 L/det, mendukung

kawasan BSD yang berkembang. WTP Alam Sutera yang juga memanfaatkan Sungai Cisadane mengambil air dengan kapasitas sebesar 95 L/det, melayani kebutuhan air di kawasan perumahan dan komersial Alam Sutera

Selain Sungai Cisadane, Kali Angke juga menjadi sumber air permukaan yang penting. Meskipun sungai ini tidak pernah kering selama musim kemarau karena berhulu di wilayah pegunungan di Bogor, sungai ini mengalami pencemaran yang cukup tinggi, terutama dari limbah domestik di sekitar aliran sungai. Selain itu, terdapat defisit air pada bulan-bulan kering seperti Agustus hingga Oktober. Air dari Kali Angke dimanfaatkan oleh PT. Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) dan PT. Jaya Real Property.

Data ketersediaan air baku yang bersumber dari Sungai Cisadane dan Kali Angke berdasarkan neraca air tahun 2021-2023 disajikan dalam Tabel 2.35, dimana terlihat bahwa ketersediaan air pada kedua sungai tersebut cenderung menurun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa diperlukan diversifikasi sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air minum jaringan perpipaan.

Tabel 2.35. Debit dan Ketersediaan Air Baku di Kota Tangerang Selatan

Uraian	**Ketersediaan Air (m^3/detik)**		
	Tahun 2021	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**
DAS Cisadane	37,95	39,58	29,87
DAS Angke	14,13	21,25	3,45

Sumber: RISPAM Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Potensi air permukaan di wilayah Tangerang Selatan merupakan salah satu solusi penting dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih yang semakin meningkat. Salah satu sumber air permukaan yang cukup berpotensi adalah Kali Salak, yang terletak di Kecamatan Setu dan melewati beberapa kelurahan seperti Keranggan dan Muncul. Sungai ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber air baku melalui sistem pengelolaan air permukaan, yang dapat digunakan untuk keperluan domestik di wilayah sekitarnya. Debit air dari Kali Salak bervariasi dengan estimasi debit minimal antara 68 liter per detik hingga 76 liter per detik. Dari debit tersebut, sekitar 13,6 hingga 15,2 liter per detik dapat diambil dan diolah menjadi air bersih.

Berdasarkan rencana pembangunan yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Waduk Karian dirancang untuk mengembangkan sumber daya air di Sungai Ciujung dan Cidurian. Waduk ini diharapkan mampu menyediakan pasokan air baku yang berkelanjutan bagi kebutuhan perkotaan dan industri di Serang, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Jakarta. Dengan kapasitas sebesar 4,6 m^3/detik, Wilayah Kota Tangerang Selatan dialokasikan 14% (empat belas persen) dari kapasitas waduk yaitu sekitar 0,65 m^3/detik.

Sungai Pesanggrahan merupakan salah satu sumber air permukaan yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai air baku di kota Tangerang Selatan. Pengolahan air dari Sungai Pesanggrahan dapat dilakukan melalui instalasi pengolahan air (IPA) yang dirancang untuk menyaring dan membersihkan air sungai sebelum didistribusikan kepada warga.

c. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu wilayah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan, IKP digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu daerah secara makro, membandingkan pencapaian antar daerah atau dari waktu ke waktu, dan menjadi dasar kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan. IKP dihitung berdasarkan pengukuran komposit dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Indeks ketahanan pangan di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 2.36, dimana ketahanan pangan di Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan.

Tabel 2.36. Indeks Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Indeks Ketahanan Pangan	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Tangerang Selatan	83,14	83,74	78,74	87,43	88,67

Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2025

d. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU atau Prevalence of Undernourishment) merupakan indikator penting untuk mengukur jumlah penduduk yang tidak mendapatkan asupan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi harian mereka agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan difokuskan pada daya beli (harga pangan vs pendapatan), akses mikro (jarak ke sumber pangan, keterjangkauan) dan kualitas gizi (konsumsi protein, sayur, buah). Data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 beserta pertumbuhannya disajikan dalam Tabel 2.37.

Tabel 2.37. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	1,51	1,89	1,50	1,92	3,13	24,07%

Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2025

Peningkatan angka PoU menggambarkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang tidak mendapatkan asupan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi harian mereka agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Peningkatan prevalensi ketidakcukupan pangan di Kota Tangerang Selatan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

a. Inflasi harga pangan
   Berdasarkan data BPS Tahun 2024, inflasi pangan di Kota Tangerang Selatan mencapai ±8,5% (delapan koma lima persen), lebih tinggi dari rata-

rata nasional (6,2%). Kenaikan harga bahan pokok (beras, telur, daging) dipicu akibat gangguan rantai pasok global seperti konflik Ukraina dan perubahan iklim;

b. Penurunan daya beli
Dengan kenaikan harga pangan sementara pendapatan yang stagnan, menyebabkan daya beli masyarakat menurun;

c. Ketergantungan impor/ pasokan dari daerah lain
Pasokan beras dan pangan lainnya di Kota Tangerang Selatan bergantung pada daerah lain dan impor sehingga rentan terhadap fluktuasi harga;

d. Urbanisasi dan kepadatan penduduk
Pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan meningkatkan tekanan pada stok pangan;

e. Kesenjangan sosial
Pada tahun 2024, rasio gini di Kota Tangerang Selatan mengalami kenaikan, yang menggambarkan tingkat kesenjangan/ketimpangan sosial meningkat. Berdasarkan data Kemensos RI Tahun 2024 menyatakan bahwa 20% (dua puluh persen) rumah tangga rentan miskin dan miskin kesulitan mengakses pangan bergizi;

f. Cadangan pangan daerah dan diversifikasi pangan belum optimal
Belum adanya insentif untuk pelaku urban farming;

g. Distribusi pangan tidak merata, dimana pangan bergizi lebih banyak terkonsentrasi di pusat perbelanjaan modern;

h. Kualitas Konsumsi yang Buruk, dimana masyarakat beralih ke pangan murah rendah gizi seperti mie instan saat harga pangan naik

Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kota Tangerang Selatan yang diiringi kenaikan PoU merupakan fenomena yang tampak paradoks. Hal tersebut menggambarkan bahwa IKP bisa meningkat karena pasokan cukup, tetapi jika harga mahal atau distribusi timpang, rumah tangga rentan miskin dan miskin tetap tidak mampu membeli.

Langkah antisipasi atas peningkatan PoU di Kota Tangerang Selatan adalah dengan menerapkan beberapa strategi terkait dengan penguatan rantai pasok dan akses distribusi pangan, seperti:

a) Membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, fasilitas penyimpanan (gudang, lumbung pangan), serta infrastruktur logistik lainnya untuk memperlancar distribusi pangan dari sentra produksi ke konsumen.
b) Membangun dan mengoptimalkan jaringan distribusi pangan yang efisien dari produsen ke konsumen, termasuk melalui pasar tradisional, koperasi, atau *e-commerce* lokal.
c) Menjalin kerja sama atau kemitraan yang kuat dengan daerah-daerah produsen pangan di sekitarnya (misalnya, Kabupaten Tangerang, Bogor, Lebak) untuk memastikan pasokan pangan yang stabil dan harga yang terjangkau.
d) Menyediakan bantuan pangan atau bantuan tunai bersyarat bagi kelompok masyarakat rentan dan miskin, terutama saat terjadi gejolak harga atau krisis ekonomi.
e) Mengoptimalkan pengawasan harga dan stok pangan untuk mencegah penimbunan dan spekulasi yang dapat memicu kenaikan harga.

f) Mendorong pengembangan pasar lokal seperti pasar tradisional dan modern yang mudah diakses oleh masyarakat, serta membangun jaringan distribusi yang efisien antara petani dan konsumen.
g) Mendukung dan memberikan fasilitas UMKM di sektor pangan lokal untuk berkembang, sehingga menciptakan lapangan kerja dan menyediakan produk pangan yang terjangkau.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup berkualitas adalah kondisi di mana sumber daya alam, ekosistem, dan lingkungan fisik mendukung kehidupan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Parameter untuk mengukur kualitas lingkungan hidup menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Kualitas lingkungan hidup diukur berdasarkan aspek fisik dan kimia (kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan), aspek biologis (keanekaragaman hayati dan kondisi ekosistem), dan aspek sosial (akses lingkungan sehat dan pengelolaan limbah). Komponen IKLH terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Kualitas lingkungan hidup di Kota Tangerang Selatan saat ini menghadapi sejumlah tantangan. Pertumbuhan perkotaan yang cepat telah menyebabkan peningkatan jumlah penduduk, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas industri, yang semuanya memberikan tekanan tambahan pada lingkungan.

IKLH Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.38. dimana terlihat bahwa terdapat peningkatan kualitas lingkungan. Komponen IKLH yang mengalami perbaikan yaitu IKU. IKTL mengalami sedikit peningkatan seiring dengan adanya kebijakan untuk menambah taman-taman pada beberapa lokasi di Kota Tangerang Selatan. Sementara itu pada nilai IKA cenderung memiliki tren penurunan. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh pengelolaan sampah yang memiliki keterkaitan dengan nilai IKLH melalui IKA. Sampah yang tidak dikelola dengan baik, terutama sampah organik dan anorganik berbahaya, seringkali mencemari sumber air seperti sungai, danau, dan air tanah. Sampah yang membusuk menghasilkan lindi (leachate) yang mengandung bahan pencemar. Hal ini dapat meningkatkan tingkat BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), dan kandungan logam berat dalam air, menurunkan nilai IKA. Pengelolaan sampah yang komprehensif, termasuk pemilahan, daur ulang, pengomposan, dan pembuangan akhir yang sesuai standar (misalnya, di TPA sanitary landfill), akan mencegah pencemaran air. Ini akan membantu menjaga dan meningkatkan kualitas air, sehingga berkontribusi pada nilai IKLH yang lebih tinggi.

Tabel 2.38. Indikator Pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	68,67	67,78	66,00	66,70	64,00
Indeks Kualitas Udara	56,13	57,87	65,56	71,08	71,59
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	31,87	45,19	36,62	36,34	36,38
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,53	58,78	56,66	57,93	61,03

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan (2025)

b. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Akses rumah tangga terhadap air minum layak mengacu pada kemampuan suatu rumah tangga untuk mendapatkan air yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan untuk kebutuhan minum, masak, dan sanitasi sehari-hari. Data rumah tangga di Kota Tangerang Selatan yang memiliki akses terhadap air minum layak disajikan dalam Tabel 2.39, dimana pada tahun 2024, jumlah Rumah Tangga di Kota Tangerang Selatan merupakan yang tertinggi ketiga setelah Kota Cilegon dan Kota Serang dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten, yakni sebesar 98,37%. Secara umum sejak tahun 2020, persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Kota Tangerang Selatan konsisten berada pada 97-99%.

Tabel 2.39. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Pandeglang	75,83	82,01	77,27	78,11	78,51
2	Kab. Lebak	73,49	73,32	73,27	75,64	77,92
3	Kab. Tangerang	98,48	97,97	98,55	97,02	97,79
4	Kab. Serang	89,95	92,33	91,91	94,62	94,75
5	Kota Tangerang	98,37	98,00	95,58	97,12	98,04
6	Kota Cilegon	94,98	98,72	99,08	99,18	99,61
7	Kota Serang	99,10	98,38	97,61	96,72	99,27
8	**Kota Tangerang Selatan**	**99,08**	**99,22**	**98,64**	**97,91**	**98,37**
Provinsi Banten		92,87	93,51	92,71	92,95	94,01

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

Hal yang sangat penting dalam hal terpenuhinya akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum layak adalah ketersediaan air bersih yang aman. Sebagaimana telah digambarkan dalam sub bab 2.1.3.3 bahwa kondisi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air di Kota Tangerang Selatan berkategori rendah. Untuk itu, mutlak diperlukan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kota Tangerang Selatan, terutama SPAM jaringan perpipaan yang dapat menjamin ketersediaan air bersih aman untuk air minum layak yang berkelanjutan kepada masyarakat. Tingkat pelayanan SPAM Kota Tangerang Selatan sampai dengan tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.40, dimana terdapat beberapa klasifikasi tingkat pelayanan. Klasifikasi pertama adalah akses aman yaitu akses air bersih dari PDAM. Klasifikasi kedua adalah akses layak dasar yaitu akses air bersih dari mini SPAM yang terdiri atas Jaringan Perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP). Jaringan perpipaan merupakan sistem distribusi air bersih dengan Sambungan Rumah (SR), sedangkan Bukan Jaringan Perpipaan merupakan distribusi dengan Kran Umum serta Hidran Umum. Kemudian, klasifikasi ketiga adalah akses layak terbatas yang berupa SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) individu, yaitu Sumur dan Penampung Air Hujan (PAH).

Berdasarkan Tabel 2.39 terlihat bahwa persentase penduduk dengan akses air bersih aman di Kota Tangerang Selatan masih rendah, yaitu sebesar ±21% (dua puluh satu persen). Wilayah dengan persentase penduduk yang memiliki akses air bersih aman terbanyak adalah Kecamatan Serpong, yaitu sebanyak 65% (enam puluh lima persen). Sementara itu, Kecamatan Ciputat Timur merupakan wilayah dengan persentase penduduk berakses air minum aman paling sedikit, yaitu sebanyak 0% (nol persen). Sebagian besar

penduduk di Kecamatan Ciputat mengakses air bersih layak terbatas, yaitu sebanyak 99,6% (sembilan puluh sembilan koma enam persen).

Tabel 2.40. Tingkat Pelayanan SPAM Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Akses Aman (%)	Akses Layak Dasar		Akses Layak Terbatas (%)	Akses Tidak Layak (%)	Tidak Ada Akses (%)
				Jaringan Perpipaan (%)	Bukan Jaringan Perpipaan (%)			
1.	Serpong	163.451	65,00	0,20	0,00.	34,80	0,00.	0,00.
2.	Serpong Utara	138.209	42,30	0,40	0,00.	57,30	0,00.	0,00.
3.	Pondok Aren	295.812	27,40	1,30	0,00.	71,30	0,00.	0,00.
4.	Ciputat	222.186	5,00	0,00	0,00.	95,00	0,00.	0,00.
5.	Ciputat Timur	169.555	0,00.	0,40	0,00.	99,60	0,00.	0,00.
6.	Pamulang	324.059	4,30	0,30	0,00.	95,30	0,00.	0,00.
7.	Setu	91.513	5,50	3,00	0,00.	91,50	0,00.	0,00.
Total		1.404.785	21,00	0,80	0,00	77,80	0,00	0,00

Sumber: Reviu RISPAM Kota Tangerang Selatan, Tahun 2025-2030

c. Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Aman

Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi dasar yang memisahkan manusia dari kotorannya, tetapi belum sepenuhnya menjamin pengolahan limbah yang aman. Sementara itu, sanitasi aman adalah kondisi di mana rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi yang digunakan hanya oleh mereka sendiri, menggunakan kloset leher angsa, dan memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik yang disedot secara berkala atau melalui jaringan perpipaan terpusat. Sanitasi aman juga mengacu pada pengolahan air limbah domestik yang baik, sehingga tidak mencemari lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Saat ini, status akses sanitasi di Kota Tangerang Selatan masih berkategori layak, belum berkategori aman, sebagaimana disajikan dalam Tabel2.41. Hal ini disebabkan karena Kota Tangerang Selatan belum memiliki IPLT tingkat Kota.

Tabel 2.41. Capaian Penyelenggaraan Sanitasi Kota Tangerang Selatan

Komponen	Target RPJMN Tahun 2020-2024	Target Prov Banten Tahun 2024	Target Kota Tangsel Tahun 2024	Target Kota Tangsel Jangka Pendek	Capaian Tahun 2021	Gap terhadap Target Kota Tahun 2024	Gap terhadap target kota jangka pendek
Akses Aman	15%	15%	12%	7%	0,20%	11,8%	6,80%
Akses Layak	90%	90%	80%	87%	98,84%	-	-

Sumber: Reviu RISPAL Kota Tangerang Selatan, Tahun 2025-2045

Data rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.42 dimana terlihat bahwa jumlahnya di Kota Tangerang Selatan paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten.

Tabel 2.42. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Pandeglang	50,15	49,11	62,14	62,08	63,66
2	Kab. Lebak	63,35	56,82	67,40	68,83	70,23
3	Kab. Tangerang	82,23	85,89	86,63	87,75	89,38
4	Kab. Serang	77,57	80,34	82,38	84,07	85,31
5	Kota Tangerang	95,10	94,94	94,43	94,95	96,93
6	Kota Cilegon	94,38	97,07	87,72	96,23	97,10
7	Kota Serang	87,34	90,76	91,55	92,36	92,71
8	**Kota Tangerang Selatan**	**97,45**	**98,84**	**97,56**	**99,29**	**99,34**
Provinsi Banten		71,10	82,00	82,89	86,41	87,93

Sumber: BPS Provinsi Banten (2025)

d. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu kota penyangga Jakarta yang terus berkembang pesat menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), produksi sampah harian di Kota Tangerang Selatan sebesar 1.022,65 ton. Selama satu tahun timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 373.267,45 ton/tahun, dengan komposisi sampah didominasi oleh sisa makanan (food waste). Penghasil sampah terbesar di Kota Tangerang Selatan berasal dari rumah tangga, yaitu sebesar 77,41%. Pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.43, dimana terlihat timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah meningkat hingga tahun 2022. Pada tahun 2023-2024, timbulan sampah yang diolah di fasilitas pengolahan sampah mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena TPA Cipeucang mengalami over capacity.

Tabel 2.43. Perkembangan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Timbulan Sampah Tahunan (ton/thn) (A)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/thn) (B)	% Pengurangan Sampah (B/A)	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun) (C)	% Penanganan Sampah (C/A)	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun) (B+C)	% Sampah Terkelola (B+C)/A
2020	390.753,87	45.280,98	11,59	224.600,93	57,48	269.881,91	69,07
2021	291.659,27	71.294,40	24,44	184.036,20	63,10	255.330,59	87,54
2022	355.009,43	81.786,00	23,04	271.510,54	76,48	353.296,55	99,52
2023	369.177,50	101.557,27	27,51	265.235,57	71,84	366.792,84	99,35
2024	373.267,45	96.016,05	25.72	265.428,00	71.11	361.444,05	96.83

Sumber: SIPSN, Tahun 2024

Dengan kondisi TPA Cipeucang yang over capacity, menyebabkan penurunan kinerja pengolahan sampah di Kota Tangerang Selatan, maka upaya daur ulang sampah menjadi upaya penting untuk mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA Cipeucang. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, kemampuan daur ulang sampah di Kota Tangerang Selatan masih belum optimal dengan rata-rata kemampuan daur ulang sebesar 22,3%. Rasio daur ulang sampah di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 2.44.

Tabel 2.44. Perkembangan Rasio Daur Ulang Sampah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) (A)	Daur ulang Sampah Tahunan (ton/tahun) (B)	Bahan baku Sampah Tahunan (ton/tahun) (C)	*Recycling Rate* (B+C)/A
2020	390.753,87	45.048,84	14.335,38	15,20
2021	291.659,27	51.040,73	1.893,90	18,15
2022	355.009,43	81.786,00	267,00	23,11
2023	369.177,50	101.557,27	1.559,57	27,93
2024	373.267,45	95.991,19	5.183,00	27.11

Sumber: SIPSN, Tahun 2024

e. Rumah Tidak Layak Huni dan Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan berbagai definisi dan standar, rumah tidak layak huni dapat diartikan sebagai kondisi tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat-syarat minimum kesehatan, keamanan, dan keselamatan bagi penghuninya, sehingga rumah tidak layak huni yang terdapat di suatu wilayah harus segera ditangani. Penanganan rumah tidak layak huni merupakan bagian dari upaya pemerintah dan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Penanganan ini mencakup perbaikan fisik rumah, penyediaan infrastruktur dasar, hingga pemberdayaan sosial-ekonomi. Pada tahun 2023, Kota Tangerang Selatan memiliki total 377.497 rumah layak huni dan 1.337 rumah tidak layak huni, dengan persentase rumah tidak layak huni sebesar 0,35% dari total keseluruhan. Jika ditinjau secara jumlah, Kecamatan Pondok Aren memiliki jumlah rumah tidak layak huni terbanyak, yaitu 292 rumah. Jika ditinjau berdasarkan persentase, Kecamatan Serpong memiliki jumlah rumah tidak layak huni terbanyak di Kota Tangerang Selatan yaitu 0,51% dari total rumah di kecamatan tersebut. Secara detail jumlah rumah tidak layak huni di Kota Tangerang Selatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.45.

Tabel 2.45. Jumlah Rumah Menurut Kondisi dan Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Kecamatan	Rumah Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni (%)
Serpong	47.669	243	0,51%
Serpong Utara	44.739	146	0,33%
Pondok Aren	85.026	292	0,34%
Ciputat	48.672	162	0,33%
Ciputat Timur	39.857	153	0,38%
Pamulang	83.576	221	0,26%
Setu	27.958	120	0,43%
Total	377.497	1.337	0,35%

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2024

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Tangerang Selatan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, diantaranya berkaitan dengan kesesuaian peruntukan lokasi dengan tata ruang, status kepemilikan tanah, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 600.2.1/Kep.237-Huk/2024 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menyatakan

bahwa, Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Tangerang Selatan terletak pada 32 (tiga puluh dua) lokasi di 7 (tujuh) Kecamatan dengan luas total sebesar 56,63 Ha (lima puluh enam koma enam tiga hektar). Secara detail, Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditampilkan secara tabular pada Tabel 2.46 dan secara spasial pada Gambar 2.22.

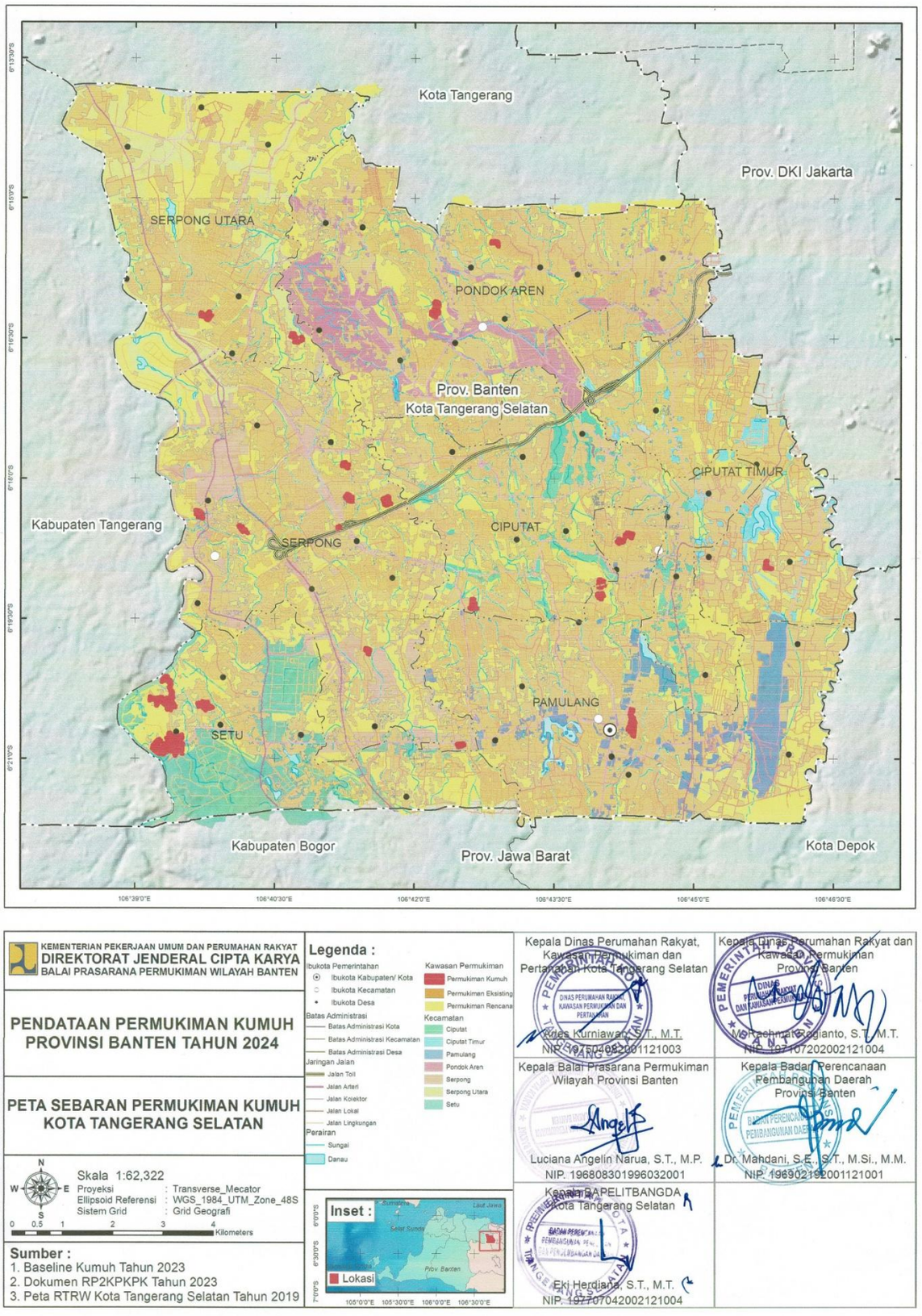
Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Provinsi Banten dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Banten Nomor 600.1.14.2/BA.755-PERKIM/DPRKPP/2024, Nomor 000.3/BA.194/Perkim-3/2024 dan Nomor 181.4/BA/Cb11/2024 tentang Penetapan Luasan Hasil Pemutakhiran Pendataan dan Pembagian Kewenangan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Tangerang Selatan, disepakati luas kawasan kumuh di Kota Tangerang yang akan ditangani oleh Pemerintah Pusat seluas 15,02 Ha, yang akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Banten seluas 8,68 Ha dan yang akan ditangani oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan seluas 32,93 Ha.

Tabel 2.46. Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Tangerang Selatan

NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRASI			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN	
			RT/RW	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN (JIWA/HA)	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KERANGGAN	3,05	RT002-RW001	KERANGGAN	SETU	416	<150	-6,33804	106,65629	27	KUMUH RINGAN
2	KERANGGAN	0,34	RT003-RW001	KERANGGAN	SETU	352	<150	-6,33599	106,65508	28	KUMUH RINGAN
3	KERANGGAN	5,29	RT004-RW002	KERANGGAN	SETU	285	<150	-6,34005	106,65476	31	KUMUH RINGAN
4	KERANGGAN	1,02	RT014-RW003	KERANGGAN	SETU	272	<150	-6,34623	106,65605	31	KUMUH RINGAN
5	KERANGGAN	2,96	RT009-RW004	KERANGGAN	SETU	548	<150	-6,34639	106,65741	33	KUMUH RINGAN
6	KERANGGAN	4,18	RT011-RW005	KERANGGAN	SETU	322	<150	-6,34813	106,65756	37	KUMUH RINGAN
7	KERANGGAN	2,66	RT012-RW005	KERANGGAN	SETU	322	<150	-6,34800	106,65597	31	KUMUH RINGAN
8	KERANGGAN	4,19	RT013-RW005	KERANGGAN	SETU	447	<150	-6,34800	106,65429	36	KUMUH RINGAN
9	MUNCUL	2,67	RT001-RW001	MUNCUL	SETU	848	<150	-6,34058	106,66246	22	KUMUH RINGAN
10	KEDAUNG	1,40	RT012-RW011	KEDAUNG	PAMULANG	532	201-400	-6,31000	106,73838	44	KUMUH SEDANG
11	KEDAUNG	1,21	RT013-RW011	KEDAUNG	PAMULANG	420	151-200	-6,31108	106,73685	26	KUMUH RINGAN
12	CILENGGANG	1,20	RT005-RW002	CILENGGANG	SERPONG	657	<150	-6,30906	106,66924	32	KUMUH RINGAN
13	CILENGGANG	1,71	RT011-RW004	CILENGGANG	SERPONG	587	201-400	-6,30639	106,66141	35	KUMUH RINGAN
14	LENGKONG GUDANG TIMUR	1,14	RT001-RW003	LENGKONG GUDANG TIMUR	SERPONG	395	<150	-6,29757	106,68753	34	KUMUH RINGAN
15	RAWA MEKAR JAYA	0,32	RT001-RW002	RAWA MEKAR JAYA	SERPONG	596	201-400	-6,30871	106,68636	44	KUMUH SEDANG
16	RAWA MEKAR JAYA	1,70	RT004-RW002	RAWA MEKAR JAYA	SERPONG	371	<150	-6,30398	106,69500	35	KUMUH RINGAN
17	RAWA MEKAR JAYA	1,72	RT005-RW002	RAWA MEKAR JAYA	SERPONG	536	201-400	-6,30342	106,68822	41	KUMUH SEDANG
18	BUARAN	0,95	RT003-RW004	BUARAN	SERPONG	539	201-400	-6,34750	106,70825	35	KUMUH RINGAN
19	JELUPANG	1,43	RT013-RW004	JELUPANG	SERPONG UTARA	202	<150	-6,27488	106,67871	30	KUMUH RINGAN
20	JELUPANG	2,14	RT017-RW006	JELUPANG	SERPONG UTARA	644	151-200	-6,27095	106,66261	31	KUMUH RINGAN
21	PAMULANG BARAT	1,20	RT001-RW003	PAMULANG BARAT	PAMULANG	288	<150	-6,34196	106,73888	41	KUMUH SEDANG
22	PAMULANG BARAT	1,78	RT002-RW003	PAMULANG BARAT	PAMULANG	322	151-200	-6,34367	106,73898	30	KUMUH RINGAN
23	PAMULANG BARAT	1,72	RT003-RW003	PAMULANG BARAT	PAMULANG	537	151-200	-6,34504	106,73888	29	KUMUH RINGAN
24	BAMBU APUS	1,80	RT001-RW001	BAMBU APUS	PAMULANG	798	201-400	-6,31862	106,73340	41	KUMUH SEDANG
25	BAMBU APUS	0,30	RT003-RW001	BAMBU APUS	PAMULANG	564	201-400	-6,32068	106,73362	39	KUMUH SEDANG

NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRASI			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN	
			RT/RW	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN (JIWA/HA)	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	BAMBU APUS	0,83	RT004-RW001	BAMBU APUS	PAMULANG	718	201-400	-6,32095	106,73306	39	KUMUH SEDANG
27	CIATER	0,44	RT007-RW003	CIATER	SERPONG	294	<150	-6,33088	106,69178	41	KUMUH SEDANG
28	CIATER	0,39	RT009-RW003	CIATER	SERPONG	332	<150	-6,33051	106,69142	44	KUMUH SEDANG
29	CIREUNDEU	1,12	RT001-RW005	CIREUNDEU	CIPUTAT TIMUR	261	<150	-6,31540	106,76356	20	KUMUH RINGAN
30	PONDOK AREN	0,95	RT005-RW011	PONDOK AREN	PONDOK AREN	543	201-400	-6,25794	106,71430	19	KUMUH RINGAN
31	PARIGI	3,05	RT001-RW001	PARIGI	PONDOK AREN	442	<150	-6,26977	106,70364	29	KUMUH RINGAN
32	SERUA	1,79	RT002-RW004	SERUA	CIPUTAT	325	<150	-6,32243	106,71046	25	KUMUH RINGAN
	JUMLAH	**56,63**	**32**	**15**	**7**	-	-	-	-	-	-

Sumber: Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 600.2.1/Kep.237-Huk/2024



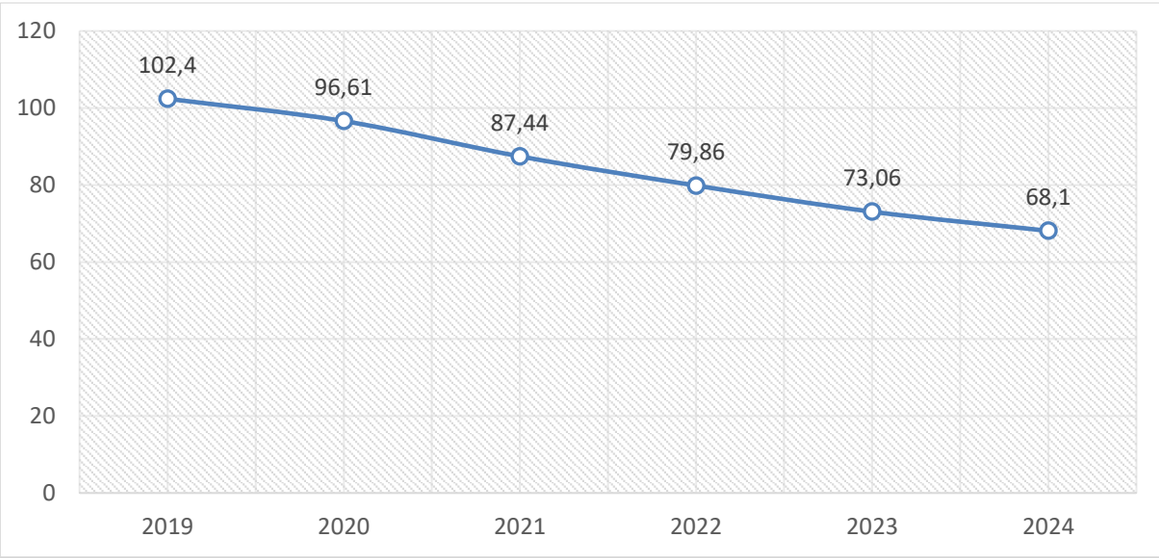
Sumber: Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 600.2.1/Kep.237-Huk/2024

Gambar 2.22. Peta Sebaran Permukiman Kumuh Kota Tangerang Selatan

2.1.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat potensi kerugian (baik fisik, ekonomi, sosial, maupun lingkungan) yang mungkin terjadi di suatu wilayah akibat bencana, dengan mempertimbangkan interaksi antara Ancaman (Hazard), Kerentanan (Vulnerability) dan Kapasitas (Capacity). Indeks risiko bencana di Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020-2024 disajikan dalam Gambar 2.23, dimana terlihat tingkat risiko bencana di Kota Tangerang Selatan dapat diturunkan dengan upaya meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.



Sumber: Dokumen Risiko Bencana Indonesia

Gambar 2.23. Indeks Risiko Bencana Kota Tangerang Selatan

Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2024-2026 telah memuat hasil dari analisis ancaman/bahaya berupa luas potensi bahaya dan peta bahaya dari setiap Bencana menurut tingkat ancamannya. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu kawasan dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Pengkajian risiko Bencana merupakan upaya dalam menghasilkan informasi terkait tingkat risiko Bencana pada suatu wilayah. Tingkat risiko Bencana disusun berdasarkan analisis tiga komponen yaitu analisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas daerah.

b. Rekapitulasi Ancaman/Bahaya

Rekapitulasi ancaman/bahaya bencana disusun berdasarkan dua komponen utama, yaitu kemungkinan terjadi suatu ancaman dan besaran dampak yang pernah tercatat untuk bencana yang terjadi tersebut. Skala tingkat bahaya dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu rendah (0-0,33), sedang (>0,33-0,66) dan tinggi (>0,66-1,00). Hasil dari rekapitulasi ancaman/bahaya berupa luas potensi bahaya menurut tingkat ancamannya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.47 dimana terdapat 4 (empat) bencana yang masuk ke dalam kategori bahaya tinggi yaitu gempa bumi, banjir, cuaca ekstrem, dan kegagalan teknologi. Kemudian terdapat 4 (empat) bencana yang masuk

ke dalam kategori bahaya sedang yaitu kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, kebakaran gedung dan permukiman. Sedangkan bencana tanah longsor masuk ke dalam kategori bahaya rendah.

Tabel 2.47. Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kota Tangerang Selatan

No	Jenis Bahaya	Luas Bahaya (ha)			Total Luas (ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Gempa Bumi	13.811,30	2.673,18	0,99	16.485,47	Tinggi
2	Banjir	415,35	440,82	741,33	1.597,50	Tinggi
3	Tanah Longsor	57,06	-	-	57,06	Rendah
4	Cuaca Ekstrim	-	13.325,84	3.159,63	16.485,47	Tinggi
5	Kekeringan	16.053,38	432,09		16.485,47	Sedang
6	Kebakaran Gedung dan Permukiman	520,29	11.770,02		12.290,31	Sedang
7	Epidemi dan Wabah Penyakit	1.926,72	8.902,98	-	10.829,70	Sedang
8	Kegagalan Teknologi	13.292,36	2.775,33	417,78	16.485,47	Tinggi
9	Konflik Sosial	308,43	141,21	-	449,64	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026

c. Rekapitulasi Kerentanan

Potensi kerentanan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dengan kelas kerentanan yang diperoleh berdasarkan nilai indeks kerentanan. Perlu diingat bahwa pengkelasan dibuat berdasarkan luasan kelas dominan tertinggi dari setiap kelurahan yang ada di tiap kecamatan

Nilai indeks kerentanan Kota Tangerang Selatan berdasarkan jenis bencana dapat dilihat pada Tabel 2.48, dimana terdapat 8 (delapan) jenis bencana yang memiliki potensi jumlah penduduk yang terpapar tinggi yaitu bencana gempa bumi, banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran gedung dan permukiman, epidemi dan wabah penyakit, kegagalan teknologi serta konflik sosial. Sementara itu, terdapat 1 (satu) jenis bencana yang memiliki potensi jumlah penduduk yang terpapar rendah, yaitu bencana tanah longsor

Tabel 2.48. Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan

No	Jenis Bencana	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			Kelas
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Gempa Bumi	1.378.466	208.126	22.196	345	Tinggi
2	Banjir	133.358	15.817	1.489	23	Tinggi
3	Tanah Longsor	576	68	10	13	Rendah
4	Cuaca Ekstrim	1.378.466	207.487	22.155	344	Tinggi
5	Kekeringan	1.378.466	208.022	22.188	345	Tinggi
6	Kebakaran Gedung dan Permukiman	1.378.466	204.474	21.777	338	Tinggi
7	Epidemi dan Wabah Penyakit	1.378.466	203.957	21.727	338	Tinggi
8	Kegagalan Teknologi	1.378.466	155.425	13.836	185	Tinggi
9	Konflik Sosial	38.182	4.421	517	7	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026

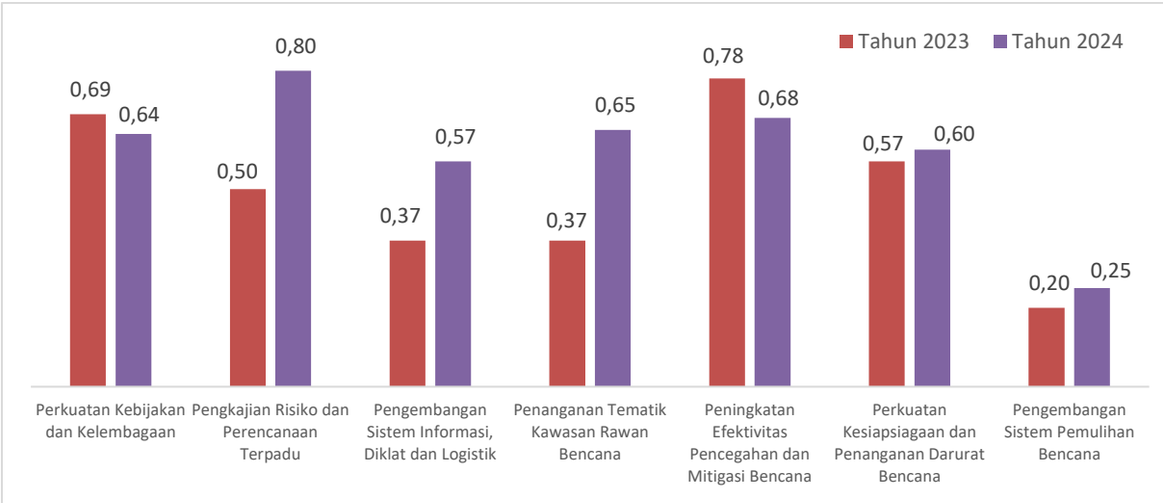
d. Rekapitulasi Kapasitas

Rekapitulasi kapasitas dalam suatu Kajian Risiko Bencana dapat mengidentifikasi sumber daya, kemampuan, dan mekanisme yang dimiliki oleh suatu komunitas atau wilayah untuk mengurangi, menghadapi, dan pulih dari bencana. Rekapitulasi kapasitas yang dianalisis terkait kebencanaan di Kota Tangerang Selatan meliputi gambaran ketahanan daerah dan kesiapsiagaan masyarakat. Ketahanan daerah Kota Tangerang Selatan dalam menghadapi potensi Bencana digambarkan berdasarkan indeks kapasitas daerah, dimana menunjukkan bahwa pada tahun 2024, nilai indeks kapasitas Kota Tangerang Selatan meningkat dibandingkan tahun 2023, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.49 dan Gambar 2.24. Hal tersebut menggambarkan adanya peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana. Komponen kegiatan prioritas yang masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana adalah penguatan kebijakan dan kelembagaan serta peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. Selain itu, jika dibandingkan dengan keseluruhan nilai komponen kegiatan prioritas pengkajian kapasitas daerah, terlihat bahwa kegiatan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana mencatatkan nilai paling kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya-upaya yang inovatif untuk mengembangkan sistem pemulihan bencana yang terintegrasi dan efektif.

Tabel 2.49. Ketahanan Daerah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023-2024

No.	PRIORITAS	Tahun 2023			Tahun 2024		
		INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,69	0,53	SEDANG	0,64	0,58	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,50			0,80		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,37			0,57		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,37			0,65		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,78			0,68		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,57			0,60		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20			0,25		

Sumber: BPBD Kota Tangerang Selatan, 2024



Gambar 2.24. Diagram Kegiatan Prioritas Hasil Pengkajian Indeks Kapasitas Daerah

Indeks kesiapsiagaan masyarakat pada semua bahaya di Kota Tangerang Selatan per parameter berdasarkan kelurahan disajikan dalam Tabel 2.50, yang menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi seluruh potensi bencana masih rendah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlu upaya-upaya inovatif dan efektif dalam meningkatkan level kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana guna meminimalisir kemungkinan kerugian besar yang akan terjadi baik dari segi materiil ataupun non materiil.

Tabel 2.50. Nilai Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat

No	Kecamatan	PK	PTD	PKM	KTMDT	PM	Kelas
1	Ciputat	0,34	0,19	0,41	0,34	0,53	Rendah
2	Ciputat Timur	0,35	0,01	0,43	0,78	0,51	Sedang
3	Pamulang	0,16	0,47	0,72	0,27	0,58	Sedang
4	Pondok Aren	0,18	0,00	0,38	0,43	0,00	Rendah
5	Serpong	0,21	0,09	0,55	0,33	0,00	Rendah
6	Serpong Utara	0,16	0,06	0,44	0,63	0,00	Rendah
7	Setu	0,36	0,27	0,50	0,46	0,55	Sedang
Kota Tangerang Selatan		0,25	0,16	0,49	0,46	0,31	Rendah

Sumber:Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026
PK = Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana
PTD = Pengelolaan Tanggap Darurat
PKM = Pengaruh Kerentanan Masyarakat
KMDP = Ketidaktergantungan Masyarakat Daerah Terhadap Pemerintah
PM = Partisipasi Masyarakat

e. Rekapitulasi Risiko Bencana per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan

1) Gempa Bumi

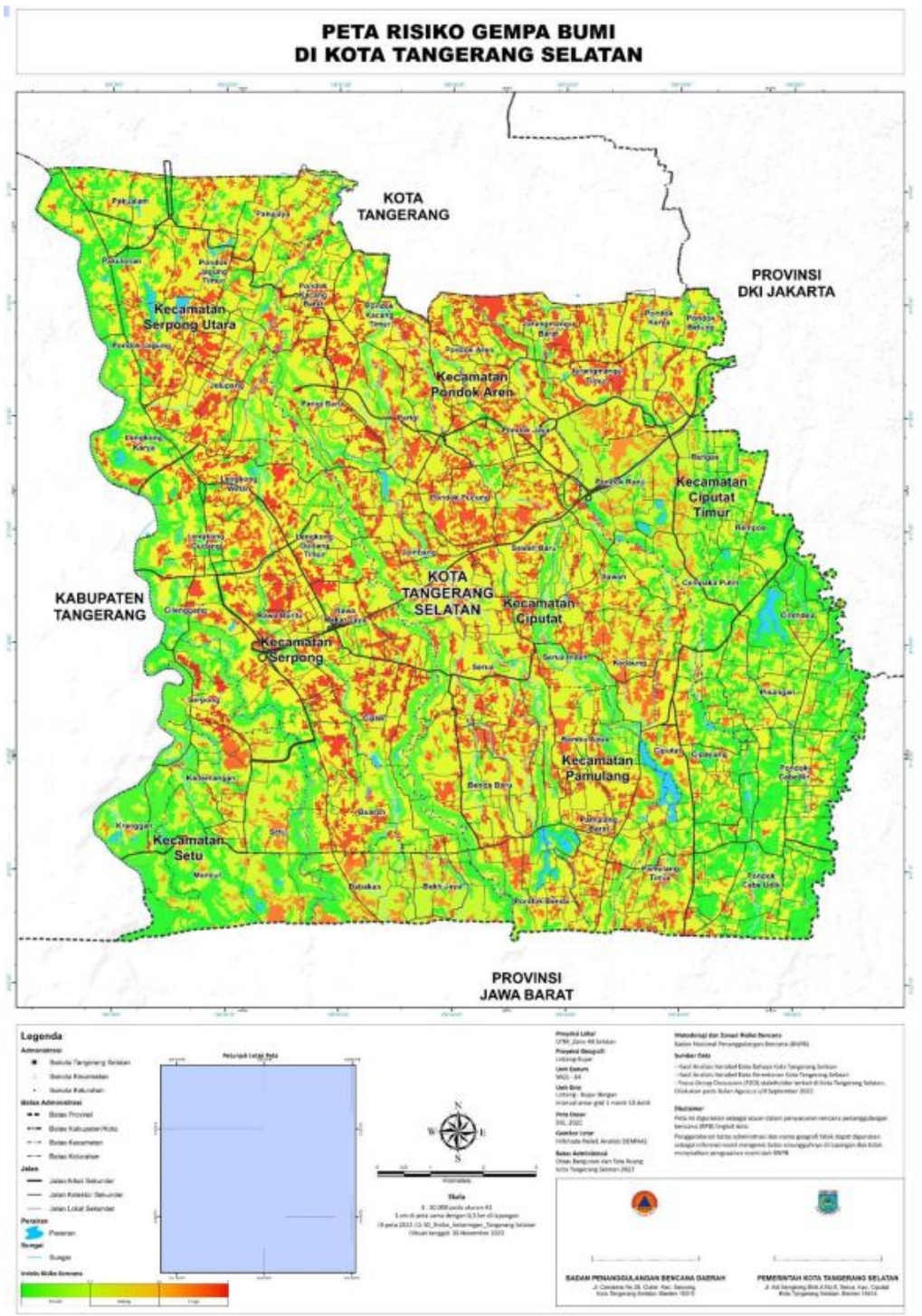
Sebaran tingkat risiko gempa bumi per Kecamatan yang diperoleh dari hasil kajian tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas ditunjukkan dalam Tabel 2.51 dan Gambar 2.25, dimana rata-rata luasan berisiko gempa bumi berkategori rendah.

Tabel 2.51. Rekapitulasi Sebaran Risiko Gempa Bumi di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Ciputat	1.729,16	386,64	-	2.115,80

2	Ciputat Timur	1.646,23	137,79	-	1.784,02
3	Pamulang	2.431,13	437,22	-	2.868,35
4	Pondok Aren	2.308,71	668,88	-	2.977,59
5	Serpong	2.314,19	528,66	0,99	2.843,84
6	Serpong Utara	1.895,98	321,57	-	2.217,55
7	Setu	1.485,90	192,42	-	1.678,32
Kota Tangerang Selatan		**13.811,30**	**2.673,18**	**0,99**	**16.485,47**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2022-2026



(Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026)

Gambar 2.25. Peta Risiko Gempa Bumi di Kota Tangerang Selatan

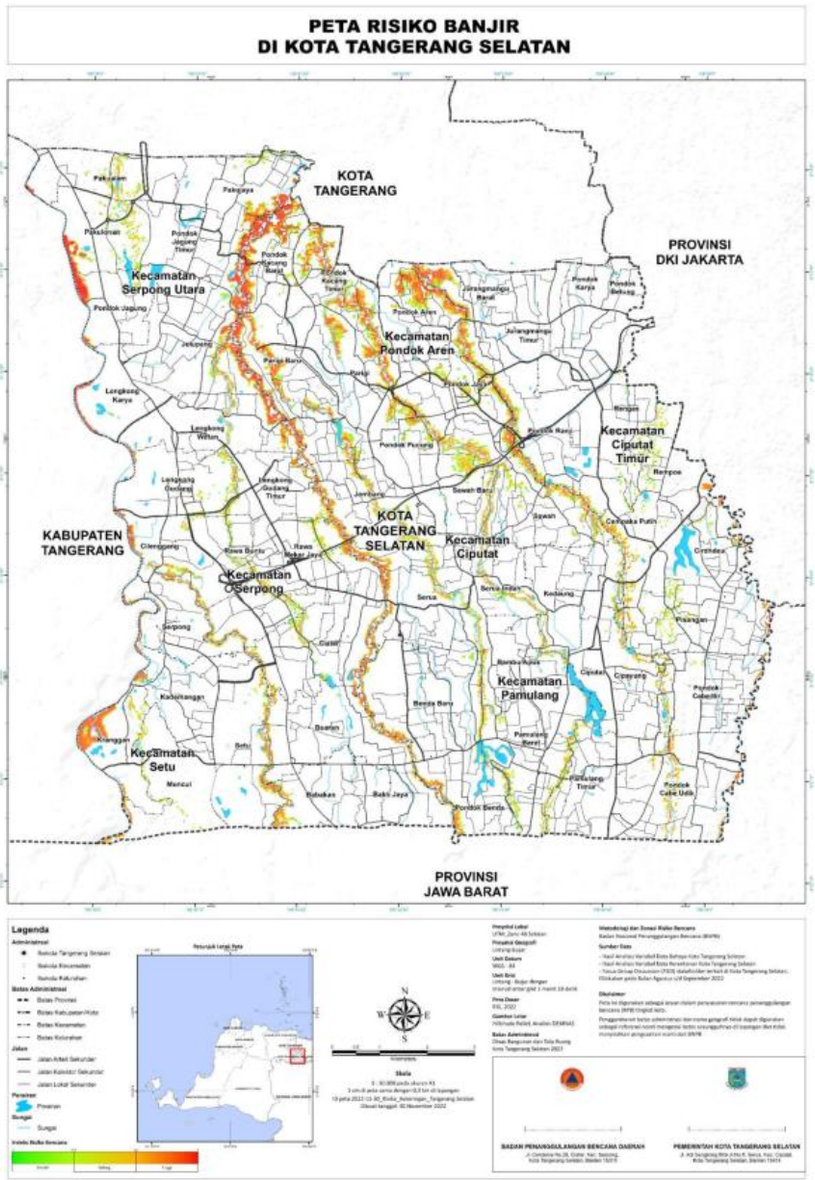
2) Banjir

Sebaran tingkat risiko banjir per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dalam Tabel 2.52 dan Gambar **2.26**, dimana rata-rata luasan risiko banjir berkategori tinggi.

Tabel 2.52. Rekapitulasi Sebaran Risiko Banjir di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)
		Rendah	**Sedang**	**Tinggi**	
1	Ciputat	68,67	79,02	115,74	263,43
2	Ciputat Timur	43,29	41,49	38,25	123,03
3	Pamulang	49,14	59,40	69,66	178,20
4	Pondok Aren	118,80	125,73	245,61	490,14
5	Serpong	63,09	62,82	106,65	232,56
6	Serpong Utara	52,83	50,04	92,70	195,57
7	Setu	19,35	22,23	72,27	113,85
Kota Tangerang Selatan		**415,17**	**440,73**	**740,88**	**1.596,78**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2022-2026



(Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026)

Gambar 2.26. Peta Risiko Banjir di Kota Tangerang Selatan

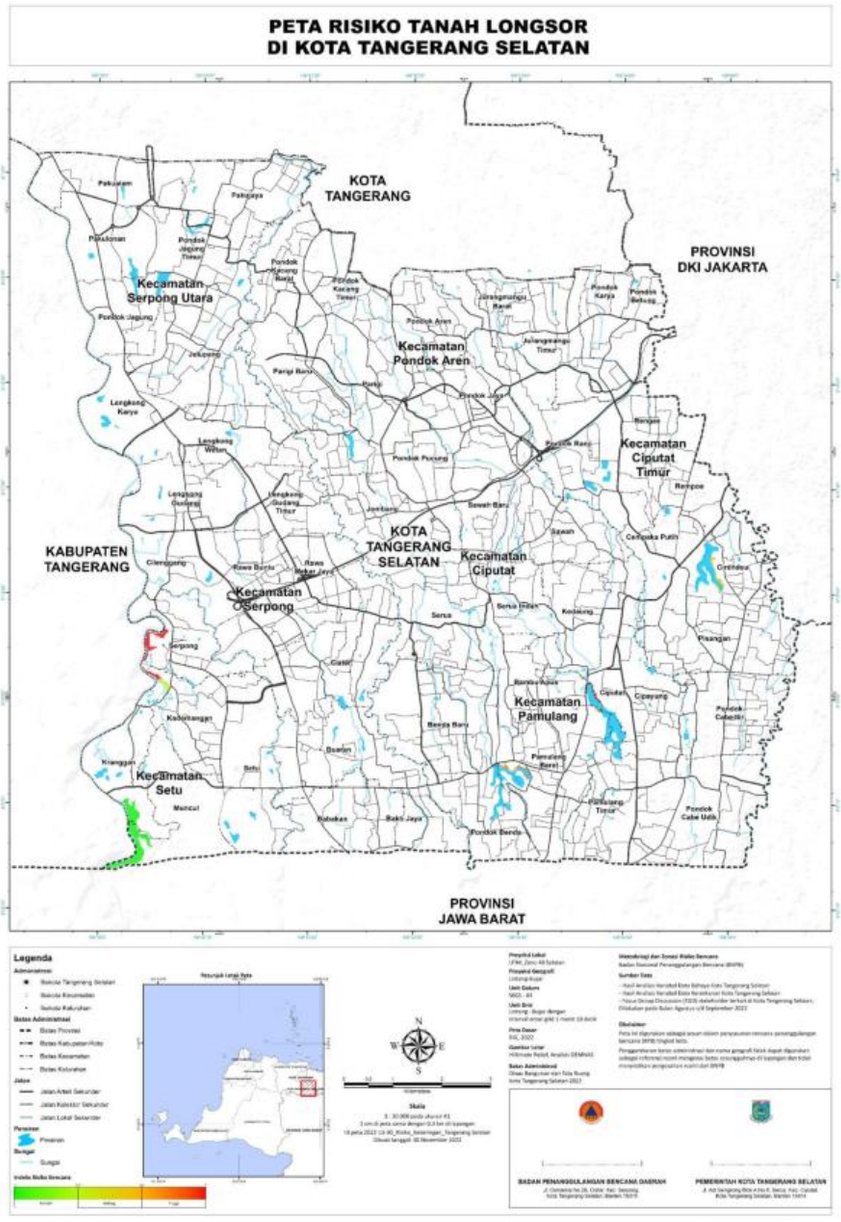
3) Tanah Longsor

Sebaran tingkat risiko tanah longsor per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dalam Tabel 2.53 dan Gambar 2.27, dimana rata-rata luasan risiko tanah longsor berkategori rendah.

Tabel 2.53. Rekapitulasi Sebaran Risiko Tanah Longsor di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)
		Rendah	**Sedang**	**Tinggi**	
1	Ciputat	1,35	-	-	1,35
2	Ciputat Timur	5,31	-	-	5,31
3	Pamulang	9,27	-	-	9,27
4	Pondok Aren	-	-	-	-
5	Serpong	9,27	-	-	9,27
6	Serpong Utara	-	-	-	-
7	Setu	31,77	-	-	31,77
Kota Tangerang Selatan		**56,97**	**-**	**-**	**56,97**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2022-2026



(Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026)

Gambar 2.27. Peta Risiko Tanah Longsor di Kota Tangerang Selatan

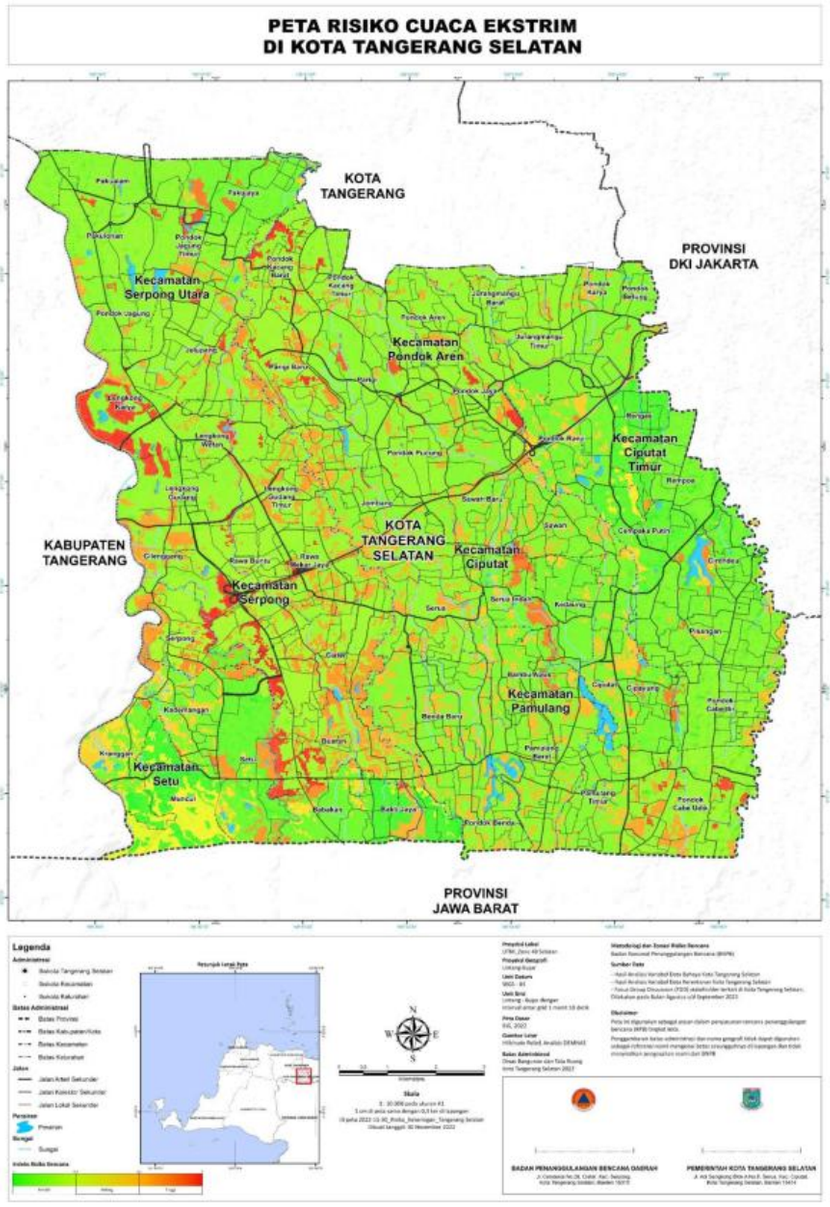
4) Cuaca Ekstrem

Sebaran tingkat risiko cuaca ekstrem per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dalam Tabel 2.54 dan Gambar 2.28, dimana rata-rata luasan risiko cuaca ekstrem berkategori sedang.

Tabel 2.54. Rekapitulasi Sebaran Risiko Cuaca Ekstrem di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Ciputat	-	1.665,98	449,82	2.115,80
2	Ciputat Timur	-	1.587,10	196,92	1.784,02
3	Pamulang	-	2.366,51	501,84	2.868,35
4	Pondok Aren	-	2.628,57	349,02	2.997,59
5	Serpong	-	2.068,13	775,71	2.843,84
6	Serpong Utara	-	1.926,49	291,06	2.217,55
7	Setu	-	1.100,25	578,07	1.678,32
Kota Tangerang Selatan		**-**	**13.343,03**	**3.142,44**	**16.485,47**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2022-2026



(Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026)

Gambar 2.28. Peta Risiko Cuaca Ekstrem di Kota Tangerang Selatan

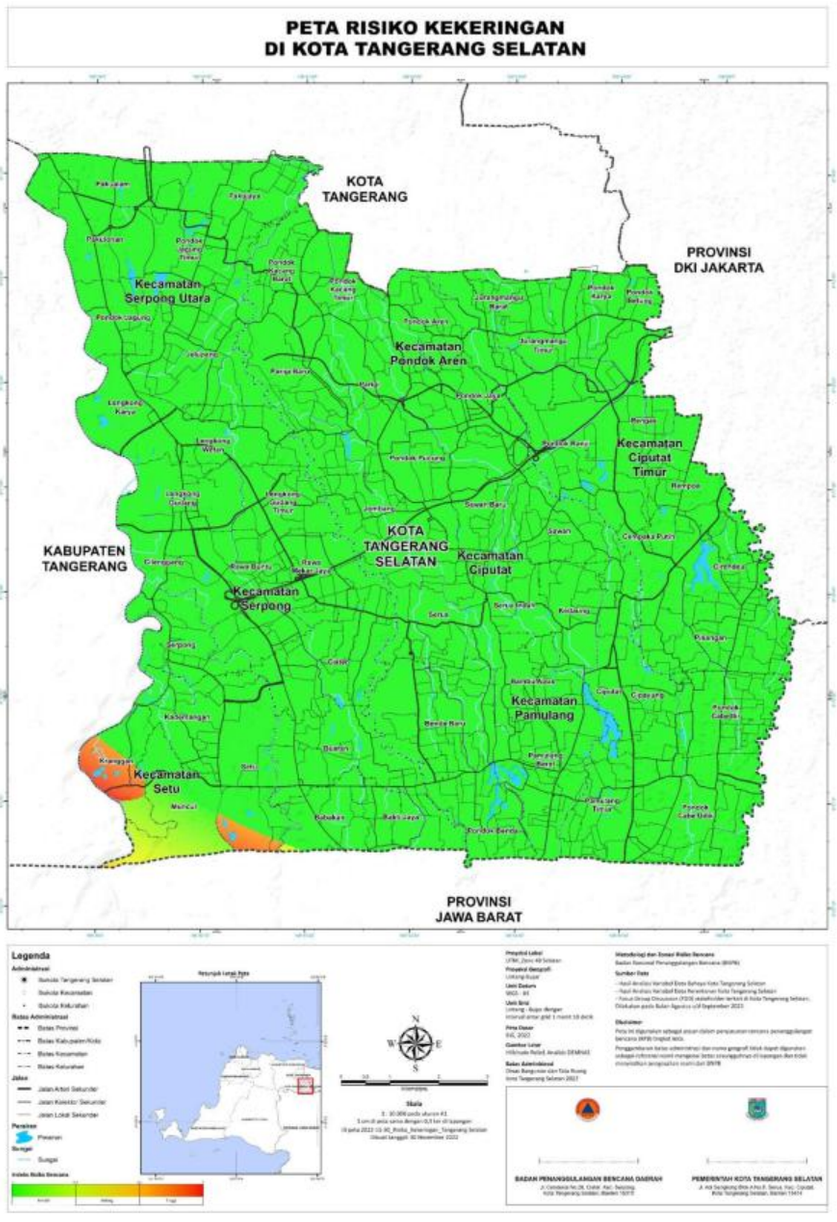
5) Kekeringan

Sebaran tingkat risiko kekeringan per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dalam Tabel 2.55 dan Gambar 2.29, dimana rata-rata luasan risiko kekeringan berkategori rendah.

Tabel 2.55. Rekapitulasi Sebaran Risiko Kekeringan di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Ciputat	2.115,80	-	-	2.115,80
2	Ciputat Timur	1.784,02	-	-	1.784,02
3	Pamulang	2.868,35	-	-	2.868,35
4	Pondok Aren	2.977,59	-	-	2.997,59
5	Serpong	2.843,84	-	-	2.843,84
6	Serpong Utara	2.217,55	-	-	2.217,55
7	Setu	1.246,23	435,09	-	1.678,32
Kota Tangerang Selatan		**16.053,38**	**432,09**	**-**	**16.485,47**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2022-2026



(Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026)

Gambar 2.29. Peta Risiko Kekeringan di Kota Tangerang Selatan

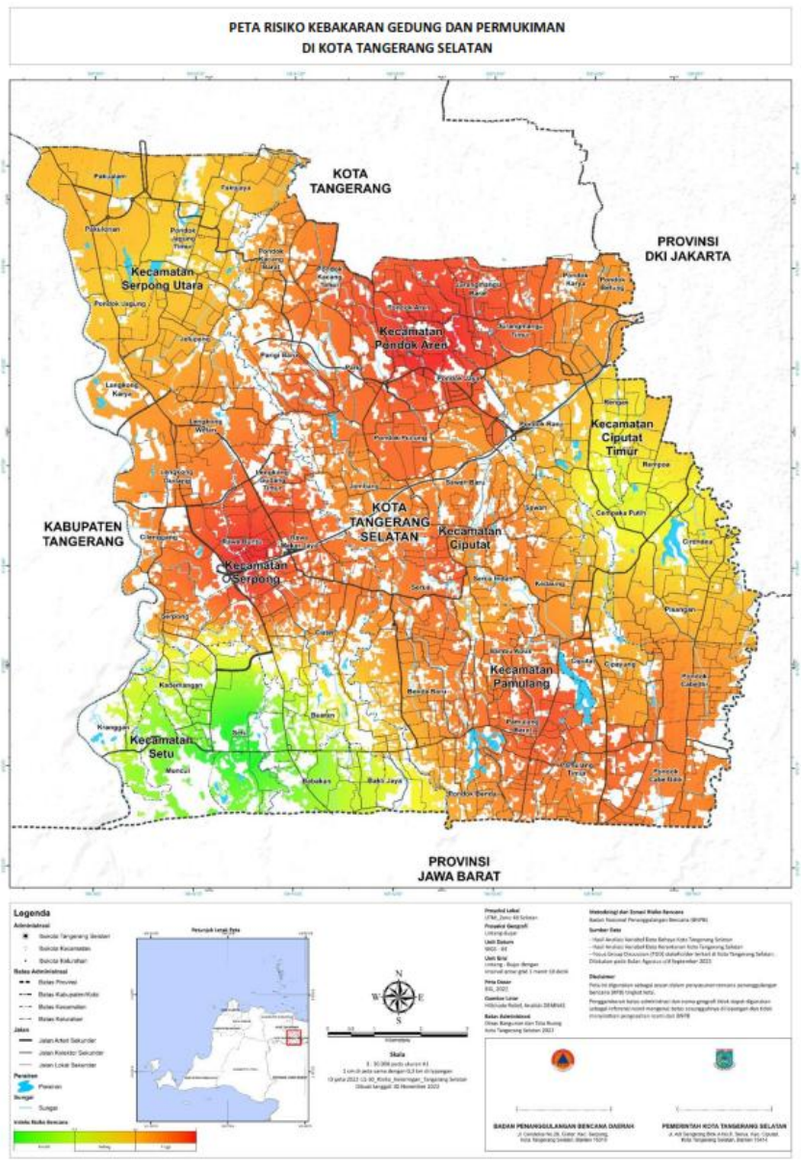
6) Kebakaran Gedung dan Permukiman

Sebaran tingkat risiko kebakaran gedung dan permukiman per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dalam Tabel 2.56 dan Gambar 2.30, dimana rata-rata luasan risiko kebakaran gedung dan permukiman berkategori sedang.

Tabel 2.56. Rekapitulasi Sebaran Risiko Kebakaran Gedung dan Permukiman di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)
		Rendah	**Sedang**	**Tinggi**	
1	Ciputat	-	1.567,80	-	1.567,80
2	Ciputat Timur	-	3.065,13	-	3.065,13
3	Pamulang	-	2.206,26	-	2.206,26
4	Pondok Aren	-	2.334,24	-	2.334,24
5	Serpong	85,23	1.794,60	-	1.879,83
6	Serpong Utara	-	1.811,25	-	1.811,25
7	Setu	435,06	555,48	-	990,54
Kota Tangerang Selatan		**520,29**	**13.334,76**	**-**	**13.855,05**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2022-2026



(Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026)
Gambar 2.30. Peta Risiko Kebakaran Gedung dan Permukiman di Kota Tangerang Selatan

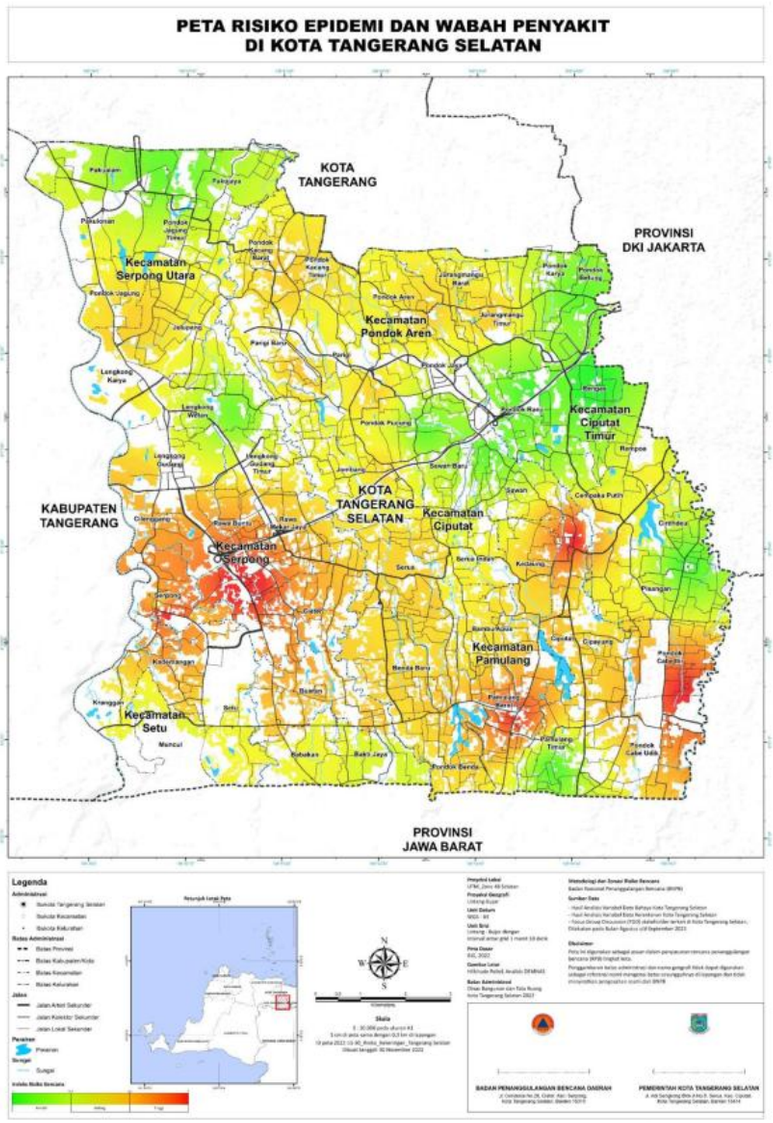
7) Epidemi dan Wabah Penyakit

Sebaran tingkat risiko Epidemi dan Wabah Penyakit per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dalam Tabel 2.57 dan Gambar 2.31, dimana rata-rata luasan risiko Epidemi dan Wabah Penyakit berkategori sedang.

Tabel 2.57. Rekapitulasi Sebaran Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Ciputat	236,25	1.296,36	-	1.532,61
2	Ciputat Timur	617,76	808,29	-	1.426,05
3	Pamulang	103,86	1.830,78	-	1.934,64
4	Pondok Aren	401,49	1.731,87	-	2.133,36
5	Serpong	138,51	1.469,97	-	1.608,48
6	Serpong Utara	428,22	1.029,51	-	1.457,73
7	Setu		733,95	-	733,95
Kota Tangerang Selatan		**1.926,09**	**8.900,73**	**-**	**10.826,82**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2022-2026



(Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026)

Gambar 2.31. Peta Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit di Kota Tangerang Selatan

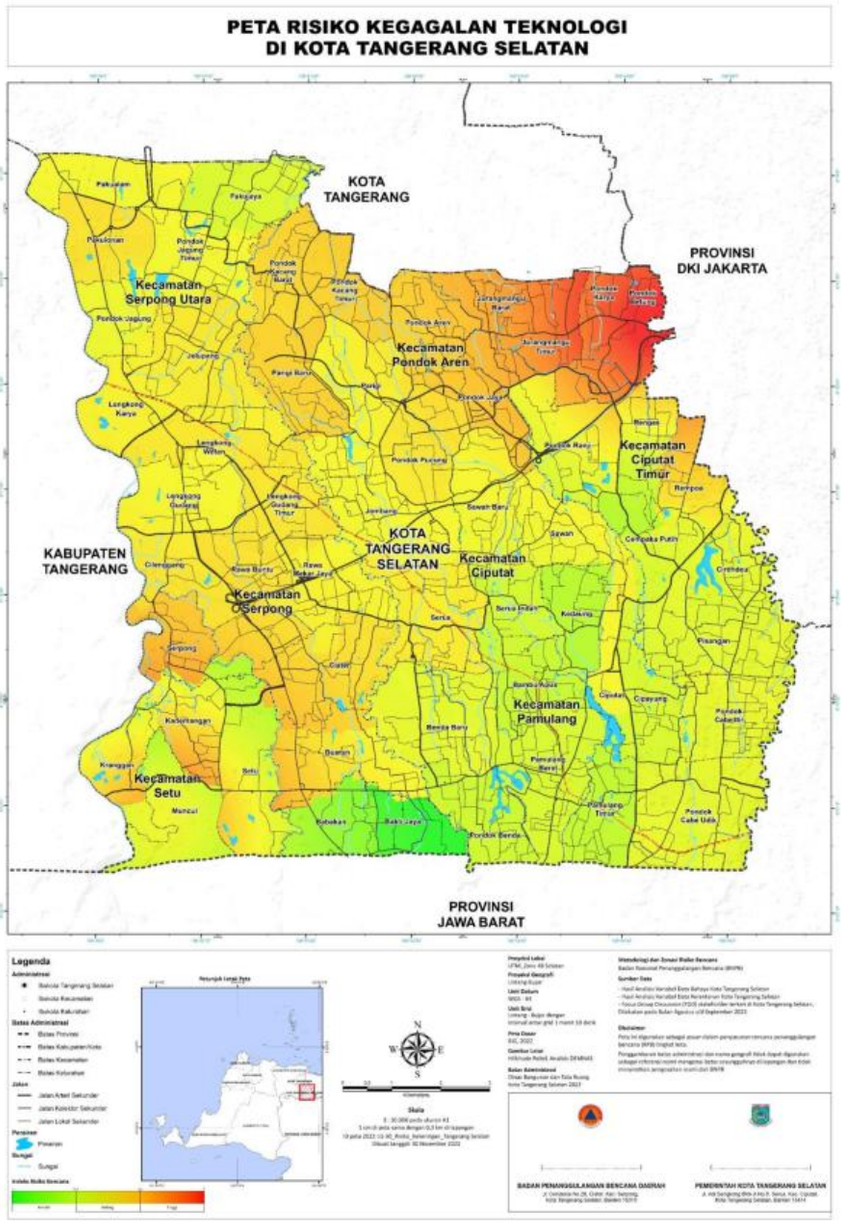
8) Kegagalan Teknologi

Sebaran tingkat risiko kegagalan teknologi per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dalam Tabel 2.58 dan Gambar 2.32, dimana rata-rata luasan risiko kegagalan teknologi berkategori rendah.

Tabel 2.58. Rekapitulasi Sebaran Risiko Kegagalan Teknologi di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)
		Rendah	**Sedang**	**Tinggi**	
1	Ciputat	2.106,53		9,27	2.115,80
2	Ciputat Timur	1.782,76	1,26		1.784,02
3	Pamulang	2.829,56	23,94	14,85	2.868,35
4	Pondok Aren	2.694,36	280,44	2,79	2.977,59
5	Serpong	1.585,10	1.251,54	7,20	2.843,84
6	Serpong Utara	2.213,86		3,69	2.217,55
7	Setu	81,45	1.217,07	379,80	1.678,32
Kota Tangerang Selatan		**13.293,62**	**2.774,25**	**417,60**	**16.485,47**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2022-2026



(Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026)
Gambar 2.32. Peta Risiko Kegagalan Teknologi di Kota Tangerang Selatan

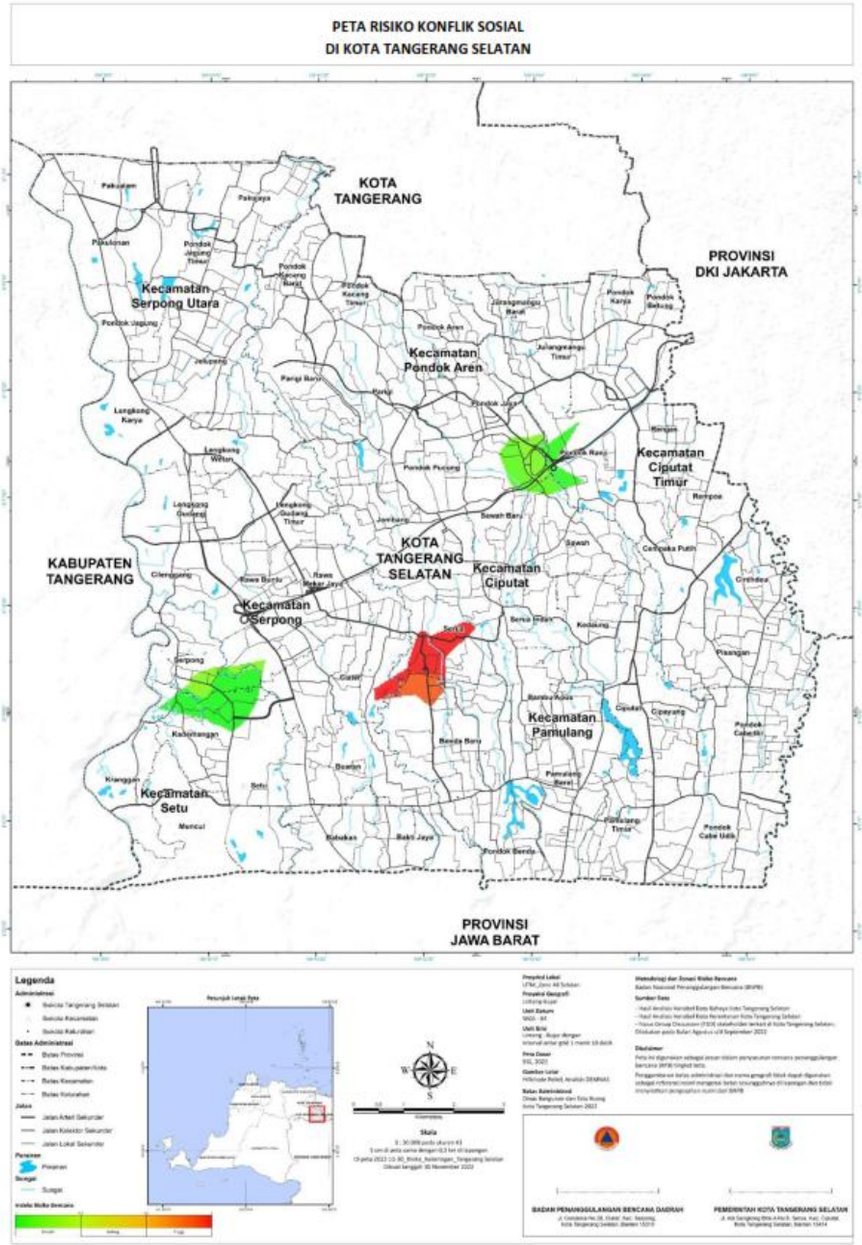
9) Konflik Sosial

Sebaran tingkat risiko konflik sosial per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dalam Tabel 2.59 dan Gambar 2.33, dimana rata-rata luasan risiko konflik sosial berkategori rendah.

Tabel 2.59. Rekapitulasi Sebaran Risiko Konflik Sosial di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Ciputat	53,82	83,61	-	137,43
2	Ciputat Timur	39,87	-	-	39,87
3	Pamulang	-	42,93	-	42,93
4	Pondok Aren	43,02	-	-	43,02
5	Serpong	36,90	14,67	-	51,57
6	Serpong Utara	-	-	-	
7	Setu	134,82	-	-	134,82
Kota Tangerang Selatan		**308,43**	**141,21**	**-**	**449,64**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2022-2026



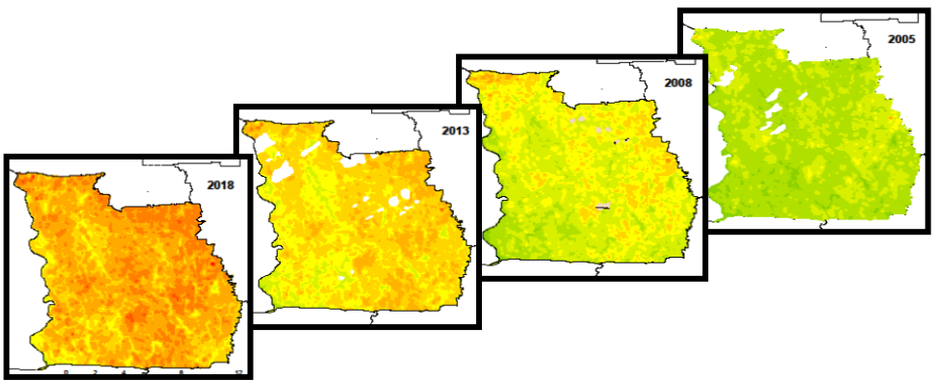
(Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026)

Gambar 2.33. Peta Risiko Konflik Sosial di Kota Tangerang Selatan

f. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan nitro oksida (N_2O) berperan sebagai penyumbang utama pemanasan global melalui efek rumah kaca. Ketika GRK terakumulasi di atmosfer, mereka menyerap dan memantulkan kembali radiasi panas dari Bumi ke permukaan, sehingga meningkatkan suhu rata-rata global (global warming). Peningkatan suhu rata-rata global dirasakan di Kota Tangerang Selatan. Penelitian mengenai Urban Heat Island/UHI di Kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh Stella Oktavianingrum et al., 2020 menunjukkan bahwa selama periode 2005-2018 telah terjadi kenaikan suhu permukaan lahan sebagai akibat dari perubahan tutupan vegetasi selama periode waktu penelitian. Perubahan tutupan lahan bervegetasi menjadi non vegetasi berkecenderungan meningkatkan suhu permukaan lahan di wilayah Kota Tangerang Selatan, sebagaimana digambarkan dalam Gambar 2.33. Perubahan tutupan lahan dari vegetasi menjadi non vegetasi penunjang

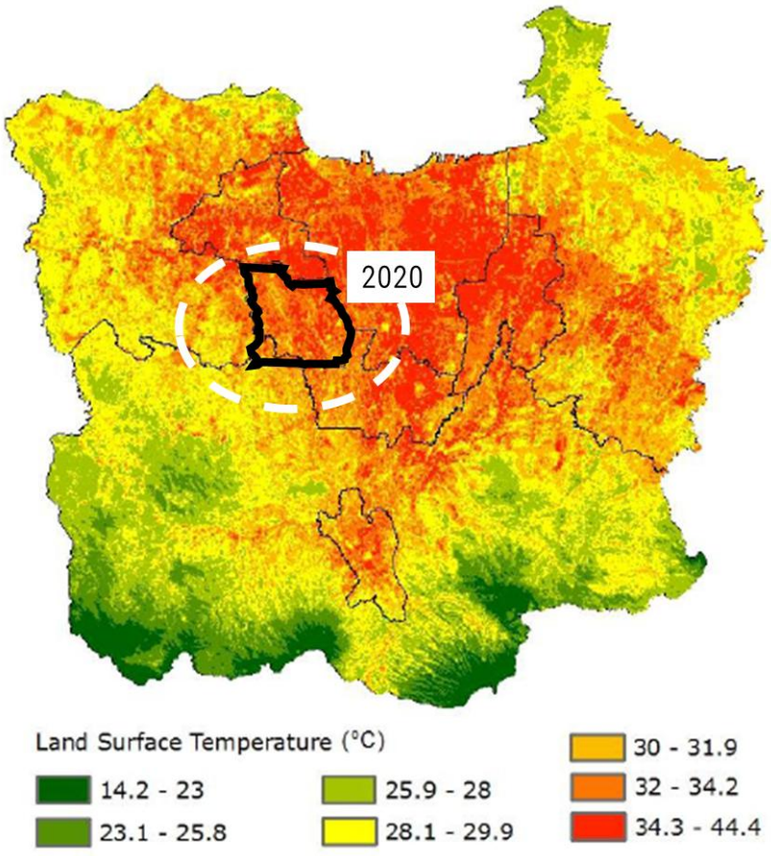
aktivitas manusia (permukiman, dan infrastruktur) secara masif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mempercepat perubahan iklim.



Sumber: analisis (2023)

Gambar 2.34. Perubahan Suhu Permukaan Lahan (LST) Kota Tangerang Selatan 2005-2018

Penelitian suhu permukaan tanah di wilayah Jakarta dan sekitarnya termasuk Kota Tangerang Selatan juga dilakukan oleh A.B Raya dan H.S Hasibuan, 2020, dimana Jakarta dan daerah pinggiran di Metropolitan (Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Depok) memiliki suhu permukaan di atas 30oC. Konfigurasi ruang menunjukkan bahwa suhu permukaan lahan semakin menurun seiring dengan bertambahnya jarak dari Kota Jakarta. Sebaran suhu permukaan lahan (Land Surface Temperature/LST) di wilayah Jabodetabek tahun 2020, menunjukkan nilai LST yang semakin meningkat sebagai mana ditunjukkan dalam Gambar 2.35.



LST	Jakarta	Tangerang Ct.	Bekasi Ct.	Depok Ct.	Bogor Ct.	Tangsel Ct.
28-30	2.65%	3.51%	1.07%	4.64%	18.75%	2.70%
30-32	8.81%	16.35%	10.26%	26.07%	32.46%	17.48%
32-34	35.36%	38.40%	39.60%	41.93%	37.49%	49.15%
34-45	52.75%	41.59%	48.94%	27.32%	8.90%	30.65%

Sumber: analisis (2023)

Gambar 2.35. Suhu Permukaan Tanah wilayah Jakarta dan sekitarnya, termasuk Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

g. Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah

Pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan indikator kunci dalam menilai kesesuaian pembangunan fisik suatu daerah dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan ruang RTRW dilakukan terhadap tingkat kesesuaian perwujudan struktur ruang dan tingkat kesesuaian perwujudan pola ruang. Penilaian kesesuaian struktur ruang dilakukan berdasarkan kesesuaian program dan lokasi program yang membentuk struktur ruang. Sementara itu penilaian kesesuaian pola ruang dilakukan berdasarkan pada:

1. Kesesuaian program dan lokasi program untuk semua pemanfaatan ruang yang membentuk pola ruang;
2. Kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan pada hasil overlay peta rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW dengan peta tutupan lahan eksisting tahun 2023;
3. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan melihat pula kesesuaian program, kesesuaian lokasi, dan juga kesesuaian waktu pelaksanaan pada dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Pembangunan Tangerang Selatan sebagai bahan sandingan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kesesuaian program kegiatan perwujudan struktur ruang dan perwujudan pola ruang Kota Tangerang Selatan dengan RTRW Kota Tangerang Selatan dan RDTR Kota Tangerang Selatan didapat hasil sebagai berikut:

1. Kesesuaian program 63,27%;
2. Kesesuaian lokasi 65,41%; dan
3. Kesesuaian waktu pelaksanaan sebesar 64,95%.

Terdapat 3 (tiga) kategori penilaian atas hasil evaluasi perwujudan program rencana tata ruang yaitu:

1. Terwujud, jika nilai perwujudannya > 85% (delapan puluh lima persen) artinya pelaksanaan (realisasi) sudah bersesuaian dengan program rencana tata ruang.
2. Belum Terwujud, jika nilai perwujudannya < 85% (delapan puluh lima persen) artinya pelaksanaan (realisasi) belum bersesuaian dengan program rencana tata ruang.
3. Tidak sesuai, jika nilai perwujudannya 0% (Nol persen) artinya program rencana tata ruang belum terealisasi (terlaksana) atau tidak sesuai dengan program rencana tata ruang (terindikasi terjadi pelanggaran).

Berdasarkan kategori tersebut, keseluruhan hasil evaluasi (penilaian) perwujudan program RTRW Kota Tangerang Selatan adalah belum terwujud dengan rata-rata nilai perwujudan 62,73%, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.60. Hal tersebut mengamanatkan perlunya dokumen RTRW Kota Tangerang Selatan dilakukan revisi.

Tabel 2.60. Penilaian Perwujudan Program RTRW di Kota Tangerang Selatan

No	Aspek Penilaian	Nilai Akhir	Nilai Bobot (%)	Perkalian Bobot
1.	Kualitas RTRW	2,14	30	64,20
2.	Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan	2,00	30	60,00
3.	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	1,60	40	64,00
Total		**5,74**	**100**	**188,20**
Rata-Rata Nilai Penilaian Akhir		1,91		62,73

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

2.1.1.7. Demografi

a. Struktur Kependudukan

Pembangunan daerah dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Karena itulah, data kependudukan merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan. Data kependudukan di Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.61.

Tabel 2.61. Data Kependudukan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Umur	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
0–4	52.970	50.640	51.500	49.210	50.200	47.920	49.070	46.820	48.100	45.960
5–9	56.880	54.270	56.330	54.080	55.630	53.670	54.780	53.000	53.580	51.860
10–14	56.950	53.120	57.140	53.480	57.220	53.830	57.140	54.120	56.790	54.170
15–19	54.920	52.000	55.260	52.060	55.650	52.240	56.080	52.510	56.300	52.700
20–24	54.280	53.490	54.290	53.200	54.280	52.840	54.340	52.510	54.070	51.860
25–29	54.410	54.960	54.490	54.750	54.440	54.490	54.320	54.230	53.810	53.430
30–34	53.550	56.370	53.530	56.130	53.680	55.880	53.970	55.640	53.850	55.090
35–39	55.920	57.470	55.590	57.520	55.020	57.360	54.340	57.070	53.540	56.540
40–44	53.820	54.660	54.400	55.310	54.910	55.970	55.310	56.580	55.320	56.910
45–49	49.290	50.740	50.220	51.830	51.020	52.650	51.740	53.270	52.280	53.740
50–54	42.190	42.310	43.420	43.770	44.660	45.440	45.870	47.200	46.940	48.790
55–59	34.650	36.200	35.970	37.530	37.160	38.550	38.270	39.430	39.330	40.340
60–64	25.130	25.510	26.450	27.340	27.960	29.380	29.540	31.470	31.050	33.410
65–69	18.180	17.610	19.330	19.030	20.160	20.240	20.840	21.350	21.590	22.570
70–74	7.180	7.430	8.700	8.900	10.450	10.640	12.240	12.480	13.850	14.240
75+	6.310	7.920	6.470	8.150	6.710	8.500	7.120	9.020	7.750	9.770
Jumlah	**676.630**	**674.700**	**683.090**	**682.290**	**689.150**	**689.600**	**694.970**	**696.700**	**698.150**	**701.380**
Jumlah Total	**1.351.330**		**1.365.380**		**1.378.750**		**1.391.670**		**1.399.530**	
laju pertumbuhan	**0,47**		**1,12**		**1,01**		**0,99**		**0,88**	
Kepadatan (jiwa/km²)	**8.197**		**8.282**		**8.363**		**8.442**		**8,489**	

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020 Laju pertumbuhan dihitung menggunakan rumus geometrik terhadap tahun dasar sensus (tahun 2020)

Berdasarkan data dalam Tabel 2.61, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu 2020-2024 menurun dibandingkan tahun 2020 (tahun sensus). Penurunan ini dapat disebabkan karena menurunnya tingkat kelahiran di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (SIPERINDU) BKKBN, Total Fertility Rate (TFR) Kota Tangerang Selatan tahun 2022-2024 sebesar 1,71, yang menunjukkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (usia 15-49 tahun). Sebagai daerah urban, karakteristik fertilitas di Kota Tangerang Selatan yang rendah disebabkan karena faktor pendidikan, ekonomi dan akses KB yang baik. Analisa penduduk berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan di Kota Tangerang Selatan meningkat dibandingkan jumlah penduduk laik-laki. Kondisi menggambarkan pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kota Tangerang Selatan.

b. Struktur Kependudukan berdasarkan Proyeksi Penduduk

Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan. Perencanaan pembangunan perlu ditunjang dengan informasi terkait besaran dan komposisi kependudukan yang lengkap dan berkesinambungan. Hasil sensus, survei, dan data administratif menyediakan informasi penduduk untuk kondisi saat pendataan tersebut dilakukan. Namun, penyusunan perencanaan dan kebijakan sesuai dinamika waktu di masa mendatang membutuhkan informasi proyeksi penduduk di masa depan. Proyeksi penduduk akan membantu memonitor dan mengevaluasi program, mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi, serta merancang kebijakan.

Proyeksi penduduk merupakan penghitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Pembentukan asumsi untuk ketiga komponen tersebut dilakukan menggunakan data-data yang menggambarkan tren di masa lampau, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan hubungannya satu sama lain. Penerapan asumsi yang digunakan akan menentukan hasil proyeksi jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan.

Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Kementerian Kesehatan, serta para pakar kependudukan bekerja sama menyusun asumsi dalam perhitungan proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk dibuat dengan metode komponen kohort berdasarkan asumsi kecenderungan fertilitas, mortalitas, serta migrasi (migrasi internasional dan migrasi internal antarprovinsi) yang paling mungkin terjadi selama periode 30 (tiga puluh) tahun yang akan datang. Proyeksi penduduk Indonesia dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada tahap pertama, dilakukan penghitungan proyeksi penduduk nasional. Selanjutnya, dihitung proyeksi penduduk per provinsi. Adapun hasil proyeksi penduduk nasional digunakan sebagai acuan dalam tahapan iterasi proyeksi pada level provinsi. Dengan demikian, total penduduk seluruh provinsi akan konsisten dengan proyeksi penduduk nasional yang digunakan sebagai acuan dalam tahapan iterasi. Setelah itu, dihitung proyeksi penduduk per kabupaten/kota. Hasil proyeksi penduduk provinsi digunakan sebagai acuan

dalam tahapan iterasi proyeksi pada level kabupaten/kota. Sehingga, total penduduk seluruh kabupaten/kota dalam suatu provinsi akan konsisten dengan proyeksi penduduk provinsi yang digunakan sebagai acuan dalam tahapan iterasi.

Penduduk dasar yang digunakan dalam proyeksi penduduk 2020–2035 adalah penduduk pertengahan tahun hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Mengingat pentingnya akurasi data penduduk dasar, dilakukan assessment terhadap komposisi penduduk dasar menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Dengan mempertimbangkan struktur piramida penduduk hasil SP2020 yang mengindikasikan terjadinya age heaping, maka dilakukan perapihan umur dengan teknik Arriaga agar kesalahan pelaporan umur tidak berlanjut sepanjang periode proyeksi. Hasil proyeksi sangat ditentukan oleh asumsi yang digunakan. Oleh karena itu, penetapan asumsi merupakan kunci penghitungan proyeksi penduduk. Secara umum, asumsi mengenai kecenderungan angka kelahiran, angka kematian, serta perpindahan penduduk ditentukan oleh kecenderungan yang terjadi di masa lalu. Namun, informasi ini belum dapat ditentukan sebagai dasar proyeksi, masih diperlukan pandangan pakar demografi dan pemangku kebijakan sehubungan dengan kebijakan di masa datang. Masukan dari pertemuan tersebut menjadi pedoman tim teknis BPS dalam menentukan asumsi yang dipakai dalam penghitungan proyeksi. Selanjutnya, tim teknis BPS melakukan penghitungan proyeksi penduduk dengan menggunakan program Rural Urban Projection (RUP). Angka fertilitas, mortalitas, dan migrasi di masa mendatang tidak dapat diprediksi, maka diperlukan beberapa kemungkinan perubahan yang akan terjadi pada setiap asumsi.

Proyeksi penduduk yang disajikan dalam bab ini bukanlah merupakan suatu prediksi atau perkiraan. Proyeksi di dalam bab ini adalah penilaian tentang apa yang akan terjadi pada penduduk Kota Tangerang Selatan jika diasumsikan perubahan komponen penduduk seperti kelahiran, kematian, dan migrasi diproyeksikan selama dua puluh tahun ke depan dari tahun 2025 hingga 2045. Data proyeksi penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2030 disajikan dalam Tabel 2.62, dimana terlihat bahwa pada tahun 2029 jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan dinilai akan mencapai 1.415.180 jiwa dengan kepadatan 8.584 jiwa/km^2 dan tahun 2030 akan mencapai 1.419.140 jiwa dengan kepadatan 8.608 jiwa/km^2.

Tabel 2.62. Proyeksi Struktur Kependudukan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2030

Umur	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
0–4	47.220	45.360	46.750	44.900	46.160	44.330	45.500	43.690	44.790	43.010	44.140	42.370
5–9	52.210	50.290	50.540	48.660	49.140	47.270	48.000	46.170	47.130	45.400	46.340	44.870
10–14	56.130	53.930	55.290	53.470	54.300	52.770	53.160	51.820	51.870	50.590	50.640	49.160
15–19	56.300	52.770	56.220	52.900	56.070	53.050	55.820	53.180	55.470	53.220	54.930	53.090
20–24	53.590	51.060	53.360	50.580	53.360	50.390	53.530	50.450	53.810	50.720	54.060	51.050
25–29	52.930	52.120	52.170	50.910	51.520	49.830	50.990	48.900	50.620	48.200	50.510	47.830
30–34	53.220	54.110	52.520	53.110	51.810	52.090	51.120	51.070	50.490	50.030	49.990	49.120
35–39	52.660	55.770	52.050	55.050	51.630	54.350	51.340	53.660	51.030	52.980	50.690	52.250
40–44	54.900	56.890	54.190	56.620	53.280	56.170	52.280	55.590	51.400	54.980	50.720	54.370
45–49	52.640	54.120	52.960	54.570	53.220	55.030	53.370	55.460	53.310	55.750	53.020	55.830
50–54	47.820	50.040	48.580	51.000	49.220	51.680	49.780	52.170	50.280	52.610	50.710	53.060
55–59	40.370	41.420	41.460	42.780	42.570	44.350	43.650	46.000	44.660	47.540	45.570	48.820
60–64	32.390	35.030	33.570	36.290	34.640	37.260	35.630	38.080	36.610	38.960	37.640	40.050
65–69	22.520	24.010	23.700	25.740	25.030	27.660	26.440	29.640	27.800	31.480	29.040	33.040
70–74	15.130	15.770	16.070	17.050	16.760	18.140	17.330	19.170	17.980	20.300	18.810	21.650
75+	8.650	10.810	9.830	12.170	11.260	13.830	12.830	15.720	14.430	17.730	15.970	19.800
Jumlah	**698.680**	**703.500**	**699.260**	**705.800**	**699.970**	**708.200**	**700.770**	**710.770**	**701.680**	**713.500**	**702.780**	**716.360**
Jumlah Total	**1.402.180**		**1.405.060**		**1.408.170**		**1.411.540**		**1.415.180**		**1.419.140**	
Kepadatan (jiwa/km²)	**8.505**		**8.523**		**8.542**		**8.562**		**8.584**		**8.608**	

Sumber:Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi Banten

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu wilayah urban yang berkembang pesat di Provinsi Banten, dengan dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh kedekatannya dengan Provinsi DKI Jakarta. Untuk memahami tingkat kesejahteraan masyarakatnya, dapat dianalisis melalui beberapa indikator ekonomi utama, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB per Kapita, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Indeks Gini, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan digambarkan berdasarkan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu tanpa memperhatikan kepemilikan faktor produksi yang digunakan (residen-non residen). Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar. Perkembangan PDRB ADHK Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.63, dimana terlihat bahwa Perekonomian Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 tumbuh melambat dibandingkan dengan tahun 2023. Laju pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Selatan tahun 2024 sebesar 5,02%, sedangkan tahun 2023 sebesar 5,36%.

Tabel 2.63. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (persen), Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,33	0,73	1,78	0,58	-3,88
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C. Industri Pengolahan	-8,72	1,67	8,35	3,66	7,96
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-7,05	4,27	10,45	2,98	6,93
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,20	5,85	3,26	5,59	3,93
F. Konstruksi	-5,03	11,79	6,07	1,99	3,97
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,76	2,573	7,25	3,84	3,92
H. Transportasi dan Pergudangan	-8,06	10,64	6,23	5,86	5,44
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,75	4,87	8,78	9,55	9,04
J. Informasi dan Komunikasi	8,78	6,69	6,65	8,59	5,98
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,55	4,89	0,22	2,90	0,68
L. Real Estate	1,78	3,15	6,01	3,99	2,20
M,N. Jasa Perusahaan	-5,92	-1,06	7,03	8,82	5,58
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,71	-5,09	7,35	5,46	21,93
P. Jasa Pendidikan	0,87	-0,97	-1,19	6,71	5,48
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,95	10,91	0,95	7,53	8,49
R,S,T,U. Jasa lainnya	-6,87	1,49	5,74	10,76	5,48
Pertumbuhan PDRB	-1,01	4,81	5,82	5,36	5,02

*Catatan / Note: * Angka sementara ** Angka sangat sementara*
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Hampir semua lapangan usaha pada tahun 2024 mencatat pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mencatat pertumbuhan tertinggi di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan sosial wajib sebesar 21,93%. Lapangan usaha ini merupakan satu-satunya yang tumbuh hingga dua digit. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh tinggi diantaranya adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,04% dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial sebesar 8,49%. Sementara itu, Konstruksi yang merupakan penyumbang terbesar bagi perekonomian Kota Tangerang Selatan, mencatat pertumbuhan sebesar 3,97%. Sementara itu, hanya ada satu lapangan usaha yang mengalami kontraksi di tahun 2024 yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang terkontraksi sebesar 3,88%.

Lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan peraturannya. Selama tahun 2020- 2024 peranannya relatif stabil, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 1,42% (2020), 1,30% (2021), 1,33% (2022), 1,34 persen (2023), dan 1,58% (2024). Pertumbuhan signifikan lapangan usaha ini pada tahun 2024 disebabkan karena penyelenggaraan Pilkada dan Pilpres secara serentak. Peningkatan aktivitas Pemerintahan dan anggaran penyelenggaraan Pilkada dan Pilpres mendorong pertumbuhannya. Selain itu, umumnya saat momen politik tersebut, Pemerintah baik Pusat dan Daerah cenderung meningkatkan belanja pada program jaminan sosial sebagai stimulus untuk menjaga stabilitas sosial. Adanya dana kampanye juga turut mendorong pertumbuhan sektor Lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan sosial wajib. Walaupun pertumbuhannya sangat tinggi pada tahun 2024, namun pertumbuhan sektor lapangan usaha ini sifatnya sementara/temporary dan hanya terjadi menjelang Pilkada/Pilpres saja.

Pada tahun 2024, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan sebesar 3,04%, dimana sebesar 3,01% merupakan kontribusi dari sub lapangan usaha Penyediaan Makan Minum (99,13% terhadap total lapangan usaha) dan sebesar 0,03% disumbangkan oleh sub lapangan usaha Penyediaan Akomodasi (0,87% terhadap total lapangan usaha). Masing-masing sub kategori pada lapangan usaha ini mengalami kenaikan pertumbuhan, yaitu Penyediaan Akomodasi sebesar 0,18% dan Penyediaan Makan Minum sebesar 9,13%. Sektor lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Tangerang Selatan berkaitan erat dengan sektor pariwisata. Upaya promosi pariwisata melalui *city branding* destinasi wisata untuk menarik minat wisatawan datang dan menginap lama di Kota Tangerang Selatan sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan kontribusi sub sektor penyediaan akomodasi.

Jasa kesehatan dan Kegiatan sosial mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2024, kontribusinya terhadap perekonomian Kota Tangerang Selatan sebesar 5,04% dengan laju pertumbuhan sebesar 8,49%. Hal tersebut didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang lengkap di Kota Tangerang Selatan. Pertumbuhan tinggi pada sektor jasa kesehatan di Kota Tangerang Selatan merupakan gambaran potensi yang dapat dikembangkan

untuk mewujudkan *health tourism* menjadi wisata unggulan di Kota Tangerang Selatan.

Selain tiga sektor lapangan usaha dari kelompok lapangan usaha tersier yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 sebagaimana digambarkan di atas, terdapat sektor lapangan usaha sekunder yang mencatatkan pertumbuhan tinggi juga, yaitu sektor Industri Pengolahan. Pada lapangan usaha Industri Pengolahan, sub lapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar adalah Industri Tekstil dan Pakaian Jadi yaitu sebesar 59,44% pada tahun 2024. Selanjutnya diikuti oleh Industri Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media sebesar 24,60%. Dari sisi pertumbuhan pada tahun 2024, sub lapangan usaha Industri Pengolahan yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah Industri Tekstil dan Pakaian Jadi yaitu sebesar 10,35%, diikuti Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik yaitu sebesar 9,53%, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik sebesar 9,38%, dan Industri Makanan dan Minuman sebesar 6,85%. Pertumbuhan sub sektor Industri Makanan dan Minuman yang menempati posisi keempat tertinggi menggambarkan potensi kontribusi sub sektor ini, apalagi jika dikaitkan dengan pertumbuhan sektor lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencatatkan pertumbuhan kedua tertinggi pada tahun 2024.

Jika disandingkan dalam konstelasi regional Provinsi Banten, pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Kota Tangerang. Pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan berada sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional. Gambaran tersebut disajikan dalamTabel 2.64.

Tabel 2.64. Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan dalam Konstelasi Regional dan Nasional Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023*	2024**
Kab Pandeglang	-0,67	3,1	3,47	2,53	2,75
Kab Lebak	-0,91	3,18	3,80	2,80	2,95
Kab Tangerang	-3,76	4,7	5,47	5,18	5,00
Kab Serang	-2,73	3,74	5,04	4,80	4,78
Kota Tangerang	-7,36	3,9	5,98	5,57	5,04
Kota Cilegon	-1,23	5,24	4,51	4,82	4,84
Kota Serang	-1,29	3,88	4,71	4,74	4,71
Kota Tangerang Selatan	**-1,01**	**4,81**	**5,82**	**5,36**	**5,02**
Provinsi Banten	-3,38	4,44	5,03	4,81	4,79
Nasional	-2,07	3,69	5,31	5,05	5,03

*Catatan / Note: * Angka sementara ** Angka sangat sementara*
Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

Selain berdasarkan pertumbuhan, perekonomian Kota Tangerang Selatan dapat tergambar dari struktur ekonominya, yaitu dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku dari kelompok lapangan usaha yang terdiri dari kelompok lapangan usaha primer, sekunder dan kelompok lapangan usaha tersier. Kelompok lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian. Kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; Konstruksi. Kemudian kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;

Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya. Selama periode 2020-2024, struktur ekonomi masyarakat Tangerang Selatan telah bergeser dari kelompok lapangan usaha sekunder ke kelompok lapangan usaha tersier yang terlihat dari besarnya kenaikan/penurunan peranan masing-masing kelompok lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2024, kelompok lapangan usaha tersier memberikan sumbangan sebesar 74,60% yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 76,11%. Kelompok lapangan usaha primer tahun 2024 memberikan sumbangan sebesar 0,19%. Kelompok lapangan usaha primer mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 0,22%. Sementara lapangan usaha sekunder sebesar 25,21% mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 yang sebesar 23,66%. Apabila dilihat menurut lapangan usahanya, ada tiga lapangan usaha utama yang menopang perekonomian Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024, yaitu lapangan usaha Konstruksi, Real Estate dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor. Lapangan usaha Konstruksi memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 16,94%, kemudian disusul lapangan usaha Real Estate sebesar 16,93% dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor sebesar 16,68%. Selanjutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi menyumbang 10,95% dan lapangan usaha Jasa Pendidikan memberikan sumbangan sebesar 8,31% dan Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 8,09%. Secara keseluruhan, struktur ekonomi Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 2.65.

Tabel 2.65. Distribusi Persentase PDRB Kota Tangerang Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,22	0,21	0,21	0,20	0,19
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	7,84	7,58	7,96	7,82	8,09
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F. Konstruksi	15,64	17,29	17,82	17,39	16,94
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,64	16,21	16,73	16,70	16,68
H. Transportasi dan Pergudangan	3,20	3,41	3,50	3,69	3,72
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,87	2,84	2,87	2,93	3,04
J. Informasi dan Komunikasi	11,14	11,13	10,93	11,01	10,95
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,48	1,47	1,42	1,40	1.34
L. Real Estate	18,55	18,12	17,68	17,42	16,93
M,N. Jasa Perusahaan	3,76	3,54	3,57	3,72	3,71
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,42	1,30	1,33	1,34	1,58
P. Jasa Pendidikan	9,33	8,71	7,95	8,01	8,31
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,69	4,98	4,79	4,89	5,04
R,S,T,U. Jasa lainnya	3,13	3,02	3,07	3,30	3,29
Total %	100	100	100	100	100

*Catatan / Note: * Angka sementara ** Angka sangat sementara*
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2025

Berdasarkan gambaran pertumbuhan dan peranan sektor lapangan usaha, terdapat potensi-potensi lapangan usaha yang dapat dikembangkan untuk diversifikasi dari sektor lapangan usaha Konstruksi yang mulai mengalami penurunan karena keterbatasan lahan di Kota Tangerang Selatan. Potensi lapangan usaha tersebut adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan. Perlunya riset dan inovasi untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut menjadi produk ekonomi unggulan daerah.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) dan merupakan sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Kota Tangerang Selatan masih berpotensi ditingkatkan produktivitasnya, salah satunya dengan upaya meningkatkan produktivitas UMKM yang terintegrasi dengan rantai perdagangan domestik dan global. Selain itu, sektor Real Estate meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estate serta penyediaan jasa real estat lainnya, yang juga merupakan sektor dominan dalam perekonomian Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020-2024 juga masih dapat dikembangkan pertumbuhannya melalui peningkatan kualitas lingkungan hunian menjadi lebih nyaman dan inklusif sehingga menarik minat orang, terutama generasi muda untuk bertempat tinggal dan berproduktivitas di Kota Tangerang Selatan. Hal ini juga selaras dengan Visi Kota Tangerang Selatan tahun 2045 yang ingin mewujudkan Kota Tangerang Selatan sebagai hunian yang nyaman dan maju.

Tabel 2.66. Potensi Sektor Lapangan Usaha di Kota Tangerang Selatan (berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2023-2024)

Kategori	Uraian Lapangan Usaha	PDRB (miliar rupiah) 2023	PDRB (miliar rupiah) 2024	Pertumbuhan (SEKTOR) (%)	Kontribusi	Rerata kontribusi sektoral terhadap PDRB	Rerata laju pertumbuhan sektoral	Tipologi Klassen	Potensi Sektor
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	118,47	113,87	-3,88%	0,16%	<	<	Sektor Terbelakang	Non-Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0			0,00%	-		-	-
C	Industri Pengolahan	5.221,97	5.637,87	7,96%	7,72%	>	>	Sektor Prima	Non-Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	66,81	71,44	6,93%	0,10%	>	<	Sektor Potensial	Non Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34,86	36,23	3,93%	0,05%	<	<	Sektor Terbelakang	Non Basis
F	Konstruksi	9571,44	9951,07	3,97%	13,62%	<	>	Sektor Berkembang	Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.939	11.369	3,92%	15,56%	<	>	Sektor Berkembang	Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	2.158,91	2.276,28	5,44%	3,12%	>	<	Sektor Potensial	Non-Basis
I	Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2.124,38	2.316,39	9,04%	3,17%	>	<	**Sektor Potensial**	**Basis**
J	Informasi dan Komunikasi	13.074	13.856	5,98%	18,97%	>	>	**Sektor Prima**	**Basis**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	868,18	874,08	0,68%	1,20%	<	<	Sektor Terbelakang	Non Basis
L	Real Estate	13.003	13.288	2,19%	18,19%	<	>	Sektor Berkembang	Basis
M,N	Jasa Perusahaan	2.217,94	2.341,76	5,58%	3,21%	>	<	Sektor Potensial	Basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	656,57	800,55	21,93%	1,10%	>	<	Sektor Potensial	Non Basis
P	Jasa Pendidikan	4.536,15	4.784,64	5,48%	6,55%	>	>	**Sektor Prima**	**Basis**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.106,11	3.369,75	8,49%	4,61%	>	<	**Sektor Potensial**	**Basis**
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.836,82	1.965,97	7,03%	2,69%	>	<	Sektor Potensial	Basis
Jumlah		**69.562,29**	**73.052,84**	**5,02%**	**100%**				
Rerata PDRB		4.090,31	4.565,80						

b. PDRB per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Pada tahun 2024, secara agregat PDRB per kapita Kota Tangerang Selatan mencapai 80,18 juta rupiah atau sebesar US$ 5.059,03. PDRB per kapita tersebut mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,90%, walaupun mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan tahun 2023, yang mencatatkan nilai 75,01 juta rupiah (US$ 4.922,68). Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2024, tren peningkatan ekonomi di Kota Tangerang Selatan masih berlanjut, yang juga menggambarkan pendapatan masyarakat masih berlanjut untuk mengalami peningkatan. Data PDRB per Kapita Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.67.

Tabel 2.67. PDRB Per Kapita Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB per Kapita (juta rupiah)	61,02	64,50	69,73	75,01	80,18
PDRB per Kapita (US $)	4.191,93	4.507,63	4.696,33	4.922,68	5.059,03
Indeks Perkembangan PDRB per Kapita (2010=100)	259,54	274,35	296,59	319,05	341,05
Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen)	23,65	5,71	8,11	7,57	6,90

*Keterangan: *) Hasil perhitungan sementara*
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2025

c. Kemiskinan

Kemiskinan adalah persoalan multi dimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Untuk mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan di suatu wilayah, digunakan beberapa indikator kemiskinan, yaitu garis kemiskinan (GK), persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Keempat indikator ini juga digunakan sebagai alat perencanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Data-data kemiskinan yang digunakan bersumber dari Susenas yang dilaksanakan oleh BPS pada tiap bulan Maret dan September. Dimensi kemiskinan di Kota Tangerang Selatan beserta Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten disajikan dalam Tabel 2.68.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Penghitungan angka kemiskinan menggunakan garis kemiskinan yang diperoleh dari data pengeluaran, sebagai batas antara penduduk miskin dan tidak miskin. Adapun penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, garis kemiskinan di Kota Tangerang Selatan tercatat sebesar Rp. 828.278. Meningkatnya garis kemiskinan ini terjadi seiring dengan naiknya harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, adanya perubahan selera atau gaya hidup, yang mengubah pola konsumsi rumah

tangga juga turut mendorong naiknya garis kemiskinan. Peningkatan garis kemiskinan dapat berarti terjadi peningkatan standar hidup minimum, dimana kriteria untuk "tidak miskin" lebih tinggi dari sebelumnya. Peningkatan garis kemiskinan ini jika tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan masyarakat maka secara statistik akan meningkatkan persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,36%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, yang tercatat sebesar 2,57%. Persentase penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan merupakan yang paling rendah di Provinsi Banten. Rendahnya tingkat kemiskinan tersebut, bukan berarti masalah kemiskinan tidak lagi menjadi prioritas utama di Kota Tangerang Selatan. Pengentasan kemiskinan tetap menjadi program prioritas di Kota Tangerang Selatan, karena hidup yang layak menjadi hak semua orang

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index, P1) mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan untuk mengetahui banyak penduduk miskin yang pendapatannya jauh di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 maka diperlukan upaya dan strategi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin yang lebih efektif untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Sementara itu tingkat keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran tingkat ketimpangan ekstrem di antara penduduk miskin (kelompok termiskin sangat tertinggal). Semakin tinggi nilai P2, semakin tinggi pula ketimpangan kondisi di antara sesama penduduk miskin, yang menunjukkan perlunya upaya lebih dalam pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran. Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (P2) di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,27 dan 0,05, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi penduduk miskin secara rata-rata mengalami perbaikan, dan memberikan sinyal positif dalam upaya pengurangan kemiskinan yang lebih merata. Tingkat kedalaman dan keparahan di Kota Tangerang Selatan juga merupakan yang paling rendah di Provinsi Banten.

Tabel 2.68. Kondisi Kemiskinan pada Kabupatan/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten (rupiah/kapita/bulan)					Persentase Penduduk Miskin - Maret					Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kab Pandeglang	361.713,00	390.754,00	416.248,00	455.297,00	479.886,00	9,92	10,72	9,32	9,27	9,18	1,00	1,49	1,21	1,56	1,52	0,16	0,33	0,33	0,38	0,35
Kab Lebak	334.509,00	358.479,00	380.681,00	419.066,00	440.705,00	9,24	10,29	8,91	8,68	8,44	1,14	1,66	1,35	1,73	1,02	0,24	0,40	0,33	0,51	0,23
Kab Tangerang	520.742,00	545.065,00	576.122,00	604.362,00	632.941,00	6,23	7,12	6,92	6,93	6,55	0,95	1,21	1,06	1,31	1,20	0,22	0,29	0,26	0,39	0,34
Kab Serang	341.074,00	362.102,00	385.864,00	425.751,00	449.291,00	4,94	5,49	4,96	4,85	4,51	0,40	0,61	0,56	0,67	0,79	0,05	0,12	0,11	0,15	0,20
Kota Tangerang	632.835,00	655.061,00	695.225,00	746.468,00	785.113,00	5,22	5,93	5,77	5,89	5,43	0,74	1,08	0,72	0,88	0,94	0,15	0,27	0,13	0,19	0,23
Kota Cilegon	504.571,00	540.032,00	572.780,00	632.703,00	663.533,00	3,69	4,24	3,64	3,98	3,75	0,39	0,50	0,42	0,48	0,44	0,06	0,11	0,09	0,10	0,07
Kota Serang	411.595,00	431.210,00	460.613,00	511.575,00	540.786,00	6,06	6,79	5,94	6,20	5,65	0,57	0,92	0,77	0,75	0,75	0,10	0,22	0,17	0,16	0,16
Kota Tangerang Selatan	643.083,00	665.610,00	712.717,00	782.543,00	828.278,00	2,29	2,57	2,50	2,57	2,36	0,31	0,34	0,32	0,45	0,27	0,08	0,07	0,07	0,12	0,05
Provinsi Banten	508.091,00	530.363,00	570.368,00	618.721,00	654.213,00	5,92	6,66	6,16	6,17	5,84	1,00	1,09	1,03	1,20	0,97	0,23	0,26	0,27	0,36	0,25

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT memberikan gambaran tentang seberapa efisien pasar tenaga kerja suatu negara dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia. Berdasarkan data dalam Tabel 2.69, terlihat bahwa pada tahun 2020-2021 tingkat pengangguran di Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan secara signifikan yang disebabkan oleh pengaruh COVID-19. Hal ini juga tidak hanya terjadi di Kota Tangerang Selatan, namun juga kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Pada tahun 2022, seiring dengan dimulainya pemulihan aktivitas ekonomi, tingkat pengangguran di Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan hingga mencapai 5,09% pada tahun 2024. Tingkat pengangguran di Kota Tangerang Selatan tercatat paling rendah di Provinsi Banten.

Tabel 2.69. Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (jiwa)															Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (persen)				
	Bekerja					Pengangguran Terbuka					Jumlah									
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kab Pandeglang	481.092	509.778	500.022	537.026	610.793	48.470	42.523	50.910	53.406	53.743	529.562	552.301	550.932	590.432	664.536	9,15	7,7	9,24	9,05	8,09
Kab Lebak	596.379	585.592	581.080	668.109	738.076	63.527	49.970	54.310	54.745	49.003	659.906	635.562	635.390	722.854	787.079	9,63	7,86	8,55	7,57	6,23
Kab Tangerang	1.596.938	1.675.211	1.822.512	1.573.582	1.589.366	239.788	166.798	155.846	117.435	102.510	1.836.726	1.842.009	1.978.358	1.691.017	1.691.876	13,06	9,06	7,88	6,94	6,06
Kab Serang	614.320	634.825	643.277	717.583	786.378	85.538	75.111	76.368	79.236	79.521	699.858	709.936	719.645	796.819	865.899	12,22	10,58	10,61	9,94	9,18
Kota Tangerang	1.030.255	1.038.183	1.106.436	876.844	931.798	97.344	103.537	85.324	63.530	58.613	1.127.599	1.141.720	1.191.760	940.374	990.411	8,63	9,07	7,16	6,76	5,92
Kota Cilegon	178.699	185.593	211.688	192.157	191.758	25.976	20.914	18.663	15.010	12.421	204.675	206.507	230.351	207.167	204.179	12,69	10,13	8,1	7,25	6,08
Kota Serang	292.638	290.045	312.198	336.725	348.081	29.846	30.139	27.760	27.125	26.686	322.484	320.184	339.958	363.850	374.767	9,26	9,41	8,17	7,45	7,12
Kota Tangerang Selatan	761.851	779.117	763.405	614.630	601.673	70.572	73.318	53.832	37.945	32.257	832.423	852.435	817.237	652.575	633.930	8,48	8,6	6,59	5,81	5,09
Provinsi Banten	5.552.172	5.698.344	5.940.618	5.516.656	5.797.923	661.061	562.310	523.013	448.432	414.754	6.213.233	6.260.654	6.463.631	5.965.088	6.212.677	10,64	8,98	8,09	7,52	6,68

Sumber : BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

Jika dilihat dari partisipasi penduduk usia produktif yang terlibat dalam pasar kerja tahun 2023, walaupun pada tahun 2024 tingkat kesempatan kerja di Kota Tangerang Selatan lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2023. Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2024 di Kota Tangerang Selatan tercatat paling rendah di Provinsi Banten. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor seperti pendidikan panjang dimana penduduk usia produktif memilih melanjutkan pendidikan dibandingkan bekerja dan adanya pengangguran tersembunyi. Hal tersebut dapat terlihat dari peningkatan jumlah bukan angkatan kerja kategori “sekolah” dan “lainnya” yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.70. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (persen)					Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (persen)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kab Pandeglang	60,28	62,32	61,66	60,33	66,92	90,85	92,30	90,76	90,95	91,91
Kab Lebak	69,97	66,75	66,17	67,90	72,82	90,37	92,14	91,45	92,43	93,77
Kab Tangerang	65,43	63,94	67,05	66,87	65,88	86,94	90,94	92,12	93,06	93,94
Kab Serang	63,46	63,86	64,25	63,22	67,77	87,78	89,42	89,39	90,06	90,82
Kota Tangerang	64,97	64,52	66,08	63,39	66,02	91,37	90,93	92,84	93,24	94,08
Kota Cilegon	61,83	61,37	67,39	62,70	60,83	87,31	89,87	91,90	92,75	93,92
Kota Serang	63,79	62,16	64,80	68,44	69,10	90,74	90,59	91,83	92,55	92,88
Kota Tangerang Selatan	62,49	62,56	58,67	60,50	58,13	91,52	91,40	93,41	94,19	94,91
Provinsi Banten	64,48	63,79	64,72	64,44	66,17	89,36	91,02	91,91	92,48	93,32

Sumber : BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

Tabel 2.71. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023-2024

Kegiatan Utama	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Jenis Kelamin			Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Angkatan Kerja	**423.384**	**229.191**	**652.575**	**413.797**	**220.133**	**633.930**
1. Bekerja	402.732	211.898	614.630	394.088	207.585	601.673
2. Pengangguran Terbuka	20.652	17.293	37.945	19.709	12.548	32.257
Bukan Angkatan Kerja	**111.476**	**314.563**	**426.039**	**126.524**	**330.029**	**456.553**
1. Sekolah	48.762	53.416	102.178	55.716	59.870	115.586
2. Mengurus Rumah Tangga	22.526	247.228	269.754	19.620	261.373	280.993
3. Lainnya	40.188	13.919	54.107	51.188	8.786	59.974

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2025

Jika diamati berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh angkatan kerja di Kota Tangerang Selatan, terlihat bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan tinggi dibandingkan tahun 2023.

Tabel 2.72. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023-2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tahun 2023				Tahun 2024			
	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah		Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
< Sekolah Dasar	93.036	1.548	94.584	98,36	60.072	-	60.072	100
SMP/ Sederajat	75.522	3.698	79.220	95,33	56.656	2.424	59.080	95,9
SMA/ Sederajat	266.556	22.416	288.972	92,24	288.534	20.865	309.399	93,26
Perguruan Tinggi	179.516	10.283	189.799	94,58	196.411	8.968	205.379	95,63

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2025

e. Rasio Gini

Rasio Gini (Gini Ratio) adalah indikator statistik yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Nilainya berkisar antara 0 (kesetaraan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Sejak tahun 2020 hingga 2024, tingkat ketimpangan di Kota Tangerang Selatan dalam kategori sedang, dimana Indeks Gini berada pada kisaran nilai antara 0,3-0,4. Pada tahun 2024, Kota Tangerang Selatan menjadi kota dengan ketimpangan tertinggi, yaitu mencapai 0,395. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam kategori ketimpangan sedang, Kota Tangerang Selatan tetap perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi melalui kebijakan yang lebih merata, tepat sasaran dan inklusif.

Tabel 2.73. Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	Rasio Gini				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Pandeglang	0,305	0,266	0,302	0,243	0,245
Kab. Lebak	0,314	0,332	0,312	0,271	0,257
Kab. Tangerang	0,285	0,294	0,282	0,286	0,269
Kab. Serang	0,303	0,264	0,284	0,274	0,267
Kota Tangerang	0,339	0,343	0,383	0,379	0,325
Kota Cilegon	0,373	0,363	0,318	0,362	0,360
Kota Serang	0,352	0,34	0,354	0,306	0,324
Kota Tangerang Selatan	**0,368**	**0,37**	**0,359**	**0,359**	**0,395**
Provinsi Banten	0,363	0,365	0,363	0,368	0,353

Sumber: BPS Provinsi Banten, tahun 2025

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu: (1) umur panjang dan hidup sehat, (2) pengetahuan, dan (3) standar hidup layak. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, IPM Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan hingga mencapai nilai >80 atau kategori Sangat Tinggi,. IPM Kota Tangerang Selatan tercatat paling tinggi di Provinsi Banten.

Tabel 2.74. IPM menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kab Pandeglang	68,86	69,02	69,7	70,28	70,88

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kab Lebak	66,39	66,5	67,19	67,68	68,33
Kab Tangerang	74,09	74,47	75,15	75,56	76,19
Kab Serang	70,93	71,05	71,99	72,63	73,28
Kota Tangerang	79,83	80,08	80,44	80,98	81,53
Kota Cilegon	76,8	77,11	77,68	78,24	78,83
Kota Serang	75,25	75,53	76,01	76,43	76,9
Kota Tangerang Selatan	**82,73**	**82,98**	**83,28**	**83,57**	**84,16**
Provinsi Banten	74,41	74,68	75,25	75,77	76,35

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.74 terlihat bahwa IPM di Kota Tangerang Selatan paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten sejak tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2024, nilai IPM Kota Tangerang Selatan mencapai 84,16. Sementara nilai IPM untuk kabupaten lainnya berkisar antara 67 hingga 80. Tingginya nilai IPM menunjukkan bahwa semakin tingginya kualitas hidup manusia di Kota Tangerang Selatan. Dengan melihat indikator-indikator pembentuk IPM, terlihat bahwa semua indikator penyusun IPM di Kota Tangerang Selatan juga paling tinggi di Provinsi Banten.

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir atau dari usia tertentu, dengan asumsi pola kematian pada saat perhitungan tetap berlaku sepanjang hidupnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, UHH Kota Tangerang Selatan mencapai nilai 75,80 tahun yang tergolong pada usia harapan hidup yang tinggi. UHH masyarakat Kota Tangerang Selatan cenderung meningkat dari waktu ke waktu selama kurun tahun 2020-2024 dan merupakan UHH paling tinggi di Provinsi Banten sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.75. Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Hasil Long Form SP2020 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kab Pandeglang	73,10	73,22	73,63	74,01	74,22
Kab Lebak	72,93	73,04	73,43	73,80	73,99
Kab Tangerang	74,56	74,59	74,91	75,18	75,34
Kab Serang	73,70	73,81	74,22	74,62	74,91
Kota Tangerang	74,78	74,78	75,02	75,30	75,50
Kota Cilegon	74,23	74,25	74,51	74,81	75,03
Kota Serang	74,43	74,54	74,84	75,13	75,31
Kota Tangerang Selatan	**75,16**	**75,16**	**75,40**	**75,64**	**75,80**
Provinsi Banten	74,12	74,17	74,46	74,77	74,97

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

b. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah indikator komposit yang mengukur tingkat kesehatan dan kesejahteraan keluarga secara holistik, mencakup

aspek fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indeks ini digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi program seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan deteksi dini masalah keluarga berisiko (contoh: berisiko stunting atau penyakit menular). IKS menggambarkan kemampuan keluarga dalam:

1. Memenuhi kebutuhan kesehatan dasar (gizi, sanitasi, akses layanan kesehatan);
2. Mencegah risiko penyakit (imunisasi, pola hidup bersih, deteksi dini);
3. Membangun ketahanan kesehatan (penanganan darurat, adaptasi pada lingkungan sehat),dan
4. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

IKS Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2023 menggambarkan status keluarga sehat di Kota Tangerang Selatan dalam kategori Pra Sehat, dimana dimensi keluarga sehat terpenuhi sebagian. Adapun dimensi keluarga sehat pada tahun 2023 yang memerlukan intervensi segera karena ketercapaiannya di bawah 76%, yaitu keikutsertaan keluarga secara aktif dalam program keluarga berencana, pengobatan sesuai standar bagi pasien tuberkulosis paru, pengobatan teratur bagi penderita hipertensi, pengobatan bagi penderita gangguan jiwa dan kebiasaan tidak merokok.

Tabel 2.76. Indeks Keluarga Sehat di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023

Indeks	2020	2021	2022	2023
Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,19	0,26	0,35	0,58

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

c. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan kondisi anak di bawah lima tahun yang tidak dapat berkembang karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Penyebab dari stunting dapat dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Pemberian kolostrum dan ASI eksklusif, pola konsumsi anak, dan penyakit infeksi merupakan faktor yang mempengaruhi status gizi anak dan berdampak langsung pada stunting. Sementara itu faktor tidak langsung berupa akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan. Angka stunting di Kota Tangerang Selatan selama tahun 2022-2024 mengalami peningkatan. Walaupun begitu, capaian angka stunting di Kota Tangerang Selatan telah melampaui target angka stunting yang diamanatkan Nasional, yaitu sebesar 14% pada tahun 2024.

Tabel 2.77. Kondisi stunting di Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting (%)	19	9	9,2	10,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

d. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan risiko kematian perempuan yang terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas (42 hari setelah melahirkan). Indikator ini digunakan untuk menilai kualitas sistem kesehatan, akses layanan maternal, dan tingkat kesejahteraan perempuan di suatu wilayah. AKI di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021-2024 mengalami tren menurun sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.78. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu (AKI) per per 100.000 Kelahiran Hidup	31,60	27,83	28,96	28,72

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

e. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (TB) mengacu pada persentase jumlah kasus TB yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dari total estimasi kasus TB yang ada di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Penemuan kasus TB yang optimal sangat penting untuk memastikan bahwa individu yang terinfeksi mendapatkan diagnosis yang tepat dan cepat, sehingga pengobatan dapat segera dilakukan. Secara garis besar, data menunjukkan bahwa cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kota Tangerang Selatan mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2023. Terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2021, namun cakupan tersebut kembali menurun di tahun-tahun berikutnya sebelum naik lagi pada 2023. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan program, yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan, sumber daya, dan dampak pandemi. Sementara itu, angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis untuk kasus yang sensitif terhadap obat secara umum tergolong tinggi, dengan capaian di atas 88 persen selama periode 2020–2022. Namun, tidak tersedia data untuk tahun 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa program pengobatan cukup efektif, meskipun tetap diperlukan upaya pemantauan dan evaluasi rutin untuk menjaga dan meningkatkan hasil pengobatan di tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.79. Cakupan penemuan dan pengobatan Tahun 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	53	63	70	96	100
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis untuk Sensitif Obat (%)	92	83	82	85	81
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis untuk Resisten Obat (%)	N/A	N/A	N/A	56,60	74

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

f. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menggambarkan proporsi penduduk suatu wilayah yang telah terdaftar sebagai peserta program JKN, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kota Tangerang Selatan hingga tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.80, yang menggambarkan akses universal terhadap layanan kesehatan di Kota Tangerang Selatan berkategori tinggi dan melebihi capaian nasional. Perluasan cakupan kepesertaan JKN merupakan upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk semua masyarakat Kota Tangerang Selatan.

Tabel 2.80. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	80,50	85,06	98,53	98,91	98,58

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah indikator yang menggambarkan tingkat pendidikan formal yang berhasil diselesaikan oleh penduduk suatu wilayah dalam satuan tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020-2024 berada pada kisaran 11,80 tahun hingga 11,86 tahun dan mencatatkan sebagai yang tertinggi di Provinsi Banten, RLS Kota Tangerang Selatan menggambarkan sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama, serta banyak yang melanjutkan hingga menengah atas.

Tabel 2.81. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab Pandeglang	7,1	7,11	7,13	7,15	7,16
Kab Lebak	6,4	6,41	6,59	6,6	6,61
Kab Tangerang	8,39	8,61	8,92	8,93	9,06
Kab Serang	7,5	7,51	7,78	7,79	7,88
Kota Tangerang	10,69	10,83	10,84	10,91	11,14
Kota Cilegon	9,87	10,08	10,34	10,38	10,39
Kota Serang	8,76	8,89	8,9	8,91	8,93
Kota Tangerang Selatan	**11,81**	**11,82**	**11,84**	**11,85**	**11,86**
Provinsi Banten	8,89	8,93	9,13	9,15	9,23

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

Tingginya tingkat rata-rata lama sekolah di Kota Tangerang Selatan didukung dengan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Tangerang Selatan yang mencapai cakupan di atas 90%, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.82. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dihitung berdasarkan jumlah anak pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk anak pada kelompok umur tersebut. Berdasarkan data dalam Tabel 2.82, terlihat bahwa tingkat partisipasi sekolah di Kota Tangerang Selatan masih memerlukan upaya-upaya peningkatan terutama pada partisipasi sekolah anak usia dini, kesetaraan dan disabilitas.

Tabel 2.82. Angka Partisipasi Sekolah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2025

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
APS Usia 5-6 Tahun (%)	N/A	60,24	65,48	56,75
APS Usia 7-12 Tahun (%)	99,50	99,72	99,63	99,22
APS Usia 13-15 Tahun (%)	98,27	98,26	98,59	97,47
APS Usia 7-15 Tahun (%)	N/A	99,31	98,68	98,67
APS Disabilitas Usia 4-18 Tahun	N/A	34,62	56,47	56,47

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
APS Disabilitas Usia 7-12 Tahun (%)	95,79	33,89	33,89	33,89
APS Disabilitas Usia 13-15 Tahun (%)	69,06	29,99	43,39	43,39
APS Usia 7-18 Tahun Kesetaraan	N/A	17,44	25,57	24,34

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud, Tahun 2022-2025

b. Harapan Lama Sekolah (RLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat diselesaikan oleh seorang anak selama hidupnya, mulai dari usia sekolah (biasanya 7 tahun) hingga dewasa. Indikator ini digunakan untuk memprediksi potensi akumulasi pendidikan suatu generasi dan menjadi tolok ukur kualitas sistem pendidikan suatu wilayah. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, HLS Kota Tangerang Selatan yang berada pada kisaran 14,42 tahun hingga 14,70 tahun mengindikasikan bahwa anak-anak di Kota Tangerang Selatan yang saat ini berusia tujuh tahun memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang akademi atau perguruan tinggi tingkat tiga (Diploma III). Nilai HLS Kota Tangerang Selatan tahun 2024 menjadi nilai HLS tertinggi di Provinsi Banten.

Tabel 2.83. Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab Pandeglang	13,47	13,49	13,72	13,73	13,74
Kab Lebak	11,97	11,98	12,09	12,1	12,11
Kab Tangerang	12,82	12,84	12,85	12,87	12,88
Kab Serang	12,57	12,58	12,78	12,86	12,87
Kota Tangerang	13,85	13,87	13,88	13,89	13,90
Kota Cilegon	13,16	13,18	13,2	13,21	13,23
Kota Serang	12,78	12,79	12,81	12,82	12,83
Kota Tangerang Selatan	**14,47**	**14,66**	**14,67**	**14,68**	**14,70**
Provinsi Banten	12,89	13,02	13,05	13,09	13,10

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

c. Kualitas Pembelajaran

Untuk mencapai Indonesia Emas Tahun 2045, prioritas pembangunan bidang pendidikan tidak hanya difokuskan pada peningkatan partisipasi sekolah, namun juga difokuskan pada kualitas pembayaran yang diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang unggul. Salah satu ukuran kualitas pembelajaran yang diamanatkan dalam pembangunan Nasional yaitu kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Kemampuan literasi dan numerasi adalah kompetensi penting yang harus dimiliki peserta didik di era globalisasi ini.

Kemampuan literasi merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sementara itu, kemampuan numerasi merupakan kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Kemampuan literasi dan numerasi pendidikan dasar di Kota Tangerang Selatan dihitung berdasarkan nilai rerata peserta didik berdasarkan asesmen Nasional, dengan data disajikan Tabel 2.84. Kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2022-2024 mengalami peningkatan yang menggambarkan peningkatan kualitas pembelajaran jenjang pendidikan dasar di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 2.84. Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2022-2024

Jenjang	Literasi	Numerasi
Sekolah Dasar (SD)		
Tahun 2022	57,46	40,41
Tahun 2023	59,90	44,63
Tahun 2024	66,89	52,27
Tahun 2025	67,17	57,29
Sekolah Menengah Pertama (SMP)		
Tahun 2022	69,26	56,45
Tahun 2023	72,73	59,47
Tahun 2024	77,93	67,79
Tahun 2025	81,28	69,60

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud, Tahun 2022-2025

Untuk mengukur kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tangerang Selatan, digunakan indikator Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B dan Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.85. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mendorong pemerataan kualitas layanan untuk jenjang PAUD cukup baik. Selain itu, rata-rata mutu kinerja dan kompetensi pendidik di satuan PAUD formal sangat baik, karena proporsi pendidik dengan kualifikasi minimal S1/D4 relatif tinggi.

Tabel 2.85. Kualitas Satuan PAUD dan Guru PAUD di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2024

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	86,44	88,33	80,32	77,56
Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	N/A	68,83	75,14	69,89

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud, Tahun 2022-2025

d. Dukungan Lingkungan Sekolah

Satuan pendidikan berperan sebagai wadah pembentuk karakter bangsa yang mengedepankan nilai-nilai inklusivitas, kebhinekaan, dan keamanan. Ketiga aspek ini menjadi fondasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, adil, dan menghargai perbedaan, sekaligus mencerminkan kekayaan budaya lokal.

Satuan pendidikan harus dapat menjamin akses dan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk penyandang disabilitas, anak dari keluarga kurang mampu, atau kelompok marginal. Prinsip inklusivitas dapat diwujudkan melalui:

a. Pembelajaran yang Ramah: Modifikasi kurikulum, metode pengajaran fleksibel, dan sarana prasarana aksesibel (contoh: jalur kursi roda, buku braille);
b. Dukungan Psikososial: Guru dan teman sebaya memberikan pendampingan untuk mencegah diskriminasi; serta
c. Kolaborasi dengan Komunitas: Kemitraan dengan dinas sosial atau LSM lokal untuk program beasiswa dan pelatihan inklusi.

Selain iklim inklusivitas, satuan pendidikan juga harus mampu menciptakan rasa aman dan kenyamanan bagi peserta didik dari hal perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan. Satuan pendidikan juga harus mampu berperan sebagai miniatur kebhinekaan Indonesia dimana dapat menjamin peserta didik dari suku, adat, ras dan agama dapat bersekolah secara aman dan nyaman tanpa diskriminasi. Gambaran iklim inklusivitas, iklim kebhinekaan dan iklim keamanan pada satuan pendidikan di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 2.86. Walaupun iklim inklusivitas, iklim kebhinekaan dan iklim keamanan pada satuan pendidikan di Kota Tangerang Selatan termasuk dalam kategori baik, namun masih memerlukan upaya peningkatan.

Tabel 2.86. Iklim Inklusivitas, Iklim Kebhinekaan, dan Iklim Keamanan pada Satuan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2025

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Sekolah Dasar (SD)				
Iklim Inklusivitas	54,71	56,29	56,78	59,39
Iklim Kebinekaan	60,26	70,58	73,65	71,31
Iklim Keamanan	73,4	71,63	73,87	75,01
Sekolah Menengah Pertama (SMP)				
Iklim Inklusivitas	53,25	59,42	58,31	60,53
Iklim Kebinekaan	61,12	69,39	74,20	72,29
Iklim Keamanan	76,82	71,05	71,31	72,93

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud, Tahun 2022-2025

e. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Dengan menggunakan IPLM, Pemerintah Daerah dapat memantau perkembangan literasi masyarakat dari waktu ke waktu, mengidentifikasi area di mana intervensi diperlukan, dan merancang kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan tingkat literasi secara keseluruhan.

IPLM di Kota Tangerang Selatan selama tahun 2023-2024 mengalami tren meningkat. Pembangunan literasi masyarakat termasuk dengan kategori Sedang, yang menggambarkan pembangunan literasi masyarakat sudah memenuhi standar namun berada dalam kategori sedang. Adapun area pembangunan yang perlu diintervensi adalah:

1. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan, merujuk pada partisipasi dan interaksi aktif masyarakat dalam program-program yang diselenggarakan oleh perpustakaan guna mempromosikan dan meningkatkan pemahaman serta apresiasi terhadap peran perpustakaan. Program tersebut meliputi kegiatan perpustakaan yang melibatkan masyarakat baik secara luring maupun daring;
2. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan, merujuk pada pemenuhan jumlah koleksi yang mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat, baik koleksi cetak maupun digital;
3. Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, merujuk pada pemenuhan SDM perpustakaan, yaitu tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan, penyediaan, dan penyelenggaraan layanan di perpustakaan. Mereka adalah individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan khusus dalam bidang perpustakaan dan informasi, serta memiliki peran penting dalam memastikan operasional perpustakaan yang efektif dan berkualitas; dan
4. Pemerataan Layanan Perpustakaan, upaya untuk menyediakan akses yang adil, merata, dan inklusif terhadap layanan perpustakaan bagi seluruh anggota masyarakat yang ditunjukkan oleh jumlah kelembagaan perpustakaan yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 2.87. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023-2024

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		Komponen Pembentuk IPLM Tahun 2024						
Tahun 2023	Tahun 2024	Pemerataan Layanan Perpustakaan	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari	Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	Jumlah Anggota Perpustakaan
54,69	57,93	0,417	0,115	0,408	1,000	1,000	0,116	1,000

Sumber : BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

f. Tingkat Kegemaran Membaca

Membaca merupakan salah satu cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang. Membaca menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan membaca harus ditumbuhkembangkan sejak usia dini dalam satuan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan literasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. Pada Tahun 2024, tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kota Tangerang Selatan tercatat sebesar 87,99 dan merupakan paling tinggi di Provinsi Banten. Rincian nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.88. Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Masyarakat Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Dimensi TGM	NIlai	Interpretasi
Frekuensi Membaca	98,21	Rata-rata frekuensi membaca per minggu yaitu lebih dari 6 kali
Durasi Membaca	82,87	Rata-rata durasi membaca per hari yaitu 2 jam s.d 2 jam 59 menit
Jumlah Bahan Bacaan	83,03	Rata-rata jumlah bahan bacaan yang dibaca per tiga bulan yaitu 5-6 bahan bacaan
Frekuensi Akses Internet	93,11	Rata-rata frekuensi akses internet untuk membaca/mencari informasi per minggu yaitu lebih dari 6 kali
Durasi Akses Internet	82,12	Rata-rata durasi akses internet untuk membaca/mencari informasi per hari yaitu 2 jam s.d 2 jam 59 menit
Nilai TGM	87,99	Tinggi

Sumber : Perpustakaan RI, Tahun 2025

g. Literasi Digital Masyarakat

Kondisi literasi digital masyarakat di Kota Tangerang Selatan digambarkan melalui Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI), yang merupakan instrumen strategis untuk memetakan tingkat adopsi teknologi, literasi digital, pemberdayaan ekonomi digital serta kesenjangan pembangunan digital yang masih ada. IMDI tidak hanya memberikan gambaran kondisi masyarakat digital Indonesia, tetapi juga mendukung upaya akselerasi transformasi digital yang merata dan inklusif. IMDI memiliki peran penting dalam mendukung Visi Indonesia Digital (VID) 2045, yang menjadikan masyarakat digital sebagai pilar utama transformasi menuju Indonesia yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing global. IMDI di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 tercatat sebesar 49,82, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang mencatatkan nilai sebesar 46,93. IMDI Kota Tangerang Selatan merupakan paling tinggi di Provinsi Banten, sebagaimana disajikan dalam.

Tabel 2.89. IMDI Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022-2024.

Kabupaten/Kota	Indeks Masyarakat Digital Indonesia		
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kota Cilegon	48,29	47,83	45,68
Kota Serang	40,70	44,42	45,33
Kota Tangerang	43,15	45,00	43,81
Kota Tangerang Selatan	**48,47**	**46,93**	**49,82**
Kab Lebak	49,54	44,22	48,86
Kab Pandeglang	43,14	40,00	45,17
Kab Serang	35,88	41,17	43,43
Kab Tangerang	46,15	44,87	43,46

Sumber : Badan Pengembangan KOMDIGI, Tahun 2025

Mengacu pada dimensi pembentuk IMDI tahun 2024 di Kota Tangerang Selatan, terdapat 2 (dua) pilar yang masih memerlukan upaya peningkatan yaitu:

1. Pilar Pemberdayaan, merujuk pada kondisi yang mencerminkan kemampuan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka (pemberdayaan ekonomi) atau aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan. Pilar ini merepresentasikan operasionalisasi dari tingkat literasi dan tingkat keterampilan digital yang ditujukan dengan keterlibatan individu dalam aktivitas digital; dan

2. Pilar Pekerjaan, yang berfokus pada keahlian digital terkait pekerjaan, di mana digitalisasi akan menciptakan tugas-tugas dan jenis pekerjaan baru yang menuntut keahlian baru.

Tabel 2.90. Pilar IMDI Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Wilayah	Pilar Infrastruktur & Ekosistem	Pilar Keterampilan Digital	Pilar Pemberdayaan	Pilar Pekerjaan
Kota Tangerang Selatan	66,53	62,85	32,74	35,36

Sumber : Badan Pengembangan KOMDIGI, Tahun 2025

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu komponen perlindungan sosial yang adaptif, yang bertujuan memberikan perlindungan bagi pekerja. Sejak tahun 2024, Pemerintah Kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dalam pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebagai upaya perluasan perlindungan sosial. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.91. Cakupan Kepesertaan Jaminan Soaial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2024

Wilayah	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kota Tangerang Selatan	43,90%	44,71%	46,73%

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah sebuah indikator yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengukur tingkat kerukunan antarumat beragama di suatu daerah. IKUB terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu kerukunan internal umat beragama, kerukunan antarumat beragama dan kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. IKUB Kota Tangerang Selatan tahun 2023 sebesar 72,39, yang menggambarkan bahwa ada dinamika dalam kerukunan umat beragama di Kota Tangerang Selatan, tetapi masih terkendali.

b. Indeks Harmoni

Indeks Harmoni adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat keharmonisan dalam suatu masyarakat, wilayah, atau negara. Indeks ini biasanya mengukur berbagai dimensi, yaitu:

1. Dimensi Ekonomi;
2. Dimensi Sosial;
3. Dimensi Budaya;
4. Dimensi Religius/ Keberagaman.

Pengukuran Indeks atas dimensi ini bertujuan untuk mengukur stabilitas ekonomi, sosial, keberagaman, dan toleransi antar kelompok di dalam masyarakat Indonesia. Indeks ini juga sering digunakan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi situasi sosial, serta sebagai dasar untuk

mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam mempromosikan harmoni dan persatuan di tengah keragaman masyarakat. Indeks harmoni di Kota Tangerang Selatan tahun 2024 sebesar 7,29 dari skala 9, berada dalam kategori sangat baik. Kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan seimbang.

c. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan di daerah. IPK dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan kebudayaan yang berbasis pengetahuan (knowledge-based) dan menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor pembangunan kebudayaan. Pengukuran IPK memiliki 7 (tujuh) dimensi, yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Ketujuh dimensi ini menggambarkan pembangunan kebudayaan harus dilaksanakan secara holistik dan sinergi dengan melibatkan berbagai bidang pembangunan terkait.

Pada tahun 2022, nilai IPK Kota Tangerang Selatan sebesar 52,50. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai IPK Provinsi Banten sebesar 51,41 (Kemendikbud, 2024). Pada tahun 2023, nilai IPK Kota Tangerang Selatan menurun menjadi sebesar 52,11. Penurunan capaian pembangunan kebudayaan tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Beberapa penyebab utama dapat meliputi:

1. Globalisasi dan Dampak Budaya Asing: Pengaruh budaya asing yang kuat akibat globalisasi bisa menggeser minat dan prioritas masyarakat dari budaya lokal. Hal ini dapat menyebabkan penurunan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal, serta mengurangi keberagaman budaya yang terukur dalam IPK;
2. Penurunan Minat Masyarakat: Jika masyarakat tidak menunjukkan minat atau partisipasi aktif dalam kegiatan kebudayaan, hal ini dapat berdampak pada penurunan IPK. Kurangnya minat ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan gaya hidup atau kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan;
3. Keterbatasan Akses Pendidikan Kebudayaan: Kurangnya akses atau kualitas pendidikan kebudayaan di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan dapat mengurangi pengetahuan dan keterampilan terkait kebudayaan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi IPK;
4. Kurangnya Dukungan dan Kerjasama dari Sektor Swasta: Tanpa dukungan yang memadai dari sektor swasta dalam bentuk sponsor, kemitraan, atau investasi dalam proyek-proyek kebudayaan, pengembangan kebudayaan bisa terhambat, yang berdampak pada IPK;
5. Perubahan Sosial dan Teknologi: Perubahan cepat dalam teknologi dan media yang tidak diimbangi dengan adaptasi dalam cara kebudayaan disajikan atau dilestarikan dapat menyebabkan penurunan dalam pengukuran IPK.

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

a. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah sebuah metode evaluasi yang mengukur mutu sebuah keluarga melalui tingkat ketenangan, kemandirian, dan kebahagiaan yang ada di dalamnya. Konsep ini

mencerminkan peran serta fungsi keluarga di berbagai daerah di Indonesia. iBangga berfungsi sebagai petunjuk penting untuk menilai keberhasilan dalam upaya meningkatkan mutu keluarga. Penilaian iBangga membantu dalam mengelompokkan wilayah-wilayah sebagai daerah yang memiliki keluarga tangguh, berkembang, atau rentan secara pembangunan. Menurut BKKBN 2020, nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori yaitu: (1) iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40, (2) iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70, dan (3) iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

iBangga di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021-2024 disajikan dalam Tabel 2.92, dimana terlihat bahwa pembangunan keluarga di Kota Tangerang Selatan dalam kategori cukup baik (berkembang).

Tabel 2.92. Indeks Pembangunan Keluarga Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
iBangga	54,16	57,72	64,22	65,65

Sumber: SIPERINDU BKKBN, 2024

b. Gender dan Anak

Indikator terkait gender yang digunakan untuk mengukur kesenjangan, kesetaraan, atau peran gender dalam pembangunan antara lain Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik suatu negara, serta memiliki kekuatan pengambilan keputusan. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan seberapa besar potensi pembangunan manusia hilang karena ketidaksetaraan gender (skala 0–1, di mana 0 = setara sempurna, 1 = sangat timpang). Indikator Gender di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.93. IPG, IDG dan IKG Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,58	93,80	93,96	94,23	94,47
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,171	0,155	0,170	0,200	0,176
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	73,85	73,08	72,67	72,36	70,59

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2024

Berdasarkan data, IPG Kota Tangerang Selatan cenderung meningkat selama tahun 2020-20204 seiring dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi semakin mengecil. Jika dianalisis berdasarkan indeks ketimpangan gender, pada tahun 2024 terlihat ketimpangan gender di Kota Tangerang Selatan menurun dibandingkan tahun 2023, yang menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan dapat menurunkan potensi kerugian pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketidaksetaraan gender.

Berbeda dengan IPG, Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020-2024 mengalami penurunan. Hal kontradiktif

tersebut dapat dijelaskan bahwa konteks pemberdayaan gender tidak hanya terbatas pada akses dasar saja, namun juga akses terhadap kekuasaan, pengaruh, dan representasi perempuan di ruang publik. Jika dianalisis berdasarkan komponen pembentuk IDG, penurunan IDG di Kota Tangerang Selatan disebabkan karena keterlibatan perempuan dalam politik dan sumber daya ekonomi mengalami penurunan.

Tabel 2.94. Keterlibatan di Parlemen Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Laki-laki					Perempuan				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kab Pandeglang	86,00	86,00	86,00	85,71	80,00	14,00	14,00	14,00	14,29	20,00
Kab Lebak	92,00	92,00	92,00	92,00	86,00	8,00	8,00	8,00	8,00	14,00
Kab Tangerang	88,00	88,00	86,00	86,00	80,00	12,00	12,00	14,00	14,00	20,00
Kab Serang	88,00	88,00	88,00	86,00	88,00	12,00	12,00	12,00	14,00	12,00
Kota Tangerang	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Kota Cilegon	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Kota Serang	86,67	86,67	86,67	86,67	91,11	13,33	13,33	13,33	13,33	8,89
Kota Tangerang Selatan	**68,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**74,00**	**32,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**26,00**
Provinsi Banten	82,35	82,35	82,35	81,18	86,00	17,65	17,65	17,65	18,82	14,00

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2024

Tabel 2.95. Sumbangan dalam Pendapatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Laki-laki					Perempuan				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kab Pandeglang	70,09	69,60	70,31	69,64	68,97	29,91	30,40	29,69	30,36	31,03
Kab Lebak	68,39	68,30	68,78	67,97	67,26	31,61	31,70	31,22	32,03	32,74
Kab Tangerang	71,55	71,02	71,70	71,26	71,50	28,45	28,80	28,30	28,74	28,50
Kab Serang	73,27	72,97	73,19	72,35	72,83	26,73	27,03	26,81	27,65	27,17
Kota Tangerang	67,79	67,94	68,00	68,02	67,94	32,21	32,06	32,00	31,98	32,06
Kota Cilegon	78,89	79,07	79,33	79,27	78,79	21,11	20,93	20,67	20,73	21,21
Kota Serang	72,34	72,12	72,34	71,69	71,97	27,66	27,88	27,66	28,31	28,03
Kota Tangerang Selatan	73,84	73,56	73,64	73,65	73,29	26,16	26,44	26,36	26,35	26,71
Provinsi Banten	68,26	68,05	68,29	67,86	67,66	31,74	31,95	31,71	32,14	32,34

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2024

Tabel 2.96. Persentase Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Laki-laki					Perempuan				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kab Pandeglang	56,70	59,85	54,60	54,04	58,13	43,30	40,15	45,40	45,96	41,87
Kab Lebak	58,76	60,62	63,74	51,39	46,46	41,24	39,38	36,26	48,61	53,54
Kab Tangerang	55,60	52,80	55,76	55,88	53,39	44,40	47,20	44,24	44,12	46,61
Kab Serang	54,22	53,45	61,60	58,29	55,40	45,78	46,55	38,40	41,71	44,60
Kota Tangerang	54,19	51,91	58,62	59,60	53,84	45,81	48,09	41,38	40,40	46,16
Kota Cilegon	57,54	50,32	58,90	57,61	50,70	42,46	49,68	41,10	42,39	49,30
Kota Serang	59,64	58,70	53,81	52,24	48,35	40,36	41,30	46,19	47,76	51,65

Kabupaten/Kota	Laki-laki					Perempuan				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kota Tangerang Selatan	57,29	55,90	58,61	56,90	58,92	42,71	44,10	41,39	43,10	41,08
Provinsi Banten	56,03	54,28	57,75	56,79	54,30	43,97	45,72	42,25	43,21	45,70

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2024

Berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak, Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kota yang ramah anak melalui partisipasi aktif dalam program Kota Layak Anak (KLA) yang dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI. Dalam lima tahun terakhir (2020–2024), capaian predikat KLA di Tangsel mengalami perkembangan yang signifikan, mencerminkan upaya serius pemerintah daerah dalam memenuhi indikator layanan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Capaian predikat Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Tahun 2020: predikat KLA Kategori Pratama, menandakan awal komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memenuhi standar dasar kota layak anak;
2. Tahun 2021: predikat KLA Kategori Pratama;
3. Tahun 2022: predikat KLA Kategori Madya, menunjukkan peningkatan dalam layanan kesehatan ramah anak, penguatan forum partisipasi anak, serta penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang lebih terstruktur;
4. Tahun 2023: predikat KLA Kategori Madya;
5. Tahun 2024: predikat KLA Kategori Nidya, menunjukkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melampaui standar minimal dan memiliki komitmen kuat dalam pemenuhan hak anak secara holistik.

c. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) digunakan sebagai alat ukur untuk melihat gambaran sejauh mana pemuda di suatu wilayah berkembang secara optimal dan memiliki kesempatan yang adil. Lingkup pembangunan pemuda yang diukur terdiri atas lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi serta kepemimpinan, IPP Kota Tangerang Selatan selama tahun 2021-2024 menunjukkan tren meningkat. Nilai IPP Kota Tangerang Selatan yang berada pada kisaran nilai 52-56 menggambarkan kualitas pembangunan pemuda di Kota Tangerang Selatan berkategori sedang.

Tabel 2.97. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2024

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Pembangunan Pemuda	52,31	53,43	54,53	55,86

Sumber: LKPJ Kota Tangerang Selatan 2021-2024

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Angka Ketergantungan/ *Dependency Ratio* (Rasio Ketergantungan)

Aspek demografi berdasarkan usia yang sangat penting dianalisis dalam dokumen perencanaan adalah Rasio Ketergantungan (dependency

ratio) yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Misal Rasio Ketergantungan 40, hal ini dapat dimaknai bahwa, setiap 100 Penduduk Usia Produktif, menanggung 40 Penduduk Usia Belum Produktif/Tidak Produktif. Angka ketergantungan dapat menggambarkan kondisi Bonus Demografi pada suatu daerah. Bonus demografi terjadi saat nilai rasio ketergantungan kecil. Semakin kecil rasio ketergantungan maka semakin besar bonus demografi. Bonus demografi didapat jika lebih dari 60% penduduk ada pada usia produktif atau jika rasio ketergantungan <66. Hal ini dapat dihitung dengan Rumus Berikut ini:

$$DR = \frac{P_{(0-14)} + P_{(65+)}}{P_{(15-64)}} x100$$

Keterangan:

DR = *Dependency Ratio* (Rasio Ketergantungan)
$P_{(0-14)}$ = Jumlah penduduk usia muda atau belum produktif (0-14 tahun)
$P_{(65+)}$ = Jumlah penduduk usia tidak produktif atau tua (65 tahun ke atas)
$P_{(15-64)}$ = Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun)

Analisa kependudukan berdasarkan usia disajikan dalam Tabel 2.98. Jika ditinjau berdasarkan komposisi penduduk menurut usia, terlihat bahwa persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020-2023 menunjukkan tren yang meningkat, lalu pada tahun 2024 persentasenya menurun. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2024 Kota Tangerang Selatan mulai memasuki masa penuaan penduduk (aging polpulation). Hal tersebut juga ditandai tren persentase penduduk lanjut usia (>65 tahun) yang mengalami peningkatan. Pengarusutamaan inklusifitas perlu dilaksanakan dalam pembangunan di Kota Tangerang Selatan, seperti perlindungan sosial untuk lansia dan pemberdayaan ekonomi bagi lansia yang masih memiliki kemampuan bekerja. Aging population juga dapat membuka peluang kebutuhan tenaga kerja perawatan (caregiver) bagi calon tenaga kerja lokal.

Walaupun mulai tahun 2024 mengalami penurunan, komposisi penduduk usia produktif masih mendominasi struktur penduduk Kota Tangerang Selatan. Persentase penduduk usia produktif yang rata-rata mencapai 71%, menggambarkan bahwa Kota Tangerang Selatan masih mengalami bonus demografi. Gambaran ini juga diperkuat dengan rasio ketergantungan di Kota Tangerang Selatan yang berada di bawah nilai 66. Kondisi ini harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui peningkatan kualitas SDM menjadi lebih unggul dan berdaya saing global sehingga penduduk usia produktif di Kota Tangerang Selatan dapat menjadi sumber tenaga kerja profesional yang dapat diserap oleh pasar kerja Nasional dan Dunia.

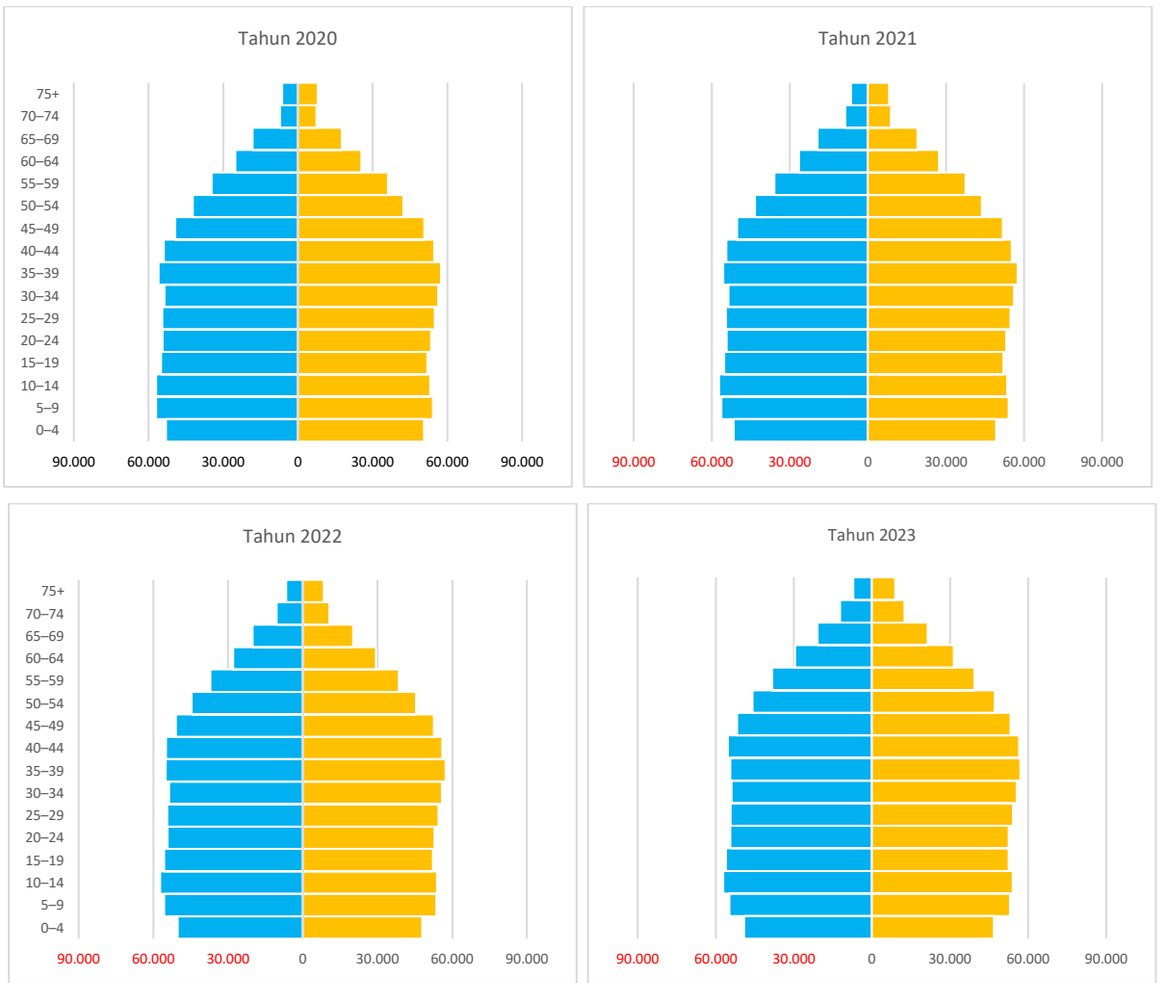
Tabel 2.98. Komposisi Penduduk berdasarkan Usia di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

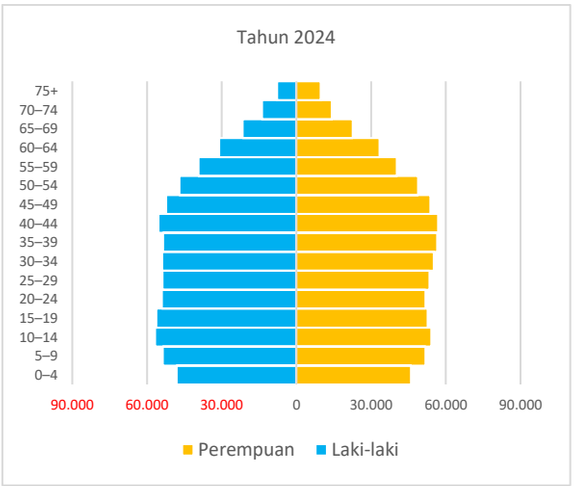
Kelompok Umur	**Periode Tahun**				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Penduduk Usia Muda (<15 Tahun) (jiwa)	324.830	321.740	318.470	314.930	310.460
Persentase Penduduk Usia Muda (%)	24,04%	23,56%	23,10%	22,63%	22,18%
Penduduk Usia Tua (>65 Tahun) (jiwa)	64.630	70.580	76.700	83.050	89.770

Kelompok Umur	Periode Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Usia Tua (%)	4,78%	5,17%	5,56%	5,97%	6,41%
Penduduk Usia Produktif (15-65 Tahun) (jiwa)	961.870	973.060	983.580	993.690	999.300
Persentase Penduduk Usia Produktif (%)	71,18%	71,27%	71,34%	71,40%	71,40%
Angka Ketergantungan	40,49	40,32	40,18	40,05	40,05

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025, diolah

Komposisi penduduk berdasarkan usia selama tahun 2020-2024 membentuk piramida tipe stasioner sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.36. Piramida penduduk stasioner menggambarkan kondisi demografis yang stabil dengan tingkat kelahiran dan kematian yang seimbang, dimana pada jangka panjang, demografis di Kota Tangerang Selatan akan mengalami penuaan penduduk dan penurunan angkatan kerja pada usia produktif.





Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

Gambar 2.36. Piramida Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Komposisi proyeksi penduduk berdasarkan usia sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.99, memperlihatkan persentase penduduk usia produktif di Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan selama kurun waktu tahun 2025-2029. Sementara itu, proyeksi persentase penduduk lansia meningkat pada tahun 2025-2029, dimana pada tahun 2029 diproyeksikan penduduk lanjut usia akan mencapai 9,17% dari proyeksi total penduduk Kota Tangerang Selatan.

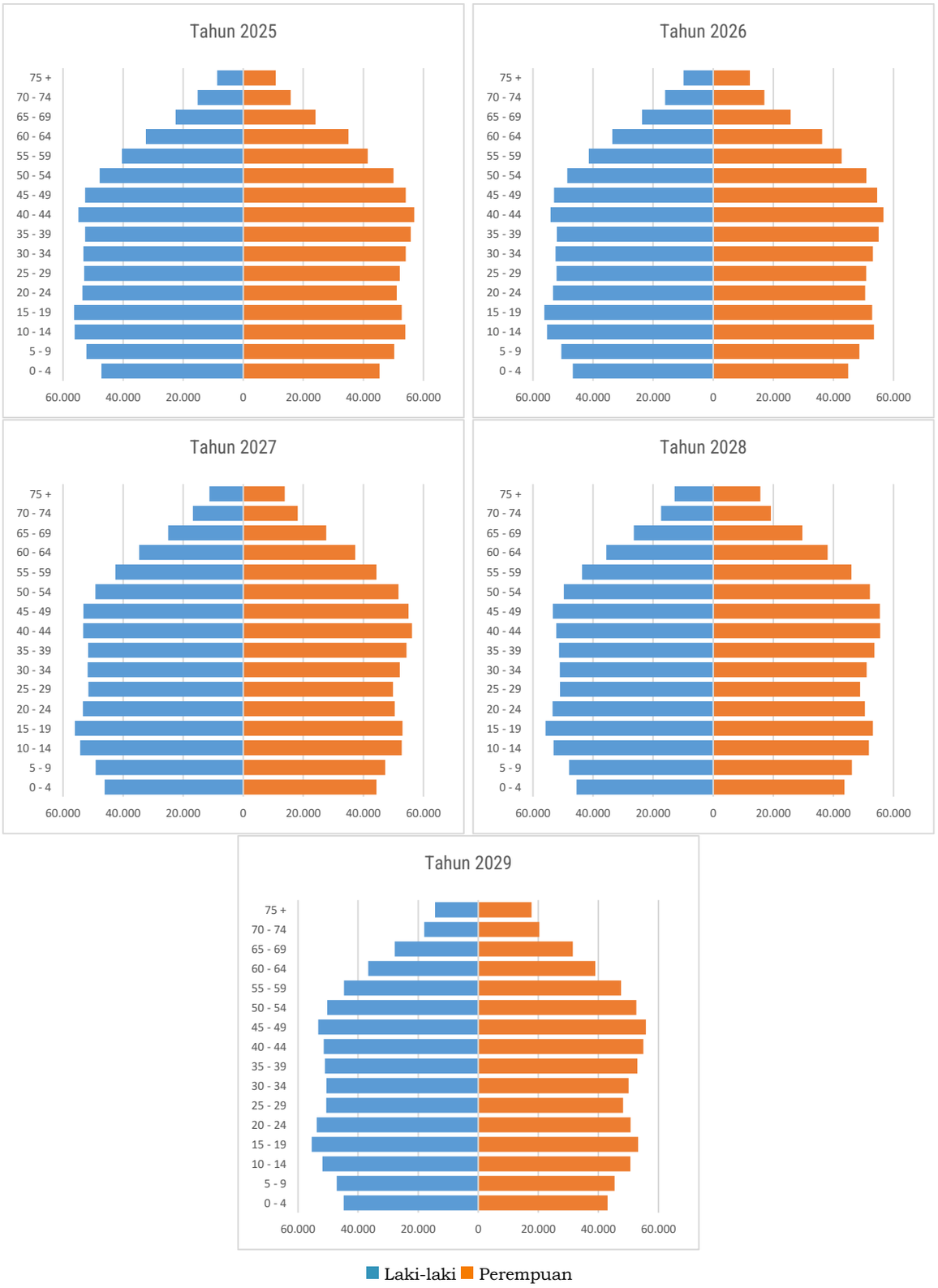
Walaupun secara komposisi persentase penduduk usia produktif masih mendominasi struktur penduduk, namun dengan meningkatnya persentase penduduk lanjut usia menyebabkan meningkatnya angka ketergantungan di Kota Tangerang Selatan hingga mencapai 41,14% pada tahun 2029. Peningkatan angka ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa tanggungan beban untuk menghidupi penduduk usia non-produktif oleh penduduk usia produktif meningkat. Persentase penduduk usia produktif yang masih di atas 60% menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan 2024-2029 masih mengalami bonus demografi pada tahun 2025-2029.

Tabel 2.99. Proyeksi Komposisi Penduduk berdasarkan Usia di Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Kelompok Umur	**Periode Tahun**				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Penduduk Usia Muda (<15 Tahun) (jiwa)	305.140	299.610	293.970	288.340	282.790
Persentase Penduduk Usia Muda (%)	21,76%	21,32%	20,88%	20,43%	19,98%
Penduduk Usia Tua (>65 Tahun) (jiwa)	96.890	104.560	112.680	121.130	129.720
Persentase Penduduk Usia Tua (%)	6,91%	7,44%	8,00%	8,58%	9,17%
Penduduk Usia Produktif (15-65 Tahun) (jiwa)	1.000.150	1.000.890	1.001.520	1.002.070	1.002.670
Persentase Penduduk Usia Produktif (%)	71,33%	71,23%	71,12%	70,99%	70,85%
Angka Ketergantungan	40,20%	40,38%	40,60%	40,86%	41,14%

Sumber:Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi Banten

Dalam periode tahun 2024-2029 struktur usia penduduk di Kota Tangerang Selatan masih cenderung berupa piramida tipe stasioner sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.37. Dalam beberapa tahun ke depan dengan pola atau laju pertumbuhan proyeksi penduduk, maka pergeseran struktur usia penduduk di Kota Tangerang Selatan akan menuju ke arah piramida konstruktif. Piramida penduduk konstruktif menunjukkan komposisi penduduk dewasa dan usia tua yang lebih besar dari penduduk muda. Piramida konstruktif menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada suatu wilayah mengalami penurunan dan pertumbuhannya lambat dimana tingkat kelahirannya lebih rendah dari angka kematian. Menuju kepada kondisi ini maka Kota Tangerang Selatan harus mulai mempersiapkan kebijakan pembangunan dan infrastruktur yang ramah lansia dan sistem jaminan sosial yang kuat sebagai antisipasi adanya aging communities di masa mendatang.



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi Banten

Gambar 2.37. Proyeksi Piramida Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Sebagaimana digambarkan dalam sub bab 2.2.1, pada tahun 2024 terdapat sektor lapangan usaha sekunder di Kota Tangerang Selatan yang mencatatkan pertumbuhan tinggi, yaitu sektor Industri Pengolahan. Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan selama tahun 2019-2024 disajikan dalam Tabel 2.100, dimana besaran rasionya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, rasio sektor ini tercatat sebesar 8,39%, kemudian mengalami penurunan berturut-turut hingga mencapai 7,58% pada tahun 2021. Meskipun sempat meningkat pada tahun 2022 menjadi 7,96%, angkanya kembali turun sedikit tipis menjadi 7,82% persen pada 2023. Pada tahun 2024 rasio PDRB sektor industri pengolahan ini kembali naik menjadi 8,09%. Pergerakan ini mencerminkan dinamika sektor industri pengolahan yang perlahan mulai pulih setelah tekanan akibat pandemi dan mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan sektor ini sebagai penggerak ekonomi daerah jika didukung oleh kebijakan dan investasi yang tepat.

Tabel 2.100. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (miliar rupiah)	6.942,05	6.470,60	6,679,48	7.654,56	8.162,24	9.083,26
Total PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	82.769,48	82.531,47	88.065,80	96.153,92	104.386,99	112.213,99
Rasio PDRB Industri Pengolahan	8,39	7,83	7,58	7,96	7,82	8,09

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2025

b. Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum

Rasio PDRB akomodasi dan makan minum yang menunjukkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Tangerang Selatan menunjukkan tren yang relatif stabil selama periode 2019 hingga 2024. Penurunan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terjadi pada tahun 2020-2021 pada saat terjadi pandemi Covid 19. Sejak tahun 2022, kontribusi sektor ini kembali meningkat secara perlahan yang mencerminkan adanya pemulihan di sektor pariwisata dan kuliner. Peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan besaran yang bahkan melampaui besaran sebelum pandemi Covid 19. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini semakin berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan, seiring dengan membaiknya mobilitas masyarakat dan meningkatnya konsumsi rumah tangga di sektor jasa.

Tabel 2.101. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB (ADHB) Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (miliar rupiah)	2.500,53	2.368,02	2.499,81	2.758,77	3.060,74	3.409,63
Total PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	82.769,48	82.531,47	88.065,80	96.153,92	104.386,99	112.213,99
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	3,02	2,87	2,84	2,87	2,93	3,04

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2025

c. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif menggambarkan kontribusi sektor ekonomi kreatif (ekraf) terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah, yang mencerminkan:

1. Tingkat perkembangan sektor kreatif (seperti fashion, kuliner, film, musik, dan teknologi digital) terhadap perekonomian daerah;
2. Potensi daya saing daerah, dimana daerah dengan proporsi PDRB ekonomi kreatif tinggi umumnya memiliki kekuatan budaya dan pariwisata (contoh: kerajinan, festival seni) serta *startup* digital dan industri kreatif yang berkembang;
3. Transformasi Struktural Ekonomi, dimana ekonomi kreatif menjadi indikator peralihan dari ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis pengetahuan, kreativitas, dan inovasi;
4. Dampak pada Tenaga Kerja, dimana proporsi PDRB ekonomi kreatif yang tinggi biasanya berkorelasi dengan lapangan kerja inklusif bagi generasi muda dan UMKM serta peningkatan produktivitas berbasis kreativitas.

PDRB ekonomi kreatif di Kota Tangerang Selatan dihitung dari komponen PDRB sektor industri pengolahan (sub sektor industri makanan dan minuman, industri pakaian jadi dan industri alas kaki), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan (sub sektor angkatan darat wisata) serta sektor jasa lainnya. Proporsi PDRB ekonomi kreatif di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 2.102. Pada tahun 2024, proporsi PDRB ekonomi kreatif mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut menggambarkan adanya potensi sektor ekonomi kreatif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 2.102. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Proporsi sektor industri makanan dan minuman	0,055	0,055	0,060	0,062	0,062
Proporsi sektor industri pengolahan sub sektor industri tekstil dan pakaian jadi	4,541	4,326	4,689	4,555	4,809
Proporsi sektor industri pengolahan sub sektor kulit, barang dari kulit, dan alas kaki	0,688	0,683	0,697	0,636	0,613
Proporsi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	2,870	2,840	2,870	2,930	3,040
Proporsi sektor transportasi dan pergudangan sub sektor angkutan darat	2,426	2,561	2,587	2,699	2,669
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	10,580	10,464	10,903	10,882	11,194

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2025, diolah

d. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap,

semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha Rasio ini digunakan sebagai indikator penting untuk menilai kondisi ekonomi dan perkembangan kewirausahaan suatu daerah. Rasio kewirausahaan yang tinggi menunjukkan bahwa banyak orang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menciptakan lapangan kerja baru, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Jika bercermin kepada negara maju, rasio kewirausahaan minimal 4%.

Rasio kewirausahaan Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.103. Pada tahun 2024, rasio kewirausahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut perlu ditangani mengingat kewirausahaan terutama pada sektor UMKM yang merupakan potensi aktivitas perekonomian yang sangat penting, baik dari segi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan memajukan potensi lokal. Diperlukan upaya-upaya dukungan komprehensif dalam penciptaan iklim berwirausaha yang dapat meningkatkan kembali rasio kewirausahaan di Kota Tangerang Selatan antara lain berupa:

1. Pemberian kemudahan perizinan, bantuan modal, dan pelatihan kewirausahaan;
2. Memasukkan kurikulum kewirausahaan sejak dini;
3. Kolaborasi dengan swasta untuk program pendampingan dan akses pasar.
4. Mendorong ekonomi digital dengan pelatihan teknologi untuk UMKM.

Tabel 2.103. Rasio Kewirausahaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pekerja yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	24.402	17.585	24.268	24.094	12.012
Jumlah Angkatan Kerja	852.435	817.237	817.237	652.575	601.673
Rasio Kewirausahaan	2,86	2,15	2,97	3,69	1,99

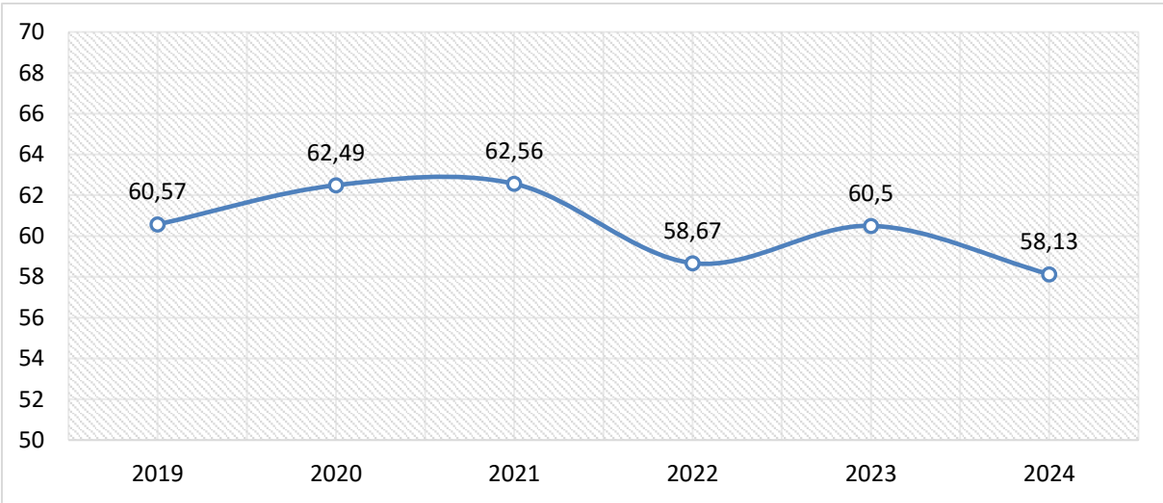
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2021-2025

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah indikator ketenagakerjaan yang mengukur keterlibatan aktif penduduk dalam kegiatan ekonomi. TPAK diperoleh dari perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Perkembangan TPAK di Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2019-2024 terlihat bahwa TPAK Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 mengalami penurunan. Jika berdasarkan gambaran dalam sub bab 2.2.1, tingkat kesempatan kerja di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 malahan meningkat dibandingkan tahun 2023. Kondisi kontradiktif ini perlu mendapatkan penanganan karena penurunan TPAK dapat berdampak pada perekonomian dan sosial, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi melambat : Jika lebih sedikit orang yang bekerja, output ekonomi (PDB) bisa menurun karena tenaga kerja adalah faktor produksi utama;
2. Meningkatnya Beban Ketergantungan : Jika banyak usia kerja tidak bekerja, beban ekonomi beralih ke kelompok yang bekerja;
3. Masalah Sosial dan Kesejahteraan;
4. Penurunan Daya Saing Daerah: Jika generasi muda tidak masuk pasar kerja (misalnya karena memilih kuliah terlalu lama atau "NEET" [*Not in Education,*

Employment, or Training]), Kota Tangerang Selatan bisa kalah bersaing dengan daerah lain karena kehilangan SDM potensial;
5. Investasi Menurun: Investor mungkin enggan masuk ke daerah dengan TPAK rendah karena kekurangan tenaga kerja terampil.



Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2020-2025
Gambar 2.38. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2024

f. Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Kapabilitas Inovasi

Indeks Inovasi Daerah (IID) mengukur kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan dan menerapkan inovasi untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Perhitungan IID yaitu rasio antara skor total dengan skor total maksimum. Skor total maksimum yang menjadi acuan adalah 250, yang merupakan gabungan dari skor maksimal pada dua aspek utama, yaitu Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dan Satuan Inovasi Daerah (SID). Aspek SPD memiliki proporsi sebesar 25,20%. Sementara itu, aspek SID memiliki proporsi sebesar 74,80. Skor dan kategori Indeks Inovasi Daerah terbagi menjadi 4 kategori, yaitu:
a. Sangat inovatif: 65,01 – 100,00
b. Inovatif: 40,00 – 65,00
c. Kurang inovatif: 0,01 – 40
d. Tidak dapat dinilai: 0

Indeks inovasi Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019-2024 disajikan dalam Tabel 2.104. Pada tahun 2024, kinerja inovasi Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, yaitu semula berpredikat Inovatif dengan skor 60,15 menjadi Inovatif dengan skor 50,45. Penurunan indeks inovasi Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 kemungkinan disebabkan oleh kombinasi dari penurunan kuantitas/kualitas inovasi yang dilaporkan, kekurangan dokumentasi, serta minimnya dukungan atau perhatian terhadap agenda inovasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan daerah. Untuk mengembalikan predikat “Sangat Inovatif”, diperlukan penguatan dalam manajemen inovasi, peningkatan kualitas bukti dan dokumentasi, serta pelibatan aktif seluruh OPD dalam menyusun dan melaporkan inovasi secara sistematis.

Tabel 2.104. Indeks Inovasi Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
Predikat Indeks inovasi daerah	Sangat inovatif	Inovatif (51,66)	Inovatif (59,88)	Inovatif (60,15)	Inovatif (50,45)

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Tahun 2021-2024

Selain dilihat dari indeks inovasi daerah, indeks kapabilitas inovasi juga dapat menjadi gambaran ekosistem pemajuan IPTEK dan inovasi di Kota Tangerang Selatan. Indeks kapabilitas inovasi merupakan bagian dari pilar pembentuk Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang diukur tahunan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah, indeks kapabilitas inovasi juga memberikan gambaran sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indeks kapabilitas inovasi Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, yaitu semula skor 3,48 menjadi skor 3,29, sebgaimana disajikan dalam Tabel 2.105. Untuk itu, Kota Tangerang Selatan perlu mengangkat derajat kolaborasi dan riset mulai dari pengembangan kluster, belanja riset, publikasi hasil riset, indeks keunggulan lembaga riset dan penyebaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara intensif. Peningkatan ekosistem kebijakan berbasis bukti juga merupakan upaya peningkatan peran riset dan inovasi sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan daerah.

Tabel 2.105. Indeks Kapabilitas Inovasi Tangerang Selatan Tahun 2023-2024

Uraian	Tahun 2023	Skor Nasional Tahun 2023	Keterangan	Tahun 2024	Skor Nasional Tahun 2024	Keterangan
Indeks Kapabilitas Inovasi	3,48	3,03	Melebihi Capaian Standar Nasional	3,29	3,13	Melebihi Capaian Standar Nasional

Sumber: BRIN, Tahun 2023-2024

2.1.3.3. Transformasi Digital

a. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Transformasi digital tidak hanya sekadar proses adopsi teknologi, tetapi juga mencakup perubahan yang lebih luas pada pola pikir, cara kerja, dan interaksi masyarakat. Transformasi digital telah menjadi kekuatan utama yang mendorong perubahan di berbagai aspek kehidupan, dari ekonomi, pendidikan, hingga layanan publik. Sebagai bagian dari cita-cita Visi Indonesia Emas, transformasi digital berperan penting dalam mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang berdaya saing global dengan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis teknologi. Dalam konteks ini, masyarakat digital menjadi aktor utama yang memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk menciptakan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses ke peluang.

Keberhasilan transformasi digital memerlukan pengukuran yang tepat untuk memahami kondisi masyarakat digital secara menyeluruh. Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan instrumen strategis untuk memetakan tingkat adopsi teknologi, literasi digital, pemberdayaan ekonomi digital serta kesenjangan yang masih ada. Indeks ini tidak hanya menggambarkan pencapaian, tetapi juga memberikan arahan bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengidentifikasi tantangan serta peluang.

Kerangka kerja IMDI terdiri atas 4 (tiga) pilar, yaitu:

1. Pilar Infrastruktur dan Ekosistem, merupakan pilar yang menjadi landasan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital pada masyarakat.

Pilar ini menekankan pentingnya kesetaraan akses untuk membangun ekosistem digital yang inklusif;

2. Pilar Keterampilan Digital, berperan sebagai alat dalam mencapai pembangunan digital yang lebih inklusif. Dalam IMDI, pilar keterampilan mencakup literasi digital dan keterampilan digital dasar;
3. Pilar Pemberdayaan, mencerminkan kemampuan digital masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka (pemberdayaan ekonomi) atau aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan. Keberadaan platform digital menawarkan peluang ekonomi baru, kesempatan pendapatan yang lebih tinggi kepada masyarakat, kualitas hidup yang lebih baik, dan inklusi keuangan;
4. Pilar Pekerjaan, terdiri dari keterampilan digital yang banyak dibutuhkan dan kemampuan pekerja dalam menggunakan teknologi digital terkait pekerjaan.

Nilai IMDI Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022-2024 beserta Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten disajikan dalam Tabel 2.106, dimana tergambar bahwa nilai IMDI Kota Tangerang Selatan tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan paling tinggi di Provinsi Banten.

Tabel 2.106. Nilai IMDI Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	Kategori IMDI Tahun 2024
Kota Cilegon	48,29	47,83	45,68	Cukup
Kota Serang	40,70	44,42	45,33	Cukup
Kota Tangerang	43,15	45,00	43,81	Cukup
Kota Tangerang Selatan	**48,87**	**46,93**	**49,82**	**Tinggi**
Kabupaten Lebak	49,54	44,22	48,86	Tinggi
Kabupaten Pandeglang	43,14	40,00	45,17	Cukup
Kabupaten Serang	35,88	41,17	43,43	Cukup
Kabupaten Tangerang	46,15	44,87	43,46	Cukup

Sumber: KOMDIGI, Tahun 2025

Sementara itu, nilai dari tiap pilar IMDI Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.107, dimana terlihat bahwa pilar yang perlu mendapatkan perhatian dan intervensi adalah pilar pemberdayaan dan pilar pekerjaan.

Tabel 2.107. Nilai Pilar IMDI Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Indikator	Pilar Infrastruktur dan Ekosistem	Pilar Keterampilan Digital	Pilar Pemberdayaan	Pilar Pekerjaan
Indeks Mayarakat Digital Indonesia	66,53	62,95	32,74	35,36

Sumber: KOMDIGI, Tahun 2025

2.1.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang terlibat dalam proses

produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

Selama periode 2020-2024, nilai PMTB Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data menunjukkan bahwa nilai nominal PMTB pada 2020-2021 menunjukkan adanya kenaikan, yaitu dari 38.169,27 miliar pada tahun 2020 sebagai imbas dari pandemi COVID-19 menjadi 41.362,81 miliar pada tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 nilai PMTB Kota Tangerang Selatan mengalami sedikit kenaikan menjadi sebesar 45.937,29 miliar. Pada tahun 2023 PMTB Kota Tangerang Selatan sebesar 48.343,16 miliar menjadi 48.628,9 miliar pada tahun 2024.

Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun cenderung melambat tetapi polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen PMTB non bangunan.

Tabel 2.108. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total PMTB					
a. ADHB (Milyar Rp)	38.169,27	41.362,81	45.937,29	48.343,16	48.628,90
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	23.778,73	25.060,99	26.082,50	26.488,28	26.943,09
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	46,25	46,97	47,78	46,31	43,34
Struktur PMTB					
a. Bangunan (Milyar Rp)	35.482,79	38.510,51	42.759,37	44.717,79	44.839,71
(%)	92,96	93,12	93,08	92,50	92,20
b. Non Bangunan (Milyar Rp)	2.686,48	2.852,30	3.177,91	3.625,38	3789,19
(%)	7,04	6,90	6,92	7,50	7,80
Total PMTB	**38.169,27**	**41.362,81**	**45.937,29**	**48.343,16**	**48.628,90**
%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Pertumbuhan					
a. Bangunan	-0,48	5,43	4,03	1,04	1,59
b. Non bangunan	0,96	4,77	4,74	9,27	3,44
Total PMTB	-0,39	5,39	4,08	1,56	1,72

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2021-2025

b. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Tangerang Selatan, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Secara total, dalam kurun waktu 2020-2024 nilai ekspor barang dan jasa di Kota Tangerang Selatan menunjukkan fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2020 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 39.407,33 miliar rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 yaitu masing-masing sebesar 51.823,23 (2021), 61.648,38 (2022), 57.432,49 (2023) dan 57.656,57

(2024). Nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 cenderung menunjukkan arah pertumbuhan yang hampir sama, yaitu cenderung berfluktuasi dengan nilai "riil" masing-masing tahun sebesar 29.160,87 miliar rupiah (2020), 31.337,02 miliar rupiah (2021), 33.947,14 miliar rupiah (2021), 30.781,15 miliar rupiah (2022) dan 36.884,80 miliar rupiah (2023). Sementara itu, Proporsi ekspor dalam PDRB menunjukkan tren yang fluktuatif, yaitu sebesar 47,74 persen pada tahun 2020, meningkat menjadi 58,85 persen (2021) dan 64,13 persen (2022). Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 55,02 persen dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 51,38 persen.

Tabel 2.109. Perkembangan Ekspor Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Milyar Rp)	39.407,33	51.823,23	61.648,38	57.932,49	57.656,57
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	29.160,87	31.337,02	33.947,14	30.781,15	36.884,80
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	**47,74**	**58,85**	**64,13**	**55,02**	**51,38**
Pertumbuhan	**-0,50**	**7,46**	**8,33**	**-9,33**	**19,33**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2021-2025

2.1.3.5. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

a. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur merupakan indikator untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. IKLI berfungsi sebagai instrumen untuk mendapatkan pandangan masyarakat yang objektif, komprehensif, dan dapat dipercaya, baik dari segi pembangunan fisik maupun manfaat yang dihasilkan. Indikator pada sektor infrastruktur yang akan dinilai meliputi: ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian, efektivitas pemanfaatan, dan kontribusi ekonomi.

Data menunjukkan bahwa IKLI Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021-2023, walaupun nilainya masih di bawah capaian pada tahun 2020. IKLI Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 sebesar 8,29 (dari skala 1-10), masuk pada tingkat mutu layanan A atau Baik Sekali. Variabel layanan dengan Indeks Kepuasan tertinggi adalah Kontribusi Terhadap Perekonomian sebesar 4,34, sedangkan variabel layanan dengan Indeks Kepuasan terendah adalah Kualitas Fisik sebesar 3,94.

Tabel 2.110. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI)	9,08	5	5,75	7,03	8,29

Sumber:Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

b. Akses Rumah Layak Huni

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi kecukupan minimum luas bangunan dan standar kesehatan penghuni rumah. Empat kriteria rumah layak huni berdasarkan Kementerian PUPR dan SDGs adalah ketahanan bangunan, kecukupan luas bangunan, akses sanitasi, serta akses air minum yang bersih.

Jika mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI), luas minimal rumah layak huni adalah minimal 7,2 meter persegi per jiwa atau 28,8 meter persegi untuk satu keluarga berjumlah empat orang. Gambaran rumah tangga dengan akses terhadap rumah layak huni berdasarkan standar luas rumah di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel 2.111, sedangkan gambaran rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi dan air bersih layak disajikan dalam sub bab 2.1.5.2 dan 2.1.5.3. dimana rata-rata rumah tangga di Kota Tangerang Selatan memiliki akses terhadap rumah layak huni.

Tabel 2.111. Persentase Rumah Tangga dengan Rumah Layak Huni berdasarkan Luasan Rumah di Kota Tangerang Selatan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Rumah Dengan Luas Lantai Per Kapita Minimal 7,2 M^2	-94,96	95,26	96,13

Sumber:BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2025

c. Indeks Kota Layak Huni

Indeks Kota Layak Huni merupakan alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kelayakan huni suatu kota atau wilayah. Indeks ini mencakup sejumlah indikator yang mencerminkan kualitas hidup, keberlanjutan lingkungan, dan ketersediaan layanan dasar di dalam kota. Nilai IKLH terbagi atas 5 kelompok yaitu:

a) Nilai indeks 81-100 = sangat baik
b) Nilai indeks 61-80 = baik
c) Nilai indeks 41-60 = cukup
d) Nilai indeks 21-40 = buruk
e) Nilai indeks 0-20 = sangat buruk

Indeks Kota Layak Huni Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021-2024 menunjukkan tingkat kelayakan huni dalam kategori baik. Pada tahun 2024, komponen ketersediaan layanan dasar dengan skor indeks tertinggi adalah fasilitas pendidikan, telekomunikasi, fasilitas peribadatan, penyediaan air bersih serta fasilitas administrasi dan pelayanan publik. Sementara itu fasilitas kesenian budaya, fasilitas pejalan kaki dan fasilitas kelompok rentan merupakan nilai indeks terendah pada Kota Tangerang Selatan.

Tabel 2.112. Indeks Kota Layak Huni Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2024

IKLH	2021	2022	2023	2024
Kota Tangerang Selatan	68,38	68,84	69,50	70,03

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

2.1.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro

a. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB menggambarkan tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap perekonomian suatu wilayah. Rasio ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kemampuan fiskal daerah: Seberapa besar pemerintah daerah mengandalkan pajak untuk membiayai pembangunan, relatif terhadap ukuran ekonominya;
2. Efektivitas pemungutan pajak: Tingkat keberhasilan daerah dalam memobilisasi potensi pajak dari aktivitas ekonomi;

3. Ketergantungan pada transfer pusat: Rasio rendah dapat mengindikasikan ketergantungan tinggi pada dana pusat (DAU/DBH)

Rasio pajak daerah terhadap PDRB ADHK Kota Tangerang Selatan dalam periode 2020–2024 disajikan dalam Tabel 2.113 yang menunjukkan tren peningkatan. Nilai rasio yang di bawah 5% (rasio rendah) mengindikasikan potensi pajak belum tergali optimal.

Tabel 2.113. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah (miliar rupiah)	1.345,14	1.523,11	1.794,85	1.917,84	2.093,59
Total PDRB (ADHK) (miliar rupiah)	59.531,08	62.392,12	66.021,24	69.561,56	73.052,84
Total PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	82.531,47	88.065,80	96.135,92	104.386,99	112.213,99
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHK	2,26%	2,44%	2,72%	2,76%	2,87%
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB	1,63%	1,73%	1,87%	1,84%	1,87%

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2025

b. Iklim Investasi

Untuk mengetahui seberapa besar efisiensi investasi yang ditanamkan di suatu daerah, dapat digunakan parameter Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Nilai ICOR yang menunjukkan produktivitas investasi yang baik adalah antara 3–4. Semakin tinggi ICOR mengidentifikasikan kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. Sebaliknya, ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal (Imelda, 2015). Nilai ICOR Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.114.

Berdasarkan data ICOR, terlihat bahwa pada tahun 2022 hingga 2024 Kota Tangerang Selatan telah mengalami pemulihan ekonomi secara bertahap setelah terdampak pandemi Covid-19 sejak Maret tahun 2020. Pada tahun 2024 ICOR Kota Tangerang Selatan tercatat sebesar 7,72, yang mengindikasikan bahwa untuk setiap peningkatan output sebesar 1 miliar rupiah diperlukan tambahan kapital sebesar 7,72 miliar rupiah. Nilai ICOR yang semakin tinggi menunjukkan efisiensi investasi yang semakin menurun. Hal ini menggarisbawahi bahwa produktivitas investasi di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 masih dalam proses pemulihan menuju kondisi optimal seperti sebelum pandemi. Tren ICOR yang cenderung meningkat dari 7,48 pada tahun 2023 menjadi 7,72 pada tahun 2024 menggambarkan ketergantungan pada investasi padat modal dengan produktivitas rendah dan struktural ekonomi yang belum terdiversifikasi, seperti dominasi sektor jasa/logistik dengan nilai tambah terbatas. Gambaran tersebut menjadi tantangan dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan kapital untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang optimal, dengan upaya antara lain pemberian insentif untuk proyek ber-multiplier effect tinggi (misalnya industri hijau atau digital) dan reformasi birokrasi untuk memangkas cost of doing business.

Berdasarkan data realisasi investasi terlihat bahwa pertumbuhan investasi di Kota Tangerang Selatan menggambarkan pertumbuhan volatil, dimana pada tahun 2021 terjadi lonjakan pertumbuhan investasi pasca pandemi Covid 19 yang dipacu pemulihan aktivitas ekonomi, stimulus fiskal dan relaksasi perizinan. Pada tahun 2022 terjadi penurunan realisasi invesatsi akibat ketidakpastian global (perang Ukraina dan inflasi AS). Semantara itu pada tahun 2023 kembali terjadi pemulihan yang didorong

percepatan proyek infrastruktur strategis Nasional. Pada tahun 2024 realisasi investasi mencapai capaian tertinggi selama kurun waktu tahun 2020-2024, namun pertumbuhannya melambat yang menandakan tantangan sustainability (keberlanjutan).

Tabel 2.114. Nilai ICOR dan Realisasi Investasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai ICOR	-39,24	8,76	7,19	7,48	7,72
Realisasi Investasi Total (Rp Triliun)	3,933	5,677	4,658	7,449	8,480
a. Realisasi PMA (Rp Triliun)	0,685	1,462	0,999	1,224	0,816
b. Realisasi PMDN (Rp Triliun)	3,248	4,215	3,659	6,225	7,664
Pertumbuhan Investasi (%)		44,34	-17,95	59,92	13,84

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2025

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif menjelaskan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan mencerminkan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, dan akuntabel dalam menjalankan kebijakan serta pelayanan kepada masyarakat. Proses ini didasarkan pada pertukaran informasi yang terbuka dan transparan, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, tata kelola pemerintahan harus mematuhi kerangka hukum yang berlaku guna memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.115, yang menunjukkan tren meningkat.

Tabel 2.115. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	61,11/B	63,48/B	65,61/B	76,79/BB	85.61/BB

Sumber: SETDA Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

2.1.4.2. Indeks Reformasi Hukum

Indeks reformasi hukum daerah dapat menggambarkan kualitas Peraturan Perundang-Undangan yang diharapkan responsif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran Indeks reformasi hukum sangat penting, terutama terkait gambaran kepastian hukum untuk iklim bisnis, perlindungan hak warga negara dan alat evaluasi bagi Pemerintah Daerah untuk perbaikan tata kelola hukum.

Indeks reformasi hukum Kota Tangerang Selatan tahun 2023 sebesar 76,09 (predikat BB/ Baik) dan tahun 2024 sebesar 99,16 (predikat AA/ Istimewa) Peningkatan nilai indeks yang sangat signifikan dapat menggambarkan adanya perbaikan yang substansial dalam tata kelola hukum, baik dari aspek transparansi, efisiensi, maupun kepatuhan terhadap regulasi.

2.1.4.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki empat tujuan, antara lain manajemen kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas, kemudian mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi. Indeks SPBE Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021-2024 menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam transformasi digital pemerintahan untuk mempercepat proses pelayanan publik dan meningkatkan transparansi.

Tabel 2.116. Capaian sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kota Tangerang Selatan

Layanan	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,48 (cukup)	2,54 (cukup)	3,18 (baik)	3,48 (baik)

Sumber: Diskominfo Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

2.1.4.4. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme sumberdaya manusia, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Indeks pelayanan publik merupakan salah satu komponen pengukuran reformasi birokrasi. Indeks pelayanan publik Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.117. Pada tahun 2024, Indeks Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan yang signifikan dan merupakan pencapaian tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.117. Capaian indeks pelayanan publik Kota Tangerang Selatan

Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	3,87	4,22	4,37	3,90	4,25

Sumber: SETDA Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

2.1.4.5. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) merupakan indikator yang mengukur tingkat digitalisasi transaksi keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana transaksi telah beralih dari sistem manual atau konvensional ke sistem digital. Berdasarkan klasifikasinya, ETPD terbagi menjadi tiga kategori: Konvensional (0%-25%) yang menunjukkan sebagian besar transaksi masih dilakukan secara manual; Semi Digital (25%-75%) di mana proses digitalisasi sudah mulai diterapkan namun belum menyeluruh; serta Digital (75%-100%) yang menandakan bahwa mayoritas transaksi telah terdigitalisasi sepenuhnya.

Berdasarkan data capaian indeks ETPD Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2021-2024 menunjukkan tren peningkatan

digitalisasi transaksi keuangan yang mengindikasikan penguatan sistem pembayaran nontunai, efisiensi proses administrasi keuangan, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Nilai indeks yang semakin mendekati angka maksimum (100) menunjukkan Kota Tangerang Selatan berada pada fase maturitas tinggi dalam implementasi transaksi digital Pemerintah Daerah.

Tabel 2.118. Capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tahun 2021-2024 Kota Tangerang Selatan

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	87,9	97,9	96,2	98,3

Sumber: Bapenda Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

2.1.4.6. Survei Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan sebuah survei yang dilakukan oleh KPK untuk memetakan risiko korupsi di instansi pemerintah. Perhitungannya melibatkan penilaian internal, eksternal, dan ahli, serta dikoreksi dengan faktor prevalensi korupsi dan integritas pelaksanaan SPI. Faktor koreksi ini dihitung berdasarkan data sekunder, seperti laporan pengaduan masyarakat ke KPK, jumlah kasus korupsi, dan hasil observasi survei. Indeks ini bertujuan untuk mendefinisikan integritas organisasi publik, menciptakan alat ukur yang objektif dan dapat diandalkan, serta mengevaluasi efektivitas upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah. Indeks ini menjadi salah satu acuan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan antikorupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Hasil SPI dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu Rentan (indeks <73), Waspada (indeks di antara 73-77) dan Terjaga (indeks 78-100). Semakin tinggi nilai mengindikasikan instansi mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu dan memiliki sistem yang relatif mampu merespon/ mengantisipasi dengan tepat ketika korupsi terjadi. Nilai SPI Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2024 disajikan dalam Tabel 2.119, dengan kisaran nilai antara 70-75 yang menggambarkan integrasi instansi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkategori rentan hingga waspada. Hal tersebut perlu menjadi perhatian dan ditangani segera karena akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 2.119. Hasil Survei Penilaian Integritas Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2024

No	Layanan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Survei Penilaian Integritas	70.90	73.32	74.29	76,25

Sumber: Kementerian PAN dan RB, Tahun 2024

2.1.4.7. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

a. Persentase Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepastian hukum. Perda yang ditegakkan dengan konsisten tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan regulasi, tetapi juga menjadi tolok ukur dalam

menciptakan ketertiban, keamanan, serta kepatuhan di masyarakat. Implementasi Perda yang optimal berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga, sekaligus memastikan bahwa kebijakan daerah dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Persentase Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditegakkan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.120, menunjukkan peningkatan signifikan dalam empat tahun terakhir. Peningkatan ini juga mendukung terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat, sejalan dengan prinsip pembangunan hukum yang berlandaskan hak asasi manusia.

Tabel 2.120. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	77,78%	100%	100%	100%

Sumber: Dokumen LPPD 2021-2024

b. Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM)

Pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi juga Pemerintah Daerah. Untuk memastikan implementasi HAM yang merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025. Regulasi ini mengatur peran aktif Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan dan program yang mendukung pemajuan HAM di wilayahnya masing-masing. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan setiap daerah dapat mengoptimalkan langkah-langkah strategis dalam melindungi hak-hak warga, terutama kelompok rentan, agar tercipta masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Persentase capaian aksi HAM di Kota Tangerang Selatan per aksi selama tahun 2022-2024 disajikan dalam Tabel 2.121 hingga Tabel 2.123 dimana tren capaian aksi HAM mengalami peningkatan. Aksi yang masih perlu diupayakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan karena pada tahun 2024 capaiannya mengalami penurunan, yaitu:

a. Aksi 1 : Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah, dan:
b. Aksi 3 : Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas.

Tabel 2.121. Capaian Aksi Ham Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

Aksi	Keterangan Aksi	Realisasi Nilai
Aksi 1	Penyusunan kebijakan oleh pelaku usaha yang memuat perlindungan hak ketenagakerjaan perempuan dan implementasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	86,7
Aksi 2	Peningkatan kesadaran dan kapasitas pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial dan/atau panti rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum.	86,3
Aksi 3	Optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum.	88,5

Aksi	Keterangan Aksi	Realisasi Nilai
Aksi 4	Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.	79
Aksi 5	Meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak dari kelompok: panti asuhan/ sosial, penghayat kepercayaan, minoritas agama, dan Kelompok Masyarakat Adat (KMA), Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Anak luar kawin.	93,5
Aksi 6	Mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.	71,2
Rata-rata		84,2

Sumber: Kemenkumham, 2023

Tabel 2.122. Capaian Aksi HAM Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Aksi	Keterangan Aksi	Realisasi Nilai
Aksi 1	Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.	93,3
Aksi 2	Optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum	100
Aksi 3	Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum	100
Aksi 4	Meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak dari kelompok: panti asuhan/ sosial, penghayat kepercayaan, minoritas agama, dan kelompok masyarakat adat (KMA), anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan anak luar kawin.	86,7
Aksi 5	Pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak-anak dari kelompok: a. Tinggal di daerah 3T/Kantong Kemiskinan (Perpres Nomor 63 Tahun 2020); b. Kelompok Masyarakat Adat (KMA); c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).	70
Aksi 6	Pemberian layanan khusus hak-hak kesehatan anak-anak dari kelompok: a. Tinggal di daerah 3T/Kantong Kemiskinan (Perpres Nomor 63 Tahun 2020); b. Kelompok Masyarakat Adat (KMA); c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	86,7
Aksi 7	Mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.	96,7
Rata-rata		90,49

Sumber: Kemenkumham, 2024

Tabel 2.123. Capaian Aksi HAM Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Aksi	Keterangan Aksi	Realisasi Nilai
Aksi 1	Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah	90,00
Aksi 2	Optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum	100
Aksi 3	Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas	96,7
Aksi 4	Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama	100
Aksi 5	Implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya	100
Aksi 6	Membangun sarana dan prasarana transportasi aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Permenhub 98/2017 pasal 3 dan 4 dalam ruang lingkup kewenangan daerah	100
Rata-rata		97,80

Sumber: Kemenkumham, 2025

c. Indeks Demokrasi (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) digunakan sebagai suatu alat ukur yang dapat menggambarkan tingkat perkembangan demokrasi berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi. IDI diperoleh dengan menggabungkan berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi dalam suatu wilayah. Nilai IDI Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022-2024 disajikan dalam Tabel 2.124, dimana tingkat perkembangan demokrasi pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari predikat baik menjadi predikat sedang. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya dinamika demokrasi atas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024.

Tabel 2.124. Indeks Demokrasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Indeks Demokrasi (IDI)	Sedang	Baik	81 (sedang)

Sumber: BPS, 2024

d. Indeks Rasa Aman

Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Persepsi dan realitas keamanan yang dirasakan oleh penduduk atau pemangku kepentingan dalam suatu area tertentu digambarkan dalam indeks rasa aman. Kota Tangerang Selatan memiliki nilai indeks rasa aman pada tahun 2021 hingga 2023 yang termasuk dalam kategori aman, sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.125. Indeks Rasa Aman Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Indeks Rasa Aman	Aman	Aman (66,97)	Aman (73,50)

Sumber: BPS, 2024

2.1.4.8. Ketangguhan Daerah

a. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional.

IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 (dua belas) pilar daya saing. Empat komponen pembentuk daya saing tersebut yaitu: Komponen Lingkungan Pendukung, Komponen Sumber Daya Manusia, Komponen Pasar dan Komponen Ekosistem Inovasi. Adapun pilar-pilar dalam masing-masing keempat komponen tersebut adalah:

a. Komponen Lingkungan Pendukung, meliputi empat pilar, yaitu:

1. Pilar 1 institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah;
2. Pilar 2 infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah;
3. Pilar 3 adopsi TIK yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0; dan
4. Pilar 4 stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup

b. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu:
   1. Pilar 5 kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup; dan
   2. Pilar 6 keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

c. Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu:
   1. Pilar 7 pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi;
   2. Pilar 8 pasar tenaga kerja yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja;
   3. Pilar 9 sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non perbankandi daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan
   4. Pilar 10 ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek.

d. Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu:
   1. Pilar 11 dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja: dan
   2. Pilar 12 kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Kategori nilai IDSD terdiri dari nilai 0 sampai dengan nilai 5, dimana nilai 0 s/d 1,25 termasuk kategori rendah, nilai 1,26 s/d 2,50 termasuk kategori sedang, nilai 2,51 s/d 3,75 termasuk kategori tinggi, dan nilai 3,76 s/d 5 termasuk kategori sangat tinggi. Nilai IDSD Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022-2024 disajikan Tabel 2.126, yang berkategori Sangat Tinggi.

Tabel 2.126. Indeks Daya Saing Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2022-2024

Kota Tangerang Selatan		**2022**	**2023**	**2024***
Lingkungan Pendukung	Pilar 1	4,28	4,14	4,64
	Pilar 2	N/A	3,75	4,36
	Pilar 3	3,88	4,93	4,95
	Pilar 4	3,78	3,54	4,83
SDM	Pilar 5	4	4,06	4,01
	Pilar 6	3,79	4,11	3,93
Pasar	Pilar 7	5,00	5,00	5,00
	Pilar 8	3,21	3,81	3,95
	Pilar 9	1,14	1,29	4,49

Kota Tangerang Selatan		2022	2023	2024*
	Pilar 10	4,09	4,94	4,97
Ekosistem Inovasi	Pilar 11	5	2,65	3,30
	Pilar 12	3,92	3,48	3,29
Skor IDSD		N/A	3,81	4,31

*Sumber: BRIN, Tahun 2025; Catatan: *= update Maret 2025*

2.1.4.9. Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam urusan pemerintahan daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana Pemerintah Daerah berhasil melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam memberikan pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan daerah. Rekap capaian IKK urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.127.

Tabel 2.127. Capaian Indikator Kinerja Kunci Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2024

No.	Urusan	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	N/A	60,24	65,48
2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	99,50	99,72	99,63
3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	98,27	98,26	98,59
4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	N/A	17,44	25,57
5	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	2,12	2,38	2,26
6	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	96,77	100	100
7	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100
8	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100
9	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100
10	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	100
11	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100
12	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100
13	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100
14	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100
15	Kesehatan	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100
16	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100
17	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100
18	Kesehatan	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100

No.	Urusan	IKK Outcome	2022	2023	2024
19	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	44,04	64,34	70,54
20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	-	-	-
21	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	-	-
22	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	98,64	97,91	98,37
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	97,56	99,29	99,34
24	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100	100
25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	93,87	97,52	98,12
26	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100
27	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100
28	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100
29	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100
30	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	100	100	100
31	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,60	0,35	0,27
32	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	100	100
33	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100
34	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100
35	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100
36	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100

No.	Urusan	IKK Outcome	2022	2023	2024
37	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100
38	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100
39	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	7,61	11,12	10,91
40	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	100	100
41	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100
42	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	100
43	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	68,69	59,37	59,39
44	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp juta)	86,48	169,84	121,42
45	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	57,79	34,59	78,14
46	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	53,23	54,31	54,33
47	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	23,12	20,52	29,14
48	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100	100	100
49	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11,03	8,80	8,51
50	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	32,21	71,75	146,79
51	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	98,76	100	100
52	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	100	100
53	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	98,76	100	60
54	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-	-	-
55	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	100	100
56	Pertanahan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100
57	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	56,66	57,93	61,03
58	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	99,52	99,35	96.83

No.	Urusan	IKK Outcome	2022	2023	2024
59	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0	0	50
60	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,48	98,48	99,05
61	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 1-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	42,04	51,57	69,47
62	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	96,06	97,34	97,79
63	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100	100	100
64	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	-	-	-
65	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	-	-	-
66	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,1	1,71	2,42
67	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	76,52	77,31	68,14
68	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	6,10	6,09	6,15
69	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,59	0,77	0,93
70	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,54	0,54	0,54
71	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100
72	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100
73	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	100	100
74	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	51,54	65,36	67,36
75	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausahaan	70,70	100	100
76	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-17,96	59,92	13,86
77	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,57	1,89	1,78
78	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,74	4,57	5
79	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	393	32	33
80	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100
81	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100

No.	Urusan	IKK Outcome	2022	2023	2024
82	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	76,28	84,65	86,05
83	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	100	100
84	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	67,35	67,35	87,99
85	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	79,31	54,69	57,93
86	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	100	100	100
87	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100	100	100
88	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	104,33	70,47	99,99
89	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	212,19	79,66	40,93
90	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	73,80	75,50	75,63
91	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	70,33	71,60	72,05
92	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,87	2,93	3,04
93	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	20,50	21,82	23,25
94	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	126,02	0	1,42
95	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	11,58	7,32	-15,29
96	Kehutanan	-	-	-	-
97	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	-	-	-
98	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	77,51	100	100
99	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	-	-	-
100	Perdagangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku,	100	100	100
101	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	24,14	129,17	20
102	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	-	-	-
103	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100
104	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	100	100
105	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	-	-	-
106	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	100	100
107	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-
108	Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	12,00	10,59	13,45
109	Keuangan	Rasio PAD	53,79	52,38	52,18
110	Unsur Pengawasan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3
111	Unsur Pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3

No.	Urusan	IKK Outcome	2022	2023	2024
112	Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer *expenditures*)	47,19	45,27	70,5
113	Keuangan	Opini Laporan Keuangan	8	8	9
114	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0
115	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	73,61	88,67	73,45
116	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	99,31	72,50	63,73
117	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	12,15	3,56	39,75
118	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	94,29	94,04	95,09
119	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	20,44	23,55	25,11
120	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	42,72	43,79	59,64
121	Keuangan	*Budget execution*: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	5,91	2,64	0,76
122	Keuangan	*Revenue mobilization*: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	22,54	10,84	16,39
123	Keuangan	Manajemen Aset	4	4	4
124	Keuangan	*Cash Management*: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	14,84	5,97	4,82
125	Keuangan	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units*)	96,43	97,20	96,62
126	Keuangan	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*)	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2024

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Subbab ini menyajikan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan hingga tahun berjalan, serta capaian realisasi terhadap target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029.

2.2.1. Evaluasi Indikator Makro Pembangunan

Evaluasi terhadap capaian Indikator Makro Pembangunan dalam penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan hingga Tahun 2024. Hal ini mempertimbangkan karakteristik data indikator makro yang umumnya dirilis secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), di mana data capaian pada tingkat kabupaten/kota bersifat tahunan dan baru dapat diakses secara lengkap paling cepat pada Triwulan IV Tahun 2025 atau paling lambat pada awal Tahun 2026.

Evaluasi ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya dan menjadi landasan perumusan strategi serta arah kebijakan pembangunan tahun 2026. Fokus evaluasi diarahkan pada indikator-indikator kunci

pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia (IPM), gini rasio, dan indikator lingkungan hidup.

Adapun capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.128. Target dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Satuan	Target PRKPD 2024	Realisasi
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,36-5,5	5,02
2	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	N/A	80,18
3	Tingkat Kemiskinan	%	1,75-2,50	2,36
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,24	5,09
5	Rasio Gini	Indeks	0,339	0,395
6	Kontribusi PDRB Kota Tangerang Selatan terhadap Provinsi Banten	%	N/A	12,84
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83,70	84,16
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	N/A	N/A
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	60,66	61,03

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat secara keseluruhan bahwa, capaian indikator makro pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 menunjukkan kinerja yang cukup baik, dengan sebagian besar indikator berhasil mencapai bahkan melampaui target. Namun, perlu perhatian khusus terhadap aspek pertumbuhan ekonomi yang belum optimal agar ke depan pertumbuhan tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Capaian ini akan menjadi landasan penting dalam merumuskan prioritas dan arah kebijakan pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

2.2.2. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah

Dalam RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026, disajikan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup indikator tujuan dan indikator sasaran. Capaian tersebut dievaluasi terhadap target yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029.

Berikut ini disajikan rekapitulasi hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 dan target dalam RKPD Tahun 2026, sebagaimana dirangkum dalam dibawah ini.

Tabel 2.129. Capaian Rekapitulasi Hasil Pengukuran atas IKU Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2024
Misi 1. Meningkatkan Kualitas SDM	**Terwujudnya SDM yang unggul,**		**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**84,16**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2024
yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera	**berdaya saing global dan sejahtera**	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	11,86
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,7
			Kemampuan Literasi SD	Skor	67,17
			Kemampuan Literasi SMP	Skor	81,28
			Kemampuan Numerasi SD	Skor	57,3
			Kemampuan Numerasi SMP	Skor	69,61
		S2. Meningkatnya derajat kesehatan pada seluruh siklus kehidupan untuk semua	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,8
		S3. Terwujudnya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial	Tingkat Kemiskinan	%	2,36
			Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	N/A
		S4. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	65,65
			Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,176
			Indeks Perlindungan Anak	Indeks	73
		S5. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55,86
		S6. Meningkatnya literasi masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan digital	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	87,99
Misi 2. Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi	**T2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi**		**Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)**	**%**	**5,02**
			PDRB (ADHB) Per Kapita	**Juta Rp**	**80,18**
			Kontribusi PDRB terhadap Provinsi Banten	**%**	**12,84**
			Rasio Gini	**Indeks**	**0,395**
			Tingkat Pengangguran Terbuka	**%**	**5,09**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2024
		S1. Berkembangnya potensi unggulan daerah terutama sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global	Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa	%	69,53
			Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,04
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	11,19
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	51,38
			Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1,99
		S2. Meningkatnya peran serta dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing dan inklusif berbasis penguatan IPTEK dan inovasi	Produktivitas tenaga kerja per total output (PDRB ADHK)	Juta Rp	121,42
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	58,13
		S3. Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHB)	%	43,34
			Nilai investasi (PMDN dan PMA)	Triliun Rp	8,48
Misi 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas	**T3. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola yang profesional, inovatif dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**85,61**
		S1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif, efisien, dan inklusif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,25
		S2. Terwujudnya pengarusutamaan transformasi digital pada sektor-sektor strategis	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	49,82
			Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Indeks	98,3
			Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	65,45
		S3. Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring, akuntabel,	Nilai SAKIP	Nilai	69,06
			Jumlah kerja sama antar Pemerintah Daerah	angka	4
			Rasio Pajak terhadap PDRB (ADHB)	%	1,87

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2024
		transparan dan efisien	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP
			Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	N/A
		S4. Meningkatnya kualitas regulasi yang adaptif dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99,16
		S5. Meningkatnya profesionalisme ASN yang kompeten, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan prima	Indeks Sistem Merit	Indeks	326
			Indeks BerAkhlak	Indeks	79,75
			Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	79
		S6. Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	76,25
		S7. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi daerah	Angka	50,45
			Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	3,29
			Persentase kebijakan berbasis bukti	%	N/A
Misi 4. Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif Dan Berkelanjutan	**T4. Terwujudnya Kota Layak Huni yang berketahanan, lestari dan inklusif**		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**Indeks**	**61,03**
			Indeks Kota Layak Huni	**Indeks**	**70,03**
			Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	**%**	**N/A**
		S1 Meningkatnya ketahanan pangan daerah yang merata dan berkelanjutan	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU)	%	3,13
		S2. Menurunnya potensi risiko bencana yang berbasis pengurangan dampak dan penguatan ketangguhan masyarakat	Indeks Risiko Bencana	Indeks	68,1
		S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan yang	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	64
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	71,59

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2024
		berkelanjutan dan layak huni	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	36,38
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	96,83
			Proporsi Rumah Tangga (RT)dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	N/A
		S4. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan yang andil, inklusif, dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8,29
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (akses aman)	%	21
			Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	%	96,13
			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	N/A
		S5. Menguatnya keterikatan sosial antar warga serta kehidupan bermasyarakat yang berbudaya, demokratis dan menjunjung tinggi HAM berlandaskan Pancasila	Indeks Harmoni	Indeks	7,29
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	52,6
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	72,39 (2023)
			Indeks Demokrasi	Indeks	86,04
			Indeks Rasa Aman	Angka	66.97

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, 2025

Berikut disajikan analisis terhadap masing-masing indikator makro pembangunan yang berkaitan dengan capaian tujuan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

1. **Tujuan T1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Berdaya Saing Global dan Sejahtera**

   Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator makro yang bersifat komposit dan strategis, karena mencerminkan kualitas hidup masyarakat dari tiga dimensi utama: umur panjang dan hidup sehat (usia harapan hidup), akses terhadap pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pendapatan per

kapita). Nilai IPM Kota Tangerang Selatan yang mencapai 84,16 pada tahun 2024 tergolong sangat tinggi dan menunjukkan capaian pembangunan manusia yang sudah berada di atas rata-rata nasional.

Capaian ini juga selaras dengan arah pembangunan daerah yang menempatkan SDM unggul sebagai fondasi daya saing kota dalam jangka panjang, khususnya dalam menghadapi bonus demografi dan tantangan revolusi industri berbasis digital. Oleh karena itu, berbagai program prioritas dalam RKPD 2026 diarahkan untuk mendukung perbaikan indikator-indikator turunan IPM seperti peningkatan akses dan kualitas pendidikan, layanan kesehatan universal, serta peningkatan pendapatan dan produktivitas masyarakat.

2. Tujuan T2: Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan ukuran utama dalam menilai kinerja ekonomi suatu wilayah secara makro, yang mencerminkan tingkat pertambahan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan tercatat sebesar 5,02%, menunjukkan pergerakan ekonomi yang cukup positif. Namun demikian, angka tersebut masih di bawah rata-rata target nasional dan regional untuk wilayah perkotaan penyangga ibu kota.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Pada tahun 2024, tren peningkatan ekonomi di Kota Tangerang Selatan masih berlanjut, yang juga menggambarkan pendapatan masyarakat masih berlanjut untuk mengalami peningkatan.

Kontribusi PDRB Kota Tangerang Selatan terhadap Provinsi Banten menunjukkan bagaimana peranan Kota Tangerang Selatan dalam struktur ekonomi wilayah di Provinsi Banten. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk perencanaan di level Provinsi Banten agar selaras dengan tujuan Pembangunan Provinsi Banten. Kontribusi PDRB Kota Tangerang Selatan terhadap Provinsi Banten menunjukkan bagaimana peranan Kota Tangerang Selatan dalam struktur ekonomi wilayah di Provinsi Banten. Secara umum Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Banten yang memiliki perekonomian relatif sudah mapan yang ditopang dari perdagangan dan jasa. Pada perekonomian yang sudah mapan seperti Kota Tangerang Selatan, umumnya laju pertumbuhan cenderung melambat karena kapasitas ruang sudah berkurang untuk ekspansi perekonomian.

Rasio Gini merupakan indikator yang mencerminkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin tinggi nilai Rasio Gini, semakin timpang distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Dalam konteks Kota Tangerang Selatan, nilai Rasio Gini sempat mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024, dengan kecenderungan meningkat

pada tahun 2024 sebesar 0,395, menunjukkan perlunya perhatian lebih serius terhadap isu ketimpangan sosial-ekonomi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT memberikan gambaran tentang seberapa efisien pasar tenaga kerja suatu negara dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia. Pada tahun 2024, tingkat pengangguran di Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 5,09%, hal ini disebabkan oleh penduduk usia produktif memilih melanjutkan pendidikan dibandingkan bekerja dan adanya pengangguran tersembunyi.

Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemudahan, keterjangkauan, dan ketersediaan layanan keuangan formal di suatu wilayah. Indeks ini menjadi alat untuk memantau perkembangan inklusi keuangan di tingkat daerah. Indeks ini dapat dijadikan dasar perencanaan dan pengembangan kebijakan seperti: pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), edukasi literasi keuangan, atau pemberdayaan UMKM.

Tantangan utama yang perlu diantisipasi adalah ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan daya serap investasi swasta yang masih perlu ditingkatkan dalam penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas.

3. Tujuan T3: Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola yang profesional, inovatif dan berintegritas

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, yang meliputi aspek kelembagaan, tata laksana, pengawasan, akuntabilitas, penguatan kualitas sumber daya aparatur, serta pelayanan publik. Indeks ini menjadi ukuran penting dalam menilai sejauh mana birokrasi daerah mampu bertransformasi menjadi lebih profesional, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan.

Pada tahun 2024, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tangerang Selatan tercatat sebesar 85,61. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja birokrasi daerah telah berada pada level sangat baik, yang menandakan kemajuan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, penerapan prinsip good governance, dan perbaikan sistem pelayanan publik.

Meskipun demikian dalam konteks reformasi birokrasi yang kompleks dan multidimensi, peningkatan pada kisaran nilai tinggi memerlukan konsistensi kebijakan, kepemimpinan yang kuat, serta perubahan budaya kerja aparatur secara berkelanjutan.

4. Tujuan T4: Terwujudnya Kota Layak Huni yang berketahanan, lestari dan inklusif

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan ukuran komposit yang mencerminkan kondisi mutu lingkungan hidup suatu wilayah berdasarkan tiga komponen utama, yaitu kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan. Indeks ini digunakan untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam menjaga keberlanjutan daya dukung

dan daya tampung lingkungan sebagai fondasi kota yang layak huni dan berkelanjutan.

Selain itu, Indeks Kota Layak Huni merupakan alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kelayakan huni suatu kota atau wilayah. Indeks ini mencakup sejumlah indikator yang mencerminkan kualitas hidup, keberlanjutan lingkungan, dan ketersediaan layanan dasar di dalam kota. Pada tahun 2024, komponen ketersediaan layanan dasar dengan skor indeks tertinggi adalah fasilitas pendidikan, telekomunikasi, fasilitas peribadatan, penyediaan air bersih serta fasilitas administrasi dan pelayanan publik. Sementara itu fasilitas kesenian budaya, fasilitas pejalan kaki dan fasilitas kelompok rentan merupakan nilai indeks terendah pada Kota Tangerang Selatan.

Indikator Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi representasi komitmen Kota Tangerang Selatan dalam menghadapi krisis iklim global. Indikator ini mengukur efektivitas upaya mitigasi emisi GRK yang berasal dari sektor energi, limbah, industri, pertanian, dan kehutanan.

Pada tahun 2024, capaian indikator-indikator lingkungan hidup Kota Tangerang Selatan menunjukkan tren yang positif namun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pengelolaan limbah, kualitas udara, dan perubahan tutupan lahan. Indeks Kota Layak Huni dalam kurun waktu lima tahun kebelakang menunjukkan tingkat kelayakan huni dalam kategori baik, memerlukan usaha untuk mencapai predikat sangat baik. Intensitas emisi GRK juga perlu terus ditekan, seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat

2.2.3. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan Urusan

Evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan untuk menilai konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Capaian pada tahun pertama ini menjadi pijakan awal yang menentukan arah, kecepatan, dan konsistensi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tangerang Selatan.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2026 disajikan melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD), yang mencerminkan hasil pembangunan pada berbagai urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Data ini menjadi dasar evaluatif dan proyeksi perencanaan pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.130. Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2026

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN		Urusan Leading Sektor
				2025	2026	
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	88,67	89,5	90,5	Urusan Pangan
2	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU)	%	3,13	2,96	1,35	Urusan Pangan
3	Konsumsi listrik per Kapita	kWh/kapita	3.108,97	3.217	3.330	
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Konsumsi Air Minum Layak (BJP dan JP)	%	98,37	100	100	Urusan PUPR
5	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	21	21	22	Urusan PUPR
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	61,03	48.23	48,52	Urusan Lingkungan Hidup

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN		Urusan Leading Sektor
				2025	2026	
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	N/A	16	18,7	Urusan PUPR
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	96,83	97	97	Urusan Lingkungan Hidup
9	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	N/A	70	70	Urusan Lingkungan Hidup
10	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	N/A	18,45	19,02	Urusan Lingkungan Hidup
11	Indeks Risiko Bencana	Indeks	68,1	63,2	62,59	Urusan Trantibumlinmas
12	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	64	71	71,2	Urusan Lingkungan Hidup
13	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	71,59	34,93	35,43	Urusan Lingkungan Hidup
14	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	36,38	33,73	33,8	Urusan Lingkungan Hidup
15	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,58	0,67	0,71	Urusan Trantibumlinmas
16	Kapasitas Air Baku	lt/detik	997,86 (2023)	1.568,00	1.853,00	Urusan PUPR
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,16	84,42-84,68	84,54-84,82	
2	Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)	%	5,02	5,40-6,31	5,60-6,45	
3	PDRB (ADHB) Per Kapita	Juta Rp	80,18	86,03-87,82	91,59-95,99	
4	Rasio Gini	Indeks	0,395	0,353-0,380	0,345-0,353	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,09	4,76-5,65	4,6-5,42	Urusan Tenaga Kerja
6	Tingkat Kemiskinan	%	2,36	1,91-2,25	1,84-2,10	Urusan Sosial
7	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	N/A	58,91	59,15	
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	0,27	0,25	0,23	Urusan Sosial
9	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,05	0,04	0,035	Urusan Sosial
10	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,8	76,21	76,65	Urusan Kesehatan
11	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	10,5	9	7,54	Urusan Kesehatan
12	Jumlah Kematian Ibu	Orang	8	14	14	Urusan Kesehatan
13	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis	%	90	95	95	Urusan Kesehatan
14	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	%	90	90	90	Urusan Kesehatan
15	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	99,6	100	100	Urusan Kesehatan
16	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	11,86	12,04	12,19	Urusan Pendidikan
17	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,7	15,12	15,35	Urusan Pendidikan
18	Kemampuan Literasi SD	Skor	67,17	69,67	72,17	Urusan Pendidikan
19	Kemampuan Literasi SMP	Skor	81,28	82,38	83,48	Urusan Pendidikan
20	Kemampuan Numerasi SD	Skor	57,3	60,2	63,1	Urusan Pendidikan
21	Kemampuan Numerasi SMP	Skor	69,61	71,11	72,61	Urusan Pendidikan
22	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	87,99	88,49	90,59	Urusan Perpustakaan
23	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	57,93	62,32	64,71	Urusan Perpustakaan
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	45	45	49,03	Urusan Tenaga Kerja
25	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	72,39 (2023)	77,5	78	Kesbangpol
26	Indeks Harmoni	Indeks	7,29	7,4	7,45	Kesbangpol
27	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	52,6	53,1	54,1	Urusan Kebudayaan
28	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	73	73,05	73,1	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
29	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	65,65	65,7	65,97	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
30	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,176	0,174	0,172	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
31	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,47	94,53	94,64	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
32	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55,86	55,96	56	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
1	Angka Ketergantungan	Nilai	40,05	40,2	40,38	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,09	8,18	8,27	

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN		Urusan Leading Sektor
				2025	2026	
3	Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa	%	69,53	69,6	69,7	
4	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,04	3,11	3,19	
5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	11,19	11,64	11,71	
6	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	51,38	52,4	52,8	
7	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1,99	2,15	2,68	Urusan Koperasi dan UKM
8	Produktivitas tenaga kerja per total output (PDRB ADHK)	Juta Rp	121,42	127,96 - 129,10	135,12-137,42	Urusan Tenaga Kerja
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	58,13	60,5	61,46	Urusan Tenaga Kerja
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	40,01	43,40-43,70	44,10-44,80	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHB)	%	43,34	44	44,8	
12	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan (kumulatif)	orang	23	71	119	Urusan Tenaga Kerja
13	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kota	unit	1	1	1	Urusan Tenaga Kerja
14	Indeks Inovasi daerah	Angka	50,45	52	54	Unsur Penelitian dan Pengembangan
15	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	3,29	3,29	3,29	Unsur Penelitian dan Pengembangan
16	Total Anggaran Belanja Litbang/Riset dan Inovasi	%	0,02 (2023)	0,02	0,02	Unsur Penelitian dan Pengembangan
17	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	49,82	49,87	49,92	Urusan Kominfo
18	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	5,03	5,05	5,07	Sekretariat Daerah
21	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8,29	8,3	8,31	
22	Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	%	96,13	97	97,5	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	70,03	70,04	70,05	
24	Rasio Pajak terhadap PDRB (ADHB)	%	1,87	1,92	1,98	Unsur Keuangan
25	Nilai investasi (PMDN dan PMA)	Triliun Rp	8,48	8,7	9,39	Urusan Penanaman Modal
26	Nilai ICOR	nilai	7,72	7,5	6	
27	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Menengah ke atas	%	64,43 (2023)	65,39	66,24	Urusan Pendidikan
28	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja	%	76,31	76,96	77,43	Urusan Tenaga Kerja
29	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	%	70,93	71,02	71,29	Urusan Tenaga Kerja
30	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Hotel Berbintang)	ribu orang	399,06	420,1	441,14	Urusan Pariwisata
31	Proporsi Jumlah Usaha Mikro pada Level Kota	%	10	11,9	12,23	Urusan Koperasi dan UKM
32	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	46 (2023)	47	48	Urusan Koperasi dan UKM
33	Kontribusi PDRB terhadap Provinsi Banten	%	12,84	13,01-13,08	13,1-13,15	
34	Proporsi Kontribusi PDRB Kota Tangerang Selatan terhadap WM Jakarta /Jabodetabekjur	%	2,17 (2023)	2,17	2,20-2,26	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,61	86,5	87,5	Sekretariat Daerah
2	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99,16	99,3	99,34	Sekretariat Daerah
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,48	3,5	-	Urusan Kominfo
4	Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)	Indeks	N/A	-	2	Urusan Kominfo
5	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Nilai	98,3	99	99	Unsur Keuangan
6	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,25	4,25	4,26	Sekretariat Daerah
7	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	76,25	77	78	Unsur Pengawasan
8	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	Urusan Trantibumlinmas
9	Capaian Aksi HAM	%	97,5	97,5	97,6	Sekretariat Daerah
10	Indeks Demokrasi	Indeks	86,04	86,5	87	Kesbangpol
11	Indeks Rasa Aman	Angka	66.97	73,7	74,21	Urusan Trantibumlinmas

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN		Urusan Leading Sektor
				2025	2026	
12	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	4,31	4,31	4,33	
13	Return on Asset (ROA) BUMD	%	1,94	2	2.11	Sekretariat Daerah
14	Jumlah kerja sama antar Pemerintah Daerah	angka	4	5	6	Sekretariat Daerah
15	Indeks Institusi	Indeks	4,14 (2023)	4,28	4,3	
16	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	79	80	81	Unsur Kepegawaian
17	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	Unsur Keuangan
18	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	65,45	66,36	67,09	Urusan Arsip
19	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	N/A	2	2,1	Unsur Keuangan
20	Nilai SAKIP	Nlai	69,06	70	72	Sekretariat Daerah
21	Indeks BerAkhlak	Indeks	79,75	80,5	81	Unsur Kepegawaian
22	Indeks Sistem Merit	Indeks	326	330	334	Unsur Kepegawaian
23	Persentase kebijakan berbasis bukti	%	N/A	50	51	Unsur Penelitian dan Pengembangan
24	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,82	0,83	0,83	Sekretariat Daerah

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

2.2.4. Evaluasi Pengelolaan Keuangan sampai dengan Triwulan I TA. 2025

Subbab ini menyajikan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Evaluasi dilakukan terhadap komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk menilai efektivitas pelaksanaan anggaran selama periode tersebut. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan strategi penyesuaian kebijakan fiskal pada tahap perencanaan RKPD 2026.

Berikut Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Konsolidasi) Tahun Anggaran 2025 periode 1 Januari 2025 Sampai 31 Maret 2025.

Tabel 2.131. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (Konsolidasi) Tahun Anggaran 2025 periode 1 Januari 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4/3) * 100
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**4.662.775.397.059,00**	**1.094.003.516.342,00**	**23,46**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.781.287.221.449,00**	**728.970.467.711,00**	**26,21**
4.1.01	Pajak Daerah	2.548.478.000.000,00	669.782.335.309,00	26,28
4.1.01.09	Pajak Reklame	43.000.000.000,00	14.005.536.214,00	32,57
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	5.000.000.000,00	2.112.270.435,00	42,25
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	440.000.000.000,00	162.965.653.816,00	37,04
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	623.000.000.000,00	146.132.041.783,00	23,46
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	789.000.000.000,00	213.206.781.061,00	27,02
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	367.217.000.000,00	86.618.935.000,00	23,59
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	281.261.000.000,00	44.741.117.000,00	15,91
4.1.02	Retribusi Daerah	144.280.359.200,00	31.702.518.241,00	21,97
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	110.378.377.200,00	24.818.858.802,00	22,49
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.401.982.000,00	974.314.500,00	18,04
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	28.500.000.000,00	5.909.344.939,00	20,73
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	735.000.000,00	0,00	0,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	735.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	87.793.862.249,00	27.485.614.161,00	31,31
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	910.389.249,00	201.830.500,00	22,17
4.1.04.05	Jasa Giro	24.000.000.000,00	2.783.177.929,00	11,60
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4/3) * 100
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	26.600.000,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.500.000.000,00	8.890.693.526,00	592,71
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	10.921.513,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	546.919.030,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	61.383.473.000,00	15.025.471.663,00	24,48
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.881.488.175.610,00**	**365.033.048.631,00**	**19,40**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.464.896.836.000,00	194.336.405.010,00	13,27
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	305.919.309.000,00	1.249.435.750,00	0,41
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	729.628.055.000,00	192.830.254.260,00	26,43
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	415.246.593.000,00	256.715.000,00	0,06
4.2.01.06	Insentif Fiskal	14.102.879.000,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	416.591.339.610,00	170.696.643.621,00	40,97
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	416.591.339.610,00	170.696.643.621,00	40,97
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, 2025

1. Pendapatan Daerah Secara Keseluruhan

Berdsarkan Tabel 2.131 dapat dilihat bahwa, sampai dengan pertengahan tahun anggaran 2025, realisasi pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan tercatat sebesar Rp1.094.003.516.342,00 atau sekitar 23,46% dari total target pendapatan daerah yang ditetapkan dalam anggaran sebesar Rp4.662.775.397.059,00. Persentase tersebut menunjukkan bahwa capaian pendapatan masih relatif rendah jika dibandingkan dengan proporsi waktu pelaksanaan tahun anggaran, yang telah mencapai triwulan kedua.

Rendahnya capaian ini mengindikasikan bahwa secara agregat, kinerja pendapatan daerah perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi secara lebih mendalam, terutama dalam konteks efektivitas perencanaan dan pelaksanaan strategi pengelolaan pendapatan daerah.

Namun demikian, jika ditelaah lebih lanjut, capaian pendapatan ini tidak bersifat seragam di seluruh jenis dan sumber pendapatan. Terdapat beberapa komponen pendapatan yang menunjukkan realisasi cukup tinggi bahkan melampaui target proyeksi sementara, seperti pendapatan dari denda pajak daerah. Sebaliknya, terdapat pula jenis pendapatan yang menunjukkan kinerja sangat rendah, khususnya pada komponen transfer dari pemerintah pusat yang belum terealisasi secara optimal.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen utama dalam struktur pendapatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang merepresentasikan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran PAD ditetapkan sebesar Rp2.781.287.221.449,00. Hingga akhir Triwulan I, realisasi PAD tercatat sebesar Rp728.970.467.711,00 atau setara dengan 26,21% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan PAD masih berada pada kategori sedang, dengan beberapa

jenis pajak dan retribusi menunjukkan progres yang baik, sementara lainnya masih jauh di bawah target. Adapun rincian analisis per komponen PAD sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan penyumbang terbesar terhadap PAD, dengan realisasi mencapai Rp669,78 miliar atau 26,28% dari target Rp2,55 triliun. Capaian ini menunjukkan kontribusi dominan sektor perpajakan dalam mendukung pendapatan daerah. Beberapa jenis pajak yang menonjol antara lain:

1) Pajak Reklame terealisasi sebesar Rp14.005.536.214,00 dari target Rp43.000.000.000,00 (32,57%). Persentase ini tergolong tinggi di antara jenis pajak lainnya, meskipun secara nominal masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak reklame, terutama pada kawasan pertumbuhan ekonomi.
2) Pajak Air Tanah menunjukkan progres terbaik dengan realisasi Rp2.112.270.435,00 dari target Rp5.000.000.000,00 (42,25%). Capaian ini mencerminkan keberhasilan upaya penertiban izin penggunaan air tanah dan pendataan wajib pajak, namun juga menandakan potensi optimalisasi lebih lanjut, khususnya melalui integrasi data pemanfaatan air tanah lintas sektor.
3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terealisasi sebesar Rp162.965.653.816,00 dari target Rp440.000.000.000,00 (37,04%). Meskipun tergolong cukup tinggi pada Triwulan I, realisasi ini masih memerlukan strategi percepatan, mengingat PBB-P2 cenderung mengalami lonjakan pembayaran pada semester II.
4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) baru mencapai Rp146.132.041.783,00 atau 23,46% dari target Rp623.000.000.000,00. Capaian ini perlu menjadi perhatian mengingat karakteristik BPHTB yang sangat bergantung pada dinamika sektor properti dan aktivitas jual beli lahan.
5) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) telah terealisasi sebesar Rp213.206.781.061,00 atau 27,02% dari target. PBJT masih memiliki potensi untuk ditingkatkan, terutama dari sektor hotel, restoran, dan hiburan, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pascapandemi.
6) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp86.618.935.000,00 (23,59%), sedangkan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih sangat rendah yaitu Rp44.741.117.000,00 atau hanya 15,91%. Rendahnya capaian opsen BBNKB mengindikasikan perlunya strategi percepatan pelaporan dan transfer data dari Pemerintah Provinsi, serta upaya edukasi kepada masyarakat.

b. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah secara keseluruhan baru mencapai Rp31.702.518.241,00 atau 21,97% dari target sebesar Rp144.280.359.200,00. Angka ini menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi retribusi belum tergali secara optimal. Rincian per jenis retribusi menunjukkan bahwa:

1) Retribusi Jasa Umum menyumbang sebagian besar realisasi, yakni Rp24.818.858.802,00 dari target Rp110.378.377.200,00 (22,49%). Masih terbuka ruang untuk peningkatan layanan publik yang

berorientasi pada peningkatan kualitas dan efektivitas pemungutan.

2) Retribusi Jasa Usaha menunjukkan kinerja yang paling rendah, hanya mencapai Rp974.314.500,00 atau 18,04% dari target Rp5.401.982.000,00. Capaian ini mengindikasikan rendahnya efektivitas pengelolaan aset dan layanan usaha daerah, serta kemungkinan adanya kendala struktural dalam penarikan retribusi jenis ini.
3) Retribusi Perizinan Tertentu baru terealisasi sebesar Rp5.909.344.939,00 atau 20,73% dari target Rp28.500.000.000,00. Optimalisasi retribusi ini memerlukan peningkatan koordinasi antar-perangkat daerah dalam penerapan kebijakan perizinan berbayar dan pelayanan berbasis OSS (Online Single Submission).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Sampai dengan akhir Triwulan I, realisasi dari komponen ini adalah nihil (0,00%) dari target Rp735.000.000,00. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pembagian dividen dari penyertaan modal daerah kepada BUMD, baik dari aspek waktu penyaluran maupun komitmen kinerja entitas terkait.

d. Lain-lain PAD yang Sah
Realisasi pada komponen ini tercatat sebesar Rp27.485.614.161,00 atau 31,31% dari target Rp87.793.862.249,00. Beberapa pos yang menonjol antara lain:

1) Pendapatan Denda Pajak Daerah menunjukkan capaian luar biasa sebesar Rp8.890.693.526,00 dari target Rp1.500.000.000,00 (592,71%). Hal ini mencerminkan keberhasilan penegakan sanksi administrasi, namun juga perlu dikaji keberlanjutannya agar tidak hanya bersifat insidental.
2) Pendapatan BLUD mencapai Rp15.025.471.663,00 dari target Rp61.383.473.000,00 (24,48%), menunjukkan progres moderat yang dapat ditingkatkan melalui penguatan tata kelola dan pelayanan unit BLUD.
3) Jasa Giro dan hasil pemanfaatan BMD masih rendah (masing-masing 11,60% dan 22,17%), yang mengindikasikan potensi optimalisasi pengelolaan kas dan aset daerah yang belum maksimal.

Secara keseluruhan, realisasi PAD hingga Triwulan I Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian yang masih perlu diperkuat, baik melalui peningkatan intensitas pengawasan terhadap potensi pajak dan retribusi, percepatan penagihan, pemutakhiran data objek dan subjek pajak, maupun penguatan kapasitas kelembagaan pemungut PAD.

3. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan. Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran Pendapatan Transfer untuk Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp1.881.488.175.610,00, dengan realisasi hingga akhir Triwulan I sebesar Rp365.033.048.631,00 atau 19,40%. Capaian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, realisasi pendapatan transfer masih tergolong rendah, khususnya yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Rincian analisis pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

Dari total alokasi pendapatan transfer, sebagian besar bersumber dari Pemerintah Pusat dengan nilai anggaran sebesar Rp1.464.896.836.000,00, namun realisasinya hingga akhir Triwulan I hanya mencapai Rp194.336.405.010,00 atau 13,27%. Persentase ini jauh di bawah ekspektasi triwulanan dan perlu menjadi perhatian dalam rangka menjaga stabilitas kas daerah. Beberapa komponen utama dari pendapatan transfer pusat antara lain:

1) Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan capaian relatif baik, yaitu sebesar Rp192.830.254.260,00 dari target Rp729.628.055.000,00 (realisasi 26,43%). DAU bersifat *block grant* dan menjadi salah satu komponen pendapatan yang paling stabil, sehingga kontribusinya tetap signifikan dalam mendukung belanja operasional.
2) Dana Bagi Hasil (DBH) baru terealisasi sebesar Rp1.249.435.750,00 dari target Rp305.919.309.000,00 atau hanya 0,41%. Rendahnya realisasi ini dapat disebabkan oleh keterlambatan distribusi dari Pemerintah Pusat, baik karena siklus pelaporan maupun persoalan administratif terkait perhitungan bagi hasil.
3) Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp256.715.000,00 dari total anggaran Rp415.246.593.000,00 atau 0,06%. Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK masih berada pada tahap awal persiapan, baik dari sisi perencanaan teknis, proses kontraktual, maupun pelaporan awal.
4) Insentif Fiskal yang dialokasikan sebesar Rp14.102.879.000,00 belum terealisasi (0%). Hal ini kemungkinan besar berkaitan dengan tahapan evaluasi kinerja daerah oleh Pemerintah Pusat sebagai prasyarat penyaluran insentif tersebut.

Rendahnya realisasi transfer dari pusat secara keseluruhan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterlambatan penyaluran dana, belum terpenuhinya dokumen persyaratan teknis dan administrasi dari pemerintah daerah, atau proses penyesuaian regulasi pusat yang berdampak pada penjadwalan ulang penyaluran.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah menunjukkan kinerja yang lebih baik, dengan realisasi sebesar Rp170.696.643.621,00 dari total alokasi Rp416.591.339.610,00, atau mencapai 40,97%. Seluruh realisasi ini berasal dari komponen pendapatan bagi hasil antar daerah, yang menunjukkan efektivitas kerja sama fiskal antar-pemerintah daerah, khususnya dengan Pemerintah Provinsi Banten.

Capaian ini mengindikasikan bahwa mekanisme distribusi pendapatan antar daerah lebih cepat dan lebih stabil dibandingkan transfer dari pusat, serta relatif tidak terlalu terpengaruh oleh siklus anggaran nasional. Namun demikian, keberlanjutan dan ketepatan waktu penyaluran tetap perlu dijaga untuk mendukung perencanaan belanja daerah yang tepat waktu.

Secara umum, capaian pendapatan transfer Kota Tangerang Selatan hingga akhir Triwulan I Tahun Anggaran 2025 masih berada pada level yang memerlukan perhatian serius, khususnya terhadap komponen yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Kota perlu memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga

teknis terkait guna mempercepat proses penyaluran dana transfer, serta memastikan seluruh dokumen persyaratan administrasi dan teknis dapat segera dipenuhi. Selain itu, monitoring ketat terhadap jadwal penyaluran dan pemanfaatan dana transfer juga perlu ditingkatkan untuk menjaga kesinambungan pendanaan program prioritas daerah.

4. Realisasi Belanja Daerah

Sampai dengan periode pelaporan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.132, realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan tercatat sebesar Rp686.059.997.291,99 dari total pagu anggaran sebesar Rp4.992.416.078.170,00, atau setara dengan 13,74%. Persentase ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang masih tergolong rendah, terutama jika mempertimbangkan bahwa tahun anggaran telah memasuki kuartal kedua.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat hambatan struktural dan operasional dalam pelaksanaan belanja daerah yang perlu mendapat perhatian serius. Beberapa penyebab rendahnya realisasi belanja antara lain:

a. Perencanaan teknis kegiatan yang belum optimal, termasuk keterlambatan dalam penyusunan dokumen pendukung seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
b. Keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik yang disebabkan oleh kendala administratif maupun kapasitas penyedia;
c. Penatausahaan keuangan dan pelaporan yang belum seragam dan tepat waktu, yang berdampak pada tertundanya proses pencairan anggaran;
d. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah, khususnya dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
e. Konsentrasi belanja pada semester kedua, yang umum terjadi dalam pola belanja pemerintah daerah, namun tetap perlu diantisipasi agar tidak menyebabkan akumulasi kegiatan dalam waktu singkat yang berisiko terhadap kualitas pelaksanaan.

Dari sisi struktur belanja, diketahui bahwa realisasi Belanja Operasi mencapai Rp656.320.362.305,99 miliar atau 18,96% dari total pagu Belanja Operasi. Sementara itu, Belanja Modal yang memiliki kontribusi penting terhadap pembangunan fisik dan peningkatan layanan publik, baru terealisasi sebesar Rp29.576.823.587,00 atau 2,15%, menunjukkan adanya keterlambatan signifikan pada aspek pembangunan infrastruktur. Selain itu, realisasi Belanja Tidak Terduga juga masih sangat rendah, yakni hanya 0,11% dari total anggarannya.

Secara umum, rendahnya realisasi belanja daerah berpotensi menghambat pencapaian target kinerja tahunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD, serta dapat berimplikasi terhadap efektivitas pelayanan publik dan keberlanjutan program pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan pelaksanaan belanja, memperkuat mekanisme pengendalian intern, serta mendorong percepatan proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.132. Laporan Realisasi Anggaran Belanja (Konsolidasi) Tahun Anggaran 2025 periode 1 Januari 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5=(4/3)*100
5	**BELANJA DAERAH**	**4.992.416.078.170,00**	**686.059.997.291,99**	**13,74**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.460.974.650.499,19**	**656.320.362.305,99**	**18,96**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.526.082.246.867,07	302.105.491.261,99	19,80
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	662.472.052.193,63	154.352.534.806,00	23,30
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	740.071.452.987,24	118.708.144.809,99	16,04
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	57.013.481.765,00	13.624.212.787,00	23,90
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.800.619.129,20	277.567.632,00	15,42
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.565.050.832,00	1.141.262.709,00	25,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	60.159.589.960,00	14.001.768.518,00	23,27
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.777.112.885.632,12	305.269.399.044,00	17,18
5.1.02.01	Belanja Barang	440.203.435.634,90	78.218.853.695,00	17,77
5.1.02.02	Belanja Jasa	947.925.496.329,59	188.604.869.757,00	19,90
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	54.792.909.987,00	7.322.606.012,00	13,36
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	59.732.731.292,63	16.006.294.861,00	26,80
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	79.447.747.086,00	2.028.300.000,00	2,55
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	78.078.808.881,00	0,00	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	15.695.464.000,00	679.676.000,00	4,33
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	101.236.292.421,00	12.408.798.719,00	12,26
5.1.05	Belanja Hibah	157.779.518.000,00	48.945.472.000,00	31,02
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	700.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	59.477.653.000,00	48.945.472.000,00	82,29
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.838.545.000,00	0,00	0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	93.763.320.000,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.376.952.999.315,01**	**29.576.823.587,00**	**2,15**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	88.204.306.808,00	0,00	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	88.204.306.808,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.157.832.090,67	22.875.801.485,00	14,56
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	7.117.645.401,00	109.800.000,00	1,54
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	17.716.977.503,00	0,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	999.949.186,00	28.400.000,00	2,84
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	2.890.685.033,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	39.540.313.740,24	18.755.668.500,00	47,43
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.333.290.894,00	121.370.000,00	5,20
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	21.449.489.784,00	0,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.841.606.457,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	18.693.941.608,64	2.944.336.614,00	15,75
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	2.442.791.453,79	0,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	294.169.482,00	1.050.000,00	0,36
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	8.325.246,00	0,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	974.093.000,00	0,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	777.841.192,00	0,00	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	25.504.046.717,00	0,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.572.665.393,00	915.176.371,00	6,74
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	513.074.588.453,34	6.416.396.240,00	1,25
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	506.040.500.757,34	6.303.938.080,00	1,25
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.946.945.021,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5=(4/3)*100
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.087.142.675,00	112.458.160,00	2,75
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	583.763.634.894,00	45.758.000,00	0,01
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	318.334.548.317,00	0,00	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	252.872.146.577,00	45.758.000,00	0,02
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	12.556.940.000,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.486.225.069,00	191.467.862,00	0,56
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	477.662.905,00	0,00	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	712.862.914,00	0,00	0,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	18.675.494.848,00	191.467.862,00	1,03
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	14.620.204.402,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	266.412.000,00	47.400.000,00	17,79
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	266.412.000,00	47.400.000,00	17,79
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**154.488.428.355,80**	**162.811.399,00**	**0,11**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	154.488.428.355,80	162.811.399,00	0,11
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	154.488.428.355,80	162.811.399,00	0,11

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, 2025

2.3. Standar Pelayanan Minimum

Standar Pelayanan Minimum (SPM) adalah ketentuan yang menetapkan jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diterima setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM memiliki peran yang sangat penting, baik bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat sebagai penerima layanan. Bagi pemerintah daerah, SPM berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan standar kualitas dan kuantitas layanan publik, serta menjadi indikator untuk menilai kinerja Kepala Daerah dalam meningkatkan mutu dan ragam pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, bagi masyarakat, SPM menjamin hak mereka untuk memperoleh layanan yang layak, yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk dipenuhi.

Capaian penerapan SPM di Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2019-2024 disajikan dalam Gambar 2.39, dimana peningkatan capaian penerapan SPM terjadi kembali pada tahun 2022 hingga pada tahun 2024 berhasil mencapai status Tuntas Paripurna.



Sumber: Aplikasi e-SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2025

Gambar 2.39. Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019-2024

Rekapitulasi penerapan SPM per bidang layanan selama tahun 2022-2024 disajikan dalam Tabel 2.133, dimana capaian SPM tahun 2022 yang telah tuntas paripurna adalah pada urusan Kesehatan dan Perumahan Rakyat yaitu sebesar 100%. Rata-rata capaian penerapan SPM pada tahun 2022 adalah sebesar 93,68% dengan predikat Tuntas Utama. Capaian

penerapan SPM tahun 2023 dan 2024 telah berhasil meraih angka maksimal, yaitu 100% untuk seluruh bidang urusannya. Dengan demikian pada tahun 2023 dan 2024, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah berpredikat Tuntas Paripurna.

Tabel 2.133. Rekapitulasi Penerapan Capaian SPM per bidang Layanan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Urusan SPM	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Penerima Layanan	Mutu Layanan	Hasil Akhir	Penerima Layanan	Mutu Layanan	Hasil Akhir	Penerima Layanan	Mutu Layanan	Hasil Akhir
Pendidikan	71,96%	14,12%	86,08%	80,00%	20,00%	100,00%	80,00%	20,00%	100,00%
Kesehatan	80,00%	20,00%	100,00%	80,00%	20,00%	100,00%	80,00%	20,00%	100,00%
Pekerjaan Umum	70,03%	11,66%	81,69%	80,00%	20,00%	100,00%	80,00%	20,00%	100,00%
Perumahan Rakyat	80,00%	20,00%	100,00%	80,00%	20,00%	100,00%	80,00%	20,00%	100,00%
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	80,00%	18,67%	98,67%	80,00%	20,00%	100,00%	80,00%	20,00%	100,00%
Sosial	80,00%	15,67%	95,67%	80,00%	20,00%	100,00%	80,00%	20,00%	100,00%
IP SPM			**93,68%**	**IP SPM**		**100,00%**	**IP SPM**		**100%**

Sumber: Aplikasi e-SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2024

2.4. Kerja Sama Pembangunan Daerah

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dalam berbagai bidang. Kerja sama ini bersifat saling menguntungkan dan karakteristiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah. Pada tahun 2024 daftar kerja sama dengan daerah lain disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.134. Kerja Sama antar Daerah Dalam Negeri Tahun 2024

NO	MITRA KERJA SAMA	NOMOR/TANGGAL	RUANG LINGKUP
1.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Nomor: 2/KB134.4/Dikominfosantik/II/2020 Nomor : 134.43/363/Pem/2020 3 Februari 2020	a. Bidang Komunikasi dan Informatika; b. Bidang Kesehatan; c. Bidang Pendidikan; d. Bidang Lingkungan Hidup; e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah; f. Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian Perkotaan; g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK
2.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Nomor : 134.432/625/Pem/2020 Nomor: MOU/16/TKKSD-MJL/IX/2020 29 September 2020	a. Bidang komunikasi dan informatika; b. Bidang lingkungan hidup; c. Bidang perdagangan dan perindustrian; d. Bidang kebudayaan dan pariwisata; e. Bidang pertanian dan perikanan; f. Bidang koperasi dan usaha kecil menengah; dan g. Bidang ketahanan pangan.
3.	Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Tentang Penanganan Persampahan Kota Tangerang Selatan Di Tempat Pemrosesan Akhir	Nomor : 800/1092- DLH/2022 660/16443-DLH/2022 Tanggal : (08-08-2022)	a. PENGIRIMAN SAMPAH PADA TAHUN 2022 DI TPAS CILOWONG SEBANYAK 108.000 (SERATUS DELAPAN RIBU) TON/TAHUN. b. PENGIRIMAN SAMPAH PADA TAHUN 2023 DI TPAS CILOWONG SEBANYAK

NO	MITRA KERJA SAMA	NOMOR/TANGGAL	RUANG LINGKUP
	Sampah Cilowong Kota Serang		120.000 (SERATUS DUA PULUH RIBU) TON/TAHUN.
4.	Perjanjian Kerja Sama, Antara Pemerintah Kabupaten Bogor Dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Di Wilayah Perbatasan	Nomor : 119/103/PKS/KS-Banhuk/IX/2022 526/683-DKPPP/2022 Tanggal : (28-09-2022)	a. Pengawasan Keamanan Pangan Di Pasar Dan Tingkat Produsen Dalam Wilayah Kabupaten Bogor Dan Kota Tangerang Selatan; b. Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Pangan Segar Di Pasar Dan Tingkat Produsen Dalam Wilayah Kabupaten Bogor Dan Kota Tangerang Selatan; Melakukan Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Pangan Segar Yang Beredar Di Pasar Dan Tingkat Produsen Dalam Wilayah Kabupaten Bogor Dan Kota Tangerang Selatan Dari Kandungan Cemaran Berbahaya Untuk Dikonsumsi; Dan c. Pertukaran Informasi Terkait Lalu Lintas Peredaran Dan Hasil Pemeriksaan Pangan Segar Dari Dan Ke Wilayah Kabupaten Bogor Dan Kota Tangerang Selatan.
5.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Ternate Dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tentang Replikasi Aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk Dan Keluar, Aplikasi Pengamanan Dokumen, Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online, Dan Sistem Informasi Mal Pelayanan Publik	Nomor : 556/237/2022 134.43/4607/TAPEM/ 2022 Tanggal : (30-11-2022)	a. PERENCANAAN KEBUTUHAN SISTEM; b. INSTALASI APLIKASI SISUMAKER, AMANDO, SIMPONIE, DAN SISTEM INFORMASI MPP; c. PELATIHAN TEKNIS APLIKASI SISUMAKER, AMANDO, SIMPONIE, DAN SISTEM INFORMASI MPP SERTA PENDAMPINGAN OPERASIONAL; DAN d. KONSULTASI IMPLEMENTASI APLIKASI SISUMAKER, AMANDO, SIMPONIE, DAN SISTEM INFORMASI MPP.
6.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Tangerang Dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tentang Kerja Sama Antar Daerah	Nomor : B/400.1.5.4/2903/VII I/ Setda/MoU/2023 Nomor: 100.3.7.1/3138/TAPE M/ 2023 (08-08-2023)	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. Pelaksanaan; b. Pembiayaan; c. Jangka Waktu; dan d. Addendum dan /atau amandemen.
7.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Lebak Dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah	Nomor: 102/MoU-13/TPKS/2023 Nomor: 100.3.7.1/3841/Tape m/ 2023 (09-09-2023)	Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri atas: (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; e. perumahan dan kawasan permukiman; dan

NO	MITRA KERJA SAMA	NOMOR/TANGGAL	RUANG LINGKUP
			f. sosial. (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olahraga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. (3) Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. perdagangan; dan e. perindustrian. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK terkait kerjasama antar Daerah.
8.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Tangerang Dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah	Nomor : 147.54/ -Bag.Tapem/2023 Nomor: 100.3.7.1/3922/Tapem/ 2023 (02-10-2023)	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. sosial; d. pangan; e. perhubungan; f. lingkungan hidup; g. komunikasi dan informatika; h. pekerjaan umum dan penataan ruang; i. perumahan dan kawasan permukiman; j. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; k. pemberdayaan masyarakat; l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; m. koperasi, usaha kecil, dan menengah; n. kepemudaan dan olahraga; o. pariwisata; dan p. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
9.	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang	Nomor : 100.3.7.1/2119/BPDB/PKS/2023 Nomor : 100.3.7.1/1905/ BPDB Kota Tangerang/2023	Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi: 1. Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan Bencana, meliputi: a. Tahapan Pra Bencana Bidang Pencegahan dan Kearsipan,

NO	MITRA KERJA SAMA	NOMOR/TANGGAL	RUANG LINGKUP
	Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Wilayah Perbatasan	(07-12-2023)	meliputi: 1) Perencanaan penanggulangan bencana; 2) Pengurangan risiko bencana; 3) Pencegahan; 4) Kesiapsiagaan; 5) Peringatan dini; 6) Mitigasi; 7) Pendidikan dan pelatihan; dan 8) Penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan. 2. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, meliputi: b. Tahapan Pra Bencana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi: 1) Perencanaan penanggulangan bencana; 2) Pengurangan risiko bencana; 3) Pencegahan; 4) Kesiapsiagaan; 5) Peringatan dini; 6) Mitigasi; 7) Pendidikan dan pelatihan; dan 8) Penelitian dan Pengembangan di bidang kebencanaan. c. Tahap saat Bencana Bidang Kedaruratan dan Logistik, meliputi: 1) Pelaksanaan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak bencana; 2) Pengerahan sumber daya dan logistic; 3) Pemulihan keamanan dan ketertiban; dan 4) Pemulihan dan pembersihan lingkungan terdampak bencana. d. Tahap saat Bencana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi: 1) Penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan; 2) Pemenuhan kebutuhan dasar; 3) Pelayanan Kesehatan; 4) Pelayanan Psikososial; 5) Pemulihan sosial, budaya dan ekonomi; 6) Pemulihan Keamanan dan ketertiban; dan 7) Pemulihan dan Pembersihan lingkungan terdampak bencana. 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pelaksanaan Kegiatan monitoring, mengevaluasi dan menyusun

NO	MITRA KERJA SAMA	NOMOR/TANGGAL	RUANG LINGKUP
			laporan hasil pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK.
10.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tentang Pengembangan Potensi Daerah Dan Peningkatan Pelayanan Publik	Nomor : 48/DG.02.02.01/PEMOTDA Nomor : 100.3.7.1/3311/Setda/Tapem/2024 Tanggal (25 Juli 2024)	a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; b. urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; c. urusan pemerintahan pilihan; dan d. bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Depok Dan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tentang Pelayanan Tempat Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir Sampah (Tppas) Regional Untuk Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Dan Kota Tangerang Selatan	Nomor : 00.3.7.1/4208/Setda/Tapem/2024 Tanggal (24 September 2024)	a. penyediaan lahan; b. pembangunan fasilitas TPPAS Regional; c. pengelolaan TPPAS Regional; d. pelayanan TPPAS Regional; e. pembiayaan TPPAS Regional; f. Kompensasi Jasa Pelayanan; g. Kompensasi Dampak Negatif; h. pemeliharaan jalan; dan i. kerja sama dengan Badan Usaha.
12.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Banten Dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nomor: 100.3.7/16-pemotda/2024 Nomor: 100.3.7.1/5925/Setda/2024 25 November 2024	a. bidang pendidikan; b. bidang kesehatan; c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; d. bidang perumahan dan kawasan permukiman; e. bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; f. bidang sosial; g. bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan; h. bidang lingkungan hidup; i. bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; j. bidang perhubungan; k. bidang komunikasi dan informatika; l. bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; m. bidang perindustrian dan perdagangan; n. bidang penanaman modal; o. bidang pariwisata; p. bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana; q. bidang kepemudaan dan olahraga; r. bidang pengembangan sumber daya manusia; s. bidang promosi dan pengembangan industri, dan perdagangan; t. bidang penanggulangan bencana; u. bidang keuangan;

NO	MITRA KERJA SAMA	NOMOR/TANGGAL	RUANG LINGKUP
			v. bidang perpustakaan dan kearsipan; w. bidang ketenagakerjaan; dan/atau x. bidang-bidang lain yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
13.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Banten Dengan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tentang Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Nomor : 100.3.7.1/06-Pemotda/2024 Nomor: 100.3.7.1/5966/Setda/2024 28 November 2024	a. Optimalisasi penerimaan; dan b. sinergi pendanaan dan kegiatan.
14.	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemadaman Kebakaran Dan Penyelamatan Di Wilayah Perbatasan	Nomor: 300.2.1/2628/BPBD/PKS/2024 Nomor: 100.4.7/1038/Damkar/PKS/2024 Nomor: 000.4.1.1/341/XI/BPBD/2024	a. pra bencana; b. penanggulangan bencana, tanggap darurat bencana; c. pasca bencana; dan d. pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Salah satu bentuk kerja sama pembangunan daerah yang diperlukan oleh Peemrintah Kota Tangerang Selatan adalah kerja sama pembiayaan. Tingginya kebutuhan masyarakat akan pembangunan dan pelayanan publik sementara Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki keterbatasan kapasitas fiskal daerah, mendorong perlu adanya upaya inovasi untuk mencari alternatif-alternatif pendanaan pembangunan melalui kerja sama dengan pihak lain. Berbagai pendekatan kerja sama pendanaan pembangunan seperti kerja sama pemerintah dengan swasta, pemanfaatan Barang Milik Daerah, hingga pendanaan lainnya seperti Ziswaf (Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf), dapat menjadi alternatif. Hal tersebut juga sejalan dengan visi kolaboratif yang diusung untuk lima tahun ke depan. Elaborasi bentuk-bentuk inovasi pendanaan alternatif yang dapat diupayakan adalah:

1) Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
   Proyek-proyek yang potensial untuk skema KPBU perlu diidentifikasi, baik untuk pembangunan baru maupun peningkatan kualitas infrastruktur eksisting. Regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2023 telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk pelaksanaannya. Terdapat 22 jenis infrastruktur, di antaranya insfrastruktur transportasi, infrastruktur air minum, infrastruktur kesehatan, infrastruktur ekosistem industri, dan lain-lain.
2) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah
   Mengoptimalkan aset-aset daerah yang belum termanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan pendapatan daerah dapat diupayakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah. Bentuk-bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat diupayakan adalah Sewa, Pinjam Pakai, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP), dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

3) Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan, Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) atau *Land Value Capture* (LVC)

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan, P3NK adalah alternatif pendanaan untuk Penyediaan Infrastruktur berbasis kewilayahan dan/atau dalam radius/koridor zonasi yang memungkinkan penyediaan infrastruktur untuk didanai dari proporsi peningkatan nilai atas dampak penciptaan nilai yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang diperoleh dari Penerima Manfaat serta hasil pengembangan Kawasan. Konsep ini memungkinkan pemerintah kota untuk menangkap nilai peningkatan lahan (land value capture) yang terjadi akibat pembangunan infrastruktur. Misalnya, jika pembangunan jalan baru meningkatkan nilai properti di sekitarnya, sebagian dari kenaikan nilai tersebut dapat diambil kembali untuk mendanai proyek infrastruktur lain atau melunasi biaya proyek awal. Ini sangat relevan untuk Tangerang Selatan yang terus berkembang pesat dengan harga properti yang cenderung meningkat. Untuk konteks daerah, implementasi P3NK membutuhkan juga regulasi berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur instrumen P3NK, pengelolaan dana P3NK, dan pengelola P3NK.

4) Pembiayaan Utang Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, terdapat opsi untuk melakukan pendanaan melalui Pembiayaan Utang Daerah. Ini dapat menjadi alternatif untuk membiayai proyek-proyek strategis dengan skala besar yang membutuhkan dana awal yang signifikan. Bentuk-bentuk Pembiayaan Utang Daerah mencakup Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah. Pinjaman Daerah telah menjadi praktik yang lazim dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagai contoh melalui program Pinjaman Pemulihan ekonomi Nasional atau Pinjaman-PEN. Untuk Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah, belum ada pemerintah daerah yang menerbitkannya. Pemerintah Kota perlu menyusun studi kelayakan dan analisis kapasitas fiskal secara menyeluruh sebelum memilih untuk menggunakan skema Pembiayaan Utang Daerah.

5) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (*CSR*)

Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Tangerang Selatan memiliki kewajiban dan kesempatan untuk berkontribusi pada pembangunan melalui program TJSL atau CSR. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengatur hal tersebut. Pemerintah Kota dapat memfasilitasi dan mengarahkan dana CSR dari berbagai perusahaan untuk proyek-proyek infrastruktur berskala kecil hingga menengah ataupun kegiatan pengembangan ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pembangunan taman kota, perbaikan lingkungan, dan sarana berusaha bagi pengusaha mikro.

6) ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf)

Pemanfaatan dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf merupakan bentuk pendanaan alternatif yang berbasis syariah. Regulasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Tujuan utama pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 001/MUNAS-IX/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat memberikan legitimasi syariah untuk penggunaan dana-dana ini. Fatwa tersebut secara spesifik membolehkan pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, sepanjang kegiatan tersebut menunjang kesejahteraan dan kemaslahatan umum, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan (mustahik). Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penggunaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang tidak hanya terbatas pada konsumsi langsung, tetapi juga dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas lingkungan yang memiliki dampak jangka panjang dan berkelanjutan bagi kesejahteraan umat.

2.5. Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tangerang Selatan merupakan instrumen strategis Pemerintah Kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat pendapatan asli daerah. BUMD dibentuk untuk mengelola potensi sumber daya daerah secara profesional dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan asas manfaat bagi masyarakat. Melalui pembentukan dan pengembangan BUMD, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya menciptakan sinergi antara sektor publik dan bisnis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Salah satu BUMD yang telah ada di Kota Tangerang Selatan adalah Perseroda Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS).

Perseroan Daerah (Perseroda) PITS Kota Tangerang Selatan merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang penyediaan air minum, dibentuk untuk mendukung pelayanan publik sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. PITS berperan penting dalam pengelolaan sumber daya air bersih dan penyediaan layanan distribusi air kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup warga serta mewujudkan tata kelola air yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, PITS diharapkan dapat dikelola secara profesional dan transparan, mengikuti prinsip-prinsip korporasi yang sehat agar mampu menjamin keberlangsungan pelayanan sekaligus menjadi entitas usaha yang mandiri secara finansial.

Mengacu pada laporan audit atas kinerja Perseroda PITS sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.135, terlihat bahwa pada tahun 2020-223 aset Perseroda PITS Kota Tangerang Selatan menunjukkan tren penurunan, dengan penurunan paling signifikan terjadi pada aset lancar, yang mencerminkan penurunan kemampuan likuiditas perusahaan. Sementara itu, peningkatan aset tidak lancar mengindikasikan adanya penambahan investasi jangka panjang atau aset tetap. Di sisi kewajiban, terjadi lonjakan tajam pada 2023, terutama pada kewajiban jangka pendek yang mencapai Rp111 miliar, sehingga meningkatkan risiko likuiditas secara signifikan. Penurunan ekuitas dari Rp161 miliar pada 2020 menjadi Rp44 miliar di 2023

mencerminkan akumulasi kerugian yang terus membebani struktur modal perusahaan. Dari sisi laba rugi, meskipun sempat mencatat laba pada 2020, PITS mengalami kerugian selama tiga tahun berturut-turut setelahnya, dengan kerugian terbesar pada 2022, menandakan operasional perusahaan belum menghasilkan keuntungan secara konsisten. Arus kas dari aktivitas operasi pun menunjukkan pola yang fluktuatif, hanya mencatat nilai positif pada 2022, sementara tahun lainnya mengalami defisit, yang memperkuat indikasi bahwa kegiatan usaha utama belum menghasilkan arus kas yang stabil.

Tabel 2.135. Laporan Auditor Independen Perseroan Daerah (Perseroda) PITS Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023

Neraca	2020	2021	2022	2023
Aset	191.391.987.720	186.978.888.876	175.951.436.938	178.559.257.425
Aset Lancar	46.330.321.131	44.277.648.915	29.344.476.818	27.552.269.493
Aset tidak lancar	145.061.666.589	142.701.239.961	146.606.960.120	151.006.987.932
Kewajiban dan Ekuitas	191.391.987.720	186.978.888.876	175.951.436.938	178.559.257.425
Kewajiban	28.724.261.401	30.177.528.892	27.395.466.842	133.820.699.170
Kewajiban Jangka Pendek	5.310.492.828	3.857.225.337	4.351.786.016	111.223.662.621
Kewajiban Jangka Panjang	24.867.036.064	24.867.036.064	23.043.680.826	22.597.036.549
Ekuitas	161.214.458.828	158.254.627.476	148.555.970.096	44.738.558.255
Laba (rugi) bersih periode berjalan	2.359.622.658	-2.981.128.181	-9.291.781.792	-7.465.022.122
Arus kas bersih yang diperoleh (digunakan) dari aktivitas operasi	-3.800.076.694	-384.667.511	6.943.326.380	-15.461.052.870
Arus kas bersih yang diperoleh (digunakan) dari aktivitas investasi	-109.509.565.575	-1.632.722.077	-5.756.284.266	-5.864.432.802
Arus kas bersih yang diperoleh (digunakan) dari aktivitas pendanaan	100.294.719.406	-	-2.132.006.895	41.252.073.269
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	-13.014.922.863	-2.017.389.588	-944.964.781	19.746.587.598
Kas dan setara kas akhir tahun	23.520.413.645	21.503.024.057	20.558.059.275	19.746.587.598

Sumber: Laporan Auditor Independen Perseroda Pembangunan Investasi Tangerang Selatan 2020-2023

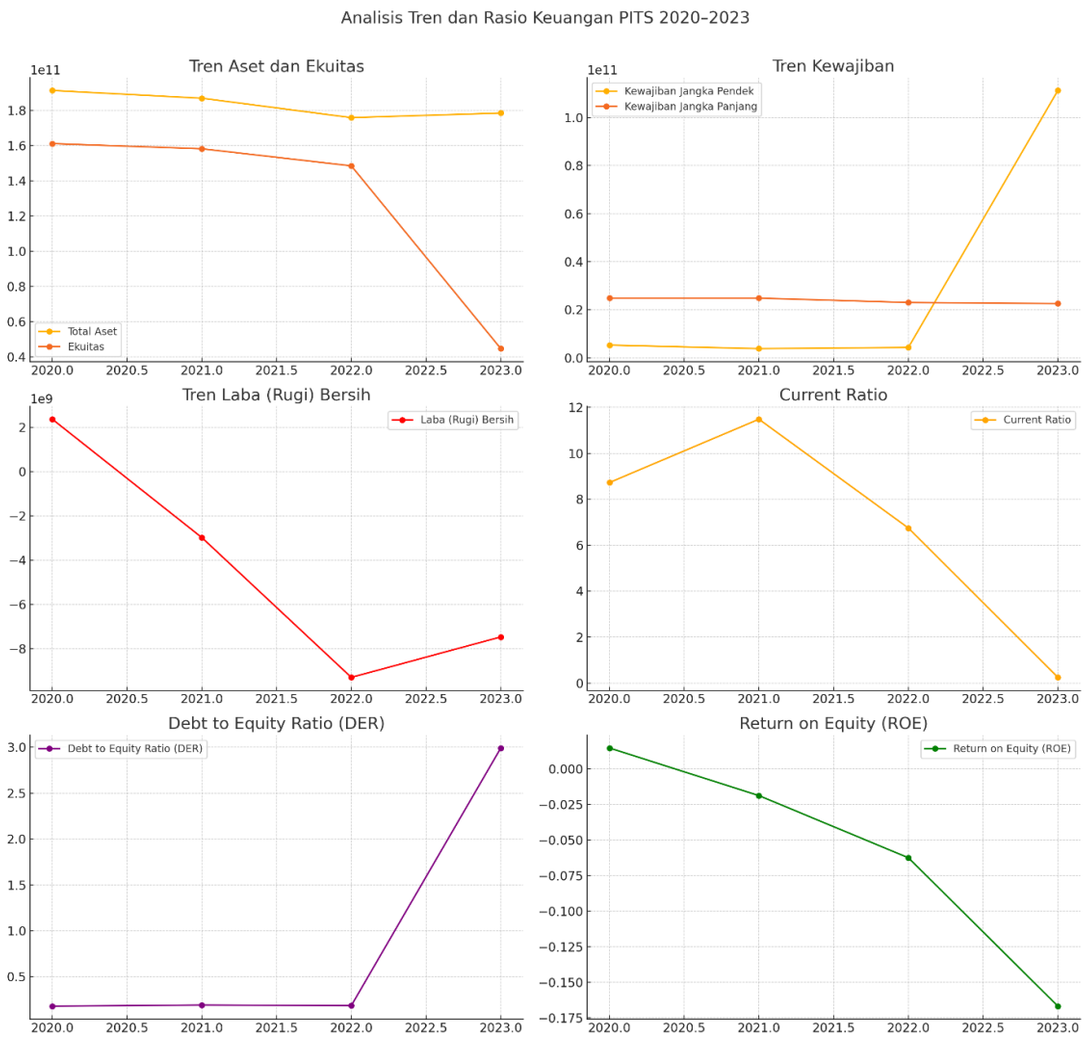
Berdasarkan data rasio keuangan PITS Kota Tangerang Selatan dari tahun 2020 hingga 2023 pada Tabel 2.136, terlihat adanya penurunan kinerja keuangan yang cukup signifikan. Rasio Keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, mengalami penurunan tajam dari 8,7 pada tahun 2020 menjadi hanya 0,25 pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan menurunnya likuiditas perusahaan secara drastis, yang dapat mengindikasikan kesulitan dalam memenuhi kewajiban lancar. Sementara itu, Debt to Equity Ratio (DER) relatif stabil di angka 0,18 pada periode 2020 hingga 2022, namun melonjak drastis menjadi 2,99 pada tahun 2023. Peningkatan DER ini menunjukkan bahwa struktur permodalan perusahaan menjadi semakin bergantung pada utang, yang meningkatkan risiko finansial. Dari sisi profitabilitas, Return on Equity (ROE) mengalami penurunan konsisten dari 1,46% di tahun 2020 menjadi -16,69% pada tahun 2023. Nilai ROE yang negatif selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian dan tidak mampu menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Secara keseluruhan, rasio-rasio ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan PITS Kota Tangerang Selatan memburuk dari tahun ke tahun, baik dari aspek likuiditas, solvabilitas, maupun profitabilitas.

Tabel 2.136. Rasio Keuangan PITS Kota Tangerang Selatan Tahun 2020–2023

Tahun	Rasio Keuangan	DER (*Debt to Equity Ratio*)	ROE (*Return on Equity*)
2020	8,7	0,18	1,46%
2021	11,5	0,18	-1,88%
2022	6,7	0,18	-6,25%
2023	0,25	2,99	-16,69%

Sumber: Laporan Auditor Independen Perseroda Pembangunan Investasi Tangerang Selatan

Gambar berikut menunjukkan tren keuangan Perseroda PITS Kota Tangerang Selatan menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan, dengan penurunan signifikan ekuitas pada 2023 meskipun total aset relatif stabil, serta lonjakan tajam kewajiban jangka pendek yang membebani struktur keuangan. Current ratio anjlok drastis di bawah ambang aman, sementara Debt to Equity Ratio (DER) melonjak tajam, mengindikasikan tingginya risiko leverage. Di sisi lain, Return On Equity (ROE) terus menurun dan berada di angka negatif, sejalan dengan tren kerugian operasional yang berkelanjutan selama tiga tahun terakhir.



Sumber: Laporan Auditor Independen Perseroda Pembangunan Investasi Tangerang Selatan Tahun 2020-2023

Gambar 2.40. Rasio Keuangan PITS Kota Tangerang Selatan

Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga merencanakan penyertaan modal daerah sebagai langkah konkret dalam mendukung operasional dan pengembangan tiga sektor strategis melalui BUMD, yaitu bidang air minum,

pasar, dan parkir. Ketiga sektor ini dipilih berdasarkan urgensi peningkatan layanan dasar, pengelolaan aset daerah yang lebih optimal, serta potensi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Sebagai dasar kebijakan yang akuntabel, Pemerintah Kota telah menyusun dokumen kajian untuk masing-masing rencana penyertaan modal tersebut, yang mencakup aspek hukum, teknis, finansial, dan kelayakan usaha. Penyertaan modal ini diharapkan mampu memperkuat struktur kelembagaan BUMD, mendorong efisiensi layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan secara menyeluruh.

2.6. Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran keuangan daerah atau yang biasa disebut Laporan Keuangan Daerah bertujuan menerangkan kondisi keuangan Pemerintah Daerah secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai amanat pertanggungjawaban kepada publik dan stakeholder. Tujuan penggambaran Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, yaitu untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah telah terlaksana sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Transparansi, yaitu untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat akan realisasi anggaran dan penggunaan dana publik;
3. Evaluasi Kinerja, yaitu sebagai dasar penilaian kinerja Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membantu Pemerintah Daerah, DPRD, dan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan fiskal daerah.

Analisa gambaran keuangan daerah tahun 2020-2024 dilakukan melalui analisa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020-2024, yang strukturnya terdiri atas komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Analisa tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, analisa kondisi keuangan daerah juga diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Analisa gambaran keuangan daerah dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.8.1.Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

2.8.1.1. Pendapatan Daerah

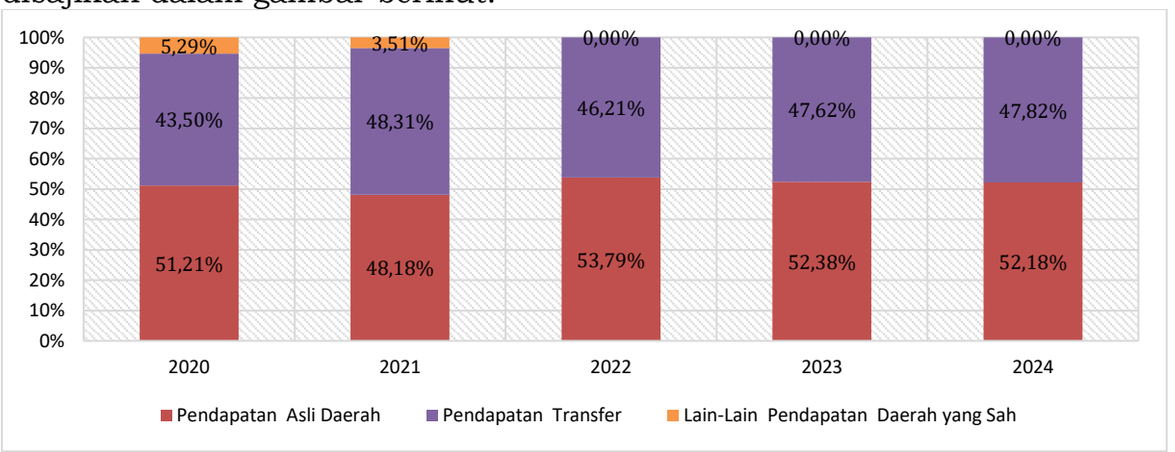
Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Akun pendapatan daerah terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang rinciannya dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
    1. Penerimaan pajak daerah.
    2. Penerimaan retribusi daerah.
    3. Penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan.
    4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
b. Pendapatan Transfer, terdiri dari
    1. Transfer pemerintah pusat.

2. Transfer antar daerah.

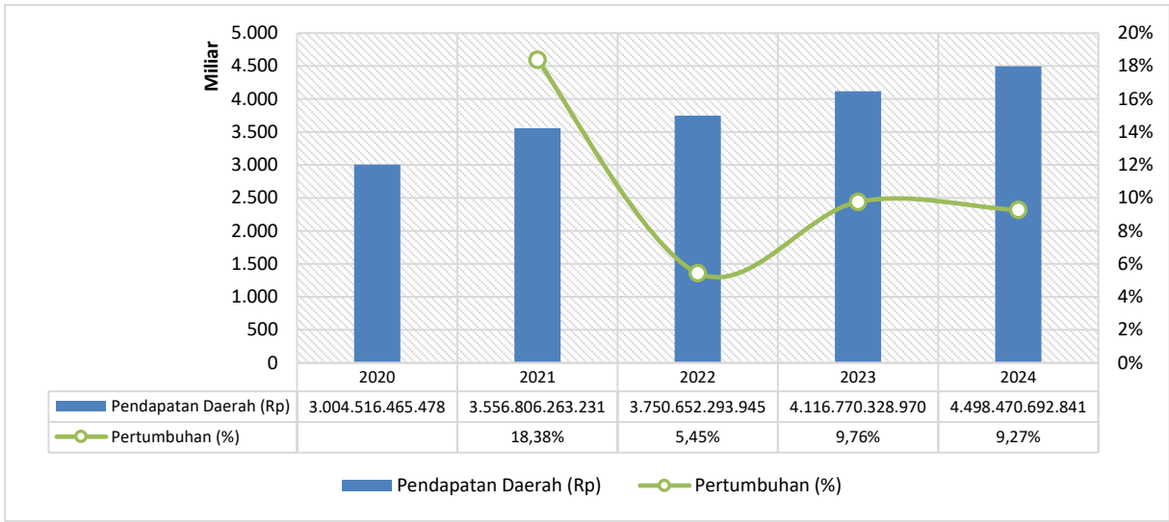
c. Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bersumber dari:
   1. Hibah.
   2. Dana darurat.
   3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.137. Dari ketiga komponen pendapatan daerah, terlihat bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi dominan terhadap total pendapatan daerah, yaitu hampir selalu lebih dari 50%. Komponen pendapatan transfer menjadi komponen kedua terbesar penyumbang total pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024, yaitu berkisar antara 43% hingga 48%. Sementara komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi bagian yang sangat kecil dari total pendapatan, bahkan pada tahun 2022-2024 kontribusinya 0%. Gambaran kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024 secara rinci disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.41. Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 meningkat besarannya sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.42. Peningkatan tersebut menggambarkan kondisi dimulainya pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid 19. Pemulihan tersebut didukung oleh peningkatan realisasi pajak daerah dan pendapatan transfer, baik dari Pusat dan Provinsi Banten. Pada masa pemulihan ekonomi tersebut, kontribusi PAD masih lebih kecil dibandingkan pendapatan transfer. Pada tahun 2022-2024, pertumbuhan pendapatan daerah mulai stabil dengan mulai meningkatnya kontribusi PAD.



Gambar 2.42. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024

Tabel 2.137. Kinerja Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-rata pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.004.516.465.478,00**	**3.556.806.263.231,00**	**3.750.652.293.945,00**	**4.116.770.328.970,00**	**4.498.470.692.841,00**	**10,72%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.538.705.693.438,00**	**1.713.722.415.531,00**	**2.017.364.068.366,00**	**2.156.287.719.241,00**	**2.347.128.663.052,00**	**11,21%**
4.1.01	Pajak Daerah	1.345.141.128.042,00	1.523.112.291.755,00	1.794.849.627.807,00	1.917.838.950.888,00	2.093.592.089.573,00	11,77%
4.1.02	Retribusi Daerah	62.630.682.276,00	50.433.166.050,00	29.551.491.739,00	47.503.933.981,00	130.996.951.091,00	43,91%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	731.439.035,00	771.586.632,00	701.475.939,00	-0,90%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	130.933.883.120,00	140.176.957.726,00	192.231.509.785,00	190.173.247.740,00	121.838.146.449,00	1,80%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.306.966.822.605,00**	**1.718.406.629.340,00**	**1.733.288.225.579,00**	**1.960.482.609.729,00**	**2.151.342.029.789,00**	**13,80%**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	977.908.693.242,00	1.017.221.382.692,00	1.049.765.930.091,00	1.228.631.422.213,00	1.400.086.802.533,00	9,55%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	907.142.937.242,00	953.979.143.692,00	1.040.880.135.091,00	1.199.626.349.213,00	1.361.057.579.533,00	10,75%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	193.115.125.434,00	253.278.625.853,00	197.760.836.797,00	258.691.674.006,00	317.755.436.000,00	15,72%
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	558.077.884.000,00	551.963.179.000,00	540.086.577.000,00	591.064.768.000,00	663.369.072.841,00	4,61%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	19.583.114.628,00	20.255.012.186,00	13.613.661.502,00	29.684.942.691,00	22.208.153.615,00	15,88%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik	136.366.813.180,00	128.482.326.653,00	289.419.059.792,00	320.184.964.516,00	357.724.917.077,00	35,46%

No	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-rata pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	70.765.756.000,00	63.242.239.000,00	8.885.795.000,00	29.005.073.000,00	0,00	32,46%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00	39.029.223.000,00	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	329.058.129.363,00	701.185.246.648,00	683.522.295.488,00	731.851.187.516,00	751.255.227.256,00	30,07%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	284.058.129.363,00	681.236.636.144,00	661.212.816.858,00	726.965.676.816,00	744.614.942.256,00	37,31%
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	45.000.000.000,00	19.948.610.504,00	22.309.478.630,00	4.885.510.700,00	6.640.285.000,00	-21,50%
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**158.843.949.435,00**	**124.677.218.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.3.01	Hibah	158.843.949.435,00	11.032.055.500,00	0,00	0,00	0,00	-93,05%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	113.645.162.860,00	0,00	0,00	0,00	-

Sumber: LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.137 bahwa komponen pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan data rincian pertumbuhan pada masing-masing komponen pendapatan yang disajikan dalam Tabel 2.138, terlihat bahwa walaupun PAD merupakan kontribusi tertinggi namun pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan masih tergantung dengan pendapatan transfer. Perlambatan pertumbuhan pendapatan transfer pada tahun 2023-2024 berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan pendapatan daerah. Untuk itu, diperlukan penguatan struktur pendapatan daerah terutama pada komponen PAD melalui upaya diversifikasi sumber pendapatan non pajak, seperti optimalisasi pengelolaan aset daerah dan peningkatan profit BUMD; serta penguatan database wajib pajak melalui perluasan basis pajak dengan digitalisasi dan pemutakhiran data.

Tabel 2.138. Rincian Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020-2024

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	18,38%	5,45%	9,76%	9,27%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11,37%	17,72%	6,89%	8,85%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	31,48%	0,87%	13,11%	9,74%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-21,51%	-100,00%	0,00%	0,00%

Analisis kesehatan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada sisi pendapatan dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Rasio PAD terhadap PDRB. Adapun analisis pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Keberhasilan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah pada pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari komponen kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan keseluruhan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan pendapatan asli daerahnya sebagai sumber pendapatan daerah tanpa bergantung kepada dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya. Tingkat kemandirian keuangan daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah pendapatan transfer dan pinjaman. Berikut disajikan data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 beserta kriteria dari rasio tersebut sebagai berikut.

Tabel 2.139. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Tabel 2.140. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Anggaran dari Sumber Dana Eksternal (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Tingkat Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan Daerah	Pola Hubungan
2020	1.465.810.772.040,00	1.538.705.693.438,00	105%	Tinggi	Delegatif
2021	1.843.083.847.700,00	1.713.722.415.531,00	93%	Tinggi	Delegatif
2022	1.733.288.225.579,00	2.017.364.068.366,00	116%	Tinggi	Delegatif
2023	1.960.482.609.729,00	2.156.287.719.241,00	110%	Tinggi	Delegatif
2024	2.151.342.029.789,00	2.347.128.663.052,00	109%	Tinggi	Delegatif

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tingkat kemandirian keuangan Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020-2024 termasuk kategori Tinggi dengan pola hubungan Delegatif dalam membiayai belanja pembangunan daerah.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berikut disajikan data Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 beserta kriteria dari rasio tersebut dalam Tabel 2.141 dan Tabel 2.142.

Tabel 2.141. Kriteria Penilaian Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0-10	Sangat Kurang
10,1-20	Kurang
20,1-30	Cukup
30,1-40	Sedang
40,1-50	Baik
> 50	Sangat Baik

Tabel 2.142. Tingkat Desentralisasi Fiskal Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	Tingkat Desentralisasi Fiskal
2020	51,21	Sangat Baik
2021	48,18	Baik
2022	53,79	Sangat Baik
2023	52,38	Sangat Baik
2024	52,18	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 2.142, terlihat bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020-2024 rata-rata termasuk kategori Sangat Baik.

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah digunakan untuk menganalisis ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi/Daerah lainnya. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima dengan total pendapatan daerah. Berikut disajikan data Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 beserta kriteria dari rasio tersebut dalam tabel berikut.

Tabel 2.143. Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah
0-10	Sangat Kurang
10,1-20	Kurang
20,1-30	Cukup
30,1-40	Sedang
40,1-50	Tinggi
> 50	Sangat Tinggi

Tabel 2.144. Tingkat Ketergantungan Keuangan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	Tingkat Desentralisasi Fiskal
2020	43,50	Tinggi
2021	48,31	Tinggi
2022	46,21	Tinggi
2023	47,62	Tinggi
2024	47,82	Tinggi

Berdasarkan Tabel 2.144 terlihat bahwa tingkat ketergantungan keuangan Kota Tangerang Selatan terhadap pendapatan transfer masih berkategori Tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa penurunan dalam pendapatan transfer akan berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan pendapatan daerah.

4. Rasio PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Rasio PAD terhadap PDRB menggambarkan kemandirian fiskal daerah dan efektivitas pengelolaan potensi ekonomi lokal untuk membiayai pembangunan secara mandiri. Rasio ini juga dapat digunakan untuk menilai kesenjangan antara potensi ekonomi (PDRB) dan realisasi pendapatan asli daerah. Berikut disajikan data Rasio PAD terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 beserta kriteria dari rasio tersebut dalam Tabel 2.145 dan Tabel 2.146.

Tabel 2.145. Kategori Rasio PAD terhadap PDRB

Rasio PAD terhadap PDRB (%)	Tingkat Kemandirian	Interpretasi
>15%	Sangat Mandiri	Daerah mampu membiayai >50% kebutuhan APBD tanpa tergantung transfer pusat
10%-15%	Mandiri	PAD signifikan, tetapi masih butuh dukungan DAU/DBH
5%-10%	Cukup Mandiri	PAD terbatas; ketergantungan pada pusat moderat
<5%	Tidak Mandiri	Mayoritas APBD bergantung pada transfer pusat (DAU/DBH)

Tabel 2.146. Rasio PAD terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	PAD (Rp)	PDRB ADHK (Rp)	Rasio PAD terhadap PDRB (%)	Tingkat Kemandirian
2020	1.538.705.693.438,00	59.531.079.344.815,00	2,58%	Tidak Mandiri
2021	1.713.722.415.531,00	62.393.119.539.222,30	2,75%	Tidak Mandiri
2022	2.017.364.068.366,00	66.021.910.488.119,00	3,06%	Tidak Mandiri
2023	2.156.287.719.241,00	69.562.289.191.620,60	3,10%	Tidak Mandiri
2024	2.347.128.663.052,00	73.052.840.000.000,00	3,21%	Tidak Mandiri

Berdasarkan rasio PAD terhadap PDRB dalam Tabel 2.146, Kota Tangerang Selatan masih menunjukkan ketergantungan terhadap pendapatan transfer untuk membiayai pembangunan daerahnya. Jika dianalisis berdasarkan elastisitas pertumbuhan PAD terhadap PDRB

sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.147, terlihat bahwa rata-rata elastisitas >1 menunjukkan PAD responsif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Pada tahun 2021-2022 terlihat Sangat elastis dimana PAD tumbuh 2,36-3,04 kali lebih cepat dari PDRB, disebabkan karena pemulihan ekonomi pasca covid 19 yang mendorong kenaikan pajak daerah (PKB, hotel, restoran). Pada tahun 2023-2024 terjadi penurunan elastisitas, dimana PDRB tumbuh stabil namun PAD melambat dan gapnya menyempit. Kondisi ini menggambarkan perlunya evaluasi terhadap faktor-faktor yang mungkin menjadi penghambat pertumbuhan PAD, seperti kurang efektifnya kebijakan terkait perluasan basis pajak dan penertiban retribusi, ketidakpatuhan wajib pajak, meningkatnya pengeluaran wajib (belanja pegawai) yang mengurangi alokasi belanja pada sektor produktif.

Tabel 2.147. Rasio PAD terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Pertumbuhan PAD (%)	Pertumbuhan PDRB (%)	Elastisitas
2021	11,37	4,81	2,36
2022	17,72	5,82	3,05
2023	6,89	5,36	1,28
2024	8,85	5,02	1,76

Elastisitas yang tinggi tidak selalu baik jika disebabkan oleh kenaikan pajak berlebihan yang membebani masyarakat. Berdasarkan analisis kontribusi masing-masing komponen PAD dalam Tabel 2.148, terlihat bahwa komponen PAD Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020-2024 masih didominasi dari komponen Pajak Daerah. Untuk itu perlu ada analisis lebih lanjut terhadap struktur komponen PAD lainnya untuk mendorong diversifikasi sumber PAD. Berdasarkan Tabel 2.149 terlihat bahwa pertumbuhan komponen PAD non pajak masih perlu dioptimalkan, seperti intensifikasi dan penertiban retribusi daerah, peningkatan profitabilitas BUMD, optimalisasi hasil kerja sama daerah dengan BUMD dan pihak swasta dalam pemanfaatan aset/Barang Milik Daerah BUMD, peningkatan pendapatan BLUD

Tabel 2.148. Kontribusi Komponen PAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
4.1.01	Pajak Daerah	87,42%	88,88%	88,97%	88,94%	89,20%
4.1.02	Retribusi Daerah	4,07%	2,94%	1,46%	2,20%	5,58%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,03%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8,51%	8,18%	9,53%	8,82%	5,19%

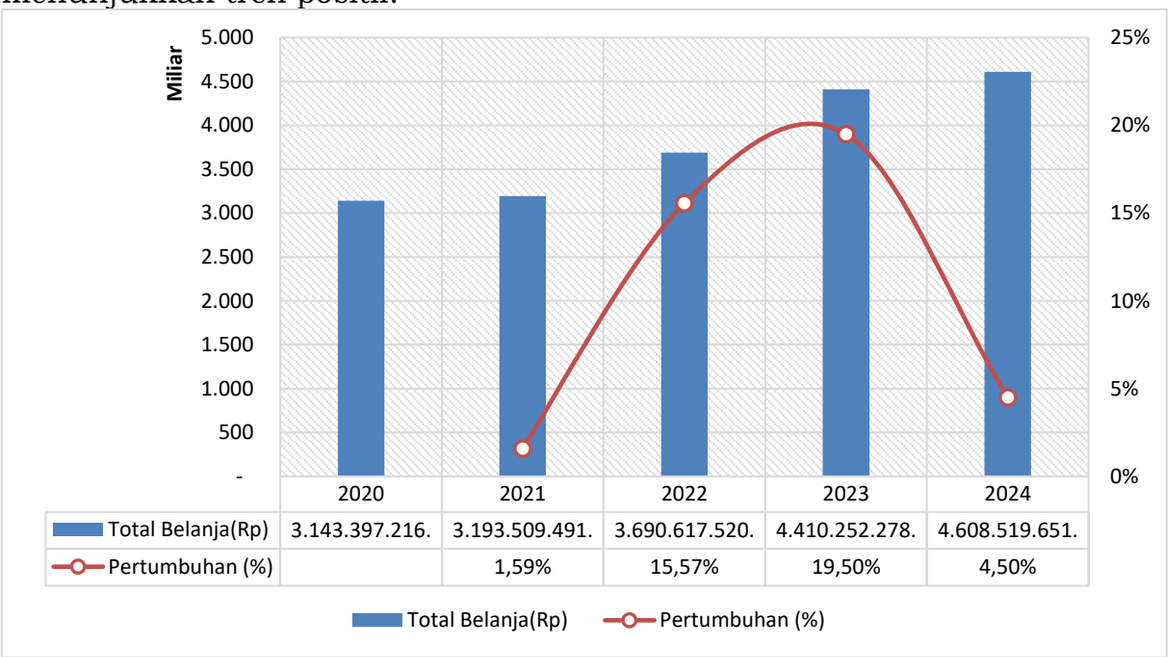
Tabel 2.149. Kontribusi Komponen PAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Pertumbuhan pada Tahun			
		2021	2022	2023	2024
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**11,37%**	**17,72%**	**6,89%**	**8,85%**
4.1.01	Pajak Daerah	13,23%	17,84%	6,85%	9,16%
4.1.02	Retribusi Daerah	-19,48%	-41,40%	60,75%	175,76%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00%	0,00%	5,49%	-9,09%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7,06%	37,13%	-1,07%	-35,93%

2.8.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

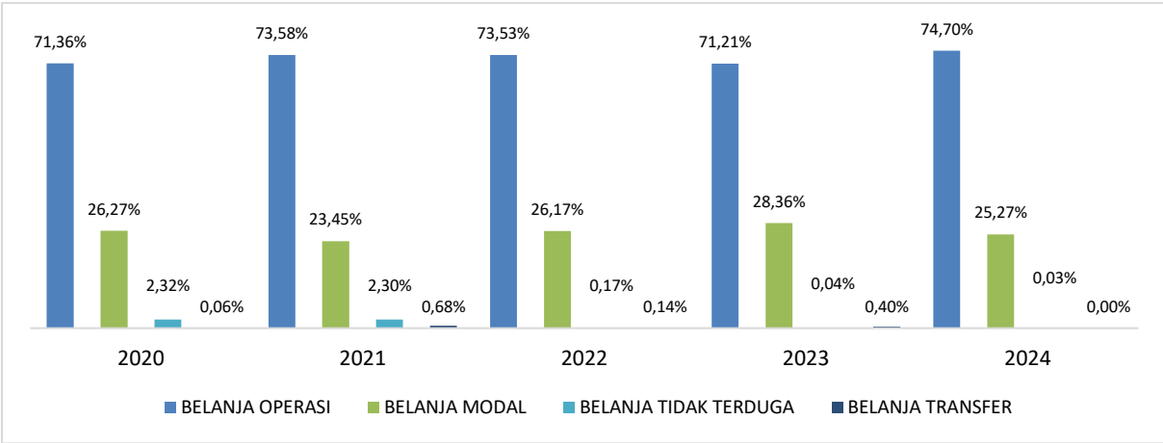
undangan, diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja (performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah terbagi ke dalam 4 pos belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, serta Belanja Transfer. Gambaran tren realisasi belanja daerah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.43 menunjukkan tren positif.



Gambar 2.43. Tren Realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020-2021, pertumbuhan belanja daerah sangat rendah (1,59%) disebabkan karena dampak pandemi covid-19 dimana pada tahun tersebut diberlakukan pembatasan aktivitas yang menghambat belanja pembangunan. Selain itu, prioritas belanja daerah pada kurun waktu tahun 2020-2021 difokuskan pada belanja darurat kesehatan, antara lain untuk vaksinasi dan fasilitas kesehatan. Pada tahun 2021-2023 terjadi lonjakan pertumbuhan belanja daerah yang sangat signifikan sebesar 15,57% pada 2022 dan sebesar 19,50% pada 2023, menunjukkan pemulihan ekonomi dan peningkatan belanja infrastruktur, terutama pada proyek strategis yang tertunda pada saat pandemi covid-19. Pada tahun 2024, pertumbuhan belanja daerah melambat drastis (4,50%), yang disebabkan karena penyesuaian anggaran karena penurunan pertumbuhan kapasitas fiskal daerah.

Untuk mengetahui komponen belanja daerah yang mempengaruhi pertumbuhan belanja daerah dapat dilihat melalui gambaran proporsi komponen belanja daerah terhadap total belanja daerah, sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.44, dimana terlihat bahwa perlambatan pertumbuhan belanja daerah rata-rata disebabkan karena penurunan proporsi komponen belanja modal.



Gambar 2.44. Tren Realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Realisasi besaran komponen belanja daerah beserta rinciannya selama tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.150. Komponen belanja transfer mencatatkan rata-rata pertumbuhan tertinggi dimana rincian belanjanya dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kota Serang dalam rangka kerja sama pengelolaan sampah untuk penanganan sampah dari Kota Tangerang Selatan. Alokasi belanja bantuan sosial pada tahun 2021 meningkat signifikan karena sebagai upaya perlindungan sosial masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Realisasi surplus/defisit selama tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.151.

Tabel 2.150. Realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun					rata-rata pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2	**BELANJA DAERAH**	**3.143.397.216.971,00**	**3.193.509.491.949,00**	**3.690.617.520.397,00**	**4.410.252.278.197,00**	**4.608.519.651.396,00**	**10,29%**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**2.243.113.362.305,00**	**2.349.626.059.070,00**	**2.713.826.400.703,00**	**3.140.481.084.493,00**	**3.442.519.710.653,00**	**11,40%**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.208.110.417.049,00	847.542.209.097,00	911.516.133.943,00	1.049.331.586.444,00	1.264.051.361.654,00	3,32%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	890.454.713.751,00	1.322.343.650.713,00	1.689.017.973.676,00	1.932.792.226.012,00	1.985.092.159.781,00	23,34%
2.1.3	Belanja Hibah	143.930.231.505,00	165.225.302.260,00	109.305.893.084,00	157.662.272.037,00	193.239.767.611,00	11,94%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	618.000.000,00	14.514.897.000,00	3.986.400.000,00	695.000.000,00	136.421.607,00	503,30%
2.2	**BELANJA MODAL**	**825.683.819.294,00**	**748.795.986.827,00**	**965.682.851.455,00**	**1.250.559.871.620,00**	**1.164.502.443.449,00**	**10,57%**
2.2.1	Belanja Modal	825.683.819.294,00	748.795.986.827,00	965.682.851.455,00	1.250.559.871.620,00	1.164.502.443.449,00	10,57%
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**72.774.406.372,00**	**73.372.090.052,00**	**6.108.268.239,00**	**1.711.322.084,00**	**1.497.497.294,00**	**-43,83%**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	72.774.406.372,00	73.372.090.052,00	6.108.268.239,00	1.711.322.084,00	1.497.497.294,00	-43,83%
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**1.825.629.000,00**	**21.715.356.000,00**	**5.000.000.000,00**	**17.500.000.000,00**	**0,00**	**290,62%**
2.4.1.	Belanja Bantuan Keuangan	1.825.629.000,00	21.715.356.000,00	5.000.000.000,00	17.500.000.000,00	0,00	290,62%

Sumber: LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Tabel 2.151. Realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SURPLUS/(DEFISIT)	(138.880.751.493,00)	363.296.771.282,00	60.034.773.548,00	(293.481.949.227,00)	(110.048.958.555,00)

Berdasarkan data dalam Tabel 2.151, terlihat bahwa pada tahun 2021-2022 kinerja APBD Kota Tangerang Selatan mencatatkan realisasi surplus antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun-tahun tersebut baru dimulai pemulihan ekonomi pasca pandemi covid -19 dimana belanja daerah baru mulai proses penyesuaian setelah dilakukan pembatasan aktivitas. Pada Tahun 2023-2024 kinerja APBD Kota Tangerang Selatan mencatatkan realisasi defisit antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Defisit APBD tersebut harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.

2.8.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah mencakup semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang berjalan maupun di tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang menghasilkan Pembiayaan Netto.

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari: (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, (2) Pencairan dana cadangan, (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Penerimaan pinjaman daerah, (5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau (6) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk: (1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, (2) Penyertaan modal daerah, (3) Pembentukan dana cadangan, (4) Pemberian pinjaman daerah, dan/atau (5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian pembiayaan daerah Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.152, dimana terlihat bahwa sumber penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah bagi BUMD. Selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan membentuk pembiayaan neto yang digunakan untuk menutup defisit APBD.

Realisasi surplus/defisit APBD ditambah dengan realisasi pembiayaan neto menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Daerah (SILPA). Pemerintah Daerah menganggarkan SILPA tahun berkenaan bersaldo nihil. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan; volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Sementara itu dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan. Data SILPA Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.153, dimana SILPA Tahun Berjalan positif digunakan untuk penerimaan pembiayaan daerah, yang dicatat sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Tabel 2.152. Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-rata pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
6	**Pembiayaan Daerah**						
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**249.350.271.104,35**	**110.469.519.611,00**	**473.766.290.893,00**	**523.829.325.526,00**	**220.347.491.299,00**	**56,45%**
61.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	249.350.271.104,35	110.469.519.611,00	473.766.290.893,00	523.829.325.526,00	220.347.491.299,00	56,45%
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**0,00**	**9.999.998.915,00**	**10.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	9.999.998.915,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00%
	Pembiayaan Netto	249.350.271.104,35	110.469.519.611,00	463.766.291.978,00	513.829.325.526,00	220.347.491.299,00	54,45%

Sumber: LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Tabel 2.153. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Realisasi Surplus/Defisit (Rp)	(138.880.751.493,00)	363.296.771.282,00	60.034.773.548,00	(293.481.949.227,00)	(110.048.958.555,00)
Pembiayaan neto (Rp)	249.350.271.104,35	110.469.519.611,00	463.766.291.978,00	513.829.325.526,00	220.347.491.299,00
SILPA (Rp)	110.469.519.611,35	473.766.290.893,00	523.801.065.526,00	220.347.376.299,00	110.298.532.744,00

Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dilakukan analisis terhadap komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.149, dimana terdapat komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang berasal dari pelampauan penerimaan PAD yang cukup besar pada tahun 2022-2023, yaitu sebesar 8-11%. Kondisi perlu dilakukan evaluasi dalam proses perencanaan PAD untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan PAD. Pada tahun 2024, komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang berasal dari pelampauan penerimaan PAD mulai menurun, yaitu sebesar 4,97%. Kondisi ini perlu dipertahankan sehingga PAD dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kota Tangerang Selatan pada tahun rencana. Komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang berasal dari penghematan belanja juga perlu diupayakan menurun setiap tahun untuk dapat mencerminkan perencanaan penganggaran belanja semakin efisien.

Tabel 2.154. Rincian Komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	**110.469.519.611,00**	**473.766.290.893,00**	**523.829.325.526,00**	**220.347.491.299,00**
Pelampauan Penerimaan PAD	(121.490.312.744,00)	175.814.125.741,00	247.808.813.987,00	116.655.180.547,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	(128.986.447.728,00)	(9.045.298.587,00)	(58.382.429.672,00)	(81.877.829.332,00)
Pelampauan Penerimaan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	(51.654.874.815,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	1.778.752.253,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja	367.674.972.386,00	287.157.602.430,00	304.898.127.930,00	158.912.287.368,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	1.085,00	0,00
Sisa Belanja Lainnya	43.147.430.259,00	19.839.861.309,00	29.504.812.196,00	26.657.852.716,00

Sumber: LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

2.8.1.4. Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan Neraca Daerah sangat penting bagi manajemen Pemerintahan Daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Sebagai salah satu unsur yang dicakup dalam Laporan Neraca Daerah, aset dapat didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Aset dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset terdiri

dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Unsur kedua dari Laporan Neraca Daerah yaitu Kewajiban yang didefinisikan sebagai utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Unsur terakhir dari Laporan Neraca Daerah adalah ekuitas yang didefinisikan sebagai kekayaan bersih Pemerintah Daerah. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Secara umum Neraca Daerah memiliki persamaan dasar yaitu :

$$Aset = Kewajiban + Ekuitas$$

Berikut merupakan kondisi Neraca Daerah Kota Tangerang Selatan Periode tahun 2019-2023, disajikan dalam Tabel 2.155.

2.8.1.5. Tabel 2.155. Laporan Neraca Daerah Kota Tangerang Selatan Periode tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024 (*un-audited*)	
1	**ASET**	**23.131.755.059.124,30**	**24.194.777.606.820,80**	**25.048.368.746.464,00**	**25.779.780.599.745,70**	**26.627.420.318.117,00**	**3,58%**
11	**Aset Lancar**	**870.606.368.666,06**	**1.212.773.143.378,47**	**1.298.854.277.783,20**	**1.068.346.684.048,32**	**911.037.874.915,25**	**3,48%**
1101	Kas dan Setara Kas	110.469.567.611,35	473.766.290.893,00	524.162.883.361,00	220.412.939.549,00	110.364.288.336,00	57,91%
1102	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1103	Piutang Pajak Daerah	964.960.346.320,74	1.047.207.152.174,13	1.100.843.867.506,13	1.217.784.904.541,13	1.342.977.775.483,13	8,64%
1104	Piutang retribusi daerah	2.820.913.537,00	1.665.920.877,00	2.080.179.886,00	2.112.249.866,78	15.892.212.948,00	159,46%
1105	Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1106	Piutang lain-lain PAD yang sah	14.239.506.400,17	439.667.924.197,60	423.378.724.076,58	466.287.848.252,07	504.748.578.337,63	750,59%
1107	Piutang transfer Pemerintah Pusat	29.990.148.152,00	58.631.207,00	58.631.207,00	0,00	0,00	-49,95%
1108	Piutang transfer Antar Daerah	257.368.331.406,00	93.473.359.750,00	53.923.423.235,00	115.503.631.943,00	0,00	-22,95%
1109	Piutang Lainnya	493.305.102,48	496.564.412,00	428.450.412,00	519.546.219,00	517.227.219,00	1,94%
1110	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(593.678.336.894,64)	(933.783.699.846,84)	(882.362.865.637,43)	(1.030.790.524.495,07)	(1.147.990.734.915,09)	19,99%
1111	Beban Dibayar di Muka	6.401.424.693,81	5.032.477.045,09	5.317.580.549,57	9.577.667.892,01	11.272.218.978,12	20,52%
1112	Persediaan	77.541.162.337,15	85.188.522.669,49	71.023.403.187,35	66.938.420.280,40	73.256.308.528,46	-0,77%
1113	Aset untuk dikonsolidasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	**Investasi Jangka Panjang**	**162.815.452.282,30**	**158.420.218.114,49**	**159.106.602.839,89**	**198.896.766.386,00**	**203.292.295.359,00**	**6,24%**
1202	Investasi Jangka Panjang Permanen	162.815.452.282,30	158.420.218.114,49	159.106.602.839,89	198.896.766.386,00	203.292.295.359,00	6,24%
13	**Aset Tetap**	**21.937.975.811.287,20**	**22.664.772.962.469,60**	**23.399.122.549.915,20**	**24.294.946.044.494,20**	**25.368.896.022.855,70**	**3,70%**
1301	Tanah	16.238.056.174.914,70	16.648.407.747.817,70	16.810.452.824.739,60	16.978.527.398.350,60	17.391.459.667.021,30	1,73%
1302	Peralatan dan Mesin	1.374.020.004.884,62	1.618.653.468.754,68	1.789.781.018.224,17	2.036.461.458.942,87	2.209.085.010.230,94	12,66%
1303	Gedung dan Bangunan	3.414.026.334.763,74	3.545.124.708.443,95	3.712.891.495.994,18	4.116.653.000.619,63	4.474.289.270.415,57	7,03%
1304	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.624.253.562.201,83	4.074.440.547.174,47	4.540.261.576.217,47	5.233.776.675.290,85	5.901.207.588.120,77	12,97%
1305	Aset Tetap Lainnya	52.790.990.329,38	60.705.488.491,38	63.724.710.174,38	44.308.382.503,38	60.042.626.923,38	6,25%
1306	Konstruksi dalam Pengerjaan	121.985.477.432,85	74.576.030.352,00	290.982.855.606,00	218.605.936.655,00	221.004.051.300,00	56,89%
1307	Akumulasi Penyusutan	(2.887.156.733.239,89)	(3.357.135.028.564,54)	(3.808.971.931.040,60)	(4.333.386.807.868,17)	(4.888.192.191.156,26)	14,08%
15	**Aset Lainnya**	**160.357.426.888,70**	**158.811.282.858,20**	**191.285.315.925,69**	**217.591.104.817,21**	**90.616.313.147,00**	**-6,28%**

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024 (*un-audited*)	
1501	Tagihan Jangka Panjang	15.486.309,52	16.350.000,00	0,00	0,00	123.000,00	-94,38%
1502	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	126.056.150.029,89	126.056.150.029,89	86.373.182.340,00	86.373.182.340,00	32.795.370.500,00	-23,38%
1503	Aset Tidak Berwujud	19.947.256.073,00	19.959.242.673,00	20.032.390.463,00	15.400.575.851,00	14.668.287.554,00	-6,86%
1504	Aset lain-lain	49.343.728.184,68	48.287.481.492,68	74.950.214.090,42	76.181.508.783,30	81.562.760.324,94	15,45%
1505	Akumulasi amortisasi aset tak berwujud	(19.358.536.451,50)	(19.658.609.901,50)	(19.893.970.665,00)	(15.343.005.305,00)	(14.409.438.100,00)	-6,55%
1506	Akumulasi penyusutan aset lainnya	(15.646.657.256,89)	(15.849.331.435,87)	(18.790.503.308,73)	(30.960.901.852,09)	(24.000.790.131,94)	15,54%
1508	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	48.614.003.006,00	85.939.745.000,00	0,00	-5,81%
16	**Properti Investasi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.577.811.840,00**	**0,00%**
1601	Properti Investasi Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	53.577.811.840,00	0,00%
2	**KEWAJIBAN**	**116.068.939.028,67**	**57.453.905.601,93**	**33.125.981.178,94**	**34.211.421.562,43**	**28.996.465.341,64**	**-26,20%**
21	**Kewajiban Jangka Pendek**	**116.068.939.028,67**	**57.453.905.601,93**	**33.125.981.178,94**	**34.211.421.562,43**	**28.996.465.341,64**	**-26,20%**
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	376.496,00	11.002.387,00	0,00	292.342,00	656,24%
2102	Utang bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2103	Utang pinjaman jangka pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2104	Bagian lancar utang jangka panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2105	Pendapatan diterima di muka	26.379.713.107,67	21.548.041.765,93	5.562.235.010,94	9.367.933.304,68	13.504.448.139,64	5,02%
2106	Utang belanja	89.689.225.921,00	35.905.487.340,00	27.196.366.487,00	23.722.677.270,75	14.381.462.307,00	-34,09%
2107	Utang jangka pendek lainnya	0,00	0,00	356.377.294,00	1.120.810.987,00	1.110.262.553,00	53,39%
22	**Kewajiban Jangka Panjang**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
2201	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2202	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2203	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2204	Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	**EKUITAS**	**23.015.686.120.095,60**	**24.137.523.701.218,90**	**25.015.242.765.285,00**	**25.745.569.178.183,20**	**26.598.423.852.774,40**	**3,69%**
31	**Ekuitas**	**23.015.686.120.095,60**	**24.137.523.701.218,90**	**25.015.242.765.285,00**	**25.745.569.178.183,20**	**26.598.423.852.774,40**	**3,69%**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		23.131.755.059.124,30	24.194.977.606.820,80	25.048.368.746.463,90	25.779.780.599.745,60	26.627.420.318.116,00	3,58%

Sumber: LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Berdasarkan Tabel 2.155, maka dapat dianalisis posisi keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas.

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk neraca keuangan daerah adalah rasio lancar dan rasio cepat (quick). Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang/ kewajiban jangka pendek yang segera harus dipenuhi dengan aset lancar, dihitung menggunakan perbandingan antara nilai aset lancar dengan nilai kewajiban lancar. Sedangkan rasio cepat (quick) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, yaitu membandingkan antara nilai aset lancar yang telah dikurangi dengan nilai persediaan dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi nilai rasio lancar menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki semakin baik. Rasio likuiditas keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.156.

Tabel 2.156. Analisa Rasio Likuiditas Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024 (*un-audited*)
A. Rasio Lancar	7,50	21,11	39,21	31,23	31,42
B. Rasio Cepat (*quick*)	6,83	19,63	37,07	29,27	28,89

Berdasarkan tren rasio likuiditas sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.156, terlihat bahwa secara rata-rata rasio likuiditas keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset yang dimilikinya. Gambaran ini terlihat juga tren penurunan kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020-2024.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan rasio hutang terhadap total aset menggunakan perbandingan antara total hutang terhadap total aset. Rasio ini menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aset. Selain itu, rasio solvabilitas juga dihitung menggunakan rasio hutang terhadap modal/ekuitas yang menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Rasio solvabilitas keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.157.

Tabel 2.157. Analisa Rasio Solvabilitas Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024 (*un-audited*)
A. Rasio Hutang terhadap Total Aset	0,005	0,002	0,001	0,001	0,001
B. Rasio Hutang terhadap Modal	0,005	0,002	0,001	0,001	0,001

Berdasarkan tren rasio solvabilitas sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.157, terlihat bahwa secara pengaruh hutang terhadap kemampuan pembiayaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat kecil. Selain itu, nilai total hutang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan hingga saat ini masih berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak bergantung pada hutang.

C. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Rasio aktivitas yang digunakan adalah rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur piutang adalah rasio untuk melihat berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang/ mengubah piutang menjadi kas. Semakin lama jangka waktu pelunasannya, semakin besar pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Rata-rata umur piutang dihitung dengan rumus:

Rata-rata Umur Piutang = 365 : perputaran piutang,

dimana perputaran piutang = pendapatan daerah dibagi rata-rata piutang pendapatan daerah.

Rata-rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan. Semakin tinggi persediaan berputar dalam satu tahun menandakan efektivitas manajemen persediaan. Sebaliknya, jika perputaran persediaan rendah menunjukkan pengendalian atas persediaan kurang efektif. Rata-rata umur persediaan dihitung dengan rumus:

Rata-rata Umur Persediaan = 365 : perputaran persediaan,

dimana perputaran persediaan = nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi rata-rata nilai persediaan.

Rasio aktivitas keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.158.

Tabel 2.158. Rasio Aktivitas Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024 (*un-audited*)
A. Rata-rata umur piutang	22,04	23,20	21,98	22,83	21,61
B. Rata-rata umur persediaan	352,05	320,44	384,35	407,81	372,64

Berdasarkan data dalam Tabel 2.158 terlihat bahwa rata-rata umur piutang dapat diubah menjadi kas antara 21-23 hari. Jika ditinjau dari tren piutang, terlihat bahwa piutang pendapatan asli daerah mengalami peningkatan pada tahun 2023-2024 dibandingkan 3 (tiga) tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan perlu adanya upaya peningkatan efektivitas penagihan piutang yang bersumber dari pendapatan asli daerah agar lebih cepat dan tepat sehingga piutang tersebut dapat diubah menjadi lebih likuid untuk pembiayaan pembangunan daerah dan meningkatkan kemampuan *cash flow* keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Beberapa upaya peningkatan efektivitas penagihan terhadap piutang PAD antara lain:

1. Penguatan Sistem Pemutakhiran Data Wajib Bayar melalui:
   - Integrasi database wajib pajak/retribusi dengan Dukcapil, Samsat, dan sistem perdagangan (contoh: memadukan antara data Booking.com dan registrasi usaha untuk intensifikasi pajak hotel);
   - Menggunakan *data analytics* untuk identifikasi wajib bayar yang belum mendaftar.
2. Optimalisasi Penagihan dengan Teknologi melalui penggunaan aplikasi penagihan digital (antara lain: dengan pesan whataps/email);
3. Menerapkan pembayaran secara elektronifikasi/transaksi elektronik (QRIS/*virtual account*) untuk memudahkan pembayaran pajak dan retribusi;
4. Penegakan hukum yang konsisten;
5. Restrukturisasi dan pemberian insentif seperti pengurangan denda atau penawaran pembayaran cicilan untuk wajib pajak yang kesulitan dan pemberian reward bagi wajib pajak yang bayar tepat waktu;
6. Audit khusus untuk verifikasi piutang fiktif/usang;
7. Penyelesaian piutang macet melalui upaya hapus buku (*write off*) piutang yang sudah tidak mungkin ditagih (dengan persetujuan DPRD);
8. Penguatan sosialisasi dan edukasi melalui media sosial

Adapun piutang yang berasal pendapatan transfer, perlu dilakukan upaya optimalisasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten. Sementara itu, rata-rata umur persediaan cenderung meningkat yang menggambarkan perlunya peningkatan efektivitas manajemen persediaan sehingga penggunaan persediaan untuk pelayanan publik dapat lebih cepat.

Proporsi Anggaran Belanja Pegawai

Analisa proporsi belanja pegawai bertujuan untuk mengevaluasi seberapa besar alokasi anggaran daerah digunakan untuk membiayai aparatur pemerintah (seperti gaji dan tunjangan) dibandingkan dengan belanja pembangunan atau pelayanan publik. Analisa dilakukan dengan membandingkan antara belanja pegawai dengan total pengeluaran daerah (belanja + pengeluaran pembiayaan) sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.159, dimana terlihat mulai tahun 2020-2023 proporsi belanja pegawai menurun hingga di bawah 30% sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2024, belanja pegawai mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan karena adanya penyesuaian belanja atas penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Walaupun mengalami kenaikan persentase belanja pegawai pada tahun 2024, namun proporsinya masih di bawah 30%.

Tabel 2.159. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur tahun 2020-2024

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2020	1.208.110.417.049	3.143.397.216.971	38,43%
2	2021	847.542.209.097	3.193.509.491.949	26,54%
3	2022	911.516.133.943	3.700.617.519.312	24,63%
4	2023	1.049.331.586.444	4.420.252.278.197	23,74%
5	2024	1.264.051.361.654	4.608.519.651.396	27,43%

Sumber: LKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024

2.8.2.Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2029

Proyeksi kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah dalam kurun waktu tahun 2025-2029 disusun berdasarkan kinerja keuangan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 sebagaimana disampaikan pada SubBab sebelumnya, kebijakan keuangan dan kondisi lingkungan yang dinamis. Kerangka pendanaan daerah tahun 2025-2029 bersifat indikatif berupa proyeksi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah, disajikan dalam Tabel 2.160. Kerangka pendanaan daerah pada tahun 2030 merupakan kerangka pendanaan transisi untuk RPJMD Tahun 2030-2034.

Tabel 2.160. Proyeksi Kerangka Pendanaan Indikatif Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	APBD Tahun 2025	Proyeksi Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**4.498.470.692.841,00**	**4.665.475.342.059,00**	**4.994.341.997.560,00**	**5.346.390.273.190,00**	**5.723.254.227.929,00**	**6.126.683.104.629,00**	**6.558.549.449.259,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.347.128.663.052,00**	**2.781.287.221.449,00**	**2.947.708.016.694,20**	**3.305.488.781.514,50**	**3.729.832.141.971,80**	**4.240.967.389.922,81**	**4.867.107.664.788,50**
4.1.01	Pajak Daerah	2.093.592.089.573,00	2.548.478.000.000,00	2.650.000.000.000,00	2.915.000.000.000,00	3.206.500.000.000,00	3.527.150.000.000,00	3.879.865.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	130.996.951.091,00	144.280.359.200,00	207.633.864.924,72	298.805.895.013,17	430.011.563.513,45	618.829.641.052,20	890.557.736.438,22
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	701.475.939,00	735.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	121.838.146.449,00	87.793.862.249,00	89.374.151.769,48	90.982.886.501,33	92.620.578.458,36	94.287.748.870,61	95.984.928.350,28
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.151.342.029.789,00**	**1.884.188.120.610,00**	**1.768.172.821.160,00**	**1.841.191.847.404,80**	**1.917.672.580.905,44**	**1.997.757.285.264,23**	**2.081.596.927.054,65**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.400.086.802.533,00	1.467.596.781.000,00	1.458.172.821.160,00	1.521.891.847.404,80	1.588.793.580.905,44	1.659.011.915.264,23	1.732.689.195.954,65
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.361.057.579.533,00	1.453.493.902.000,00	1.444.172.821.160,00	1.507.891.847.404,80	1.574.793.580.905,44	1.645.011.915.264,23	1.718.689.195.954,65
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (Dbh)	317.755.436.000,00	305.919.309.000,00	327.771.360.660,00	337.604.501.479,80	347.732.636.524,19	358.164.615.619,92	368.909.554.088,52
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (Dau)	663.369.072.841,00	732.355.360.000,00	718.134.189.150,00	754.040.898.607,50	791.742.943.537,88	831.330.090.714,77	872.896.595.250,51

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	APBD Tahun 2025	Proyeksi Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.2.01.01.03	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik	22.208.153.615,00	12.894.584.000,00	12.894.584.000,00	11.605.125.600,00	10.444.613.040,00	9.400.151.736,00	8.460.136.562,40
4.2.01.01.04	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (Dak) Non-Fisik	357.724.917.077,00	402.324.649.000,00	385.372.687.350,00	404.641.321.717,50	424.873.387.803,38	446.117.057.193,54	468.422.910.053,22
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (Did)	0,00	14.102.879.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	39.029.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	751.255.227.256,00	416.591.339.610,00	310.000.000.000,00	319.300.000.000,00	328.879.000.000,00	338.745.370.000,00	348.907.731.100,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	744.614.942.256,00	416.591.339.610,00	310.000.000.000,00	319.300.000.000,00	328.879.000.000,00	338.745.370.000,00	348.907.731.100,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	6.640.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.01	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**BELANJA DAERAH**	**4.608.519.651.396,00**	**4.995.116.023.170,00**	**5.144.341.997.560,00**	**5.496.390.273.190,00**	**5.873.254.227.929,00**	**6.326.683.104.629,00**	**6.658.549.449.259,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.442.519.710.653,00**	**3.684.552.464.948,56**	**3.799.039.057.977,00**	**4.001.087.333.607,00**	**4.322.969.082.474,00**	**4.556.320.350.957,00**	**4.713.246.509.676,00**

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	APBD Tahun 2025	Proyeksi Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.264.051.361.654,00	1.459.054.045.015,87	1.663.946.898.196,00	1.783.401.431.675,00	2.087.876.922.693,00	2.138.634.449.025,00	2.190.660.913.516,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.985.092.159.781,00	2.067.685.901.932,69	1.985.092.159.781,00	2.067.685.901.932,00	2.085.092.159.781,00	2.142.685.901.932,00	2.372.585.596.160,00
5.1.05	Belanja Hibah	193.239.767.611,00	157.812.518.000,00	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	200.000.000.000,00	75.000.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	136.421.607,00	0,00	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.164.502.443.449,00**	**1.300.563.558.057,44**	**1.335.302.939.583,00**	**1.485.302.939.583,00**	**1.540.285.145.455,00**	**1.760.362.753.672,00**	**1.935.302.939.583,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.497.497.294,00**	**10.000.000.164,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.497.497.294,00	10.000.000.164,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**220.347.491.299,00**	**329.640.681.111,00**	**150.000.000.000,00**	**150.000.000.000,00**	**150.000.000.000,00**	**200.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**
7.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**220.347.491.299,00**	**359.640.681.111,00**	**200.000.000.000,00**	**200.000.000.000,00**	**200.000.000.000,00**	**200.000.000.000,00**	**200.000.000.000,00**
7.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	220.347.491.299,00	359.640.681.111,00	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
7.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**30.000.000.000,00**	**50.000.000.000,00**	**50.000.000.000,00**	**50.000.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000.000,00**
7.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	30.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	100.000.000.000,00

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	APBD Tahun 2025	Proyeksi Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		110.298.532.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pada proyeksi pendapatan daerah, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah, terdapat tambahan potensi pendapatan asli daerah dari beberapa pajak yang semula merupakan komponen bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Banten. Untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah perlu diupayakan beberapa kebijakan, antara lain:

a) Penguatan Sistem Pemutakhiran Data Wajib Bayar melalui:
   - Integrasi *database* wajib pajak/retribusi dengan Dukcapil, Samsat, dan sistem perdagangan (contoh: memadukan antara data Booking.com dan registrasi usaha untuk intensifikasi pajak hotel);
   - Penggunan *data analytics* untuk identifikasi wajib bayar yang belum mendaftar.
b) Penyederhanaan prosedur dan optimalisasi penagihan menggunakan teknologi melalui penggunaan aplikasi penagihan digital (antara lain: dengan pesan whataps/email);
c) Penerapan pembayaran secara elektronifikasi/transaksi elektronik (QRIS/*virtual account/e-commerce*) untuk memudahkan pembayaran pajak dan retribusi;
d) Restrukturisasi pembayaran pajak dan retribusi seperti pengurangan denda atau penawaran pembayaran cicilan; pemberian *reward* bagi wajib pajak yang bayar tepat waktu;
e) Pemberian insentif bagi wajib pajak/retribusi yang bayar tepat waktu dan/atau yang membayar menggunakan sistem pembayaran digital;
f) Penguatan sosialisasi dan edukasi melalui media sosial atau kegiatan tatap muka untuk peningkatan literasi masyarakat dalam hal kemudahan pembayaran pajak dan retribusi menggunakan transaksi digital;
g) Optimalisasi pengawasan bersama terhadap Wajib Pajak, bekerjasama dengan Kanwil DJP Banten, KPP Pondok Aren dan KPP Serpong
h) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
i) Peningkatan koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten dalam rangka peningkatan alokasi pendapatan transfer yang menjadi bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j) Mendukung program-program Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan.
k) Mengupayakan inovasi pembiayaan yang bersumber dari sektor non pemerintah, baik melalui KPBU, CSR dan/atau *creative financing* lainnya;
l) Mengoptimalkan pemanfaatan aset/Barang Milik Daerah (BMD);
m) Mendorong penyelenggaraan BLUD dan BUMD yang sehat dan *profitable*.

Proyeksi kerangka pendanaan untuk belanja pegawai pada belanja daerah tahun 2025-2029, terhitung proporsi belanja pegawai terhadap total belanja dan pengeluaran pembiayaan sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen). Hal tersebut disebabkan penerimaan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun 2025, yang merupakan konvesi dari pegawai honorer. Kebijakan dalam kerangka pendanaan belanja daerah yang akan diterapkan pada kurun waktu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a) Belanja urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk kebutuhan pencapaian standar pelayanan minimal dan peningkatan kualitas pelayanannya;

b) Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar;
c) Belanja daerah dialokasikan untuk mendukung target prioritas pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah dan kemampuan daerah;
d) Belanja daerah yang berasal dari pendapatan transfer yang telah ditentukan penggunaannya, dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) Belanja daerah dialokasikan untuk pencapaian program prioritas pembangunan daerah, termasuk fokus pembangunan KDH/WKDH selama kurun waktu tahun 2025-2029.
f) Belanja Tidak Terduga dianggarkan secara memadai mengantisipasi kejadian luar biasa di luar kewenangan daerah atau kondisi darurat/ mendesak di luar perencanaan, tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat atau diamanatkan peraturan perundang-undangan;
g) Belanja hibah dan bantuan sosial dialokasikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah setelah pemenuhan urusan pelayanan wajib sesuai ketentuan yang berlaku
h) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, belanja daerah dialokasikan untuk pendanaan fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi pendanaan fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian kualitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan;
i) Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, belanja daerah dialokasikan untuk pendanaan Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi pendanaan kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan, pencapaian kualitas SPM bidang kesehatan dan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya pada seluruh siklus kehidupan;
j) Pendanaan untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah. Alokasi pendanaan tersebut di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan serta diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi;
k) Pendanaan layanan pengawasan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah, untuk kegiatan pengawasan dan peningkatan kapabilitas APIP;
l) Pendanaan untuk program dan kegiatan yang diusulkan melalui aspirasi melalui Musrenbang dan pokok-pokok pikiran pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan sebagai perwakilan masyarakat sebesar Rp. 250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Rupiah) atau sesuai kemampuan keuangan daerah;

m) Pendanaan untuk peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana, termasuk untuk pemadaman kebakaran dan penyelamatan, paling sedikit 1% (satu persen) dari total belanja daerah. Alokasi pendanaan tersebut dialokasikan untuk pencapaian kualitas SPM bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (trantibumlinmas).
n) Pendanaan untuk pengelolaan sampah melalui PLTSA berupa Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS) yang dialokasikan sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Dalam kurun waktu tahun 2025-2029, dialokasikan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 250.000.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) untuk pendanaan BUMD Kota Tangerang Selatan, baik untuk yang eksisting atau rencana BUMD yang akan dibentuk selama tahun 2025-2029. Pada tahun 2025-2029, rencana BUMD yang akan dibentuk adalah BUMD pasar/aneka usaha dan BUMD parkir .BUMD pasar/aneka usaha, BUMD pangan, dan/atau BUMD pariwisata.

2.7. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan pencapaian kinerja saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.7.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan dirumuskan mengacu pada dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 serta kesenjangan (gap) antara prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan disajikan dalam tabel berikut.

.

Tabel 2.161. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Gambaran Umum Daerah	KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Hasil Penjaringan Aspirasi	Penafisan untuk Permasalahan Daerah RPJMD Tahun 2025-2029
Aspek Geografi dan Demografi				
1. Jumlah penduduk yang tinggi (> 1 juta) dan pertumbuhan kota yang pesat memicu tingginya penggunaan lahan yang berdampak pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta penurunan kinerja jasa lingkungan hidup; 2. Pembangunan perkotaan yang belum berorientasi pada kelestarian lingkungan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup (pencemaran air, udara dan tanah) dan peningkatan suhu permukaan; 3. Kota Tangerang Selatan memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman bencana gempa bumi, banjir, cuaca ekstrem dan kegagalan teknologi. Sementara itu ketahanan daerah terhadap potensi bencana tersebut masih belum optimal, terutama dalam hal kesiapsiagaan masyarakat dan pengembangan pemulihan bencana yang terintegrasi dan efektif; 4. Ketahanan pangan daerah masih belum optimal ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk yang tidak mendapatkan asupan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi harian agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif.	1. Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 2. Kinerja jasa lingkungan hidup berkategori rendah; 3. Tangsel memiliki potensi bencana yang tinggi, namun tingkat adaptasi dan mitigasi bencana masyarakat masih rendah; 4. Belum optimalnya kualitas konsumsi pangan; 5. Belum semua rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sanitasi dan air minum yang aman.	1. Daya Dukung Lingkungan Hidup Menurun; 2. Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Belum Optimal; 3. Pengelolaan Persampahan yang Terpadu dan Ramah Lingkungan Belum Optimal;	1. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan tekanan besar pada lingkungan, termasuk lahan yang semakin sempit dan masalah-masalah perkotaan seperti pencemaran, kemacetan, banjir, dan risiko kebakaran yang meningkat 2. Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dan pengambil kebijakan terhadap adaptasi dan mitigasi kebencanaan serta kepedulian pada kelestarian lingkungan hidup 3. Belum optimalnya tata kelola pencegahan dan penanganan bencana serta tata kelola pembangunan yang ramah lingkungan	1. Kualitas Lingkungan Hidup menurun 2. Kota Tangerang Selatan masih rentan pangan (terutama keterjangkauan untuk masyarakat miskin), air, bencana dan perubahan iklim
Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1. Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Diversifikasi potensi ekonomi daerah berbasis produk unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah belum optimal; 2. Ketimpangan ekonomi meningkat dan tingkat kemiskinan masih berfluktuasi yang mengindikasikan belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan yang adaptif dan inklusif; 3. Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi belum merata, dimana masih terdapat peningkatan prevalensi stunting dan status keluarga sehat di Kota Tangerang Selatan masih berkategori Pra Sehat;	1. Penuntasan kemiskinan dan perluasan perlindungan yang adaptif belum optimal; **2.** Masih terdapat penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan di Kota Tangerang Selatan, terutama TBC dan Kusta	1. Percepatan Penuntasan Kemiskinan dan Perluasan Perlindungan yang Adaptif Belum Optimal; 2. Belum optimalnya kualitas SDM yang berdaya saing global; 3. Penguatan Norma Keluarga dan Masyarakat Belum Optimal.	1. Kesejahteraan penduduk belum sepenuhnya optimal. Biaya hidup yang terus meningkat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat; 2. Masih kurang efektifnya upaya-upaya pengentasan kemiskinan karena kurangnya inovasi dalam program yang mendukung masyarakat miskin agar dapat mandiri secara ekonomi 3. Perubahan budaya dan nilai sosial dalam gaya hidup masyarakat perkotaan memengaruhi nilai-nilai tradisional dan adat istiadat yang mulai tergerus sehingga memengaruhi identitas kolektif masyarakat sehingga meningkatkan	1. Pertumbuhan ekonomi daerah melambat, ketimpangan meningkat dan upaya pengentasan kemiskinan belum efektif karena kurangnya inovasi program. 2. Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi belum merata 3. Akses dan kualitas pendidikan belum merata, inklusif dan unggul

Gambaran Umum Daerah	KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Hasil Penjaringan Aspirasi	Penafisan untuk Permasalahan Daerah RPJMD Tahun 2025-2029
4. Partisipasi pendidikan dasar dan kualitas pembelajaran belum merata dan inklusif; 5. Masih terdapat dinamika dalam kerukunan umat beragama; 6. Belum optimalnya upaya pembangunan kebudayaan; 7. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam partisipasi ekonomi dan kepemimpinan.			kesenjangan sosial dan kurangnya gotong royong di masyarakat	4. Kehidupan sosial yang berbudaya dan harmonis belum optimal
Aspek Daya Saing Daerah				
1. Kota Tangerang Selatan masih mengalami bonus demografi namun mengalami penurunan partisipasi angkatan kerja yang berpotensi meningkatkan beban ketergantungan. Upaya peningkatan kualitas SDM usia produktif hingga menjadi sumber tenaga kerja profesional yang dapat meningkatkan penyerapan pasar kerja Nasional dan Dunia belum optimal; 2. Kontribusi sektor ekonomi kreatif yang merupakan indikator peralihan dari ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis pengetahuan, kreativitas, dan inovasi belum optimal. Kondisi tersebut juga diperkuat dengan kinerja inovasi daerah yang menurun; 3. Kewirausahaan daerah potensi aktivitas perekonomian yang sangat penting, baik dari segi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan memajukan potensi lokal mengalami penurunan.; 4. Aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan dan keterampilan pekerja dalam menggunakan teknologi digital terkait pekerjaan masih belum optimal; 5. Kontribusi ekspor terhadap PDRB mengalami penurunan; 6. Kualitas layanan infrastruktur belum optimal, terutama kualitas fisik dan integrasinya; 7. Belum optimalnya fasilitas perkotaan untuk mendukung tingkat kelayakan huni di Kota Tangerang Selatan, terutama terkait kualitas penyediaan fasilitas kesenian budaya, fasilitas pejalan kaki dan fasilitas kelompok rentan; 8. Potensi pajak daerah belum tergali optimal; 9. Iklim investasi daerah belum efisien.	1. Laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan; 2. Pengembangan potensi ekonomi dan daya tarik daerah belum optimal; 3. Belum optimalnya kontribusi sektor UMKM dan Ekraf terhadap sektor perdagangan di Tangerang Selatan; 4. Produktivitas tenaga kerja belum optimal	1. Produktivitas Tenaga Kerja Belum Optimal; 2. Pengembangan Potensi Ekonomi dan Daya Tarik Daerah Berbasis Riset Belum Optimal; 3. Infrastruktur, Layanan Perkotaan dan Pemenuhan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman Belum Sesuai Standar, Terintegrasi dan Inklusif Sesuai Kebutuhan Masyarakat; 4. Penataan Ruang yang Belum Terintegrasi, Berkeadilan dan Berkelanjutan	1. Belum optimalnya pertumbuhan sektor basis ekonomi selain konstruksi dan real estate; 2. Belum dikembangkannya kawasan wisata tematik yang mengintegrasikan produk wisata inovatif dan ekonomi digital Kota Tangerang Selatan; 3. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur serta kondusivitas lingkungan untuk meningkatkan daya tarik Kota Tangerang Selatan sebagai destinasi bisnis dan wisata; 4. Belum optimalnya link and match antara kualifikasi dan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja di Kota Tangerang Selatan; 5. Rendahnya riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kualitas SDM untuk bersaing dengan pencari kerja dari daerah lain; 6. Belum optimalnya pengembangan sub sektor ekonomi kreatif, pemanfaatan inovasi teknologi hasil riset yang tepat guna, dan kesiapan kapasitas produksi UMKM; 7. Kurangnya moda transportasi publik yang terintegrasi dan inklusif; 8. Rendahnya adopsi teknologi untuk hal yang produktif, dan konten digital lokal yang belum memadai, menjadi tantangan dalam pengembangan ekonomi daerah;	1. Kualitas SDM dan tenaga kerja belum unggul dan berdaya saing 2. Pengembangan dan diversifikasi produk unggulan daerah belum optimal 3. Inovasi dan adopsi teknologi belum optimal untuk peningkatan produktivitas daerah 4. Daya tarik pariwisata daerah belum berdaya saing; 5. Kontribusi sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian daerah belum optimal 6. Peningkatan investasi daerah belum berkelanjutan 7. Kualitas perkotaan yang layak huni belum optimal 8. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum digali optimal

Gambaran Umum Daerah	KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Hasil Penjaringan Aspirasi	Penafisan untuk Permasalahan Daerah RPJMD Tahun 2025-2029
Aspek Pelayanan Umum				
1. Transformasi tata kelola yang profesional belum optimal; 2. Integritas instansi penyelenggara pemerintahan belum optimal; 3. Penyelenggaraan HAM terutama bagi penduduk dengan disabilitas dan kelompok rentan belum optimal; 4. Kapabilitas inovasi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah mengalami penurunan; 5. Belum optimalnya daya saing daerah, terutama dalam hal pemerataan kualitas keterampilan SDM dan ekosistem inovasi; 6. Upaya peningkatan rasa aman dan nyaman di Kota Tangerang Selatan belum optimal		1. Belum Optimalnya Peran Riset, Inovasi dan Teknologi dalam mendukung pengembangan ekonomi Daerah; 2. Kerjasama Multihelix Dalam Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal; 3. Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik Belum optimal	1. Kurangnya inovasi dalam skema kerjasama daerah dengan multi pihak membuat kerjasama yang ada kurang efektif dan belum mampu menghasilkan solusi yang kreatif untuk mengatasi berbagai permasalahan daerah; 2. Masih adanya kebijakan pemerintah yang belum inklusif (belum mengakomodir kebutuhan khusus bagi kelompok rentan); 3. Belum efektifnya pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif penyediaan sarana prasarana perkotaan yang membutuhkan biaya sangat besar dan teknologi tinggi; 4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum terintegrasi dan belum responsif secara real-time, sehingga pelayanan publik masih belum efisien dan efektif	1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, berorientasi pelayanan prima, inklusif dan berintegritas belum optimal; 2. Kebijakan daerah yang dihasilkan belum berbasis riset dan belum inklusif

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Berdasarkan penafisan dari identifikasi permasalahan daerah tersebut, maka dirumuskan masalah pokok daerah yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 2.162. Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Penafisan dari Identifikasi Permasalahan	Masalah	Masalah Pokok
Kualitas Lingkungan Hidup menurun	Belum optimalnya kualitas lingkungan perkotaan sebagai kota layak huni	Belum optimalnya pembangunan kewilayahan yang inklusif, terintegrasi, berketahanan sosial, budaya dan ekologi
Kualitas perkotaan yang layak huni belum optimal		
Kehidupan sosial yang berbudaya dan harmonis belum optimal	Belum optimalnya ketahanan sosial dan budaya daerah	
Kota Tangerang Selatan masih rentan pangan (terutama keterjangkauan untuk masyarakat miskin), air, bencana dan perubahan iklim	Belum optimalnya ketahanan daerah terhadap pangan, air dan bencana (termasuk perubahan iklim)	
Pertumbuhan ekonomi daerah melambat	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan	Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi
Pengembangan dan diversifikasi produk unggulan daerah belum optimal		
Daya tarik pariwisata daerah belum berdaya saing;		
Kontribusi sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian daerah belum optimal		
Inovasi dan adopsi teknologi belum optimal untuk peningkatan produktivitas daerah		
Kualitas tenaga kerja belum unggul dan berdaya saing	Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah	
Derajat kesehatan masyarakat belum merata	Belum optimalnya pemerataan kesehatan berkualitas dan terjangkau	Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing global
Akses dan kualitas pendidikan belum merata, inklusif dan unggul	Belum optimalnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif	
Ketimpangan meningkat dan upaya pengentasan kemiskinan belum belum efektif karena kurangnya inovasi program.	Belum optimalnya pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan yang inklusif	
Reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola belum profesional	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang prima dan inklusif	Belum optimalnya reformasi birokrasi dan transformasi tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah
Kebijakan yang dihasilkan belum berbasis riset dan belum inklusif		

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Hasil identifikasi terhadap masalah pokok di Kota Tangerang Selatan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2026 terangkum sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembangunan kewilayahan yang inklusif, terintegrasi, berketahanan sosial, budaya dan ekologi

   Pembangunan kewilayahan yang berketahanan sosial, budaya, dan ekologi merupakan fondasi penting dalam menciptakan Kota Tangerang Selatan yang lestari dan inklusif. Namun, sejumlah indikator strategis menunjukkan bahwa pembangunan berbasis wilayah belum sepenuhnya mendukung ketahanan lingkungan, sosial, dan budaya secara menyeluruh.

Dari sisi ekologi dan lingkungan hidup, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 61,03 menunjukkan kualitas lingkungan yang masih dalam kategori sedang dan perlu perbaikan. Nilai ini terutama dipengaruhi oleh rendahnya Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 36,38, yang menandakan degradasi lahan akibat konversi penggunaan lahan dan tekanan urbanisasi yang tinggi. Di sisi lain, Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 64,00 dan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 71,59 juga masih dalam kategori sedang, mencerminkan masih adanya beban pencemaran dari limbah domestik, industri, dan kendaraan.

Meskipun persentase timbulan sampah yang dikelola di fasilitas pengolahan mencapai 96,83%, proporsi daur ulang masih relatif kecil (25,72%). Selain itu, capaian rumah tangga dengan akses terhadap air minum perpipaan baru mencapai 20,29%, dan akses terhadap sanitasi aman baru mencapai 11%, menunjukkan ketimpangan infrastruktur dasar di kawasan perkotaan.

Dari aspek ketahanan sosial dan budaya, Indeks Rasa Aman hanya 66,97, dan Indeks Harmoni berada di angka 7,29 (dari skala 10), menunjukkan bahwa kohesi sosial dan persepsi keamanan masih perlu diperkuat. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 52,11 dan Indeks Kerukunan Umat Beragama yang relatif baik (76,47) menunjukkan potensi sosial-budaya yang besar namun belum dioptimalkan.

Sementara itu, Indeks Risiko Bencana (68,1) menunjukkan potensi kerentanan tinggi terhadap bencana, baik hidrometeorologis maupun antropogenik, yang harus diantisipasi melalui pembangunan wilayah yang adaptif dan tangguh.

2. Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi

Perekonomian Kota Tangerang Selatan tahun 2024 mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%, angka yang cukup stabil namun belum menunjukkan percepatan signifikan pascapandemi. Dengan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp 80,18 juta, tingkat kesejahteraan masyarakat tergolong tinggi secara nominal, namun belum sepenuhnya merata.

Indikator Rasio Gini sebesar 0,395 menandakan ketimpangan pendapatan yang masih cukup tinggi dan mendekati ambang batas kewaspadaan (0,4), menunjukkan bahwa pertumbuhan belum inklusif. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih sebesar 5,09%, yang menunjukkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, terutama dari kelompok usia produktif.

Struktur ekonomi Kota Tangerang Selatan sangat dominan pada sektor tersier, di mana kontribusi sektor Perdagangan dan Jasa mencapai 69,53%, sementara kontribusi sektor-sektor berbasis produktivitas dan ekspor masih relatif rendah:

a. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum hanya 3,04% dari PDRB ADHB,

b. Rasio kewirausahaan sebesar 51,38, menunjukkan potensi namun belum tergarap maksimal untuk membentuk basis ekonomi mandiri.

Tingkat produktivitas tenaga kerja tercatat sebesar Rp121,42 juta per tenaga kerja, yang meski tinggi secara angka, belum cukup kompetitif dibandingkan kota-kota besar lain di kawasan Jabodetabek. Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) hanya mencapai 60,50%, menunjukkan bahwa hampir 40% penduduk usia kerja belum berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi.

Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB sebesar 43,34% dan total investasi (PMA dan PMDN) mencapai Rp 8,47 triliun, menandakan potensi yang besar namun belum sejalan dengan peningkatan signifikan pada sektor-sektor produktif, terutama industri kreatif, manufaktur ringan, dan teknologi berbasis ekspor.

3. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing global

   Kota Tangerang Selatan menunjukkan capaian pembangunan manusia yang relatif tinggi, tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,16, yang menempatkannya dalam kategori "sangat tinggi". Namun demikian, jika ditelaah lebih dalam terhadap komponen penyusun IPM dan indikator pendukung lainnya, masih terdapat sejumlah tantangan yang menunjukkan bahwa kualitas SDM belum sepenuhnya unggul dan berdaya saing secara global.

   Beberapa indikator yang mencerminkan kualitas pendidikan dan literasi menunjukkan capaian yang masih perlu ditingkatkan:

   a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) baru mencapai 11,86 tahun, masih di bawah batas ideal 12 tahun untuk jenjang pendidikan menengah.
   b. Kemampuan Literasi SD berada di skor 67,17, sedangkan kemampuan numerasinya lebih rendah lagi di skor 57,3. Ini menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman dasar pada jenjang pendidikan dasar.
   c. Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP masing-masing sebesar 81,28 dan 69,61, menunjukkan sedikit perbaikan namun belum ideal dalam membangun kompetensi kognitif yang kuat.
   d. Indeks Pembangunan Pemuda hanya mencapai 55,86 (kategori utama), mencerminkan belum optimalnya pengembangan kapasitas, partisipasi, dan integrasi pemuda dalam pembangunan daerah.

   Selain itu, Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kota Tangerang Selatan sebesar 49,82 mengindikasikan kesiapan digital masyarakat masih pada tingkat sedang, yang menjadi hambatan dalam menghadapi transformasi digital dan revolusi industri 4.0.

4. Belum optimalnya reformasi birokrasi dan transformasi tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah

   Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menunjukkan beberapa capaian positif dalam transformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Hal ini terlihat dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 85,61, yang termasuk kategori sangat baik, serta Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas pengelolaan keuangan daerah yang berhasil dipertahankan. Namun demikian, sejumlah indikator strategis

menunjukkan bahwa transformasi birokrasi secara menyeluruh masih menghadapi berbagai tantangan.

Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,48 masih menunjukkan ruang besar untuk peningkatan integrasi digital antarlayanan. Demikian pula, nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sebesar 69,06, masih berada pada level "B", yang menunjukkan bahwa praktik pengelolaan kinerja belum sepenuhnya berbasis hasil dan berorientasi outcome.

Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,25 (dari skala 5) menandakan bahwa pelayanan kepada masyarakat sudah tergolong baik, tetapi masih terdapat gap dalam kualitas pelayanan antar sektor dan kelurahan. Di sisi lain, meskipun nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan angka cukup tinggi (76,25), praktik integritas birokrasi belum sepenuhnya merata dan konsisten di seluruh tingkatan pemerintahan.

Indikator lain yang menunjukkan kelemahan transformasi birokrasi adalah Indeks Inovasi Daerah yang masih rendah (50,45) dan Indeks Kapabilitas Inovasi sebesar 3,27, menandakan bahwa tata kelola berbasis inovasi belum menjadi budaya kerja yang melekat di seluruh OPD

2.7.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

A. Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Urusan Pendidikan

a. Belum optimalnya sistem pendidikan di Kota Tangerang Selatan dalam menyerap partisipasi penduduk dan memperluas akses penduduk dapat bersekolah sesuai dengan usianya, baik pada jenjang pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan.
b. Belum idealnya kompetensi guru.
c. Kualitas pendidikan yang dapat bersaing secara nasional belum merata.

2. Kesehatan

a. Belum optimalnya integrasi antar komponen penyelenggara upaya kesehatan untuk mendukung sistem kedaruratan yang responsif.
b. Belum optimalnya upaya pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai standar.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas jalan dan simpang karena sulitnya pembebasan lahan.
b. Belum optimalnya upaya pengendalian banjir.
c. Belum optimalnya penyediaan akses jaringan perpipaan SPAM
d. Belum optimalnya akses sanitasi aman.

e. Belum optimalnya penyediaan RTH publik sesuai standar.
f. Belum optimalnya pengendalian laik fungsi bangunan untuk keselamatan.
g. Belum diterapkannya skema insentif dan disinsentif sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Permukiman

a. Belum optimalnya penyediaan PSU kawasan perumahan dan permukiman sesuai standar.
b. Masih terdapat kawasan kumuh perkotaan dan Rumah Tidak Layak Huni.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Masih rendahnya kesiapsiagaan masyarakat.
b. Belum optimalnya sistem penanggulangan bencana terutama terkait pengembangan sistem informasi yang responsif, penyelenggaraan diklat SDM kebencanaan, penyediaan logistik yang tepat sasaran, penanganan tematik kawasan bencana dan pengembangan sistem pemulihan bencana.
c. Belum optimalnya penegakan Perda/Perwal dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
d. Belum optimalnya cakupan penanganan bencana kebakaran karena belum semua wilayah di Kota Tangerang Selatan terlayani oleh Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
e. Belum idealnya jumlah SDM Satpol PP, Satlinmas dan PPNS yang bersertifikasi.

6. Sosial

a. Belum optimalnya pelayanan dan pemberdayaan Pemerlu Program Kesejahteraan Sosial (PPKS).
b. Pemanfaatan Satu Data Regsosek belum optimal.
c. Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

B. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Masih rendahnya penyerapan dan produktivitas tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri).
b. Belum optimalnya hubungan industrial yang dapat mendorong iklim kemajuan usaha untuk peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Belum optimalnya upaya pemberdayaan kemandirian ekonomi perempuan terutama pada kelompok rentan.
b. Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi perempuan sebagai tenaga profesional.
c. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran Responsif Gender.
d. Belum optimalnya perlindungan anak dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga.

3. Pangan

a. Belum optimalnya upaya peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan pangan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta berorientasi pada peningkatan pendapatan rumah tangga terutama bagi masyarakat miskin dan MBR.

4. Lingkungan Hidup

a. Belum optimalnya upaya pengurangan produksi sampah melalui proses daur ulang (3R).
b. Belum optimalnya pengelolaan timbulan sampah yang ramah lingkungan.
c. Belum optimalnya perbaikan kualitas lingkungan hidup terutama pada kualitas lahan, air dan udara.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Belum optimalnya cakupan kepemilikan adminduk.
b. Belum optimalnya kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan.

6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Masih terbatasnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi yang dapat menurunkan angka fertilitas atau kesuburan dan meningkatkan AKI.

7. Perhubungan

a. Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi.
b. Belum optimalnya upaya pengurangan titik kemacetan.
c. Belum optimalnya aksi keselamatan lalu lintas.

8. Komunikasi dan Informatika

a. Belum optimalnya penerapan SPBE.
b. Belum optimalnya implementasi *Smart City*
c. Belum optimalnya pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai potensi untuk meningkatkan cakupan Keterbukaan Informasi Publik.

9. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Masih rendahnya rasio kewirausahaan.
b. Masih rendahnya dukungan fasilitasi pembiayaan, pemasaran, pendampingan kelembagaan dan usaha serta fasilitasi kemitraan bagi UMKM.
c. Masih rendahnya peran koperasi sebagai agregator/konsolidator UMKM.

10. Penanaman Modal

a. Belum optimalnya upaya ekstentifikasi potensi-potensi investasi yang bernilai tambah tinggi dan dapat menyerap tenaga kerja.

11. Kepemudaan dan Olahraga

a. Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
b. Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
c. Prasarana olahraga belum memenuhi standar kompetisi
d. Belum optimalnya jaminan kesejahteraan bagi atlit dan pelatih.
e. Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi di Kota Tangerang Selatan sebagai tuan rumah.

12. Statistik

a. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral daerah yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan.
b. Belum terwujudnya satu data daerah yang terintegrasi dan termutakhirkan.

13. Persandian

a. Belum optimalnya tingkat keamanan informasi pemerintah daerah.

14. Kebudayaan

a. Belum optimalnya pembinaan komunitas seni dan budaya lokal.

15. Perpustakaan

a. Masih rendahnya literasi masyarakat.
b. Masih rendahnya pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat.

16. Kearsipan

a. Masih rendahnya kesesuaian pemusnahan arsip dengan NSPK
b. Masih rendahnya persentase kesesuaian autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media sesuai NSPK.

C. Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

a. Belum optimalnya peningkatan perikanan budidaya dalam menunjang ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
b. Masih diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan terutama masyarakat miskin/MBR.

2. Pariwisata

a. Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
b. Masih kurangnya pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan kebutuhan DUDI.
c. Masih rendahnya tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi.

3. Pertanian

a. Masih rendahnya persentase penerapan budidaya pertanian holtikultura yang baik, terutama untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.

4. Perdagangan

a. Belum optimalnya upaya pengendalian harga bahan pokok dan bahan penting lainnya;
b. Masih rendahnya pertumbuhan perdagangan berorientasi ekspor.
c. Belum optimalnya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

5. Perindustrian

a. Masih rendahnya dukungan fasilitasi pembiayaan, pemasaran, pendampingan kelembagaan dan usaha serta fasilitasi kemitraan bagi IKM.
b. Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan izin usaha industri IKM

D. Penunjang Urusan

1. Perencanaan

a. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
b. Belum optimalnya sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.

2. Keuangan

a. Belum optimalnya ekstensifikasi potensi pajak daerah.
b. Belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak;
c. Belum optimalnya manajemen aset daerah dan pemanfaatan aset daerah terhadap peningkatan PAD.
d. Belum optimalnya penatausahaan keuangan pada perangkat daerah.

3. Kepegawaian

a. Masih rendahnya profesionalisme ASN.
b. Belum optimalnya implementasi manajemen ASN berbasis kinerja.

4. Pendidikan dan Pelatihan

a. Belum optimalnya pemenuhan pendidikan dan pelatihan kompetensi ASN sesuai standar.

5. Penelitian dan Pengembangan

a. Belum optimalnya kapasitas riset dan inovasi dalam pembangunan daerah.

6. Kesatuan Bangsa Dan Politik

a. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan lembaga organisasi kemasyarakatan.

7. Kecamatan

a. Belum optimalnya pelayanan publik.
b. Masih rendahnya akuntabilitas data kewilayahan untuk perencanaan pembangunan kewilayahan.

E. Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

a. Masih rendahnya kualitas kebijakan publik.
b. Belum optimalnya upaya perwujudan reformasi birokrasi pada perangkat daerah.
c. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah.

2. Sekretariat DPRD

a. Belum optimalnya pelayanan kinerja sekretariat DPRD

F. Unsur Pengawasan

1. Inspektorat.

a. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah.

2.7.3. Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian

tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis ini disimpulkan dari permasalahan daerah, isu strategis sesuai lingkungan dinamis dan potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

2.7.2.1. Potensi Daerah dan Modalitas Daerah

1. Posisi strategis Tangerang Selatan dalam konstelasi regional dan Kawasan aglomerasi Jabodetabek

Kebijakan pengembangan wilayah dalam perspektif kota adalah strategi dan rencana yang dibuat oleh pemerintah kota untuk mengatur pertumbuhan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya di wilayah Kota Tangerang Selatan. Tujuan utama dari kebijakan pengembangan wilayah ini adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup penduduk, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang di seluruh wilayah. Namun demikian, pengembangan Kota Tangerang Selatan harus sejalan dengan pengembangan daerah sekitar. Semakin eratnya hubungan daerah Jabodetabekpunjur mengarah pada perencanaan membentuk wilayah megalopolitan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta membentuk kawasan aglomerasi. Adapun tujuan dari pengembangan kawasan aglomerasi yaitu untuk menyinkronkan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan daerah sekitar (Pasal 51 ayat 1). Kawasan Aglomerasi di sekitar Daerah Khusus Jakarta minimal melingkupi Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Dengan pengembangan kawasan aglomerasi tersebut, maka perlu untuk dilakukan sinkronisasi dokumen rencana Tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan Kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota Yang termasuk dalam cakupan Kawasan Aglomerasi. Selanjutnya, sinkronisasi dilakukan melalui penyusunan dokumen rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang mencakup seluruh atau sebagian wilayah kawasan aglomerasi. Dokumen rencana tata ruang tersebut memuat fungsi dan struktur ruang yang dapat menjamin keselarasan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pada kawasan aglomerasi.

Dalam konstelasi Kawasan aglomerasi Jabodetabek, Kota Tangerang Selatan akan mengambil perannya sebagai supporting system bagi Kawasan Aglomerasi Jabodetabek. Kota Tangerang Selatan menjadi tempat yang menarik untuk dikembangkan menjadi kawasan permukiman kelas menengah atas dibandingkan dengan kota-kota satelit yang lainnya. Hal ini karena kedekatannya dengan Jakarta sebagai tempat aktivitas bekerja dan berusaha, ditambah dengan konektivitas antar moda sehingga penghuni kawasan-kawasan permukiman di Kota Tangerang Selatan dapat dengan mudah melaju dari rumah ke kantor.

Dari satu sisi, maraknya pembangunan kawasan hunian akan mendorong perekonomian Kota Tangerang Selatan melalui pertumbuhan konsumsi. Banyak pekerja di Jakarta yang akan membelanjakan pendapatannya di Kota Tangerang Selatan sebagai tempat tinggalnya. Kondisi ini akan mendorong tumbuhnya aktivitas-aktivitas ekonomi yang

terkait dengan pelayanan dan jasa seperti sekolah, rumah sakit, pertokoan, hiburan, pasar, mall, kuliner, dan sebagainya. Keunggulan ini tentunya harus dioptimalkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan.

Peran Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dalam kawasan aglomerasi Jabodetabek menjadi semakin penting. Penataan ruang permukiman menjadi kunci untuk menghadapi peningkatan kepadatan penduduk yang semakin tinggi dan urbanisasi Jabodetabek yang tidak terkendali. Studi terkait daya dukung dan daya tampung perlu dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan keberlanjutan Kota Tangerang Selatan sebagai kota hunian. Selain itu pemanfaatan teknologi dan pengembangan inovasi juga menjadi penting untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan. Integrasi infrastruktur abu-abu (grey infrastructure) dan infrastruktur hijau (green infrastructure) dapat menjadi terobosan untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan menjadi kota hunian yang modern dengan tetap mengusung prinsip berkelanjutan.

2. Potensi Ekonomi Daerah dalam kategori Cepat Maju dan Tumbuh Pesat

Kota Tangerang Selatan memiliki utilitas permukiman yang relatif lengkap. Kota Tangerang Selatan memiliki kelengkapan dari sisi sarana dan prasarana perbelanjaan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan perkantoran. Berdasarkan tinjauan terhadap PDRB per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi, perekonomian Kota Tangerang Selatan termasuk dalam kategori Cepat Maju dan Tumbuh Pesat, dengan sektor ekonomi penggerak terdapat pada sektor tersier perdagangan dan jasa. Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dalam kawasan aglomerasi Jabodetabek dapat dioptimalkan perannya dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

3. Pembangunan SDM di Kota Tangerang Selatan Berkategori Sangat Tinggi

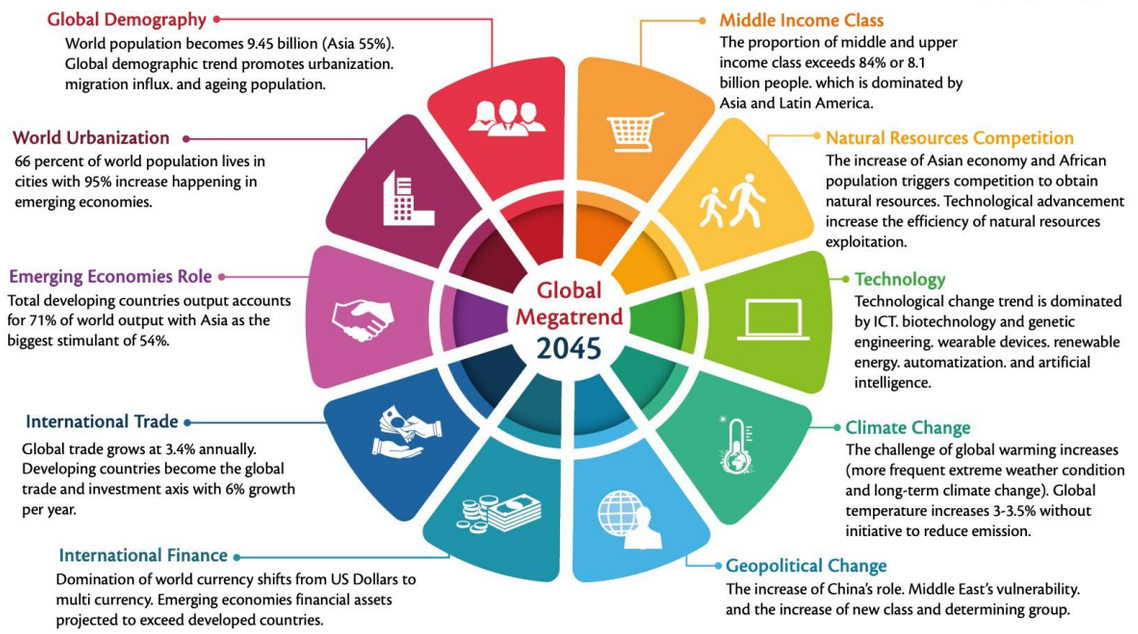
Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam pembangunan berkelanjutan yakni sebagai modalitas utama pembangunan daerah. Kota Tangerang Selatan telah mendapatkan bonus demografi dimana penduduk Kota Tangerang Selatan didominasi oleh usia produktif yang merupakan Generasi X dan Generasi Milenial. Rata-rata penduduk Kota Tangerang Selatan menamatkan pendidikan menengah dengan harapan melanjutkan pendidikan hingga jenjang Diploma. Penduduk Kota Tangerang Selatan juga memiliki tingkat kesehatan yang tinggi, dimana usia harapan hidup penduduknya paling tinggi di Provinsi Banten.

Pembangunan manusia dan pembangunan gender di Kota Tangerang Selatan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi (IPM > 80 dan IPG > 90) serta pemberdayaan gender dalam kategori tinggi (IDG > 70). Tingkat kemiskinan di Kota Tangerang Selatan juga tercatat sangat rendah secara nasional, yaitu di bawah 5 persen. Rata-rata penduduk Kota Tangerang Selatan melek teknologi informasi dimana sebagian penduduknya mengakses internet.

2.7.2.2. Isu Global

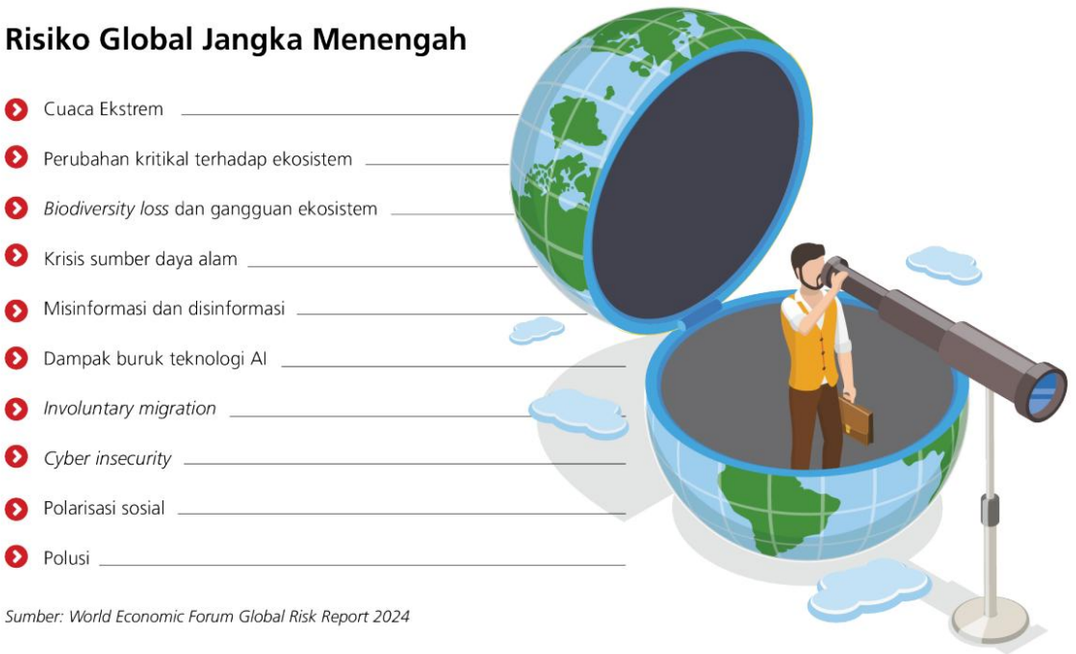
Upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah akan menghadapi isu dan tantangan yang dinamis. Tantangan global cukup relevan sebagai salah satu pertimbangan dalam merumuskan isu strategis RPJMD Kota Tangerang Selatan sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan di masa mendatang. Isu dan tantangan pembangunan perlu dimitigasi dan dioptimalisasi menjadi peluang untuk mencapai sasaran jangka menengah serta trajektori pembangunan jangka panjang.

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence). Megatren global yang dapat mempengaruhi perkembangan Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Gambar 2.45.



Gambar 2.45. Isu Megatrend Global

World Economic Forum Global Risk Report tahun 2024 mengemukakan sejumlah risiko global yang perlu diantisipasi dalam kerangka pembangunan jangka menengah. Diantara risiko tersebut adalah cuaca ekstrem, perubahan kritikal ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan gangguan ekosistem, krisis SDA, misinformasi dan disinformasi, dampak buruk AI, involuntary migrasi, keamanan cyber, polarisasi sosial dan polusi sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.46.



Gambar 2.46. Risiko Global Jangka Menengah

2.7.2.3. Isu Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Pembangunan jangka menengah dalam RPJMD 2025-2029 berperan penting sebagai fondasi awal untuk mencapai visi jangka panjang Kota Tangerang Selatan. Upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah akan menghadapi isu dan tantangan yang dinamis tidak hanya pada konstelasi regional, melainkan juga nasional. Berikut ini merupakan sejumlah tantangan dalam pembangunan jangka menengah nasional yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2025-2029:

1) Rendahnya Produktivitas
2) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
3) Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat
4) Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif
5) Krisis Lingkungan
6) Geopotitik dan Geoekonomi
7) Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Terdapat isu pada RPJMN 2025-2029 dalam sasaran Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang tertuang pada Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Berikut ini merupakan sejumlah isu perkotaan dalam pembangunan jangka menengah nasional yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2025-2029:

1) Setiap 1 persen pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia hanya meningkatkan 1,4 persen PDB perkapita, kontribusi ekonomi yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan Cina dan rata-rata negara Asia Timur dan Pasifik (Bank Dunia, 2019).
2) Pemanfaatan lahan perkotaan yang belum efisien dan pengendalian ruang yang kurang efektif telah mendorong laju urbanisasi lebih tinggi di pinggiran kota yang menyebabkan permukiman tumbuh menyerak dan keluar dari control.
3) Ketersediaan dan akses layanan perkotaan berupa rumah layak huni, layanan air minum, sanitasi, dan infrastruktur perkotaan masih terbatas, sementara

pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, serta sarana pendidikan dan kesehatan belum inklusif dan memadai.

4) Pembangunan dan penyediaan infrastruktur khusus di wilayah metropolitan belum merata, memiliki kualitas yang terbatas, serta tidak terintegrasi secara kewilayahan.

5) Rendahnya kesempatan kerja, penanganan sektor ekonomi informal yang belum optimal, serta tingginya kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kriminalitas masih menjadi tantangan utama perkotaan pada bidang sosial-ekonomi.

6) Tingkat pencemaran dan degradasi lingkungan yang semakin tinggi di perkotaan, ditambah dengan rendahnya ketangguhan perkotaan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, menciptakan tantangan besar bagi keberlanjutan hidup di perkotaan.

7) Belum ada regulasi yang mengatur perkotaan secara terpadu, kurang dinamisnya kelembagaan, serta belum inovatifnya pembiayaan pengelolaan perkotaan untuk mengatasi kompleksitas perkotaan di 2045.

8) Tingginya konsentrasi penduduk Indonesia di Pulau Jawa (sebesar 56,10 persen) utamanya di Wilayah Metropolitan Jakarta menyebabkan beban Jakarta dan daerah sekitarnya meningkat, sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan peningkatan dampak kerugian ekonomi.

Terdapat isu pada RPJMN 2025-2029 dalam Arah Pembangunan Wilayah Jawa. Berikut ini merupakan sejumlah isu Wilayah Jawa dalam pembangunan jangka menengah nasional yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2025-2029:

1) Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitarnya, dibuktikan dengan rata-rata nilai Metropolitan Performance Index di Pulau Jawa masih berada di bawah 50 persen.

2) Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah (industri di Jawa masih memiliki rasio robot density 5:10.000, bandingkan dengan Malaysia 55:10.000 dan Korea Selatan 1.000:10.000).

3) Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di Jawa bagian selatan.

4) Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa.

5) Kesenjangan keterampilan dan mismatch pendidikan-industri terlihat dari perbedaan antara keterampilan yang diajarkan di pendidikan dan kebutuhan industri, dengan tingkat pengangguran lulusan SMK dan SMA pada 2023 masing-masing sebesar 9,31 persen dan 8,15 persen.

6) Prevalensi stunting, wasting, dan underweight masih relatif tinggi, rata-rata untuk Wilayah Jawa mencapai 20 persen (2023).

7) Beban kasus TBC tertinggi ada pada wilayah padat penduduk.

8) Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa sebesar 8,11 persen (2023). Program pengurangan kemiskinan belum terpadu dengan potensi sektor ekonomi unggul dan inovasi pemberdayaan ekonomi pada daerah kantong-kantong kemiskinan tinggi.

2.7.2.4. Isu Regional Provinsi Banten

Isu dalam konstelasi regional yang akan mempengaruhi arah pembangunan jangka menengah Kota Tangerang Selatan adalah isu pembangunan Provinsi Banten, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang Belum Berkualitas

Kualitas sumber daya manusia dibentuk dari berbagai aspek, beberapa diantaranya adalah aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek perlindungan sosial. Momentum bonus demografi Provinsi Banten menjadi titik penting dalam mengakselerasi pembangunan. Maka dari itu diperlukan strategi khusus untuk memanfaatkan momentum ini secara optimal hingga akhirnya berdampak sebesar-besarnya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

2. Pembangunan Ekonomi yang Belum Optimal

Perekonomian yang baik dapat dilihat dari meratanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang merata terbentuk dari optimalnya pengelolaan sektor-sektor unggulan serta inovasi dan investasi yang kuat. Di Provinsi Banten, hal-hal tersebut dinilai belum optimal karena pertumbuhan ekonomi daerah utara dan selatan masih belum sama, sektor-sektor unggulan belum dikelola secara maksimal, dan inovasi yang mendorong investasi masih perlu ditingkatkan.

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

Tata kelola pemerintah merupakan isu yang penting dalam harmonisasi hubungan antar pemerintah dan kelembagaan. Tata kelola pemerintah yang belum optimal dapat menjadi kendala utama dalam penyediaan layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan tata kelola pemerintah Banten antara lain indeks persepsi anti korupsi yang rendah yang menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik. Selain itu, tantangan tata kelola pemerintah Banten adalah pengelolaan keuangan daerah dan kapasitas fiskal daerah yang masih perlu perbaikan. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) merupakan ukuran kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah yang dihitung dengan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. DDF Provinsi Banten berada dalam kategori “baik”, tetapi dalam 10 tahun terakhir DDF Banten fluktuatif dan cenderung menurun.

4. Manajemen Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Belum Optimal

Kondisi Lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa aspek, beberapa diantaranya adalah aspek daya dukung, kualitas, dan ancaman bencana. Kondisi lingkungan hidup di Provinsi Banten dilihat dari aspek daya dukungnya dinilai belum dikelola dengan optimal, dari aspek kualitasnya juga dinilai belum optimal, dan dari aspek kebencanaannya memiliki risiko bencana yang masih tinggi.

2.7.2.5. Isu Strategis dalam RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Isu dalam konstelasi regional berikutnya yang juga akan mempengaruhi arah pembangunan jangka menengah Kota Tangerang Selatan adalah isu pembangunan jangka panjang di Kota Tangerang Selatan

2025-2045. Isu strategis RPJPD Kota Tangerang Selatan 2025-2045 yang perlu disintesis dan diintegrasikan ke dalam isu strategis jangka menengah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. **Kualitas SDM yang sehat, cerdas, adaptif teknologi dan berdaya saing global**

   Di era globalisasi dan pesatnya perkembangan zaman yang semakin modern saat ini, menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM sesuai tuntutan zaman akan mendorong keberhasilan dalam berbagai aspek pembangunan. Di masa depan, dunia akan menghadapi perubahan yang jauh lebih cepat daripada yang pernah dialami sebelumnya, terutama dipicu oleh megatren global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi. Perubahan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan budaya, ekonomi, serta menuntut adaptasi dan inovasi yang cepat dari individu, masyarakat, dan daerah untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul. Situasi ini akan dapat jauh lebih menantang dengan semakin berkembangnya teknologi yang dalam beberapa hal, dapat menggantikan peran manusia. Oleh karena itu, peningkatan daya saing menjadi keniscayaan bagi Kota Tangerang Selatan. Hanya melalui tenaga kerja yang berdaya saing maka bonus demografi dapat benar-benar menjadi bonus.

2. **Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis riset yang maju, tangguh dan berkeadilan**

   Pada tahun 2045, Indonesia menargetkan posisinya sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Profil Indonesia 2045 menjadi peta jalan (roadmap) yang harus diejawantahkan oleh seluruh daerah termasuk Kota Tangerang Selatan. Pemerintah daerah secara konsisten mendayagunakan seluruh sumberdayanya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Transformasi ekonomi dapat diwujudkan dengan sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Kota Tangerang Selatan bersama Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

3. **Tata kelola yang profesional, inovatif dan kolaboratif**

   Tata kelola diperlukan dalam rangka agar Pemerintah Daerah bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola yang efektif, kebijakan yang transparan, dan administrasi publik yang responsif memainkan peran penting dalam mendukung kemajuan daerah. Belum optimalnya implementasi manajemen aparatur sipil negara, reformasi akuntabilitas kinerja dan belum optimalnya penataan kelembagaan serta proses bisnis untuk transformasi pelayanan publik merupakan kondisi atau hal yang ke depannya menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pada

akhirnya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, profesional, transparan, dan bertanggungjawab adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun akuntabilitas pemerintahan daerah yang bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antar legislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.

4. Penyediaan infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang mendukung kenyamanan dan produktivitas

Optimalisasi penataan ruang dan sistem permukiman yang berkeadilan dan berkelanjutan menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Dalam hal ini terjadinya gated community harus mulai diantisipasi agar tidak terus meningkat ke depannya. Sistem permukiman yang berkeadilan dan berkelanjutan harus diwujudkan terutama melalui integrasi kawasan-kawasan permukiman di mana fasilitas dan infrastruktur yang saat ini hanya bisa diakses dan dimanfaatkan oleh penghuni perumahan harus mulai diserahkan pengelolaannya ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan sehingga fasilitas dan infrastruktur tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Selain pemerataan standarisasi dan integrasi infrastruktur, hal lain yang perlu diperhatikan adalah belum optimalnya kinerja smart city terutama dalam memantau kebutuhan infrastruktur berdasarkan pola mobilitas penduduk. Ke depan pemanfaatan teknologi digital ini akan sangat penting. Bahkan juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan kota. Teknologi digital akan mempermudah, mempercepat, dan meringankan kinerja pelayanan serta akan meningkatkan kapasitas infrastruktur baik itu infrastruktur dasar maupun infrastruktur ekonomi. Smart city juga diharapkan mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan perkotaan.

5. Peningkatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi

Wilayah perkotaan ke depan dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah. Isu lingkungan hidup dan perubahan iklim merupakan bagian penting yang perlu diantisipasi. Laju pembangunan kota terus didorong guna mencapai target pertumbuhan, menjadikan wilayah Kota Tangerang Selatan memiliki posisi strategis terhadap wilayah di sekitarnya, khususnya hub ekonomi bagi Jakarta. Dalam perkembangan skala kawasan, kawasan megaurban Jakarta-Bandung diprediksi akan berkembang pesat di masa mendatang. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi tersebut, maka perkembangan kota ke depan akan semakin beragam dan berkembang pesat. Hal ini tentu perlu diantisipasi dengan terus mendorong penataan lingkungan wilayah perkotaan yang selaras dengan menghadirkan karakter lingkungan perkotaan yang sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pelaksanaan setiap program pembangunan yang dilakukan di daerah perlu dengan cermat memperhitungkan perkiraan dampak serta risiko lingkungan

6. Hunian modern dan nyaman bagi kawasan Megapolitan Jabodetabek

Dalam konstelasi ruang megapolitan Jabodetabek, Kota Tangerang Selatan menjadi tempat yang menarik menjadi kawasan permukiman

kelas menengah atas dibandingkan dengan kota-kota satelit yang lainnya. Hal ini karena kedekatannya dengan Jakarta sebagai tempat aktivitas bekerja dan berusaha, sehingga penghuni kawasan-kawasan permukiman di Kota Tangerang Selatan dapat dengan mudah melaju dari rumah ke kantor. Ke depan segregasi sosial ini perlu diatasi agar Kota Tangerang Selatan dapat bertransformasi menjadi kota hunian yang nyaman dan berkelanjutan. Peran Kota Tangerang Selatan sebagai penyangga Jakarta dalam konteks hunian akan menjadi semakin penting. Penataan ruang permukiman menjadi kunci untuk menghadapi peningkatan kepadatan penduduk yang semakin tinggi. Studi terkait daya dukung dan daya tampung perlu dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan keberlanjutan Kota Tangerang Selatan sebagai kota hunian. Selain itu pemanfaatan teknologi dan pengembangan inovasi juga menjadi penting untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan. Integrasi infrastruktur abu-abu (grey infrastructure) dan infrastruktur hijau (green infrastructure) dapat menjadi terobosan untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan menjadi kota hunian yang modern dan berkelanjutan. Di kota-kota pada negara maju, hal ini sudah banyak dilakukan dengan pendekatan yang dinamakan dengan NBS (Nature Based Solutions).

2.7.2.6. Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Negara-negara di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah berkomitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai 8 Millenium Development Goals (hingga tahun 2015) dan dilanjutkan 17 Sustainable Development Goals (SDGs) di tahun 2030. Seluruh komponen negara, tidak terkecuali seluruh pemerintah daerah di Indonesia harus berkontribusi dalam pencapaian SDGs di daerahnya masing-masing. KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan menganalisis pencapaian indikator TPB hingga tahun 2023. Hasil kajian tersebut menghasilkan tiga isu Pembangunan Berkelanjutan paling prioritas yang perlu diakomodir dalam dokumen RPJMD sebagaimana sebagai berikut.

Tabel 2.163. Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Prioritas dan Justifikasi Pendukungnya pada KLHS RPJMD 2025-2029

No	Isu PB Paling Strategis	Justifikasi Pendukung terhadap Isu Paling Strategis
1	Pemenuhan Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman yang Sesuai Standar Belum Optimal	Permasalahan yang dihadapi terkait Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman adalah seluruh Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman belum terintegrasi sesuai kebutuhan masyarakat, antara lain belum terintegrasinya antara jaringan jalan, fasilitas perparkiran dengan sistem transportasi menyebabkan terjadinya kemacetan. Sistem drainase yang belum terintegrasi dengan sistem jaringan SDA menyebabkan Kota Tangerang Selatan mengalami genangan bahkan banjir. Terkait dengan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah yaitu masih adanya rumah tangga yang belum terlayani SPALD dan SPAM jaringan perpipaan menggambarkan bahwa belum semua rumah tangga di Kota Tangerang Selatan mengakses sanitasi dan air minum yang aman. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian karena pelayanan air limbah dan air minum

No	Isu PB Paling Strategis	Justifikasi Pendukung terhadap Isu Paling Strategis
		perpipaan merupakan pelayanan dasar yang harus dipenuhi. Dalam rangka menjaga konservasi air tanah. Ditinjau dari standar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan sehat, masih adanya Rumah Umum Tidak Layak Huni menggambarkan bahwa masih adanya perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kota Tangerang Selatan yang perlu diintervensi. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian PSU perumahan dan kawasan permukiman yang harus disediakan sesuai standar. Keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan menjadi RTH publik dan tingginya harga lahan merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam penyediaan RTH publik sesuai standar di Kota Tangerang Selatan.
2	Penanganan kualitas lingkungan hidup belum optimal	Belum optimalnya pengurangan sampah dan daur ulang sampah, serta besarnya timbulan sampah yang dibuang ke TPA Cipeucang menjadikan TPA Cipeucang yang lahannya terbatas menjadi penuh, sehingga kinerja pengolahan sampah terkendala. Dalam analisis D3TLH disampaikan kecenderungan ketersediaan air di Kota Tangerang Selatan semakin hari semakin menurun, Untuk daya dukung pangan, jika mengacu pada selisih ketersediaan dan kebutuhan menunjukkan defisit pangan. Dengan demikian, perlunya memaksimalkan ketersediaan logistik pangan dari daerah lain untuk memastikan kecukupan pangan di Kota Tangerang Selatan, mengingat Kota Tangerang Selatan bukan daerah penghasil komoditi pangan. Dalam Laporan Kualitas Udara Dunia Tahunan ke-6 yang dirilis oleh perusahaan teknologi kualitas udara asal Swiss, IQAir. Tangerang Selatan menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia sepanjang 2023, lebih buruk dari Jakarta hingga Palembang. Adapun hasil analisis AQMS dan Data Satelit, Konsentrasi NO2 yang lebih tinggi terlihat di wilayah-wilayah dengan lalu lintas kendaraan yang tinggi dan aktivitas perkotaan yang padat. Ditinjau dari kinerja jasa lingkungan di Kota Tangerang Selatan yang dianalisis berdasarkan basis data tahun 2018, menunjukkan bahwa kondisi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air, kondisi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia pangan, kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air, kinerja jasa lingkungan pengaturan kualitas udara, kinerja jasa lingkungan pengaturan perlindungan banjir, dan kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan iklim berkategori rendah.
3	Ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim belum optimal	Ketahanan daerah Kota Tangerang Selatan dalam menghadapi potensi bencana, berada pada kategori sedang. Ditinjau dari aspek kerentanan, Kota Tangerang Selatan sangat rentan terhadap bencana gempa bumi, banjir, kekeringan, kebakaran gedung dan permukiman, epidemi dan wabah penyakit, kegagalan teknologi, konflik sosial, dan pandemi covid-19, dimana potensi penduduk yang akan terpapar dalam kategori tinggi. Pengembangan

No	Isu PB Paling Strategis	Justifikasi Pendukung terhadap Isu Paling Strategis
		sistem pemulihan bencana dan secara keseluruhan wilayah Kota Tangerang Selatan dalam kategori rendah. Selama periode 2005-2018 telah terjadi kenaikan suhu permukaan lahan sebagai akibat dari perubahan tutupan vegetasi, dengan peningkatan rata-rata suhu permukaan sekitar 0,4 - 0,70°C setiap tahunnya.

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2025

2.7.2.7. Isu Strategis Daerah Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan identifikasi isu-isu global, nasional, regional, RPJMD Kota Tangerang Selatan dan isu berdasarkan KLHS serta potensi/modalitas yang dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan, maka dirumuskan isu strategis daerah yang disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.164. Perumusan Isu Strategis Daerah RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Modalitas	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Provinsi Banten Tahun 2025-2045	Isu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045	KLHS RPJMD 2025-2029	Isu RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
Pembangunan SDM di Kota Tangerang Selatan Berkategori Sangat Tinggi	Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera	1. Polarisasi sosial 2. Dampak Buruk AI	1. Masalah Sosial-Ekonomi di Masyarakat Perkotaan 2. *Aging Population* Negara Maju	1. Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Penanggulangan kemiskinan 3. Penanggulangan pengangguran terintegrasi	Kualitas SDM yang sehat, cerdas, adaptif teknologi dan berdaya saing global		1. Peningkatan kualitas SDM yang unggul, produktif dan berdaya saing global 2. Pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan yang inklusif 3. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja
Posisi strategis Tangerang Selatan dalam konstelasi regional dan Kawasan aglomerasi Jabodetabek	Belum optimalnya pembangunan kewilayahan yang inklusif, terintegrasi, berketahanan sosial, budaya dan ekologi	*Involuntary* migrasi	Pemenuhan Layanan Perkotaan yang Belum Memadai dan Inklusif	Peningkatan pemerataan dan interkoneksi pembangunan	Penyediaan infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang mendukung kenyamanan dan produktivitas	Pemenuhan Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman yang Sesuai Standar Belum Optimal	Pengembangan transportasi publik dan pengelolaan sampah secara terpadu dalam konstelasi Kawasan Aglomerasi
			Pola Pembangunan Perkotaan yang Menyerak		Hunian modern bagi kawasan megapolitan Jabodetabek		Penyediaan prasarana, sarana dan layanan perkotaan yang berkualitas, terintegrasi dan inklusif
		1. Polusi 2. Cuaca Ekstrem 3. Perubahan kritikal ekosistem	1. Penerapan standar *Suistainability*	Penguatan kelestarian lingkungan dan	Peningkatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Penanganan kualitas lingkungan hidup belum optimal	Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berketahanan

Modalitas	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Provinsi Banten Tahun 2025-2045	Isu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045	KLHS RPJMD 2025-2029	Isu RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
		4. Hilangnya keanekaragaman hayati dan gangguan ekosistem 5. krisis SDA	yang tinggi di level global 2. Degradasi Lingkungan Perkotaan dan Rendahnya Ketangguhan Bencana	mitigasi potensi bencana		Ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim belum optimal	
	Belum optimalnya reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola yang profesional, inovatif, dan berintegritas	1. Keamanan *cyber* 2. Misinformasi dan disinformasi	1. Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral 2. Tata Kelola yang Belum Profesional, Inovatif, dan Kolaboratif	Pemantapan reformasi birokrasi yang bersih dan melayani	Tata kelola yang profesional, inovatif dan kolaboratif		Tata kelola yang profesional, inovatif dan kolaboratif disertai pengembangan *science/evidence-based policy*
Potensi Ekonomi Daerah dalam kategori Cepat Maju dan Tumbuh Pesat	Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi		1. Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian nasional 2. Transisi energi untuk pemerataan	Peningkatan produktivitas ekonomi wilayah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis riset yang maju, tangguh dan berkeadilan;		Penguatan daya saing pariwisata berbasis potensi kesehatan (*health tourism*), ritel, budaya, dan MICE Peningkatan produktivitas UMKM dan sektor ekonomi kreatif berbasis riset dan inovasi Penataan sektor ekonomi informal

Rumusan isu strategis daerah berdasarkan penapisan dalam Tabel 2.164 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM yang unggul, produktif dan berdaya saing global

Pesatnya perkembangan zaman yang semakin modern saat ini, menuntut sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM sesuai tuntutan zaman akan mendorong keberhasilan dalam berbagai aspek pembangunan. Di masa depan, dunia akan menghadapi perubahan yang jauh lebih cepat daripada yang pernah dialami sebelumnya, terutama dipicu oleh megatren global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi. Perubahan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan budaya, ekonomi, serta menuntut adaptasi dan inovasi yang cepat dari individu, masyarakat, dan daerah untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul.

Kota Tangerang Selatan masih mengalami bonus demografi hingga tahun 2045, yang dicirikan dengan nilai rasio ketergantungan (dependency ratio) di bawah 66. Bonus demografi memiliki periode waktu (window of opportunity) yang terbatas sehingga perlu manfaatkan secara optimal. Situasi bonus demografi dapat memberikan dampak yang positif khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Tetapi, bonus ini tidak serta merta langsung berwujud pada manfaat riil yang diterima melainkan membutuhkan upaya sehingga bonus ini dapat benar-benar berbuah positif seperti pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Bous demografi perlu dikapitalisasi untuk dapat meraih manfaat yang ditawarkannya (Chen et al. 2023).

Fase-fase dalam kerangka bonus demografi penting untuk diidentifikasi karena masing-masing fase membutuhkan kebijakan yang tepat guna dapat merealisasikan secara maksimal manfaat positif yang ditawarkan oleh bonus demografi. Seberapa jauh daerah dapat memanfaatkan bonus demografi akan sangat ditentukan oleh kebijakan yang diterapkan (Chen et al., 2023). Menggunakan kerangka kerja Demographic Dividend Framework yang disusun oleh Cardona et al. (2020), terdapat enam sektor yang perlu diintervensi untuk dapat mengkapitalisasi bonus demografi meliputi 1) tata kelola dan kelembagaan ekonomi, 2) keluarga berencana, 3) kesehatan ibu dan anak, 4) pendidikan, 5) pemberdayaan perempuan, dan 6) ketenagakerjaan. Intervensi yang dilakukan hanya pada salah satu atau beberapa dari keenam sektor tersebut adalah perlu namun tidak cukup (necessary but insufficient) untuk dapat memaksimalkan potensi bonus demografi, melainkan membutuhkan intervensi multisektoral (Cardona et al., 2020). Masing-masing sektor tersebut kemudian dilengkapi dengan program dan intervensi spesifik yang dibutuhkan sehingga Demographic Dividend Framework tersebut dapat memberikan panduan kebijakan hingga ke level yang detail.

Pada sektor pendidikan, Kota Tangerang Selatan telah menunjukkan kinerja yang cukup baik namun juga masih memiliki sejumlah tantangan. Kota Tangerang Selatan memiliki persoalan tingkat pendidikan penduduk usia produktif yang didominasi oleh penduduk berpendidikan menengah atas. Tingkat pendidikan SMA sederajat yang

ditamatkan pada berbagai generasi menunjukkan angka sebesar 54,32% pada generasi milenial, 40,56% pada Generasi X, dan 30,41% pada Baby Boomer (BPS,2020). Terdapat korelasi antara pendidikan dan daya saing tenaga kerja. Pencari kerja dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar tenaga kerja karena tingkat pendidikan yang lebih tinggi sering kali dikaitkan dengan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja. Pendidikan yang lebih tinggi juga dapat membuka peluang kerja yang lebih baik dan memberikan akses ke jaringan profesional yang lebih luas. Situasi ini terkait peningkatan kualitas SDM di Kota Tangerang Selatan akan dapat jauh lebih menantang dengan semakin berkembangnya teknologi yang dalam beberapa hal dapat menggantikan peran manusia.

Komposisi penduduk perempuan yang jumlahnya berimbang dengan penduduk laki-laki sementara kinerja pemberdayaan gender pada tahun 2024 mengalami penurunan mengamanatkan perlunya upaya yang lebih tepat sasaran dan komprehensif terutama dalam pelibatan perempuan dalam kepemimpinan dan sumber-sumber ekonomi strategis. sehingga kualitas SDM perempuan di Kota Tangerang Selatan juga dapat berdaya saing global seperti halnya laki-laki.

2. Pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan yang inklusif

Pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan di Kota Tangerang Selatan menghadapi tantangan berkaitan dengan struktur demografi selama kurun tahun 2025-2029, dimana pada kurun waktu tersebut, walaupun Kota Tangerang Selatan masih memiliki bonus demografi, namun juga terjadi peningkatan penduduk usia lanjut. Jika pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan tidak diupayakan secara inklusif maka dapat memperdalam jurang kemiskinan.

Dengan bonus demografi yang masih terjadi di Kota Tangerang Selatan, perluasan akses terhadap pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi, akses kesehatan dan akses terhadap lapangan kerja formal sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas SDM. Selain itu, program pemberdayaan berbasis keahlian digital dan kewirausahaan bagi generasi muda, juga diperlukan sehingga potensi bonus demografi dapat terkonversi menjadi pertumbuhan inklusif.

Peningkatan populasi lansia membutuhkan sistem jaminan kesehatan dan pensiun yang memadai, sehingga lansia tidak bergantung pada keluarga atau pekerjaan informal tanpa perlindungan sosial. Beban ganda muncul ketika generasi produktif harus menanggung kebutuhan lansia sekaligus anak-anak, memperparah kemiskinan antar-generasi.

3. Pengembangan transportasi publik dan pengelolaan sampah secara terpadu dalam konstelasi Kawasan Aglomerasi

Laju pembangunan kota terus didorong guna mencapai target pertumbuhan, menjadikan wilayah Kota Tangerang Selatan memiliki posisi strategis terhadap wilayah di sekitarnya, khususnya hub ekonomi bagi Jakarta. Dalam perkembangan skala Kawasan aglomerasi Jabodetabek akan semakin berkembang pesat di masa mendatang. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi tersebut, maka perkembangan kota ke depan akan semakin beragam dan berkembang pesat. Upaya-upaya untuk mendorong penyediaan infrastruktur yang dapat meningkatkan

aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi antar wilayah akan mendorong terus melesatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Penyediaan infrastruktur konektivitas yang paling strategis adalah penyediaan transportasi publik yang terintegrasi dan inklusif. Penyediaan transportasi publik yang terintegrasi dan inklusif membawa berbagai manfaat bagi masyarakat dan kota secara keseluruhan, yaitu:

a. Kemudahan Akses dan Mobilitas: Dengan transportasi publik yang terintegrasi, perjalanan menjadi lebih mudah dan efisien karena pengguna dapat berpindah dari satu moda transportasi ke moda lainnya dengan mudah, tanpa perlu berpindah kendaraan secara berulang-ulang. Ini juga mempermudah mobilitas bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau;
b. Pengurangan kemacetan lalu lintas: Sistem Transportasi yang baik dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan pada akhirnya mengurangi kemacetan lalu lintas. Hal ini berkontribusi pada perjalanan yang lebih cepat dan lebih nyaman bagi semua pengguna jalan;
c. Efisiensi biaya: Transportasi publik yang terintegrasi dan inklusif biasanya lebih ekonomis dibandingkan dengan memiliki dan mengoperasikan kendaraan pribadi. Ini menguntungkan terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang mungkin sulit untuk membeli dan memelihara kendaraan pribadi;
d. Lingkungan yang lebih bersih: Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Transportasi publik yang ramah lingkungan, seperti bus listrik atau kereta api yang menggunakan energi terbarukan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
e. Keadilan sosial: Sistem transportasi inklusif memastikan bahwa semua lapisan masyarkat termasuk penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya memiliki akses yang sama terhadap transportasi. Hal ini mendukung kesetaraan sosial dan memungkinkan semua orang untuk mengakses peluang pekerjaan, pendidikan dan layanan kesehatan;
f. Pengembangan ekonomi: Sistem transportasi yang baik medukung pengembangan ekonomi dengan meningkatkan akses ke pusat-pusat bisnis, pasar dan area komersil. Hal ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja;
g. Keamanan dan kenyamanan: Transportasi publik yang dirancang dengan baik biasanya lebih aman daripada perjalanan dengan kendaraan pribadi, terutama jika dilengkapi dengan fitur keamanan seperti pencahayaan yang baik, pemantauan video, dan perugas keamanan. Hal ini juga mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.

Persoalan perkotaan lainnya yang menjadi isu di Kota Tangerang Selatan adalah penanganan dan pengelolaan persampahan. Persampahan yang dihadapi Kota Tangerang Selatan adalah jumlah timbunan sampah yang terus meningkat, sementara kapasitas tampung TPA Cipeucang terbatas.. Upaya peningkatan optimalisasi TPS3R dan Bank sampah perkotaan serta program pemberdayaan pengelolaan sampah merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah dimasa mendatang. Mengingat lahan di Kota Tangerang Selatan sangat terbatas, maka kerjasama dengan wilayah sekitarnya secara terpadu dalam pengelolaan sampah merupakan upaya strategis dalam jangka menengah sampai dengan beroperasinya PLTSA di Kota Tangerang Selatan.

4. Penyediaan prasarana, sarana dan layanan perkotaan yang berkualitas, terintegrasi dan inklusif

Optimalisasi penataan ruang dan sistem permukiman yang berkeadilan dan berkelanjutan menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Dalam hal terjadinya gated community harus mulai diantisipasi agar tidak terus meningkat ke depannya. Sistem permukiman yang berkeadilan dan berkelanjutan harus diwujudkan terutama melalui integrasi kawasan-kawasan permukiman dimana fasilitas dan infrastruktur yang saat ini hanya bisa diakses dan dimanfaatkan oleh penghuni perumahan tertentu harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Tangerang Selatan.

Integrasi prasarana dan sarana perkotaan, termasuk pengelolaannya menjadi penting agar tidak terjadi segregasi sosial yang mengancam keberlanjutan. Ketimpangan akses terhadap fasilitas dan infrastruktur publik akan dapat memicu konflik sosial yang akan mengancam keberlanjutan. Dalam hal ini integrasi kawasan diharapkan dapat menciptakan keadilan, karena pada prinsipnya tidak boleh ada diskriminasi dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur.

Dengan kondisi lahan yang terbatas, maka struktur ruang yang kompak menjadi salah satu strategi yang harus diupayakan. Sayangnya, tidak meratanya kualitas infrastruktur yang ada saat ini di Kota Tangerang Selatan menghambat aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi sehingga struktur ruang kota menjadi timpang dan terfragmentasi. Beban kawasan dengan infrastruktur dasar dan ekonomi yang berkualitas akan semakin tinggi karena terjadi penumpukan aktivitas di kawasan tersebut. Hal ini tentunya akan mengurangi kenyamanan dan sekaligus akan mengurangi produktivitas.

Upaya-upaya untuk peningkatan kualitas dan integrasi infrastruktur dan layanan perkotaan sebagai modal dasar pembangunan kota perlu didorong dalam jangka menengah ini. Diperlukan pengaturan dan pengelolaan yang lebih baik agar infrastruktur dan layanan perkotaan juga dapat diakses oleh semua warga sesuai dengan kapasitasnya

5. Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berketahanan

Wilayah perkotaan ke depan dihadapkan pada tantangan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang terus menurun. Hal ini tentu perlu diantisipasi melalui pembangunan dan penataan perkotaan yang menghadirkan karakter lingkungan perkotaan yang sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pelaksanaan setiap program pembangunan yang dilakukan dengan cermat memperhitungkan perkiraan dampak serta risiko lingkungan.

Ketahanan pangan, bencana serta perubahan iklim menjadi landasan yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan. Dari sisi ketahanan pangan, Kota Tangerang Selatan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dalam hal penyediaan pangan karena mengandalkan hampir seluruh pasokan pangannya dari luar kota. Ketergantungan pangan yang tinggi pada pasokan dari luar wilayah dapat membuat Kota Tangerang Selatan rentan terhadap berbagai gangguan dalam rantai pasokan, seperti bencana alam atau masalah logistik. Oleh karena itu, Kota Tangerang Selatan perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan

ketahanan pangan dengan membangun dan menguatkan kerjasama antar daerah terutama dengan daerah produsen pangan.

Kota tangguh bencana dan perubahan iklim menjadi salah satu upaya besar Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengurangi risiko bencana dan perubahan iklim. Tantangan global yang menjadi perhatian dunia adalah dinamika perubahan iklim semakin besar ke depan, sementara aktivitas masyarakat dalam penggunaan energi dari fosil juga belum dapat dikurangi secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Alston dan Whittenbury (2013), memperkirakan akan adanya krisis bencana alam dari perubahan iklim yang tidak terkendali, dimana pada tahun 2030, variabilitas iklim akan mengancam ketahanan pangan dan kebutuhan air karena pada saat itu populasi dunia sudah menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan mencapai 50% lebih besar dari kondisi saat ini, 45% lebih banyak energi yang dibutuhkan dan 30% lebih banyak air bersih yang dibutuhkan. Dengan gambaran saat ini dimana kesiapsiagaan sebagian besar wilayah di Kota Tangerang Selatan masih rendah untuk menghadapi bencana dan perubahan iklim, maka isu terkait peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi sangat penting dalam rencana pembangunan daerah jangka menengah.

Mengingat ketergantungan Kota Tangerang Selatan pada energi listrik yang sangat tinggi (mencapai 100 persen, BPS Provinsi Banten, 2021), maka pengembangan kota di masa mendatang perlu mengedepankan penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, tantangan terberat dalam implementasinya adalah mencari terobosan atau inovasi untuk bertransformasi atau ber-transisi dari penggunaan energi fosil menjadi energi bersumber dari alam yang bersifat regeneratif

6. Tata kelola yang profesional, inovatif dan kolaboratif disertai pengembangan *science/evidence-based policy*

Tata kelola diperlukan agar Pemerintah Daerah bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola yang efektif, kebijakan yang transparan, dan administrasi publik yang responsif memainkan peran penting dalam mendukung kemajuan daerah. Tata kelola tersebut masih menjadi kendala utama di Kota Tangerang Selatan dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Belum optimalnya implementasi manajemen sistem merit bagi aparatur sipil negara, reformasi akuntabilitas kinerja dan belum optimalnya penataan kelembagaan serta proses bisnis untuk transformasi pelayanan publik merupakan kondisi atau hal yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan perlu berinovasi guna beradaptasi dengan kompleksitas permasalahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Sebagai sebuah organisasi publik sangat membutuhkan sistem birokrasi yang efektif dan efisien sehingga roda organisasi dapat bergerak dengan cepat dan taktis secara komprehensif dengan tujuan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Sistem birokrasi yang baik tidak memiliki format baku yang tetap, sehingga pemerintah dituntut agar terus melakukan perubahan-perubahan positif

guna menyesuaikan dinamika perubahan di masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik.

Perkembangan teknologi saat ini dan ke depan berdampak besar terhadap cara kerja pemerintahan. Teknologi membuka peluang baru dalam transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumberdaya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan akan mengubah interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Digitalisasi pemerintahan menghadapi tantangan terkait dengan tata kelola keamanan, keterpaduan data dan informasi serta belum meratanya literasi digital. Kompleksitas digitalisasi semakin dirasakan terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan. Memanfaatkan potensi dan keberadaan berbagai perguruan tinggi, lembaga kajian, swasta dan para profesional yang ada di Kota Tangerang Selatan menjadi modal tersendiri bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat melakukan kerjasama untuk menjawab dan beradaptasi terhadap tantangan ke depan. Kerjasama multihelix ini akan membantu dan memperingan kerja-kerja pemerintahan ke depan dalam menjawab tantangan ke depan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang

7. Penguatan daya saing pariwisata berbasis potensi kesehatan (*health tourism*), ritel, budaya, dan MICE

Kemudahan akses dari Kota Tangerang Selatan daerah lainnya menjadikan Kota Tangerang Selatan dipilih sebagai tujuan masyarakat khususnya Jabodetabek untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan penyelenggaraan berbagai acara Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition (MICE) serta perbelanjaan. Pangsa pasar MICE-government terutama dari Kementerian dan Lembaga Negara merupakan berkontribusi signifikan dalam kegiatan MICE di hotel-hotel di Kota Tangerang Selatan. Health tourism akan menjadi program prioritas pengembangan pariwisata di Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan memiliki prasarana kesehatan yang cukup lengkap, baik yang memberikan layanan kesehatan medis, layanan perawatan estetika dan spa, sebagai potensi dalam penyelenggaraan health tourism

8. Peningkatan produktivitas UMKM dan sektor ekonomi kreatif berbasis riset dan inovasi

Nasional menargetkan pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US$23.000-30.300. Nasional mengarahkan transformasi ekonomi yang difokuskan pada peningkatan daya saing yang tinggi secara internasional dan berkelanjutan dengan menekankan pada perluasan dan penguatan peran dalam Global Value Chain, penguasaan teknologi menengah dan tinggi. Jika transformasi yang dimaksud oleh Nasional menitikberatkan pada industrialisasi, maka dalam konteks Kota Tangerang Selatan akan bertransformasi menuju perdagangan dan jasa, UMKM dan Ekonomi Kreatif. Analisis terhadap struktur PDRB menunjukkan bahwa terdapat beberapa sektor lapangan usaha yang merupakan basis dengan kontribusinya yang cukup potensial dan berkembang terhadap PDRB namun belum berstatus prima sementara terdapat beberapa sektor

lapangan usaha yang merupakan sektor prima penopang perekonomian Kota Tangerang Selatan diperkirakan akan menurun kontribusinya karena daya dukung lahan yang terbatas. Untuk itu, Kota Tangerang Selatan perlu mempertimbangkan upaya cepat mempersiapkan shifting sektor ekonomi prima sebagai bentuk transformasi ekonomi, salah satunya dengan memperkuat kontribusi pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif.

Kemudahan akses dari Kota Tangerang Selatan daerah lainnya menjadikan Kota Tangerang Selatan dipilih sebagai tujuan masyarakat khususnya Jabodetabek untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan penyelenggaraan berbagai acara Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition (MICE) serta perbelanjaan. Pangsa pasar MICE-government terutama dari Kementerian dan Lembaga Negara merupakan berkontribusi signifikan dalam kegiatan MICE di hotel-hotel di Kota Tangerang Selatan. Health tourism akan menjadi program prioritas pengembangan pariwisata di Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan memiliki prasarana kesehatan yang cukup lengkap, baik yang memberikan layanan kesehatan medis, layanan perawatan estetika dan spa, sebagai potensi dalam penyelenggaraan health tourism

9. Penataan sektor ekonomi informal

Penataan sektor ekonomi informal adalah proses yang bertujuan untuk mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan ekonomi yang sebelumnya tidak terdaftar atau tidak diatur ke dalam kerangka ekonomi formal. Sektor ekonomi informal sering kali mencakup usaha kecil, pekerjaan mandiri, dan aktivitas yang tidak terdaftar atau tidak diatur secara resmi. Penataan sektor ini penting dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, melindungi hak pekerja, dan memaksimalkan potensi kontribusi sektor ini terhadap perekonomian secara keseluruhan.

10. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja

Kota Tangerang Selatan memiliki potensi ekonomi yang besar, didukung oleh lokasi strategis di kawasan metropolitan Jakarta dan struktur penduduk yang didominasi oleh usia produktif. Rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja menjadi tantangan utama dalam mendorong produktivitas daerah yang berkelanjutan. Selain itu, ketidaksesuaian (mismatch) antara keterampilan angkatan kerja dengan kebutuhan industri, serta kurangnya inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga akan menambah hambatan pertumbuhan ekonomi, memperlebar ketimpangan, dan mengurangi daya saing daerah di tingkat nasional maupun global. Diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan semua pihak (Pemerintah Daerah, sektor privat, dan masyarakat) untuk dapat mentransformasi bonus demografi menjadi SDM unggul yang mendorong pertumbuhan inklusif. Langkah konkret seperti pelatihan berbasis teknologi (Digital Upskill Programme), sertifikasi kompetensi, pemberdayaan kelompok rentan (perempuan dan disabilitas) dan kolaborasi industri-pendidikan akan mempercepat terciptanya lapangan kerja berkualitas sekaligus menguatkan fondasi ekonomi daerah di masa depan.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 serta arahan kebijakan dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029, masih banyak permasalahan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan isu strategis guna menyelesaikan permasalahan utama pembangunan daerah secara bertahap dengan memperhatikan isu strategis pembangunan nasional dan isu strategis pembangunan provinsi Banten. Berikut ini adalah Isu strategis pembangunan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan Tahun 2025 dirumuskan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.165. Rumusan Isu Strategis Daerah Kota Tangerang Selatan

Penafisan dari Identifikasi Permasalahan	**Masalah**	**Masalah Pokok**	**Isu Strategis**
Kualitas Lingkungan Hidup menurun	Belum optimalnya kualitas lingkungan perkotaan sebagai kota layak huni	Belum optimalnya pembangunan kewilayahan yang inklusif, terintegrasi, berketahanan sosial, budaya dan ekologi	- Pengembangan transportasi publik dan pengelolaan sampah secara terpadu dalam konstelasi Kawasan Aglomerasi - Penyediaan prasarana, sarana dan layanan perkotaan yang berkualitas, terintegrasi dan inklusif - Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berketahanan
Kualitas perkotaan yang layak huni belum optimal			
Kehidupan sosial yang berbudaya dan harmonis belum optimal	Belum optimalnya ketahanan sosial dan budaya daerah		
Kota Tangerang Selatan masih rentan pangan (terutama keterjangkauan untuk masyarakat miskin), air, bencana dan perubahan iklim	Belum optimalnya ketahanan daerah terhadap pangan, air dan bencana (termasuk perubahan iklim)		
Pertumbuhan ekonomi daerah melambat	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan	Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi	- Penguatan daya saing pariwisata berbasis potensi kesehatan (health tourism), ritel, budaya, dan MICE - Peningkatan produktivitas UMKM dan sektor ekonomi kreatif berbasis riset dan inovasi - Penataan sektor ekonomi informal
Pengembangan dan diversifikasi produk unggulan daerah belum optimal			
Daya tarik pariwisata daerah belum berdaya saing;			
Kontribusi sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian daerah belum optimal			
Inovasi dan adopsi teknologi belum optimal untuk peningkatan produktivitas daerah			
Kualitas tenaga kerja belum unggul dan berdaya saing	Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah		
Derajat kesehatan masyarakat belum merata	Belum optimalnya pemerataan kesehatan berkualitas dan terjangkau	Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing global	- Peningkatan kualitas SDM yang unggul, produktif dan berdaya saing global - Pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan yang inklusif - Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja
Akses dan kualitas pendidikan belum merata, inklusif dan unggul	Belum optimalnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif		
Ketimpangan meningkat dan upaya	Belum optimalnya pengentasan		

Penafisan dari Identifikasi Permasalahan	Masalah	Masalah Pokok	Isu Strategis
pengentasan kemiskinan belum belum efektif karena kurangnya inovasi program.	kemiskinan dan penurunan ketimpangan yang inklusif		
Reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola belum profesional	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang prima dan inklusif	Belum optimalnya reformasi birokrasi dan transformasi tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tata kelola yang profesional, inovatif dan kolaboratif disertai pengembangan science/evidence-based policy
Kebijakan yang dihasilkan belum berbasis riset dan belum inklusif			

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2026 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2024 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2025 dan 2026. Arah kebijakan ekonomi Kota Tangerang Selatan juga mempertimbangkan hasil analisis perkembangan ekonomi global dan nasional tahun 2025 serta perkiraan tahun 2026, sekaligus mengacu pada arah kebijakan dan target yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi Banten untuk Kota Tangerang Selatan.

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi nasional, kondisi ekonomi Provinsi Banten, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan RKPD tahun 2026. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip untuk penyelesaian berbagai permaslahan kota Tangerang Selatan yang tertuang dalam isu strategis dan program prioritas, serta perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional tahunan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 menetapkan sejumlah target makro pembangunan yang menjadi pedoman dan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah. Target-target ini dirancang untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjawab tantangan global dan domestik.

Dalam aspek pertumbuhan ekonomi, pemerintah menargetkan laju pertumbuhan sebesar 5,8% hingga 6,3%, guna menjaga momentum pemulihan pascapandemi dan meningkatkan produktivitas nasional. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, kebijakan difokuskan pada optimalisasi peran Bulog, pembangunan lumbung pangan (food estate), serta peningkatan bauran energi terbarukan seperti ethanol dan biodiesel, termasuk pengembangan SPAM terintegrasi dan pengelolaan sampah yang lebih modern.

Pada aspek lingkungan hidup, RKP 2026 menargetkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai nilai 76,67, sejalan dengan peningkatan upaya mitigasi perubahan iklim. Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita ditargetkan naik menjadi USD 5.870, sebagai indikator kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Di sisi lain, penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ditetapkan sebesar 37,14%, mencerminkan komitmen nasional terhadap pembangunan rendah karbon.

Adapun dalam dimensi sosial, penurunan tingkat kemiskinan ditargetkan mencapai kisaran 6,5% hingga 7,5%, melalui penguatan program perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan kelompok rentan. Seluruh target ini menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah, dengan peran aktif pemerintah daerah untuk mengkonkretkan sasaran tersebut ke dalam perencanaan dan penganggaran tahunan yang lebih kontekstual dan tepat sasaran.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2026, RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menurunkan kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, serta menekan ketimpangan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, pemberdayaan UMKM dan wirausaha, penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, dan berbasis digital.

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Banten

Dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2026 disampaikan bahwa, kondisi perekonomian tahun 2025 dan tahun 2026 diproyeksikan mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2023. Hal ini ditunjukan dengan sudah tumbuhnya perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2022 yang sudah mencapai 5,03% serta tahun 2023 sebesar 4,81%. Selain itu berbagai lembaga internasional seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan ekonomi global pada 2025 akan tumbuh pada kisaran 2,7% - 3,2%.

Bank Dunia dan IMF memproyeksikan perekonomian Indonesia pada tahun 2025 akan tumbuh pada kisaran 4,9 – 5,1% di tengah perkembangan geopolitik di tingkat global yang kurang kondusif. Asumsi lainnya yang melandasi optimisme perkembangan ekonomi Indonesia adalah kondisi perekonomian negara-negara yang menjadi pasar komoditas ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat, Jepang, China dan Negara Uni Eropa. Berdasarkan berbagai proyeksi tersebut serta memperhatikan perkembangan keadaan ekonomi di tingkat global, regional maupun nasional serta penetapan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 – 5,6 dalam RKP 2025, maka Laju Pertumbuhan Ekonomi Banten diproyeksikan dapat mencapai kisaran 5,28-5,33%. Kondisi tersebut dapat tercapai dengan asumsi kondusifitas wilayah pasca pelaksanaan pesta demokrasi Pilpres, Pileg dan Pilkada serta peningkatan minat investasi di kalangan investor setelah adanya kepastian kepemimpinan. Dari aspek sektoral, pertumbuhan positif sektor industri pengolahan dan kontruksi yang memberikan dominasi sumbangsih pada perekonomian Banten melahirkan optimisme pencapaian target tersebut. Penyelesaian Tol Serang Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24,17 Km diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan laju pertumbuhan sektor konstruksi dan Real estate.

Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mampu mencapai nilai yang ditargetkan. Proyeksi kinerja perekonomian Banten didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu sebagai berikut.

Faktor Pendorong:

1. Peningkatan daya saing untuk produk baja olahan domestik seiring pencabutan kebijakan tax rebate Tiongkok untuk komoditas baja;
2. Mulai beroperasinya sejumlah pabrik baru dan peningkatan kapasitas produksi besar pada industri baja dan petrokimia di Provinsi Banten;
3. Berlanjutnya pembangunan beberapa PSN di wilayah Banten, seperti proyek jalan tol dan bendungan;
4. Akselerasi penjualan ekspor untuk produk baja berupa Hot Rolled Coil dengan level margin yang lebih baik ke negara non tradisional;
5. Konsumsi RT berpotensi meningkat sejalan dengan menguatnya daya beli masyarakat dan mobilisasi, serta didukung oleh berlanjutnya stimulus serta relaksasi perekonomian yang melanjutkan tren peningkatan;
6. Pemulihan kinerja korporasi;
7. Memastikan ketersediaan lapangan kerja dan dialog untuk mempertahankan industri padat karya di Banten;
8. Sektor Pertanian potensial untuk menyerap tenaga kerja, didukung oleh ketersediaan lahan pertanian. Langkah yang ditempuh pemda melalui pembangunan Jalan Usaha Tani dan Irigasi Pertanian;
9. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi – Pro Job, yaitu penguatan efektivitas MOU Pendidikan Vokasi;
10. Banten penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera, didukung oleh banyaknya Industri skala besar dan menengah;
11. Insentif ataupun kemudahan perizinan maupun fasilitas pendukung investasi lainnya;
12. Adanya kemajuan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat di Provinsi Banten;
13. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten seiring dengan pulihnya daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan;
14. Mengurangi jumlah pengangguran khususnya yang berada di wilayah Banten selatan. Upaya yang ditempuh antara lain penguatan pendidikan vokasi, penguatan pelatihan tenaga kerja, revitalisasi BLKI. Sementara untuk mengatasi ketimpangan dilakukan dengan pembangunan infrastruktur konektivitas;
15. Ekspektasi inflasi yang semakin terkendali pasca penetapan berbagai kebijakan pendukung;
16. Sinergi dan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah yang terjaga dengan baik berbagai kebijakan dan program nyata Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga harga di level stabil.

Faktor Penahan:

1. Kondisi geopolitik di tingkat global (Perang Rusia-Ukraina dan Perang Timur Tengah) dapat berimplikasi kepada ekspor komoditas.
2. Penerapan berbagai kebijakan dalam negeri di tengah ketidakpastian global dapat mendorong peningkatan harga bahan baku komoditas dunia dan berpotensi menahan konsumsi masyarakat;
3. Pergeseran bentuk pengeluaran masyarakat dari kebutuhan leisure ke non- leisure serta kecenderungan masyarakat berpendapatan tinggi yang masih menahan konsumsi;
4. Potensi risiko perpindahan industri ke provinsi lain dikarenakan Upah Minimum Regional yang lebih rendah;
5. Belum optimalnya penyelarasan (matching) antara kebutuhan Industri dengan kurikulum pendidikan atau pelatihan SDM;

6. Perbedaan antara kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Industri dengan kompetensi para pencari kerja;
7. Rendahnya daya saing pekerja Banten (mayoritas pekerja yang berpendidikan SD ke bawah);
8. Besarnya jumlah penduduk migran yang datang ke Provinsi Banten untuk mencari pekerjaan dengan tingkat keterampilan dan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan lowongan kerja yang ada relatif tingginya Upah Minimum Regional (UMR) dan adanya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
9. Dari 729 SMK (81 Negeri dan 648 Swasta), hanya 281 sekolah yang berorientasi industry;
10. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi penduduk miskin dan penyediaan alokasi anggaran secara berkelanjutan, by name by address untuk pemberian bantuan yang tepat guna dan tepat sasaran;
11. Belum optimalnya orkestrasi kebijakan yang diambil oleh setiap Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk dapat secara simultan mengatasi kemiskinan di masing-masing kota/Kabupaten;
12. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi penduduk miskin dan penyediaan alokasi anggaran secara berkelanjutan, by name by address untuk pemberian bantuan yang tepat guna dan tepat sasaran;
13. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah berpotensi kepada penurunan anggaran pembangunan di tingkat Pemerintah Provinsi.

Tabel 3.1. Target dan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Provinsi Banten Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	RKPD 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,60-6,20
2	Produk PDRB Per Kapita	(Juta Rupiah)	80,00-82,40
3	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	4
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,45-5,15
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,45-6,65
6	Rasio Gini	Nilai	0,340-0,360
7	Indeks Modal Manusia	Nilai	0,57
8	Pesentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	43,05
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	Nilai	67,17

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan berbagai target indikator diatas, maka Kebijakan Perekonomian Daerah Provinsi Banten diarahkan pada:

1. Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang merata antara Banten Selatan dan Banten Utara;
2. Peningkatan produktivitas ekonomi melalui modernisasi pertanian dan ekonomi biru;
3. Pengembangan industri kimia dasar dan hilirisasi output hasil industry tersebut;
4. Peningkatan investasi yang berkualitas melalui optimalisasi kepastian usaha;
5. Percepatan peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan belanja daerah untuk belanja produktif;
6. Peningkatan creative financing dan peran sektor swasta dalam Pembangunan daerah;
7. Peningkatan pendapatan perkapita Masyarakat.
8. Peningkatan kontribusi PDRB sektor maritim;
9. Peningkatan kontribusi PDRB sektor manufaktur;
10. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Tangerang Selatan

Kondisi perekonomian Kota Tangerang Selatan tahun 2026 tidak bisa terlepas dari kondisi ekonomi yang terjadi pada tahun 2024, yang mana berupaya untuk mengembangkan kesempatan kerja bagi masyarakat dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi yang tidak terpusat serta mengembangkan potensi ekonomi lokal. Pembangunan ekonomi akan berhasil bila mampu memenuhi kebutuhan peningkatan ekonomi baik secara individu maupun kelompok. Hal ini tentunya dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan yang akan berpengaruh positif bagi pembangunan ekonomi daerah Kota Tangerang Selatan salah satunya dalam program perbaikan kondisi fisik/lokalitas daerah yang ditunjukkan untuk kepentingan pembangunan ekonomi serta daya tarik potensi ekonomi daerah Kota Tangerang Selatan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yakni **"Tangerang Selatan Unggul, Inklusif, Inovatif, Kolaboratif Menuju Kota Lestari",** maka pada RKPD Tahun 2026 Pemerintah Kota Tangerang Selatan menetapkan arah kebijakan ekonomi yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan proyeksi dan target utama pembangunan ekonomi daerah, serta hasil kesepatan melalui koordinasi teknis perencanaan pembangunan tahun 2025 antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada Tanggal 6 bulan Maret Tahun 2025 dan perkembangannya, yakni laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6-6,45 persen, peningkatan PDRB per kapita pada kisaran Rp91,59–Rp95,99 juta, serta kontribusi terhadap PDRB Kab/Kota sebesar 13,10–13,15 persen.

Kebijakan ekonomi tersebut diarahkan pada:

1. Penguatan Fondasi Ekonomi Produktif dan Inklusif, dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat ekosistem UMKM melalui digitalisasi, kemudahan akses pembiayaan, dan penyediaan infrastruktur pendukung. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kontribusi sektor ekonomi terhadap pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas basis ekonomi masyarakat.
2. Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah Perekonomian Daerah, melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, integrasi kawasan strategis, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses produksi dan distribusi. Hal ini sejalan dengan visi kota yang unggul dan inovatif, sekaligus memperkuat posisi Tangerang Selatan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi regional di Provinsi Banten.
3. Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja Lokal, dalam rangka menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke kisaran 4,6-5,42 persen. Pemerintah daerah akan mendorong pelatihan kerja berbasis permintaan pasar, penguatan program D3 (Dilatih, Disertifikasi dan Ditempatkan) serta kemitraan dengan sektor swasta melalui pengintegrasian dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) untuk penyerapan tenaga kerja, terutama pada sektor prioritas.

4. Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan, melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran, serta peningkatan akses kelompok rentan terhadap layanan dasar dan ekonomi produktif. Target penurunan tingkat kemiskinan diarahkan pada kisaran 1,84-2,10 persen, dengan pengendalian Rasio Gini pada rentang 0,345-0,353 sebagai indikator pemerataan hasil pembangunan.
5. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai fondasi ekonomi jangka panjang, dengan memperkuat layanan pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Target IPM tahun 2026 sebesar 84,54-84,82 menjadi pendorong utama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing global.
6. Penguatan Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan, yang ditandai dengan upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara kumulatif sebesar 19,02 persen. Transformasi menuju ekonomi rendah karbon akan dilakukan melalui efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta penguatan peran sektor swasta dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Berikut gambaran capaian pada tahun 2024, dan target pada RKPD Tahun 2025 dan 2026, sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut.

Tabel 3.2. Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, dan Target RKPD Tahun 2025 dan 2026

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun		Wali data
				2025	2026	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,02	5,40-6,31	5,60-6,45	BPS
2	PDRB (ADHB) per Kapita	Juta Rupiah	80,18	86,03-87,82	91,59-95,99	BPS
3	Kontribusi PDRB Kota Tangerang Selatan terhadap Provinsi Banten	%	12,84	13,01-13,08	13,10-13,15	BPS
4	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	84,16	84,42-84,68	84,54-84,82	BPS
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,09	4,76-5,65	4,60-5,42	BPS
6	Rasio Gini	Nilai	0,395	0,353-0,380	0,345-0,353	BPS
7	Tingkat Kemiskinan	%	2,36	1,91-2,25	1,84-2,10	BPS
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	61,03	48,23	48,52	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup
9	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	N/A	18,45	19,02	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kota Tangerang Selatan 2025-2029

Tabel 3.3. Sinkronisasi ASTACITA dalam RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
1	Memperkokoh ideologI Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	18.086.367.053	0,40%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Sub Kegiatan tidak dianggarkan karena Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Sudah ada dan Legal
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	24.472.930			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	0			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sub kegiatan ini tidak dianggarkan karena substansinya masih termasuk dalam sub kegiatan: Pelayanan Informasi Publik
					Pelayanan Informasi Publik	105.588.000			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	24.412.000			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	10.400.000.000			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	7.531.894.123			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
				POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melaluI swasembada pangan, energi, air, ekonomi syarlah, ekonomi digital, ekonomi hijau. Dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	0	7.372.581.954	0,16%	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	sudah ditetapkan dengan perwal nomor 118 tahun 2022
					Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	0			DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	sudah ditetapkan dengan perda nomor 9 tahun 2019, sedang dilakukan revisi RTRW direncanakan ditetapkan tahun 2025, tidak dianggarkan lagi ditahun 2026
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	55.779.374			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
					Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	51.164.356			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang	20.566.674			DINAS KETAHANAN PANGAN,	

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
					Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				PERTANIAN DAN PERIKANAN	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	0			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Sub kegiatan ini belum dialokasikan karena keterbatasan anggaran
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	243.739.750			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
					Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	2.573.131.800			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	0			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sub kegiatan ini tidak dianggarkan karena substansinya masih termasuk dalam sub kegiatan: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	0			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tangsel tidak memiliki Laut
					Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	0			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tangsel tidak memiliki Laut
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	0			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tangsel tidak memiliki Laut

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	0			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Sub Kegiatan ini masuk ke dalam Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, sedangkan di Kota Tangsel tidak memiliki Sumber daya Kelautan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mengambil program pengelolaan perikanan budidaya untuk memfasilitasi dan membina kelompok Pembudidaya ikan kecil yang ada di kota tangsel
					Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	0			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Sub Kegiatan ini masuk ke dalam Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, sedangkan di Kota Tangsel tidak memiliki Sumber daya Kelautan, untuk kegiatan pengawasan produk olahan ikan diakomodir ke dalam program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di sub kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
					Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	0			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tangsel tidak memiliki Laut
					Pengawasan Ekstraksi Garam	0			DINAS KETAHANAN PANGAN,	Tangsel tidak memiliki Laut

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
									PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.428.200.000			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
					Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	0			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tangsel tidak memiliki luasan sawah yang dilindungi sesuai Kepwal nomor :050.13/1579/bappeda
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Prasarana Pendukung Pertanian antara Perluasan Lahan Pertanian , Bendungan, irigasi, akses permodalan (KUR) dimana di tangsel sudah tidak ada Prasarana tersebut, dan sesuai Kepwal nomor:050.13/1579/Bappeda , kota tangerang selatan tidak memiliki luasan sawah yang dilindungi
					Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	0			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tangsel tidak memiliki luasan sawah yang dilindungi sesuai Kepwal nomor :050.13/1579/bappeda
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				0			#N/A	Tangsel tidak memiliki Hutan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				0			#N/A	Tidak ada kewenangan di Kota

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	0	4.456.419.352	0,10%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1. Sub kegiatan ini tidak dianggarkan karena substansinya masih termasuk dalam sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 2. Kota Tangerang Selatan tidak memiliki tanah/lahan yang menjadi Objek Retribusi Tanah seperti : a) Tanah Negara yang dikuasai langsung oleh negara, b.) Tanah kelebihan maksimum, c.) Tanah absentee, d.) Tanah swapraja dan Bekas swapraja, e.) Tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai masyarakat, f.) Tanah yang ditelantarkan, g.) Tanah Eks Hak Guna Usaha.
					Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	0			DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1. Sub kegiatan ini tidak dianggarkan karena substansinya masih termasuk dalam sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 2. Kota Tangerang Selatan tidak memiliki tanah/lahan yang menjadi Objek Reforma Agararia dalam hal ini harus berbasiskan karateristik desa, yaitu : Desa Sawah, Desa Perkebunan, Desa Hutan, Desa Kebun Rakyat, Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Desa Adat.

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	0			DINAS PERHUBUNGAN	Tangsel tidak memiliki penyeberangan, danau dan suangai
					Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	0			DINAS PERHUBUNGAN	Tangsel tidak memiliki penyeberangan, danau dan suangai
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	34.260.110			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	173.618.289			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	3.079.054.643			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	240.782.000			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	50.000.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	250.582.320			DINAS PENDIDIKAN	

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
									DAN KEBUDAYAAN	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	0			DINAS PARIWISATA	Sub kegiatan ini belum dialokasikan karena keterbatasan anggaran
					Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	50.000.000			DINAS PARIWISATA	
					Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0			DINAS PARIWISATA	Sub kegiatan ini belum dialokasikan karena keterbatasan anggaran
					Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0			DINAS PARIWISATA	Sub kegiatan ini belum dialokasikan karena keterbatasan anggaran
					Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000			DINAS PARIWISATA	
					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	76.000.000			DINAS PARIWISATA	
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	200.000.000			DINAS PARIWISATA	
					Pengembangan Pendidikan	15.750.000			DINAS PARIWISATA	
					Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	26.395.330			DINAS PARIWISATA	
					Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	74.977.040			DINAS PARIWISATA	
					Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	79.999.620			DINAS PARIWISATA	

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
					Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	55.000.000			DINAS PARIWISATA	
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	15.000.000	327.396.842.285	7,18%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3.125.000.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100.000.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)*	226.773.087.875			DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	dikerjakan di DCKTR pada sub kegiatan “Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota” Rp 226,773,087,875,-
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	0			DINAS PENDIDIKAN	tahun 2026 KDH/WKDH di kegiatan kesetaraan fokus untuk lembaganya..

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
									DAN KEBUDAYAAN	banyak bantaun-bantuan yg menyasar ke lambaganya.
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengembangan Rumah Sakit	535.450.000			DINAS KESEHATAN	
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	51.293.211.242			DINAS KESEHATAN	
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.788.226.550			DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	37.284.100.000			DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0			DINAS KESEHATAN	Sub Kegiatan tersebut rencananya akan dipakai untuk kegiatan DAK TA 2025
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	20.790.000			DINAS KESEHATAN	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	0			DINAS SOSIAL	Akan dianggarkan pada tahap KUA PPAS
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	79.307.828			DINAS SOSIAL	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	50.000.000			DINAS TENAGA KERJA	

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
			dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja							
					Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7.400.000			DINAS TENAGA KERJA	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	0			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, sehingga anggaran yang ada lebih diprioritaskan kepada bimbingan teknis PPRG
					Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.738.006.138			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.200.000			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
					Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	14.500.000			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,	

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
									PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	0			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Sub kegiatan tersebut tidak diambil karena tidak tercantum dalam Renstra 2025–2029, tidak terdapat UPT yang melaksanakan, serta kegiatan koordinasi dengan instansi lain sudah diakomodasi dalam sub kegiatan kerja sama dan rapat koordinasi.
					Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	50.000.000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	90.300.000			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
					Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	0			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	kegiatannya di integrasikan dengan pelaksanaan pos gizi yang pagu anggarannya ada di Kecamatan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN	Pada tahun 2026 karena keterbatasan anggaran daerah maka tidak dilaksanakan kegiatan

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
				KELUARGA SEJAHTERA (KS)					ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	pengelolaan ketahanan keluarga tetapi sebagai penggantinya dengan sasaran yang sama dilaksanakan dengan kegiatan peningkatan kompetensi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan sumber dana DAK
					Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	89.341.000			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	282.922.000			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Seleksi Atlet Daerah	0			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Seleksi atlet yang dilaksanakan oleh Dispora hanya seleksi atlet pelajar untuk berpartisipasi dalam event olahraga POPDA. Sudah dianggarkan sebesar Rp.300.000.000 dari usulan kebutuhan Rp.2.600.000.000 dalam sub kegiatan 2.19.03.2.01.0006

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar.
					Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	0			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan dilaksanakan oleh KONI melalui Hibah Pemerintah Daerah. Hibah dianggarkan pada Sub Kegiatan 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota
					Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	0			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pagu Anggaran masih diajukan untuk sub kegiatan ini, aktivitas yang direncanakan seperti Tangsel Marathon, Senam Rutin.
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	949.999.652			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
					Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	0			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak melaksanakan sub kegiatan ini, tetapi untuk pemanfaatan Koleksi Perpustakaan ada pada Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat yaitu melalui pelayanan

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
										mobil Perpustakaan Keliling, Layanan Sirkulasi dan Field Trip, akan tetapi pada RKPD TA 2026 belum dianggarkan dikarenakan keterbatasan anggaran, dan sedang diusulkan untuk dianggarkan pada tahapan KUA dan PPAS TA 2026
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nrlar tambah di dalam negeri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	0	17.145.560.413	0,38%	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	Kota Tangsel tidak memiliki lahan pertanian
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0			DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	Kota Tangsel tidak memiliki lahan pertanian
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0			DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Sub kegiatan ini belum dianggarkan karena merupakan rangkaian proyek karian Serpong yang masih dalam proses
					Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0			DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Sub kegiatan ini belum dianggarkan karena merupakan rangkaian proyek karian Serpong yang masih dalam proses
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	14.096.553.640			DINAS PERHUBUNGAN	

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
			Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	125.000.000			DINAS PERHUBUNGAN	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	40.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Pengawasan Penanaman Modal	60.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	0			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Sub kegiatan ini belum dialokasikan karena keterbatasan anggaran
					Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	0			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Kota Tangerang Selatan bukan merupakan kota penerbit SKA
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pameran Dagang Nasional	0			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Sub kegiatan ini belum dialokasikan karena keterbatasan anggaran
					Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	0			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Sub kegiatan ini belum dialokasikan karena keterbatasan anggaran
		URUSAN PEMERINTAHAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0			DINAS PERINDUSTRIAN	Sub kegiatan ini belum dialokasikan karena keterbatasan anggaran

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
		BIDANG PERINDUSTRIAN	pengolahan nonmigas	PEMBANGUNAN INDUSTRI					DAN PERDAGANGAN	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.824.006.773			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	0			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Sub kegiatan ini belum dialokasikan karena keterbatasan anggaran
					Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	0			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Sub kegiatan ini belum dialokasikan karena keterbatasan anggaran
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	25.665.002.254	282.694.184.703	6,20%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	0			DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	sub kegiatan ini belum dianggarkan karena masih fokus pada sub kegiatan: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	26.391.116.314			DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	229.431.000.000			DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	152.566.135			DINAS SOSIAL	
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000			DINAS SOSIAL	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.044.500.000			DINAS TENAGA KERJA	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	0			SEKRETARIAT DAERAH	Tangsel tidak memiliki desa

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	0			#N/A	tidak ada urusan Transmigrasi
					Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	0			#N/A	tidak ada urusan Transmigrasi
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	0			#N/A	tidak ada urusan Transmigrasi
7	Memperkuat reformasi politik, hukum. Dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	209.990.000	1.464.555.791	0,03%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
					Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	0			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sub kegiatan ini tidak dianggarkan karena substansinya masih termasuk dalam sub kegiatan: Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
					Penyediaan Akses Internet	0			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sub kegiatan ini tidak dianggarkan karena substansinya masih termasuk dalam sub kegiatan: Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
					Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	0			DINAS KOMUNIKASI	Sub kegiatan ini tidak dianggarkan karena substansinya masih

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
									DAN INFORMATIKA	termasuk dalam sub kegiatan: Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	31.462.000			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	0			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sub kegiatan ini tidak dianggarkan karena substansinya masih termasuk dalam sub kegiatan: Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	0			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sub kegiatan ini tidak dianggarkan karena substansinya masih termasuk dalam sub kegiatan: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.223.103.791			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adildan makmur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	200.000.000	24.953.806.175	0,55%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
					Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	179.160.504			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Penanganan sampah melalui pengangkutan	8.350.003.219			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
					Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	100.000.000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
					Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	5.037.075.229			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
					Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	3.062.673.100			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	0			#N/A	Tangsel tidak memiliki desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya	93.000.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengembangan Cagar Budaya	400.000.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	0			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	Kota Tangerang Selatan tidak memiliki naskah kuno dan kewenangan pengelolaan naskah kuno menjadi kewenangan Perpustakaan Nasional RI berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Program Registrasi Naskah Kuno sebagai Ingatan Kolektif Nasional (Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 1 ayat 6)
					Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	0			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	Kota Tangerang Selatan tidak memiliki naskah kuno dan kewenangan pengelolaan naskah kuno menjadi kewenangan Perpustakaan Nasional RI berdasarkan Peraturan

No	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	TOTAL PAGU	%	OPD	Keterangan
										Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Program Registrasi Naskah Kuno sebagai Ingatan Kolektif Nasional (Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 1 ayat 6)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	0			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	Karena keterbatasan anggaran pada tahapan RKPD TA 2026, maka untuk sub kegiatan ini kami mengajukan surat usulan penambahan anggaran agar bisa dianggarkan pada tahapan KUA dan PPAS TA 2026
			Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	0			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	Karena keterbatasan anggaran pada tahapan RKPD TA 2026, maka untuk sub kegiatan ini kami mengajukan surat usulan penambahan anggaran agar bisa dianggarkan pada tahapan KUA dan PPAS TA 2026
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	7.531.894.123			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							683.570.317.726	15,00%		

Sumber: Permendagri No.10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 diolah Bappelitbangda, 2025

Tabel 3.4. Daftar Keselarasan Highlight Intervensi Pembangunan Kewilayahan

KODE	RKP 2026		RKPD 2026	
	LOKASI PRIORITAS	**HIGHLIGHT INTERVENSI**	**LOKASI PRIORITAS**	**DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**
1	Lokasi PSEL dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 yang diusulkan dalam PSN RPJMN Tahun 2025-2029 antara lain berada di DK Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semaralg, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado.		Kecamatan Serpong	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / Kegiatan Pengelolaan Sampah
2	Wilayah metropolitan dengan timbulan sampah >1.000 ton/hari:			
3	Kawasan Aglomerasi Jakarta/WM Jakarta • Provinsi DKI Jakarta • Provinsi Jawa Barat: Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Cianjur • Provinsi Banten: Kab. Tangerang, Kota Tangerang, **Kota Tangerang Selatan**	Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di Kawasan Aglomerasi Jakarta (termasuk Tangerang Raya, Bekasi Raya, Depok, dan Bogor Raya), termasuk penerapan SIH3 dan FEWS;	Seluruh Kecamatan di Kota Tangerang Selatan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) / Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

KODE	RKP 2026		RKPD 2026	
	LOKASI PRIORITAS	**HIGHLIGHT INTERVENSI**	**LOKASI PRIORITAS**	**DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);	Kecamatan Setu, Serpong, Serpong Utara	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota/Permukiman/Kawasan Tertentu;	Kecamatan Setu	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi BTS.DKI/BANTEN – GANDARIA/BTS.DEPOK/ TANGERANG (CIPUTAT – BOGOR).	Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN / Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
	Jakarta-Tangerang International Business Corridor dan Jakarta Global City Urban Tourism (Central-South) (Sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Regeneratif Greater Jakarta) • Provinsi DKI Jakarta: Kota Adm. Jakarta Pusat, Kota Adm. Jakarta Selatan • Provinsi Banten: **Kota Tangerang Selatan**, Kab. Tangerang	Persiapan Pembangunan MRT Lebakbulus-Serpong;	Kecamatan Ciputat Timur, Pondok Aren dan Serpong	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG / Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) / Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
4	Provinsi Banten			
		Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi.	Seluruh Kelurahan di Kota Tangerang Selatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI / Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan output: • Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kota Cilegon; • Pembangunan PLTSa di Kota Tangerang; • Pembangunan PLTSa di Kota Tangerang Selatan.	Kecamatan Serpong	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / Kegiatan Pengelolaan Sampah

KODE	RKP 2026		RKPD 2026	
	LOKASI PRIORITAS	**HIGHLIGHT INTERVENSI**	**LOKASI PRIORITAS**	**DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**
5	Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang (A1), Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang-Tangerang (A2), dan Jakarta-Tangerang International Business Corridor •Kota Cilegon •Kota Serang •Kab. Serang •Kab. Tangerang •Kota Tangerang • **Kota Tangerang Selatan**	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT)	Kecamatan Setu	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah. Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Arah kebijakan pendapatan dalam penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besarnya PAD merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menetapkan arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selaras dengan dinamika regulasi nasional dan kebutuhan daerah. Kebijakan ini juga mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Tangerang Selatan yang unggul, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan PAD pada tahun 2026 difokuskan pada upaya intensifikasi, ekstensifikasi, serta modernisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1) Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis Regulasi Nasional dan Daerah

   Meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan mengacu pada kerangka hukum terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023. Implementasi regulasi ini menjadi landasan dalam perluasan objek dan subjek pajak, penyesuaian tarif, serta penyederhanaan jenis pajak dan retribusi.

2) Penguatan Pengawasan Bersama Wajib Pajak

   Melakukan pengawasan secara terpadu terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kolaborasi bersama Kanwil DJP Banten, KPP Pondok Aren, dan KPP Serpong, guna meningkatkan efektivitas pemantauan

dan penegakan hukum perpajakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3) Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pajak Daerah

Memperkuat sistem informasi perpajakan daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, keakuratan data perpajakan, integrasi informasi antarinstansi, serta perluasan kanal pembayaran digital berbasis Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

4) Penguatan Regulasi Teknis Terkait Pendapatan Daerah

Melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan PAD, serta menyusun regulasi teknis baru yang mendukung efektivitas pemungutan, kepastian hukum, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak serta pengguna layanan retribusi.

5) Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah

Menyusun sistem administrasi yang lebih efisien dan ramah pengguna, dengan berbasis digital dan terintegrasi, guna mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi secara cepat, transparan, dan akuntabel.

6) Optimalisasi Kebijakan Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan Elektronifikasi

Mengoptimalkan strategi intensifikasi penerimaan melalui peningkatan kepatuhan dan efisiensi pemungutan, serta ekstensifikasi dengan menggali potensi objek pajak dan retribusi baru. Diperkuat dengan implementasi ETPD untuk meningkatkan rasio pajak daerah terhadap total PAD secara signifikan.

7) Pemberian Relaksasi Pajak Daerah secara Selektif dan Terukur

Melakukan kebijakan relaksasi pajak, baik berupa pengurangan, penghapusan sanksi administrasi, maupun penjadwalan ulang kewajiban pajak bagi pelaku usaha dan masyarakat terdampak, dalam rangka meningkatkan penerimaan jangka panjang dan kepatuhan sukarela.

8) Pengoptimalan Pendapatan dari Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah

Mendorong kinerja BUMD dan unit usaha milik daerah melalui penguatan tata kelola, peningkatan efisiensi usaha, serta ekspansi usaha strategis. Di samping itu, potensi lain-lain PAD yang sah akan diidentifikasi dan dimaksimalkan secara sistematis.

b. Dana Transfer

Dalam rangka memastikan ketepatan perencanaan fiskal dan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menetapkan kebijakan pendapatan transfer pada RKPD Tahun 2026.

Adapun arah kebijakan yang ditempuh meliputi:

1. Sinkronisasi dengan Alokasi Dana Transfer yang Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Pemerintah Kota akan menyesuaikan target pendapatan transfer berdasarkan dokumen resmi dari Pemerintah Pusat, seperti Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2026, Nota Keuangan, serta alokasi indikatif Dana Transfer ke Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Termasuk di dalamnya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, serta Dana Insentif Fiskal.

2. Penyesuaian Berdasarkan Regulasi Teknis Dana Transfer

   Penyesuaian dilakukan dengan mengacu pada ketentuan terbaru, seperti Peraturan Presiden tentang Rincian APBN, Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Transfer, serta surat edaran atau petunjuk teknis dari kementerian/lembaga terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian target pendapatan dengan plafon yang sah dan dapat diterima.

3. Penyelarasan dengan Dana Transfer dari Pemerintah Provinsi Banten

   Selain dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota juga akan melakukan penyesuaian atas pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Banten, termasuk Bantuan Keuangan Provinsi. Penyesuaian dilakukan berdasarkan informasi resmi yang diterima dalam forum Musrenbang, konsultasi teknis, dan dokumen perencanaan anggaran provinsi.

4. Pemantauan Berkala atas Perkembangan Alokasi dan Realisasi Dana Transfer

   Pemerintah Kota melalui BPKAD dan Bappelitbangda akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi dan revisi alokasi dana transfer yang mungkin terjadi di tengah tahun berjalan. Hasil pemantauan digunakan sebagai dasar dalam revisi target pendapatan pada dokumen perubahan.

5. Penguatan Sistem Informasi dan Basis Data Transfer ke Daerah

   Penyesuaian target juga didukung dengan penguatan basis data dan sistem informasi transfer daerah agar memudahkan akses terhadap data resmi, mempercepat proses penyusunan RKPD, serta meningkatkan akurasi perencanaan pendapatan daerah.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen *Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah* merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bersifat pelengkap namun strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Pendapatan ini mencakup berbagai jenis pendapatan yang tidak termasuk dalam kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Dana Transfer, di antaranya dana hibah dari Kementerian/Lembaga, serta dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang dialokasikan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat.

Berikut proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2026

No	Struktur	Realisasi			Proyeksi	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	2026
		LKPD *Audited*	LKPD *Audited*	LKPJ	P-RKPD	RKPD
1	**PENDAPATAN**					
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**2.017.364.068.366**	**2.156.287.719.241**	**2.347.128.663.052**	**2.947.239.704.856**	**3.003.751.946.773**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.791.819.627.807	1.917.838.950,888	2.093.592.089.573	2.673.527.897.583	2.686.978.000.000
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	29.551.491.739	47.503.933.981	130.996.951.091	144.280.359.200	171.027.505.459
4.1.3	Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	731.439.035	771.586.632	701.475.939	629.151.223	701.475.939
4.1.4	Lain – lain – PAD yang Sah	192.231.509.785	190.173.247.740	121.838.146.449	128.802.296.850	145.044.965.375
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.733.288.225.579**	**1.960.482.609.729**	**2.151.342.029.789**	**1.899.623.628.650**	**1.338.084.877.000**
4.2.1	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**1.049.765.930.091**	**1.228.631.422.213**	**1.400.086.802.533**	**1.475.497.866.203**	**1.018.084.877.000**
4.2.2	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**	**683.522.295.488**	**731.851.187.516**	751.255.227.256	424.125.762.447	320.000.000.000
4.3	**LAIN – LAIN PENDAPATAN SAH**	-	-			
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.750.652.293.945**	**4,116.770.328.970**	**4.498.470.692.841**	**4.846.863.333.506**	**4.341.836.823.773**

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Mengacu pada kondisi pendapatan dan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1) Perencanaan dan pendanaan terpadu, berisi rencana kerja dan perkiraan kebutuhan pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan.
2) Perencanaan dan pendanaan berbasis kinerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari program/kegiatan/sub kegiatan.
3) Belanja untuk kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.
4) Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
5) Belanja daerah dialokasikan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional dan provinsi Tahun 2026 sesuai dengan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah dan kemampuan daerah.
6) Belanja daerah yang berasal dari pendapatan transfer yang telah ditentukan penggunaannya, dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7) Belanja daerah dialokasikan untuk pemenuhan target prioritas pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 pada periode tahun 2026, termasuk fokus pembangunan KDH/WKDH.
8) Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dianggarkan dan dirinci dalam sub-kegiatan pada Renja Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian visi misi KDH-WKDH sesuai RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 pada periode tahun 2026.
9) Belanja Bantuan Keuangan Kepada partai Politik berpedoman kepada Peraturan yang berlaku.
10) Belanja untuk kerjasama pengelolaan sampah dengan daerah lain di dalam maupun di luar Provinsi Banten berpedoman kepada Peraturan yang berlaku.
11) Belanja Tidak Terduga dianggarkan secara memadai mengantisipasi kejadian luar biasa di luar kewenangan daerah atau kondisi darurat/ mendesak di luar perencanaan, tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat atau diamanatkan peraturan perundang-undangan.
12) Belanja untuk pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) dengan Kota Tangerang Selatan sebagai tuan rumah pelaksanaan PORPROV.

13) Belanja hibah dan bantuan sosial dialokasikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah setelah pemenuhan urusan pelayanan wajib sesuai ketentuan yang berlaku. Belanja hibah tahun 2026 yang tertuang dalam struktur belanja terdiri dari belanja hibah yang berasal dari proposal masyarakat atau Lembaga, belanja transfer Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan belanja bantuan keuangan untuk partai politik.

Kebijakan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), antara lain:

1) pendanaan fungsi pendidikan
   dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan pendanaan fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi pendanaan fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.
2) pendanaan kesehatan
   dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan pendanaan Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi pendanaan kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
3) pendanaan infrastruktur
   Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) pendanaan pendidikan dan pelatihan bagi ASN
   pendanaan untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah. Alokasi pendanaan tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi.
5) Pendanaan layanan pengawasan
   Pendanaan layanan pengawasan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah, untuk kegiatan pengawasan dan peningkatan kapabilitas APIP.

Perumusan rencana belanja daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2026 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2026

No	Struktur	Realisasi			Rencana Belanja	
		Tahun 2022	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
		LKPD *Audited*	LKPD *Audited*	LKPJ	**P-RKPD**	**RKPD**
5	**BELANJA**					
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.713.826.400.703**	**3.140.481.084.493**	**3.442.519.710.653**	**3.600.041.422.248**	**3.377.808.226.008,25**
5.1.1	Belanja Pegawai	911.516.133.943	1.049.331.586.444	1.264.051.361.654	1.587.892.550.884	1.684.039.018.094,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.932.792.226012	1.689.017.973.676	1.985.092.159.781	1.854.369.353.364	1.472.056.239.499,25
5.1.5	Belanja Hibah	109.305.893.084	157.662.272.037	193.239.767.611	157.779.518.000	221.615.992.280
5.1.6	Bantuan Sosial	3.986.400.000	695.000.000	136.421.607	0	96.976.135
5.2	**BELANJA MODAL**	**965.682.851.455**	**1.250.559.871.620**	**1.164.502.443.449**	**1.345.265.214.539**	**1.168.982.671.552,75**
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**6.108.268.239**	**1.711.322.084**	**1.497.497.294**	**11.855.229.463**	**10.000.000.000**
5.3.1	Belanja tak Terduga	6.108.268.239	1.711.322.084	1.497.497.294	11.855.229.463	10.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**5,000,000.000**	**17.500.000.000**			**0**
5.4.2	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN					0
	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya					0
	JUMLAH BELANJA	**3.690.617.520.397**	**4.410.252.278.197**	**4.608.519.651.396**	**4.957.161.866.250**	**4.556.790.897.561**

3.2.2.1. Belanja Mandatori

Belanja Mandatori adalah pengeluaran atau belanja daerah yang wajib dialokasikan oleh pemerintah daerah karena telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Belanja ini bersifat *mandatory spending* atau pengeluaran yang tidak bisa dikurangi atau dihindari karena sifatnya mengikat secara hukum. Belanja Mandatori dalam RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3.7. Belanja Mandatori RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2026

No.	Mandatory Spending	Urusan	Perangkat Daerah	RKPD 2026	
				Rp	%
	Total APBD dalam RKPD 2026			**4.619.290.897.561**	
	Total Belanja dalam RKPD 2026			**4.556.790.897.561**	
1	**Belanja Pegawai (maks 30%)**			**1.684.039.018.094**	**36,96%**
	Belanja Pegawai Total			**1.625.040.597.214**	
	Transfer Khusus Daerah			**0**	
	Tunjangan Profesi Guru (TPG)			0	
	Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru			0	
2	**Belanja Pendidikan (min. 20%)**		**Total Belanja Pendidikan**	**1.071.643.852.361**	**23,52%**
		Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	740.294.838.706	
		Kebudayaan		3.519.111.504	
		Pemuda dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	98.836.957.007	
		Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.149.998.933	
		Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesbangpol (Paskibraka)	2.214.430.336	
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan)	225.628.515.875	
3	**Belanja Kesehatan (min. 15%)**		**Total Belanja Kesehatan**	**754.749.576.301**	**25,71%**
			APBD-Belanja Pegawai	**2.935.251.879.467**	
		Kesehatan	Dinas Kesehatan	754.236.283.401	
		Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas P3AP2KB (Bidang KB)	513.292.900	
4	**Belanja layanan pengawasan (min. 0,5%)**	**Belanja Pengawasan dikurangi belanja Gaji dan Tunjangan ASN**		**2.391.451.798**	**0,05%**
		Pengawasan	Inspektorat	36.528.376.068	
		Belanja Gaji dan Tunjangan melekat Inspektorat		34.136.924.270	
5	**Belanja Infrastruktur (min. 25%)**	**Total Belanja Infrastruktur**		**1.482.487.851.824**	**32,53%**
		Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:		0	
		Selisih belanja daerah dan belanja bagi hasil/transfer		4.556.790.897.561	
		Belanja Modal		1.168.989.871.553	
		Belanja pemeliharaan		91.785.011.856	
		Belanja Hibah		221.615.992.280	
		Belanja Bantuan Sosial		96.976.135	
		Belanja Bantuan Keuangan		0	
6	**Belanja Peningkatan SDM ASN (min. 0,5%)**		**Total Belanja Peningkatan SDM**	**34.654.955.354**	**0,76%**
		- Kepegawaian	BKPSDM	26.054.127.861	
		- Pendidikan dan pelatihan		2.315.953.304	

No.	Mandatory Spending	Urusan	Perangkat Daerah	RKPD 2026	
				Rp	%
		Keuangan	Bapenda	655.000.000	
		Perencanaan dan Penelitian Pengembangan	Bappelitbangda	312.080.720	
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	50.000.000	
		Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	130.000.000	
		Lingkungan Hidup	DLH	183.032.900	
		Pariwisata	Dispar	15.750.000	
		Perindustrian dan Perdagangan	Disperindag		
		Inspektorat	Inspektorat	65.132.588	
		Pemerintahan	Sekretariat DPRD	115.100.000	
		Ketahanan Pangan	DKP3	264.843.160	
		Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SDSDABMBK	535.214.000	
		Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas P3AP2KB	76.076.000	
		Tenaga Kerja	Disnaker	50.000.000	
		Pendidikan	Dindik	1.969.239.821	
		Sosial	Dinsos		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinkes	1.688.405.000	
		Administrasi Kecamatan	Kecamatan	175.000.000	
7	**Perlindungan Sosial**		**Total Belanja Perlindungan Sosial**	**45.324.498.447**	**0,99%**
		Kesehatan	Dinkes	37.284.100.000	
		Sosial	Dinsos	7.516.557.447	
		Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas P3AP2KB	99.061.000	
		Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		424.780.000	
8	**Belanja urusan kebencanaan (min. 1%)**		**Total Belanja Urusan Kebencanaan**	**263.312.500.952**	**5,78%**
		Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	BPBD	15.035.170.188	
			Dinas Pemadam Kebakaran	23.701.896.771	
		Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.671.137.625	
		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Dinas Sosial	195.000.000	
		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	6.240.000	
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas SDA,Bina Marga dan Bina Konstruksi	215.703.056.368	
9	**Belanja Riset dan Inovasi Daerah**		**Total Belanja Riset dan Inovasi Daerah**	**1.000.000.000**	**0,02%**
		Riset dan Inovasi Daerah	Bappelitbangda	1.000.000.000	
10	**Belanja Aspirasi**	**Tersebar dalam urusan**	**Tersebar dalam Perangkat Daerah**	**249.962.093.149**	**5,49%**
			Aspirasi Masyarakat	149.990.601.982	
			Pokok-pokok pikiran DPRD	99.971.491.167	

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, 2025

3.2.2.2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Daftar rincian penerima hibah dan bansos dalam RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.8. Daftar Rincian Penerima Hibah Dan Bantuan Sosial Untuk RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2026

1. Hibah Uang

NO	NAMA PEMOHON	ALAMAT LEMBAGA	KELURAHAN	KECAMATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	NILAI PERMOHONAN (Rp)	JUMLAH EVALUASI / REKOMENDASI (Rp)	JUMLAH PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	OPD PEMBINA
1	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'An	Jl. Siliwangi No. 3 Gd. Layanan Keagamaan Tangerang Selatan	Pamulang Barat	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	20.514.232.000	14.000.000.000	11.000.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2	Badan Wakaf Indonesia Kota Tangerang Selatan	Jl. Benda Timur 10, Blok F3 No. 8	Pondok Benda	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	2.295.990.000	2.187.128.000	450.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3	Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan	Islamic Center Jl. Hanjuang Raya Sektor 1.1, Bsd City	Serpong	Serpong	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	9.968.344.000	6.500.000.000	5.000.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	Majelis Ulama Indoensia Kota Tangerang Selatan	Jl. Siliwangi No. 2	Pamulang Barat	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	1.500.000.000	1.200.000.000	1.000.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
5	NPC Kota Tangsel	Jl. Cendrawasih No 2 RT 001/05	Cipayung	Ciputat	000.7.7.1/1367/DISPORA/2025	2.213.000.000	1.931.000.000	500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
6	Kormi Kota Tangsel	Jl. Raya Rawa Buntu No 19 RT 006/001	Rawa Buntu	Serpong	000.7.7.1/1649/DISPORA/2025	1.668.470.000	1.368.470.000	500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
7	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Tangerang Selatan	Jl. Maruga Raya Ruko Golden Maruga	Serua	Ciputat	000.7.7.1/1667/DISPORA/2025	1.708.944.000	1.415.838.230	400.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
8	*Komite Olahraga Nasioanal Indonesia Kota Tangerang Selatan*	*Jl. Bintaro Utama 3A*	*Pondok Aren*	*Pondok Aren*	*000.7.7.1/1700/DISPORA/2025*	*205.792.789.000*	*183.448.013.000*	*100.000.000.000*)*	*DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA*
9	Palang Merah Indonesia	Jl. Tekno Widya	Ciater	Serpong	400.7.3.1/3262/DINKES	1.683.480.000	447.520.000	447.520.000	DINAS KESEHATAN

NO	NAMA PEMOHON	ALAMAT LEMBAGA	KELURAHAN	KECAMATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	NILAI PERMOHONAN (Rp)	JUMLAH EVALUASI / REKOMENDASI (Rp)	JUMLAH PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	OPD PEMBINA
10	TP PKK Tangerang Selatan	Jl. Maruga Raya No 1	Serua	Ciputat	900.1.13.5/674/DP3P2KB/2025	1.186.700.000	1.111.700.000	1.000.000.000	DP3AP2KB
11	FKUB Kota Tangerang Selatan	Jl. Siliwangi No 03	Pamulang Barat	Pamulang	200.1.2/931/KESBANGPOL/2025	1.058.531.000	782.131.000	250.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
12	BNN Kota Tangerang Selatan	Jl. Raya Puspitek Serpong No 1	Setu	Setu	200.1.2/931/KESBANGPOL/2025	1.002.550.000	591.275.000	591.275.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
13	Yayasan Majelis Dzikrussholawat Wal Manaqib Bintang Sembilan Satu Hati Al Hasaniah	Jl. Inpres Kp. Bulak RT. 002/09	Benda Baru	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	647.775.000	302.265.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
14	Musholla Al Mubarokah	Gg. Langgar Al-Mubarokah RT 012/010	Kedaung	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	583.099.000	200.000.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
15	Yayasan Rahmat Semesta	Jl. Semanggi II No. 78 RT 004/003	Cempaka Putih	Ciputat Timur	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	405.699.750	220.369.150	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
16	Pengajian Al Hidayah	Jl. Pinang No. 5 RT 001/005	Pamulang Timur	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	426.050.000	426.050.000	200.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
17	Yayasan Syaikh At Tawwaabiin Parigi	Jl. Haji Sarmah No. 1 RT 003/007	Parigi	Pondok Aren	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	2.120.180.000	466.235.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
18	Yayasan Tahfidzul Quran Darurozak Al Haromaien	Bulak Wangi No. 3 RT 006/013	Kedaung	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	1.350.000.000	255.300.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
19	Yayasan Bina Insani Al Qomariah	Jl. KH. Dewantara Gg. Suka Damai No. 170 RT. 003/004	Sawah	Ciputat	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	240.701.000	226.624.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	NAMA PEMOHON	ALAMAT LEMBAGA	KELURAHAN	KECAMATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	NILAI PERMOHONAN (Rp)	JUMLAH EVALUASI / REKOMENDASI (Rp)	JUMLAH PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	OPD PEMBINA
20	Yayasan Lembaga Kemanusiaan Emotional Spiritual Quotient	Jl. Masjid Jami Al Latief RT. 004/002 No. 165	Kademangan	Setu	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	554.675.000	300.000.000	300.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
21	Yayasan Al Barkah An Nahari	Kp. Pondok Serut RT 02/10 No.14	Pondok Kacang Barat	Pondok Aren	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	470.025.000	369.605.000	150.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
22	Yayasan Pendidikan Al Itishaam	JL CABE IV RT 02/03	Pondok Cabe Ilir	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	813.780.000	584.180.000	300.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
23	Yayasan Pendidikan Islam Zikru Aulia	Jl. Amd Bakti Jaya Pocis 11	Setu	Setu	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	321.535.000	321.535.000	150.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
24	Mushalla An-Nur'Isyah	Jl. H.Muhari, Perum Pesona Sasmita Indah RT 003/004 No.108	Pamulang Barat	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	502.618.000	267.484.000	100.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
25	Yayasan Vihara Siripada	Perumahan Villa Melati Mas Jl. Serpong Blok B10 No.54	Jelupang	Serpong Utara	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	209.000.000	209.000.000	200.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
26	Yayasan Khazanah Dimar Cayapata	Jl. Suka Bakti II RT. 003/006	Serua Indah	Ciputat	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	410.316.000	378.816.000	150.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
27	Yayasan Bina Insan Tangerang Selatan	Jl. Lamtoro RT 02/016 No.46	Pamulang Timur	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	452.515.000	255.646.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
28	Masjid Jami Al Muminun	Jl. Mujair I RT. 002/004	Bambu Apus	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	7.500.000.000	343.242.900	300.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
29	Yayasan Annisa Taqwania Banten	Jl. AmaRTa Raya Blok X3 No. 18 Reni Jaya	Pondok Benda	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	700.000.000	420.000.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	NAMA PEMOHON	ALAMAT LEMBAGA	KELURAHAN	KECAMATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	NILAI PERMOHONAN (Rp)	JUMLAH EVALUASI / REKOMENDASI (Rp)	JUMLAH PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	OPD PEMBINA
30	Askaf Bersinergi Indonesia	Villa Pamulang Blok CH1 No.27	Pamulang	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	822.420.000	503.695.000	250.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
31	Yayasan Tahfidzul Quran Ar-Rahmani	Jl. Al-Ihsan RT. 002/007 Kp. Sawah	Sawah	Ciputat	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	303.579.000	303.579.000	300.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
32	Pondok Pesantren Al-Qur'Aniyyah	Jl. Panti Asuhan Ceger No.06 RT 03/12	Jurangmangu Timur	Pondok Aren	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	7.427.243.000	1.000.000.000	750.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
33	Yayasan Pendidikan Islam Asy-Syifa Pamulang	Jl. Akasia Gg. Musholla No. 35	Pamulang Timur	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	654.629.000	548.369.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
34	Gereja Pantekostan Di Indonesia Jemaat "Sejahtera" (GPDI Sejahtera Bintaro)	Jl. Merak Blok B14 No. 6, Pondok Jurangmangu Indah	Jurangmangu Timur	Pondok Aren	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	503.099.000	449.500.000	300.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
35	Yayasan Al Mustaqim Indonesia	Jl. Gapura Menteng No. 22 RT. 005/001	Jurangmangu Barat	Pondok Aren	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	1.680.660.000	100.000.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
36	Yayasan At-Taqwa Pamulang	Jl. Benda Timur XV Pamulang Permai II	Benda Baru	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	3.900.000.000	300.000.000	300.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
37	Yayasan Al Matiin Satu Kampungsawah	Jl. H. Nasa Samsudin RT. 001/017	Kedaung	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	1.258.786.000	810.130.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
38	Yayasan Al-Amanah Nusantara Tangerang Selatan	Jl. Sumatra RT. 001/007 Gg. H. Mualim Bakri	Jombang	Ciputat	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	676.686.000	124.190.500	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
39	Yayasan Jami Al Barokah	Jl. Ampera Poncol RT. 007/002	Babakan	Setu	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	491.783.000	89.000.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	NAMA PEMOHON	ALAMAT LEMBAGA	KELURAHAN	KECAMATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	NILAI PERMOHONAN (Rp)	JUMLAH EVALUASI / REKOMENDASI (Rp)	JUMLAH PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	OPD PEMBINA
40	Yayasan Islam Anwarul Quran	Hutama Karya RT. 003/001	Kademangan	SETU	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	3.234.779.501	749.252.281	650.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
41	Yayasan Global Baitul Akbar	Arinda Permai 2	Pondok Aren	Pondok Aren	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	317.268.000	317.268.000	300.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
42	Yayasan Pengembangan Mahasiswa Insan Cita	Jl. Puri Intan, No. 58 RT. 003/007	Pisangan	Ciputat Timur	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	825.980.830	400.000.000	250.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
43	Yayasan Pembangunan Masyarakat Sejahtera	Jl. Masjid Darussalam No.40 RT 009/004	Kedaung	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	709.002.500	302.600.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
44	Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Istiqomah	Jl. Inpres Kp.Bulak RT 005/009	Benda Baru	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	4.991.000.000	936.099.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
45	Yayasan Jamiatul Mu'Minin	Jl. Jombang Raya G H Liun RT 002/001	Perigi Lama	Pondok Aren	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	248.950.000	200.550.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
46	Forum Silaturahim Pondok Pesantren	Gd Kelembagaan Pamulang	Pamulang	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	1.488.000.000	438.000.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
47	Yayasan Daarul Hidayah	Jl. Jurang Mangu Barat	Pondok Aren	Pondok Aren	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	311.800.000	300.000.000	300.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
48	Mushola Al Ikhlas Cilenggang	Jl. Cilenggang	Cilenggang	Serpong	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	181.585.000	150.000.000	125.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
49	Yayasan As Sakiinah Pondok Prima	Jl Anggrek.	Pondok Kacang Timur	Pondok Aren	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	850.144.000	500.000.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
50	Yayasan Masjid Al Muawwanah Pondok Pucung	Jl. Jombang Raya G H Liun RT 002/001	Pondok Pucung	Pondok Aren	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	2.648.381.929	692.870.473	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	NAMA PEMOHON	ALAMAT LEMBAGA	KELURAHAN	KECAMATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	NILAI PERMOHONAN (Rp)	JUMLAH EVALUASI / REKOMENDASI (Rp)	JUMLAH PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	OPD PEMBINA
51	Masjid Al Aman Polres Tangsel	Jl. Taman Kintamani	Ciater	Serpong	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	339.936.602	250.000.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
52	Masjid Raudhatul Hakim Vila Serpong	Jl. Kencana Viii Vila Serpong	Jelupang	Serpong Utara	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	5.000.000.000	2.000.000.000	250.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
53	Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren An-Anamiyah	Jl Aren Ii RT 08/03 No 37	Pondok Betung	Pondok Aren	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	1.012.509.000	400.976.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
54	DKM Jami Nurul Iman	Jl Masjid Darussalam RT 07/04	Kedaung	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	805.220.000	336.925.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
55	Yayasan Nurudaril Ibtida	Kp Kademangan RT 06/03	Kademangan	Setu	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	3.379.520.000	974.657.344	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
56	Yayasan Pendidikan Islam Al Ghulaam	Jl H Sarmah RT 03 /07	Pondok Kacang Timur	Pondok Aren	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	202.726.500	196.326.500	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
57	Ikatan Pendidik Al-Quran Kota Tangerang Selatan	Jl Cendrawasih 1 RT 005/002	Sawah Baru	Ciputat	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	651.700.000	335.500.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
58	Pondok Pesantren Darul Izzah	Jl Sumatera No 125 RT 02/06	Jombang	Ciputat	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	1.080.200.000	211.190.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
59	Gerakan Pejuang Shubuh Tangerang Selatan	Jl Benda Barat Xv Pamulai Permai 2	Pondok Benda	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	553.900.000	192.000.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
60	Dewan Dakwah Islamiyah Kota Tangsel	Jl Witana Harja Blok B Kav 92	Pamulang Barat	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	649.400.000	641.400.000	250.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
61	Yayasan Saham Kebahagiaan Akhirat	Gd Ki Ageng Giring Iii Building Kp Sari Mulya No 101 RT 002/001	Setu	Setu	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	358.680.274	358.680.274	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	NAMA PEMOHON	ALAMAT LEMBAGA	KELURAHAN	KECAMATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	NILAI PERMOHONAN (Rp)	JUMLAH EVALUASI / REKOMENDASI (Rp)	JUMLAH PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	OPD PEMBINA
62	Perkumpulan Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah	Jl Alhidayah Tpu Parakan RT 02/09	Pondok Benda	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	226.140.000	146.190.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
63	Yayasan Al-Iftitah	Pondok Benda Indah RT 008/015	Pondok Benda	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	60.727.249	60.727.249	60.727.249	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
64	Musholla Al-Mukarromah	Jl. Pinus RT. 001/022	Pamulang Timur	Pamulang	000.4.3.2/1651/SETDA/2026	219.500.000	219.500.000	75.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
65	Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Darussalam	Jl. Otista 36 RT. 001/010 Cimanggis	Ciputat	Ciputat	000.4.3.2/1651/SETDA/2027	1.797.838.000	815.233.000	200.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
66	Yayasan Rumah Anak Pancasila	Jl Jombang Raya No 54 RT 04/04	Pondok Jaya	Pondok Aren	200.1.4.11/637.3/KESBANGPOL/2025	515.650.000	250.000.000	75.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
67	Perkumpulan Satuan Tugas Banten Kesti Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir	Cilenggang RT 005/002	Cilenggang	Serpong	200.1.4.11/637.2/KESBANGPOL/2025	300.925.000	80.000.000	75.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
68	Komando Distrik Militer 0506 Tangerang	Tangerang	Tangerang	Tangerang	200.1.4.11/919-KESBANGPOL/2025	2.858.277.000	658.277.000	500.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
69	Generasi Anti Narkotika Nasional (Gann)	Gria Asri BSD Blok G1 / 09 Jl Ke Dongdong 1 No 9 RT 055/007	Jelupang	Serpong Utara	200.1.4.11/637.1/KESBANGPOL/2025	350.805.000	102.700.000	75.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
70	KPU Tangsel	Jl. Raya Serpong No 1	Setu	Setu	200.1.4.11/922-KESBANGPOL/2025	3.478.882.000	1.449.816.000	1.000.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	NAMA PEMOHON	ALAMAT LEMBAGA	KELURAHAN	KECAMATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	NILAI PERMOHONAN (Rp)	JUMLAH EVALUASI / REKOMENDASI (Rp)	JUMLAH PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	OPD PEMBINA
71	Bintang Muda Indonesia	Jl. H Sarmah No 41	Parigi Lama	Pondok Aren	200.1.4.11/510.POLDAGRI/2025	344.525.000	90.000.000	75.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
72	Pengacara Dan Jawara Bela Umat	Jl.KH. Wahid Hasyim Gg Batako No 35B	Pondok Aren	Pondok Aren	200.1.5.2/1335/POLDAGRI/2025	679.206.000	90.000.000	75.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
73	LBH Matahati	Jl Gria Hijau Raya No 51	Paku Alam	Serpong Utara	200.1.5.2/1335/POLDAGRI/2025	374.406.000	120.000.000	75.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
74	Brigade Manguni Indonesia	Jl. Sumbawa Raya Blok N-6 No 12 RT 003/006	Pamulang Barat	Pamulang	200.1.5.2/1335/POLDAGRI/2025	706.150.000	100.000.000	75.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
75	Perkumpulan Pemuda Peduli Industri Pembela Negara	Kp Jombang RT 003/004	Lengkong Gudang Timur	Serpong	200.1.5.2/1335/POLDAGRI/2025	270.197.000	80.000.000	75.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
76	Keluarga Besar Puta Putri Polri	Jl. Kesatriaan Polri Brien C No 132 RT 002/012	Ciputat	Ciputat	200.1.4.11/506/KESBANGPOL/2025	890.000.000	100.000.000	75.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
77	Madrasah Ibtidaiyah Sunanul Husna	Jl. Menjangan Iv RT 01/04	Pondok Ranji	Ciputat Timur	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	612.148.000	500.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
78	MI Annajiyah	Jl. PLN Nomor 80 RT 002/001	Pondok Karya	Pondok Aren	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	318.850.000	300.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
79	MI Mathla'Ul Anwar Kademangan	Jl. Masjid Jami Al Latif Kademangan	Kademangan	Setu	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	54.260.000	50.000.000	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
80	DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam	Jl. Makam Pahlawan Bahagia Pondok Aren	Parigi	Pondok Aren	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	593.120.000	500.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA PEMOHON	ALAMAT LEMBAGA	KELURAHAN	KECAMATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	NILAI PERMOHONAN (Rp)	JUMLAH EVALUASI / REKOMENDASI (Rp)	JUMLAH PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	OPD PEMBINA
81	Madrasah Ibtidaiyah Unwaanunnajah	Jl.Komplek Pondok Pucung Indah II RT. 006/002 No 45	Pondok Pucung	Pondok Aren	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	937.100.000	720.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
82	Madrasah Ibtidaiyah Yaspita	Jl. Raya Serpong Km. 8 No. 22	Pondok Jagung	Serpong Utara	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	505.220.000	500.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
83	MI Al – Mursyidiyyah	Jl. Raya Siliwangi Gang Anggrek RT 003 RW 018	Pondok Benda	Pamulang	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	616.766.400	500.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
84	Yayasan Pendidikan Islam Ishlahuddiniyyah Pondok Aren	Jl. Panti Asuhan RT 003/011 Kp Ceger	Jurangmangu Barat	Pondok Aren	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	426.000.000	360.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
85	Madrasah Ibtidaiyah Muslim Asia Afrika	Jl. Srikandi RT 002/004 No.55	Pondok Benda	Pamulang	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	305.000.000	250.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
86	Yayasan Pendidikan Islam Madrasah Ibtidayah Raudhatul Muta'Alimin	Jl. Kelurahan Lengkong Wetan Ciater II RT 001/008	Lengkong Wetan	Serpong	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	220.800.000	200.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
87	Yayasan Pendidikan Raudlatul Hikmah	Jl. Arjuna Parakan RT 001/08	Pondok Benda	Pamulang	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	500.000.000	500.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
88	Yayasan Bahrul Ulum Tangerang Selatan Madrasah Ibtidaiyah Al Wardah	Jl. Batas Cabe VI	Pondok Cabe Ilir	Pamulang	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	222.000.000	200.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
89	Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman	Jl. Cikini Dalam RT 003/01	Jurangmangu Barat	Pondok Aren	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	717.195.000	700.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA PEMOHON	ALAMAT LEMBAGA	KELURAHAN	KECAMATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	NILAI PERMOHONAN (Rp)	JUMLAH EVALUASI / REKOMENDASI (Rp)	JUMLAH PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	OPD PEMBINA
90	Madrasah Ibtidaiyah Assa'Adatuddarain 1	Jl. Surya Kencana No.002	Pamulang Barat	Pamulang	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	570.714.000	500.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
91	MI Tarbiyah Islamiyah	Jl. Jombang Raya No.02 RT02/03	Pondok Aren	Pondok Aren	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	774.334.704	720.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
92	Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah	Jl. Panda Raya No.50 RT 02/06	Pondok Ranji	Ciputat Timur	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	644.179.500	500.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
93	Yayasan Pendidikan Islam Nur Asy-Syafiiyah Rempoa Mi Nurul Islam	Jl. Pahlawan No.18 RT 01/07	Rempoa	Ciputat Timur	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	750.000.000	720.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
94	Yayasan Darul Rohimah Nusantara	Jl. Arya Putra RT 01/04 No.100	Serua Indah	Ciputat	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	381.000.000	360.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
95	Yayasan Mahesa Al-Fachry Ihsan	Jl. Musyawarah RT 03/03	Pondok Benda	Pamulang	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	1.604.618.000	720.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
96	Mi Nurul Falah	Jl. Jombang Raya RT 02/02	Pondok Pucung	Pondok Aren	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	611.270.000	500.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
97	Yayasan Perguruan Islam Nurul Kassyaf	Jl. Wisma Tajur RT. 002/010	Pondok Kacang Barat	Pondok Aren	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	1.324.122.000	720.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
98	Pondok Pesantren Tahfizh Al Quran Bait Qurany	Jl. Legoso Raya Gg. Kubur RT. 003/001	Pisangan	Ciputat Timur	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	1.800.000.000	720.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
99	Mi Al Huda Sakti Ciputat	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1	Ciputat	Ciputat	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	723.170.000	720.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
100	Persatuan Guru Madrasah Indonesia (Pgmi)	Jl. Ciater Barat No. 11 RT. 005/002	Ciater	Serpong	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	341.455.000	300.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA PEMOHON	ALAMAT LEMBAGA	KELURAHAN	KECAMATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	NILAI PERMOHONAN (Rp)	JUMLAH EVALUASI / REKOMENDASI (Rp)	JUMLAH PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	OPD PEMBINA
101	YPI Al-Fajar	Jl. Aria Putra No. 102	Kedaung	Pamulang	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	230.000.000	200.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
102	Yayasan Ikhwanul Qurro Mulia	Kp. Pondok Jati Selatan RT 06/013	Jurangmangu Barat	Pondok Aren	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	309.244.000	300.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
103	Yayasan Nurul Ikhlas Ciputat	Jl. Aria Putra Gg. Swadaya RT. 001/010	Kedaung	Pamulang	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	4.071.500.000	720.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
104	Yayasan Putra Putri Munasharoh Pondok Cabe	Jl. Cabe V No. 23	Pondok Cabe Ilir	Pamulang	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	314.527.500	300.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
105	Yayasan Unwaanul Falah Imam Firdaus	Jl. H. Cari RT 002/001 No. 32	Pondok Kacang Barat	Pondok Aren	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	92.200.000	92.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
106	Yayasan Insan Cahaya Mulia Tangerang	Jl. Bulak Wangi Ii No. 12 RT. 008/013	Kedaung	Pamulang	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	226.763.000	200.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
107	Yayasan Nurul Baitul Muttaqin	Jl. Serpong Priyang RT. 001/001	Pondok Jagung	Serpong Utara	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	151.142.500	150.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
108	Yayasan Masjid Al Hidayah Pamulang Permai I SD Islam Al Hidayah Pamulang	Pamulang Permai I Blok A35-A 50	Pamulang Barat	Pamulang	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	200.000.000	200.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
109	Yayasan Paud Al Fatthanah	Jl. Kebantenan RT. 005/008	Pondok Aren	Pondok Aren	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	200.000.000	200.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
110	Yayasan Nurul Falah (MI Nurul Falah) Sawah Baru	Jl. Kecubung I RT. 005/002	Sawah Baru	Ciputat	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	333.500.000	300.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
111	Yayasan Sabila Faradisa (SMP Islam Faradisa)	Jl. Gurame Iii RT. 001/001	Bambu Apus	Pamulang	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	211.660.000	200.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA PEMOHON	ALAMAT LEMBAGA	KELURAHAN	KECAMATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	NILAI PERMOHONAN (Rp)	JUMLAH EVALUASI / REKOMENDASI (Rp)	JUMLAH PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	OPD PEMBINA
112	Yayasan Nawa Dinamika Sejahtera	Jl. Kayu Manis 2	Pondok Cabe Udik	Pamulang	000.7.7.1/4580/Dikbud/2025	22.794.000.000	720.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
113	Yayasan Karya Anugrah Dharma Wanita Tangerang Selatan	JL Maruga Raya	Serua	Pemulang	000.7.7.1/4963/DIKBUD/2025	1.798.553.000	720.000.000	720.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
114	Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak Kanak (GOPTKI) Dewan Pimpinan Cabang Kota Tangerang Selatan	JL Maruga Raya No.1	Serua	Ciputat	000.7.7.1/4963/DIKBUD/2025	683.414.000	680.000.000	680.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
115	Yayasan Zmart Edu Indonesia	Jl. Galur- Jl Pisangan Raya No 16	Pisangan	Ciputat Timur	000.7.7.1/4963/DIKBUD/2025	538.125.000	500.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
116	Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Al Hasanah	Jl. Jombang Raya RT 002/006	Pondok Kacang Timur	Pondok Aren	000.7.7.1/4963/DIKBUD/2025	361.440.000	360.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
117	DPD Forum PAUD Tangerang Selatan	Pendopo Herzuno Jl Swadaya No 45	Cipayung	Ciputat	000.7.7.1/4963/DIKBUD/2025	203.650.000	200.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
118	HIMPAUDI Kota Tangerang Selatan	Jl Roda Hias Ranca Indah Serpong No 13	Serpong	SERPONG	000.7.7.1/4963/DIKBUD/2025	300.000.000	250.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
119	Yayasan QOD Kafa Indonesia	Jl Moh.Ganda Sasmita No 5 RT 004/009	Serua	Ciputat	000.7.7.1/4963/DIKBUD/2025	948.517.600	720.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
120	MIS Al Khaeriyah	Kp Koceak RT 06/02	Kranggan	SETU	000.7.7.1/4963/DIKBUD/2025	300.022.000	300.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA PEMOHON	ALAMAT LEMBAGA	KELURAHAN	KECAMATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	NILAI PERMOHONAN (Rp)	JUMLAH EVALUASI / REKOMENDASI (Rp)	JUMLAH PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	OPD PEMBINA
121	MI Jam'iyyatul Khair	Jl. Wr Supratman No 35	Cempaka Putih	CIPUTAT TIMUR	000.7.7.1/4963/DIKBUD/2025	316.353.000	250.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
122	MI Raudhatul Athfal	Kp Smapal Kp Babakan RT 001/002	Lengkong Gudang	Serpong	000.7.7.1/4963/DIKBUD/2025	360.000.000	200.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
123	PPTI Kota Tangerang Selatan	Jl. Raya Puspitek No1	Serpong	Serpong	400.7.8.1/3245/DINKES	590.114.000	108.960.000	75.000.000	DINAS KESEHATAN
124	Forum Kader Posyandu Kota Tangerang Selatan	Jl. Makmur RT 005/005	Cipayung	Ciputat	400.7.1/3408/DINKES	307.529.000	54.750.000	54.750.000	DINAS KESEHATAN
125	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Jl. KH Ahmad Dahlan	Cirendeu	Ciputat	000.4.3.2/0746-BGN/2025	2.887.887.000	2.887.887.000	200.000.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
126	Komando Distrik Militer 0506 Tangerang	Jl Taman Makam Pahlawan Taruna No 144 RT 001/009	Sukasari	Tangerang	000.4.3.2/0746-BGN/2025	3.688.958.000	3.688.958.000	2.000.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
127	Komando Resort Militer 052/Wijayakrama	Jl. Boelevard Diponogoro No 108 Kelapa Dua Kab Tangerang	Bencongan	Kelapa Dua	000.4.3.2/0746-BGN/2025	60.444.990.000	63.446.970.000	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
128	Yayasan Menata Rumah Kita Bersama	Jl. Masjid Jami Al Latif No 1	Kademangan	Setu	000.4.6.421/DPK/2025	1.179.875.000	802.646.000	500.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
129	Yayasan Marcilea Peculi Sosial	Jl. H Dewi No 61	Benda Baru	Pamulang	400.9.7/670/DINSOS/2025	188.325.000	40.590.000	40.590.000	DINAS SOSIAL
TOTAL						**448.719.408.339**	**330.557.389.901**	**139.244.862.249**	

*)sesuai dengan kondisi keuangan daerah

2. **Hibah Barang**

NO	NAMA PEMOHON	ALAMAT LEMBAGA	KELURAHAN	KECAMATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	NILAI PERMOHONAN (Rp)	JUMLAH EVALUASI / REKOMENDASI (Rp)	JUMLAH PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	OPD PEMBINA
1	Palang Merah Indonesia	Jl. Cendekia Sektor II	Ciater	Serpong	400.7.3.1/3262/DINKES	7.222.990.261	552.449.981	552.449.981	DINAS KESEHATAN
2	NPCI Kota Tangerang Selatan	Jl Cendrawasih No 2 Rt 001/05	Ciputat	Ciputat	000.7.7.1/1367/DISPORA/2025	342.000.000	332.500.000	150.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Total						**7.564.990.261**	**884.949.981**	**702.449.981**	

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertangung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pembentukan dana abadi daerah, pemberian pinjaman daerah.

Adapun rencana pembiayaan daerah periode tahun 2026 disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.9. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2022 s.d 2026

No	Struktur	Realisasi			Proyeksi Pembiayaan	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		LKPD *Audited*	LKPD *Audited*	LKPJ	P-RKPD	RKPD
6	**PEMBIAYAAN**					
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**473.766.290.893**	**523.829.325.526**	**220.347.491.299**	**110.298.532.744**	**277.454.073.788**
6.1.1	Penggunaan SILPA	473.766.290.893	523.829.325.526	220.347.491.299	110.298.532.744	277.454.073.788
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**9.999.998.915**	**10.000.000.000**	**0,00**	**0**	**62.500.000.000**
6.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.999.998.915	10.000.000.000	0,00	0	62.500.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	**453.766.291.978**	**513.829.325.526**	**220.347.491.299**	**110.298.532.744**	**214.954.073.788**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**523.801.065.526**	**220.347.376.299**		0	0

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan periode 2025–2030, serta berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. RKPD Tahun 2026 juga merupakan penjabaran tahunan dari dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029, yang mencerminkan kesinambungan dan konsistensi dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah.

Adapun visi pembangunan daerah yang menjadi arah kebijakan dalam RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 adalah: **"Tangerang Selatan Unggul, Inklusif, Inovatif, Kolaboratif Menuju Kota Lestari"**. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Berdaya Saing Global dan Sejahtera;
2. Misi 2 Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi;
3. Misi 3 Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas;
4. Misi 4 Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif dan Berkelanjutan.

Penjabaran visi dan misi pembangunan ke dalam tujuan dan sasaran daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 disajikan secara sistematis pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun	
					2025	2026
Misi 1. Meningkatkan Kualitas SDM yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera	**Terwujudnya SDM yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera**		**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**84,42-84,68**	**84,54-84,82**
		S1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	12,04	12,19
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,12	15,35
			Kemampuan Literasi SD	Skor	69,67	72,17
			Kemampuan Literasi SMP	Skor	82,38	83,48
			Kemampuan Numerasi SD	Skor	60,2	63,1
			Kemampuan Numerasi SMP	Skor	71,11	72,61
		S2. Meningkatnya derajat kesehatan pada seluruh siklus kehidupan untuk semua	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,21	76,65

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun	
					2025	2026
		S3. Terwujudnya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial	Tingkat Kemiskinan	%	1,91-2,25	1,84-2,10
			Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	58,91	59,15
		S4. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	65,7	65,97
			Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,174	0,172
			Indeks Perlindungan Anak	Indeks	73,05	73,1
		S5. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55,96	56
		S6. Meningkatnya literasi masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan digital	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	88,49	90,59
Misi 2. Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi	**T2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi**		**Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)**	**%**	**5,40-6,31**	**5,60-6,45**
			PDRB (ADHB) Per Kapita	**Juta Rp**	**86,03-87,82**	**91,59-95,99**
			Kontribusi PDRB terhadap Provinsi Banten	**%**	**13,01-13,08**	**13,10-13,15**
			Rasio Gini	**Indeks**	**0,353-0,380**	**0,345-0,353**
			Tingkat Pengangguran Terbuka	**%**	**4,76-5,65**	**4,60-5,42**
		S1. Berkembangnya potensi unggulan daerah terutama sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global	Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa	%	69,6	69,7
			Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,11	3,19
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	11,64	11,71
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	52,4	52,8
			Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,15	2,68
		S2. Meningkatnya peran serta dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing dan inklusif berbasis penguatan IPTEK dan inovasi	Produktivitas tenaga kerja per total output (PDRB ADHK)	Juta Rp	127,96-129,10	135,12-137,42
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	60,5	61,46
		S3. Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHB)	%	44	44,8
			Nilai investasi (PMDN dan PMA)	Triliun Rp	8,7	9,39
Misi 3. Mewujudkan Reformasi	**T3. Terwujudnya reformasi**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**86,5**	**87,5**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun	
					2025	2026
Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas	**birokrasi dan tata kelola yang profesional, inovatif dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan**	S1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif, efisien, dan inklusif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,25	4,26
		S2. Terwujudnya pengarusutamaan transformasi digital pada sektor-sektor strategis	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	49,87	49,92
			Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Indeks	99	99
			Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	66,36	67,09
		S3. Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring, akuntabel, transparan dan efisien	Nilai SAKIP	Nilai	70	72
			Jumlah kerja sama antar Pemerintah Daerah	angka	5	6
			Rasio Pajak terhadap PDRB (ADHB)	%	1,92	1,98
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP
			Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2	2,1
		S4. Meningkatnya kualitas regulasi yang adaptif dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99,3	99,34
		S5. Meningkatnya profesionalisme ASN yang kompeten, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan prima	Indeks Sistem Merit	Indeks	330	334
			Indeks BerAkhlak	Indeks	80,5	81
			Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80	81
		S6. Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	77	78
		S7. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi daerah	Angka	52	54
			Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	3,29	3,29
			Persentase kebijakan berbasis bukti	%	50	51
Misi 4. Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif Dan Berkelanjutan	**T4. Terwujudnya Kota Layak Huni yang berketahanan, lestari dan inklusif**		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**Indeks**	**48.23*)**	**48,52**
			Indeks Kota Layak Huni	**Indeks**	**70,04**	**70,05**
			Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	**%**	**18,45**	**19,02**
		S1 Meningkatnya ketahanan pangan daerah yang merata dan berkelanjutan	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU)	%	2,96	1,35
		S2. Menurunnya potensi risiko bencana yang	Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,2	62,59

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun	
					2025	2026
		berbasis pengurangan dampak dan penguatan ketangguhan masyarakat				
		S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan dan layak huni	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	71	71,2
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	34,93	35,43
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	33,73	33,8
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	97	97
			Proporsi Rumah Tangga (RT)dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	70	70
		S4. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan yang andil, inklusif, dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8,3	8,31
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (akses aman)	%	21	22
			Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	%	97	97,5
			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	16	18,7
		S5. Menguatnya keterikatan sosial antar warga serta kehidupan bermasyarakat yang berbudaya, demokratis dan menjunjung tinggi HAM berlandaskan Pancasila	Indeks Harmoni	Indeks	7,4	7,45
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	53,1	54,1
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	77,5	78
			Indeks Demokrasi	Indeks	86,5	87
			Indeks Rasa Aman	Angka	73,7	74,21

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Misi 1 RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahap I 2026

Arah Kebijakan	Tahap I-2026
Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan yang inklusif dan terintegrasi dengan dunia kerja	Pemetaan kebutuhan kompetensi peserta didik
	Reformasi kurikulum pendidikan dasar yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
	Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
	Peningkatan akses layanan pendidikan, terutama untuk kelompok rentan dan disablitas, melalui pemberian bantuan biaya pendidikan inklusif (BOSDA, Bantuan Biaya Personil) mulai dari jenjang PAUD hingga SMP
	Penyediaan prasarana dan sarana sekolah sesuai kajian kebutuhan secara berjenjang
Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan berbasis digital dan mendukung gaya hidup sehat perkotaan	Peningkatan akses layanan dasar melalui perluasan cakupan UHC hingga 100% secara bertahap dan layanan ngider sehat premium
	Peningkatan gizi anak untuk penurunan stunting
	Revitalisasi layanan posyandu untuk ibu, anak dan lansia
	Revitalisasi layanan puskesmas, terutama untuk layanan kesehatan tradisional dan kesehatan mental
	Peningkatan kualitas kampanye PHBS di sekolah dan lingkungan permukiman
	Pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas yang berkompeten
Memperkuat sistem perlindungan sosial yang terintegrasi, adaptif siklus hidup, dan berbasis data satu pintu	Pemutakhiran data keluarga rentan lebih presisi, terpadu dan berbasis spasial
	Perluasan cakupan jaminan sosial dasar yang inklusif dan terpadu (contoh: integrasi bantuan tunai, bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, dan bantuan sembako) secara bertahap
	Layanan bansos dan perlindungan sosial berbasis satu data yang menjangkau seluruh inividu sasaran
	Pendampingan penerima sasaran yang melibatkan kader sosial berbasis satuan kewilayahan (contoh: satu RW satu Kader Sosial)
Mendorong pemberdayaan perempuan, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas melalui pelatihan, kewirausahaan dan partisipasi aktif dalam pembangunan	Penyusunan basis data kebutuhan kelompok inklusif (perempuan, anak, lansia, pemuda dan disabiltas)
	Fasilitasi komunitas inklusif (Forum anak, kelompok pemuda, forum lansia, forum disabilitas dan kebutuhan khusus)
	Pelatihan vokasi dasar bagi perempuan, pemuda dan lansia
	Pemenuhan hak dasar kelompok inklusif termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Tabel 4.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Misi 2 RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahap I 2026

Arah Kebijakan	Tahap I -2026
Transformasi UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif melalui digitalisasi dan integrasi rantai nilai industri	Pemetaan sektor unggulan berbasis wilayah (teknologi, jasa, ekonomi kreatif, pariwisata perkotaan)
	Pelatihan dasar kewirausahaan untuk UMKM dan pelaku ekonomi kreatif
	Revitalisasi koperasi tradisional menjadi koperasi digital
	Fasilitasi perizinan usaha mikro kecil berbasis OSS (Online Single Submission)
Memperkuat daya saing tenaga kerja dengan upskilling dan re-skilling vokasi adaptif, sertifikasi berbasis potensi daerah dan pemagangan produktif	Pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri kreatif
Memperluas peluang investasi inklusif melalui kawasan tematik serta digitalisasi platform promosi dan perijinan	Promosi digital produk lokal melalui platform pemerintah
	Updating Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) Tahun 2026–2030
	Digitalisasi database potensi investasi dan profil IKM/UMKM unggulan
	Pembentukan Tim Percepatan Investasi Daerah lintas OPD
	Pelatihan OSS-RBA & perizinan elektronik bagi pelaku usaha dan petugas daerah
Meningkatkan daya saing pariwisata perkotaan yang terintegrasi dengan ekonomi berbasis komunitas sebagai motor pertumbuhan daerah	Pengembangan destinasi wisata berbasis budaya lokal dan ekonomi komunitas

Tabel 4.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Misi 3 RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahap I 2026

Arah Kebijakan	Tahap I -2026
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM ASN yang responsif, adaptif, dan berbasis kompetensi	Audit kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dan analisis beban kerja ASN
	Peningkatan literasi digital ASN melalui pelatihan teknis
	Pembentukan Forum Kolaborasi Pemerintah–Masyarakat-Akademisi
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas berbasis digital dan terintegrasi	Penerapan roadmap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan smart governance
	Pengembangan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah termasuk transaksi keuangan
Memperkuat pelayanan publik yang partisipatif dan terbuka, berbasis data inovasi, digitalisasi dan standar mutu layanan.	Digitalisasi terpadu layanan dasar (perizinan, kependudukan, pengaduan)
	Penyederhanaan proses bisnis layanan publik

Tabel 4.5. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Misi 4 RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahap I 2026

Arah Kebijafian	Tahap I -2026
Meningkatkan kualitas infrastruktur publik (transportasi, drainase, air bersih, sanitasi) yang inklusif, terintegrasi dan ramah lingkungan	Monev infrastruktur dasar (jalan, transportasi publik, saluran, RTH, air bersih, sanitasi) berbasis inklusi dan kerentanan (rawan kemacetan, rawan banjir, rawan air)
	Penataan perkotaan dan kualitas infrastruktur dasar berdasarkan hasil monev secara bertahap
Menata dan mengembangkan sistem permukiman yang layak, terjangkau, inklusif dan terintegrasi dengan transportasi publik, sarana dan prasarana perkotaan (seperti: air minum, air limbah, ruang hijau publik)	Penyediaan bantuan bedah rumah tidak layak huni dan Rehabilitasi kawasan kumuh secara bertahap dengan pendekatan inklusif
	Peningkatan integrasi hunian dengan akses air bersih, sanitasi, jaringan jalan lingkungan dan drainase serta penerangan
Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan dan ketahanan daerah terhadap pangan, bencana dan perubahan iklim melalui edukasi, inovasi, dan pendekatan partisipatif	Updating Peta Risiko Bencana dan Rencana Kontinjensi Wilayah
	Penguatan ketahanan pangan lokal melalui pelatihan urban farming skala RT/ RW Mantap
Meningkatkan ketahanan sosial, budaya dan harmoni masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan pendidikan	Pembentukan Forum Harmoni Sosial dan Forum Ketahanan Komunitas
	Pemetaan kerentanan sosial dan kapasitas komunitas (RT/RW)

4.2. Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2026

Perencanaan pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2026 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, dan RKPD Banten Tahun 2026, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah.

1.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan; pemerataan ekonomi, dan
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP 2026, serta memastikan kesinambungan antara kebijakan pusat dan daerah, maka rumusan prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 juga diarahkan untuk selaras dengan Program Prioritas, khususnya program-program strategis yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Beberapa program prioritas nasional yang menjadi perhatian utama dan turut menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan yaitu:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanaan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karateristik-mandiri lainnya.
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.

Program-program tersebut akan diimplementasikan secara sinergis melalui perangkat daerah terkait, serta dituangkan ke dalam prioritas dan sasaran pembangunan Kota Tangerang Selatan dalam RKPD Tahun 2026, guna mewujudkan visi daerah menuju kota yang unggul, inklusif, inovatif, kolaboratif, dan lestari.

1.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2026

Selain mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan beberapa program prioritas nasional, penyusunan Prioritas Pembangunan dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten sebagai wujud sinergi vertikal antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2026 tersebut meliputi:

1. Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh;
2. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, Dan Tidak Diskriminatif;
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana.

Sebagai bagian dari wilayah strategis di Provinsi Banten dan pusat pertumbuhan ekonomi, Kota Tangerang Selatan menyesuaikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2026 dengan mengintegrasikan visi pembangunan daerah ke dalam kerangka pembangunan provinsi. Penyesuaian ini dilakukan untuk memperkuat peran Kota Tangerang Selatan sebagai simpul pertumbuhan wilayah Jabodetabek, sekaligus memastikan tercapainya pembangunan yang selaras, terintegrasi, dan berkelanjutan.

1.2.3. Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah yang memiliki karakteristik penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perumusan isu strategis Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 disusun berdasarkan gambaran umum hasil evaluasi pelaksanaan dan permasalahan pembangunan Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Bab II, serta hasil penelaahan terhadap kebijakan strategis nasional dan provinsi yang telah diuraikan pada Bab 4.

Dari permasalahan pembangunan yang sudah dijelaskan pada Bab II, maka dirumuskan isu-isu strategis daerah Kota Tangerang Selatan yang akan menjadi prioritas pada Tahun 2026 adalah:

Aspek Sumber Daya Manusia

1. ***Kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing global***

   Pembangunan SDM Kota Tangerang Selatan menunjukkan capaian positif, tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2024 sebesar 84,16, yang termasuk tinggi secara nasional. Namun, terdapat beberapa tantangan mendasar yang perlu diperhatikan untuk menjamin keberlanjutan kualitas SDM dan peningkatan daya saing global:

   a. Kualitas pendidikan dasar belum merata. Skor kemampuan literasi dan numerasi jenjang SD masih rendah (67,17 dan 57,3)

dibandingkan SMP (81,28 dan 69,61), menunjukkan perlunya peningkatan mutu pendidikan dasar dan intervensi sejak usia dini.
b. Rata-rata lama sekolah (11,86 tahun) belum mencapai harapan lama sekolah (14,7 tahun), mengindikasikan masih adanya potensi putus sekolah atau keterbatasan akses ke jenjang pendidikan tinggi.
c. Indeks Pembangunan Pemuda (55,86) menunjukkan masih terbatasnya partisipasi dan pemberdayaan generasi muda dalam pembangunan.
d. Indeks Pembangunan Keluarga (65,65) dan Indeks Ketimpangan Gender (0,176) menandakan pentingnya penguatan institusi keluarga dan pemberdayaan perempuan sebagai fondasi pembangunan SDM.
e. Indeks Masyarakat Digital Indonesia masih rendah (49,82), mencerminkan masih terbatasnya literasi digital yang esensial dalam menghadapi ekonomi digital dan transformasi teknologi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah intervensi strategis dan lintas sektor yang mencakup perbaikan mutu pendidikan, pemberdayaan pemuda, peningkatan ketahanan keluarga, perluasan akses teknologi informasi, serta penguatan layanan kesehatan.

2. Perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran

Tingkat kemiskinan Kota Tangerang Selatan tahun 2024 tercatat rendah, yaitu sebesar 2,36%, menunjukkan keberhasilan dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi. Namun, sejumlah indikator menunjukkan bahwa perlindungan sosial belum sepenuhnya adaptif dan menjangkau kelompok rentan secara efektif, antara lain:

a. Kedalaman dan keparahan kemiskinan masih ada.
   Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,27 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,05 menunjukkan bahwa sebagian penduduk miskin hidup dalam kondisi sangat rentan dan memerlukan intervensi yang lebih intensif dan berkelanjutan.
b. Ketahanan keluarga belum optimal.
   Indeks Pembangunan Keluarga yang baru mencapai skor 65,65 menunjukkan perlunya penguatan kapasitas keluarga dalam fungsi pengasuhan, perlindungan sosial, dan ketahanan ekonomi.
c. Ketimpangan gender masih terjadi.
   Nilai Indeks Ketimpangan Gender sebesar 0,176 menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan dalam mengakses sumber daya, layanan publik, dan kesempatan ekonomi, sehingga berisiko lebih tinggi terhadap kemiskinan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan antara lain:

a. Pemutakhiran dan integrasi data perlindungan sosial (DTKS dan data sektoral lainnya);
b. Pengembangan skema perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim;
c. Penguatan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dan rentan berbasis kewirausahaan dan pelatihan keterampilan;
d. Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam seluruh program sosial;
e. Peningkatan aksesibilitas layanan dasar dan sosial bagi kelompok rentan.

Aspek Ekonomi

1. ***Penguatan daya saing dan peningkatan produktivitas UMKM dan sektor ekonomi kreatif berbasis riset dan inovasi***

   Kinerja ekonomi Kota Tangerang Selatan menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% dan PDRB per kapita ADHB mencapai Rp80,18 juta pada tahun 2024. Namun, sejumlah indikator menunjukkan bahwa struktur ekonomi belum sepenuhnya ditopang oleh produktivitas dan inovasi sektor unggulan lokal, termasuk UMKM dan ekonomi kreatif.

   a. Ketergantungan pada sektor perdagangan dan jasa masih tinggi
      Proporsi PDRB ADHB dari sektor perdagangan dan jasa mencapai 69,53%, sementara sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif hanya berkontribusi 3,04%, menunjukkan potensi sektor ini belum tergarap maksimal sebagai sumber pertumbuhan baru yang berbasis inovasi dan kearifan lokal.

   b. Rasio kewirausahaan masih moderat
      Rasio kewirausahaan Kota Tangerang Selatan sebesar 51,38 menunjukkan masih perlunya penguatan ekosistem kewirausahaan, khususnya dalam penciptaan wirausaha baru yang berorientasi pada pasar digital dan global.

   c. Produktivitas dan ekspor belum optimal
      Meskipun nilai ekspor barang dan jasa telah mencapai Rp 56,44 miliar, kontribusinya terhadap struktur ekonomi masih terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan riset pasar, penguatan kualitas produk, serta fasilitasi ekspor bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.

   d. Pengangguran masih menjadi tantangan
      Dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,09%, upaya penciptaan lapangan kerja produktif melalui UMKM dan sektor kreatif sangat penting sebagai bagian dari solusi pengentasan pengangguran dan penguatan daya saing ekonomi lokal.

   e. Kesenjangan pendapatan masih terjadi
      Indeks Rasio Gini sebesar 0,395 mengindikasikan masih adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Penguatan peran UMKM yang inklusif dapat menjadi salah satu instrumen untuk menciptakan pemerataan ekonomi.

   Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah memperkuat ekosistem wirausaha yang inovatif dan inklusif. Hal ini dilakukan melalui akses pasar melalui promosi digital, fasilitasi ekspor serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset guna mendorong inovasi produk dan model bisnis.

2. ***Pengembangan pariwisata berbasis potensi kesehatan (health tourism), ritel, budaya, dan MICE***

   Kota Tangerang Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis kesehatan, budaya, ritel modern, dan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), didukung oleh posisi strategis sebagai bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek dan ketersediaan infrastruktur dasar yang relatif memadai.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah penguatan branding wisata kesehatan dengan memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan unggulan, revitalisasi ruang publik untuk seni budaya lokal, serta integrasi kawasan ritel dan pusat perbelanjaan sebagai bagian dari atraksi wisata kota.

3. Penataan sektor ekonomi informal

Sektor ekonomi informal di Kota Tangerang Selatan memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya melalui pedagang kaki lima, usaha rumahan, dan jasa mikro. Namun, sektor ini masih menghadapi tantangan besar seperti belum jelasnya legalitas dan kelembagaan usaha, minimnya akses terhadap pendampingan dan inovasi serta belum terintegrasinya usaha informal dengan ekonomi formal. Kondisi ini menuntut upaya penataan yang lebih sistematis dan inklusif agar potensi ekonomi informal dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian daerah.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan antara lain: melakukan pendataan dan registrasi pelaku usaha informal sebagai dasar intervensi kebijakan; menyediakan ruang usaha yang legal dan tertata; memfasilitasi legalitas dan akses pembiayaan; menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan digitalisasi usaha kecil; serta membangun kemitraan dengan dunia usaha dan komunitas guna menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berdaya saing.

Aspek Tata Kelola Pemerintahan

1. Tata kelola yang profesional, inovatif dan kolaboratif disertai pengembangan science dan evidence-based policy

Tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan kolaboratif menjadi landasan penting bagi terciptanya pemerintahan daerah yang efektif dan responsif terhadap perubahan. Namun, berdasarkan capaian indikator strategis Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi tata kelola berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan.

a. kapasitas inovasi dan pemanfaatan teknologi belum optimal. Indeks Inovasi Daerah yang masih berada pada angka 50,45 serta Indeks Kapabilitas Inovasi sebesar 3,27 mencerminkan keterbatasan dalam kelembagaan, sumber daya manusia, dan ekosistem inovasi di lingkungan pemerintah daerah.
b. pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) perlu ditingkatkan. Nilai SPBE sebesar 3,48 menunjukkan adanya progres, namun integrasi dan interoperabilitas antar-sistem digital masih belum sepenuhnya terwujud, sehingga menghambat pelayanan publik yang efisien dan terukur.
c. kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja memerlukan penguatan. Nilai SAKIP Kota Tangerang Selatan yang baru mencapai 69,06 menandakan perlunya penerapan manajemen kinerja berbasis hasil yang lebih terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
d. konsistensi integritas dan kualitas pelayanan publik perlu terus dijaga. Nilai SPI sebesar 76,25 dan Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,25 memang tergolong baik, namun masih perlu penguatan pada aspek

integritas birokrasi, etika pelayanan, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan antara lain: reformasi menyeluruh untuk mendorong birokrasi berorientasi pada hasil, terbuka terhadap inovasi, didukung teknologi informasi, serta berbasis pada data dan ilmu pengetahuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola daerah secara berkelanjutan.

Aspek Pembangunan Kewilayahan

1. ***Pengembangan transportasi publik dan pengelolaan sampah secara terpadu dalam konstelasi Kawasan Aglomerasi***

   Pengembangan sistem transportasi publik dan pengelolaan sampah secara terpadu menjadi isu strategis krusial bagi Kota Tangerang Selatan, khususnya dalam konteks integrasi wilayah Jabodetabek sebagai kawasan aglomerasi yang saling terhubung secara fungsional. Meskipun tingkat pengelolaan sampah sudah mencapai 96,83%, dengan 71,11% terolah dan 25,72% terdaur ulang, masih terdapat tantangan dalam membangun sistem pengelolaan yang sirkular dan berbasis wilayah. Saat ini, sebagian besar sampah masih bergantung pada pengangkutan ke TPA Cipeucang, yang secara jangka panjang tidak berkelanjutan.

   Posisi geografis Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari simpul pergerakan masyarakat Jabodetabek membuat kota Tangerang Selatan rawan terhadap tekanan arus komuter. Tanpa adanya penguatan sistem angkutan umum yang memadai, murah, dan terhubung antarwilayah, mobilitas masyarakat akan terus tidak efisien, menciptakan kemacetan dan menurunkan kualitas hidup warga.

   Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah kolaborasi antarwilayah, pembiayaan inovatif, dan integrasi perencanaan infrastruktur menjadi upaya penting menuju kota yang layak huni dan berkelanjutan.

2. ***Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berketahanan***

   Sebagai bagian dari kawasan aglomerasi Jabodetabek, Kota Tangerang Selatan menghadapi tantangan dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berketahanan. Meskipun pertumbuhan ekonomi dan sosial terus meningkat, tekanan terhadap kualitas lingkungan dan risiko bencana semakin kompleks. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 61,03 mengindikasikan kondisi lingkungan yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pencemaran udara, kualitas air, dan alih fungsi lahan. Indeks Risiko Bencana yang cukup tinggi (68,1) menunjukkan kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologis seperti banjir dan kekeringan.

   Meskipun prevalensi ketidakcukupan pangan (PoU) sebesar 3,13 tergolong rendah, ketahanan pangan tetap perlu dijaga melalui pendekatan keberlanjutan, termasuk urban farming dan pengelolaan limbah pangan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah penguatan tata kelola lingkungan, integrasi mitigasi iklim, penataan ruang berbasis risiko, serta sistem distribusi pangan yang adaptif.

2. ***Penyediaan prasarana, sarana dan layanan perkotaan yang berkualitas, terintegrasi dan inklusif***

Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek menghadapi tantangan kompleks dalam penyediaan layanan dasar perkotaan. Walaupun capaian hunian layak sudah tinggi, yaitu mencapai 99,73% pada tahun 2024, hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan terpenuhinya kualitas dan keberlanjutan infrastruktur dasar lainnya.

Akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan masih belum optimal, baru mencapai 20,29%. Kondisi ini mengindikasikan ketergantungan masyarakat pada sumber air alternatif yang belum tentu memenuhi standar kualitas dan keamanan. Begitupun dengan akses terhadap sanitasi aman baru mencapai 11,00%, memperlihatkan masih minimnya infrastruktur sanitasi yang layak dan ramah lingkungan di wilayah permukiman.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah peningkatan kualitas layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan hunian berkelanjutan menjadi prioritas strategis dalam mewujudkan kota yang sehat, dan berketahanan.

1.2.4. Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2026

Perencanaan tahunan dalam RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 disusun sebagai fondasi strategis untuk memperkuat transisi estafet pembangunan antar periode RPJPD (dari 2005–2025 menuju 2025–2045) serta antar RPJMD (dari periode 2021–2026 menuju masa transisi 2025–2029), guna memastikan kesinambungan arah pembangunan jangka panjang dan menengah secara terintegrasi dan berkelanjutan. Untuk itu, Tema Pembangunan Tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 untuk Tahap I (RKPD 2026) adalah **"Penguatan Fondasi Pembangunan SDM Unggul, Layanan Dasar dan Tata Kelola Inklusif"** dengan fokus strategis yaitu Transformasi awal pada pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, layanan dasar perkotaan serta tata kelola yang inklusif dan berbasis data.

Keselarasan antara tema RKP, RKPD Provinsi Banten Tahun 2026 dengan Tema RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 disajikan dalam Gambar berikut.



Gambar 4.1. Keselarasan antara tema RKP Tahun 2026, Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2026 dengan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 di daerah, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan Kota Tangerang Selatan tahun 2026, ditetapkan prioritas daerah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera;
2. Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi;
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas;
4. Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif dan Berkelanjutan.

Adapun arah kebijakan dari Prioritas Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6. Arah Kebijakan

No	Prioritas Daerah	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas SDM yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera	1. Meningkatkan kompetensi, kesempatan, dan minat bagi siswa dalam melangsungkan pendidikan serta menghasilkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi 2. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat termasuk dalam hal penanggulangan penyakit dan jaminan dalam mendapatkan layanan kesehatan 3. Memperluas cakupan dan jangkauan jaminan sosial bagi masyarakat secara adaptif dan inklusif 4. Meningkatkan peran dan kontribusi keluarga, pemuda, perempuan, lansia serta penyandang disabilitas dalam pembangunan
2	Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi	1. Meningkatkan kesempatan dan partisipasi kerja bagi masyarakat disertai penerapan riset dan inovasi 2. Mengoptimalkan kontribusi sektor jasa dan perdagangan, melalui upaya pengembangan pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif 3. Meningkatkan keunggulan dan daya tarik daerah dalam menjaring minat investasi serta dalam memanfaatkan peluang aglomerasi ekonomi kawasan Jabodetabek 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberikan perhatian terhadap sektor informal dan mendorong berkembangnya kewirausahaan serta koperasi, disertai penguatan UMKM dan industri kecil yang berorientasi pada pasar ekspor
3	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas	1. Mendorong percepatan reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan penerapan SPBE, pelayanan publik dan pencegahan terhadap tindak korupsi 2. Mendorong partisipasi dan kolaborasi seluruh komponen masyarakat dalam proses pembangunan termasuk dalam penumbuhan ekonomi dan demokrasi, serta dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan 3. Mendorong peningkatan tata kelola dan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi pajak dan pemanfaatan sumber-sumber alternatif pendapatan daerah
4	Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif Dan Berkelanjutan	1. Mendorong kota yang beraksesibilitas tinggi untuk mendukung mobilisasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pengembangan ekonomi wilayah 2. Mendorong hadirnya kawasan permukiman dengan hunian yang memiliki aksesibilitas terhadap kebutuhan masyarakat dan ketahanan terhadap air dan energi 3. Meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi distribusi dan penguatan koordinasi para pihak sumber pangan daerah

No	Prioritas Daerah	Arah Kebijakan
		4. Meningkatkan pengawasan dan instrumen pengendalian terhadap aktivitas pencemaran lingkungan perkotaan 5. Meningkatkan penanganan sampah melalui pengumpulan, pemilahan dan pengolahan terintegrasi yang memiliki manfaat ekonomi dan lingkungan 6. Kesiapsiagaan bencana banjir dan perubahan iklim melalui pemantapan infrastruktur dan masyarakat dan sistem upaya-upaya pencegahan 7. Mendorong internalisasi nilai agama dan budaya yang mendukung peningkatan nilai kekayaan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing global

Berdasarkan arah kebijakan pada Prioritas Daerah 1 terdapat rencana tindak/program unggulan (highlight intervensi) Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam melaksanakan misi pembangunan tahun 2025-2029 yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Daerah 1 sebagai berikut:

1. Pembangunan 7 Unit Sekolah Baru Tingkat SMP
2. Optimalisasi Sekolah Kesetaraan Paket C
3. Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Untuk Siswa
4. BOSDA PAUD, SD Dan SMP
5. Bantuan biaya Pendidikan bagi 9000 siswa SMP setiap tahun (Rp1.800.000/tahun)
6. Bantuan biaya Pendidikan PAUD bagi 50.000 anak dalam 5 tahun (Rp1.800.000/tahun)
7. Peningkatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana PAUD
8. Bantuan Pendidikan Sarjana Bagi 1000 Guru PAUD Dan Tenaga Kependidikan Setiap Tahun
9. Beasiswa Berprestasi, Kurang Mampu, Difabel Dan Penghapal Kitab Suci Sebanyak 5.000 Siswa per tahun (Rp750.000/Siswa/Tahun)
10. Insentif bagi kepala sekolah swasta dan guru swasta (Rp250.000/orang/bulan)
11. Pelatihan Guru Yang Berbasis Kompetensi Dan Keterampilan Pengajaran
12. Peningkatan akses layanan kesehatan untuk semua melalui perluasan cakupan UHC 100%
13. Ngider sehat premium (Ngider sehat dengan tenaga dokter dan layanan ambulan, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan (MCU) gratis
14. Pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas pelayanan kesehatan
15. Pemberian Makanan Tambahan di Pos Gizi dan Posyandu – balita, ibu hamil, lansia
16. Lansia Sehat Berdaya/Posbindu Plus (Pendampingan Kesehatan dan psikologi di Posbindu)
17. Pengasuhan Lansia di Rumah diintergrasikan program BKL (Bina Keluarga Lansia)
18. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan Rujukan (3 RSUD, 29 RS swasta, dan 35 Puskesmas)
19. Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Unggulan:
    a. RSU Kota Tangerang Selatan diprioritaskan pada pelayanan Penyakit Kanker, Jantung, Stroke, Urenonefrologi - Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA);
    b. RSU Pondok Aren diprioritaskan pada Pelayanan Mental Health Treatment dan Kesehatan Tradisional

c. RSU Serpong Utara diprioritaskan pada pelayanan Tumbuh Kembang Anak dan Trauma Center

20. Peningkatan Kelas RSUD Kota Tangerang Selatan berbasis layanan
21. Pengembangan layanan kesehatan tradisional pada RSU dan Puskesmas
22. Griya Lansia (Termasuk Untuk Disabilitas) Melalui Pembangunan/Kerja Sama dengan Panti
23. Lomba Kelurahan Sehat Dilakukan Setiap Tahun
24. Penanganan Penyandang Disabilitas
25. Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
26. Bantuan Alat Bantu Kesehatan Yang Tidak Tercakup BPJS Atau Alat Bantu Non Kesehatan Bagi Total 500 Penyandang Disabilitas Selama 5 Tahun (100 Orang Per Tahun)
27. Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Rentan Dengan Total Target 45.000 Orang Selama 5 Tahun
28. Pembangunan Sarana Olahraga Standar Nasional

2. Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi

Berdasarkan arah kebijakan pada Prioritas Daerah 2 terdapat rencana tindak/program unggulan (highlight intervensi) Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam melaksanakan misi pembangunan tahun 2025-2029 yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Daerah 2 sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Event Skala Nasional dan Internasional
2) Pengembangan 5 Kawasan Tematik Pariwisata Perkotaan
3) Pendampingan Entrepreneur Dan Peningkatan Literasi Digital Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
4) Pembentukan Hub dan Channeling Bagi Para Pelaku Ekonomi Kreatif
5) Peningkatan Jumlah Pendampingan Legalitas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
6) Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Pemasaran Produk IKM Dan UMKM
7) Pengembangan Budidaya Anggrek, Budidaya Anggur dan Komoditas Kuliner
8) Peningkatan Jumlah Pendampingan Legalitas Usaha (antara Lain Pembuatan NIB, Sertifikat Produksi P-IRT)
9) Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi 1000 Pelaku Usaha, Termasuk Sertifikasi Halal Self Declare Sebanyak 10.000 Produk
10) Kerja Sama Peningkatan Akses Permodalan Bagi Pelaku UMKM Dan Koperasi
11) Pengembangan Koperasi Menjadi Koperasi Serba Usaha
12) Penyelenggaraan Kegiatan Bursa Lowongan Kerja One Stop Career Solution Terintegrasi 4 Kali dalam Setahun
13) Penyediaan Portal Lowongan Kerja Pada Tangsel Single Window Solution
14) Peningkatan Kompetensi SDM Tenaga Kerja Melalui Program 3D Sebanyak 2500 Orang Termasuk 200 Orang Penyandang Disabilitas
15) Peningkatan Pelayanan Perizinan Yang Cepat, Murah Dan Transparan

3. Mewujudkan transformasi birokrasi dan tata kelola yang profesional, kolaboratif dan adaptif

Berdasarkan arah kebijakan pada Prioritas Daerah 3 terdapat rencana tindak/program unggulan (highlight intervensi) Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam melaksanakan misi pembangunan tahun 2025-2029 yang secara

konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Daerah 3 sebagai berikut:

1) Corporate University
2) Beasiswa Tematik Bagi ASN
3) Pengembangan Kompetensi ASN Dalam Pemanfaatan Teknologi Pelayanan Publik (Digital Talent)
4) Pemetaan Organisasi Birokrasi Secara Berkala
5) Peningkatan Partisipasi Melalui Perencanaan Tematik
6) Pemetaan Kebutuhan Pegawai Struktural, Fungsional Umum Dan Fungsional Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan
7) Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE)
8) Kerja Sama Pembiayaan Pembangunan melalui Creative Financing / Pembiayaan Pembangunan Kreatif
9) Peningkatan PAD Melalui Elektronifikasi/Transaksi Digital Pemungutan PAD
10) Pembentukan BUMD Pasar/Aneka Usaha, BUMD Parkir dan BUMD lain sesuai kajian kebutuhan
11) Peningkatan Kerja Sama Dengan Kabupaten/Kota Penghasil Kebutuhan Bahan Pokok Melalui BUMD
12) Kerja Sama Pembangunan dan Pelayanan pada Kawasan Aglomerasi
13) Penambahan 1000 Titik WIFI Gratis
14) Penambahan Kecepatan Pada WIFI Publik Yang Telah Terpasang

4. Membangun kota berketahanan, terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan

Berdasarkan arah kebijakan pada Prioritas Daerah 4 terdapat rencana tindak/program unggulan (highlight intervensi) Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam melaksanakan misi pembangunan tahun 2025-2029 yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Daerah 4 sebagai berikut:

1) Penambahan 100 Titik Program RW Mantap
2) Penyediaan Stok Bahan Pokok Sesuai Standar Melalui BUMD Pasar
3) Penyediaan Posko Penanggulangan Bencana Dan Penyelamatan Bersama Menjadi 14 Titik
4) Pembangunan Alun-Alun Kota/ Ruang Terbuka Publik inklusif di Kecamatan Setu, Serpong Dan Ciputat
5) Implementasi Rencana Aksi Menuju Bangunan Nol Emisi Karbon
6) Program Kampung Iklim Yang Disinergikan Dengan Program Penataan Kawasan Kumuh
7) Gerakan Penanaman Satu Juta Pohon dan Gerakan Sejuta Biopori
8) Pembangunan dan penataan taman
9) Pelaksanaan Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL)
10) Program Penyediaan Sarana Tempat Sampah Terpilah Rumah Tangga Dan Pengangkutan Sampah Terpilah Dilakukan Dengan Angkutan Terpilah
11) Kerja Sama Pengelolaan Sampah
12) Penambahan Frekuensi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) Sebanyak 2 Kali Dalam 1 Bulan
13) Pembangunan Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) Di Setiap Kecamatan
14) Peningkatan Pengelolaan Sampah Di TPS3R
15) Revitalisasi TPS3R 38 Unit

16) Pembangunan Jalur Pedestrian Dan Sepeda Pada Beberapa Ruas Di Jalan Kota
17) Penyediaan Ducting Utilitas Di 25 Ruas Jalan
18) Tindaklanjut Rencana Perpanjangan MRT Lebak Bulus-Serpong
19) Penambahan 10 Unit Bis Sekolah dan Peningkatan Kerja Sama dengan Pihak Sekolah
20) Kerja Sama Perwujudan Transit Oriented Development (TOD)
21) Kerja sama penyediaan perlintasan tidak sebidang dengan Provinsi Banten yang berlokasi di Stasiun Sudimara/Pasar Jombang dan Stasiun Serpong/Pasar Serpong berupa flyover dan atau underpass
22) Kerja Sama Pelebaran jalan dengan Provinsi Banten pada ruas Jl. Pondok Cabe-Cinere, dan ruas Jl. Siliwangi Segmen Parakan – Jl. Puspiptek Raya
23) Pelebaran 8 Titik Simpang Sebidang yang berlokasi antara lain di ruas Jl. Viktor, ruas Jl. Kampung Utan, ruas Jl. Pondok Cabe, melalui pembebasan lahan, perbaikan geometric, dan pembangunan simpang sebidang
24) Kerja Sama Pembangunan 3 Protected U-Turn Antara Lain Jl. Raya Serpong, Jl. Ciater, Jalan Depan Delatinos
25) Pelebaran 2 ruas jalan kota Jl. Viktor-Jl. Rawa Buntu Dan Jl. Benda Raya/Maruga - Jl. Aria Putra
26) Penambahan Titik Area Traffic Control System (ATCS) Menjadi 5 Titik
27) Penataan lokasi parkir dengan Smart Parking berbasis IoT untuk memberikan kemudahan kepada pengguna
28) Pembangunan Sambungan Rumah (SR) Air Minum Perpipaan Aman Dengan Total 106.137 Rumah Tangga
29) Pembangunan Total 1.000 Unit SPAL Domestik (Tanki Septic)
30) Kerja Sama Pembangunan dan Penyediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
31) Program Peningkatan Kualitas RUTLH/Bedah Rumah Sebanyak 2.500 Unit
32) Penataan Kawasan Kumuh kewenangan Pemerintah Kota
33) Peningkatan Drainase Lingkungan Sepanjang 300 Km
34) Peningkatan Jumlah Titik Tangsel Terang Sebanyak 15.000 Titik
35) Pembangunan dan Operasional TPU Sarimulya
36) Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Sepanjang 166,2 Km
37) Pembangunan 10 Titik Tandon dan Long Storage
38) Optimalisasi Kualitas Penataan Kota dan Jalan
39) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kota Terintegrasi Dengan Rencana Sistem Saluran Drainase
40) Pemeliharaan Dan Pembangunan Drainase Perkotaan
41) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terintegrasi
42) Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Longsor
43) Koordinasi Penataan DAS Dan Sempadan Situ Dengan Provinsi Banten Dan BBWS
44) Koordinasi Normalisasi Kali Angke Dan Sempadan Kali Angke
45) Pemeliharaan Rusunawa Dan Mengembangkan Kerja Sama Pembangunan Perumahan ASN
46) Peningkatan Pembinaan Komunitas Seni Dan Budaya
47) Peningkatan Pemeliharaan Cagar Budaya
48) Pembentukan Unit Penataan Kota Untuk Penerapan Insentif Dan Disinsentif

4.3. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi

Pembangunan Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi daerah yaitu "Tangerang Selatan Unggul, Inklusif, Inovatif, Kolaboratif Menuju Kota Lestari", dengan misi pembangunan yang sejalan dengan agenda nasional maupun provinsi. Dalam rangka menjamin kesinambungan dan keselarasan pembangunan lintas wilayah dan sektor, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN 2025–2029) dan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2026, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 4.7. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Prioritas Provinsi dan Nasional

No	Prioritas Nasional	No	Prioritas Provinsi Banten	No	Prioritas Daerah
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	3	Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif	1	Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing global
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	2	Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan, dan potensial	2	Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembadapangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.				
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4	Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas.		
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan tangguh	3	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Kolaboratif dan Adaptif
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.				
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara holistik dan resiliensi terhadap bencana	4	Membangun kota berketahanan, terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan

Sumber: Bappelitbangda, diolah tahun 2025

4.4. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD dalam pelaksanaan kegiatan reses. Penelaahan terhadap usulan-usulan tersebut dilakukan dengan menyelaraskan pokok-pokok pikiran DPRD dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Dalam RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026, penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD mencakup hasil reses ke-1 dan ke-2, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.8. Hasil Penelaahan Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

MISI	Sasaran	Jumlah Usulan	Anggaran	Persen
Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar dan perkotaan yang terintegrasi dan inklusif	706	96.894.062.493	95,66
	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	19	1.614.124.140	2,57
Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi	Berkembangnya potensi unggulan daerah terutama sektor ekonomi kreatif, UMKM dan pariwisata	3	400.000.000	0,41
Meningkatkan Kualitas SDM yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera	Meningkatnya Kualitas Pemuda	9	863.304.534	1,22
	Kesehatan berkualitas untuk semua pada semua siklus kehidupan	1	200.000.000	0,14
Jumlah		**738**	**99.971.491.167**	**100**

Sumber: Bappelitbangda, Tahun 2025

4.5. Penelaahan Hasil Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum dialog partisipatif antar pemangku kepentingan yang bertujuan untuk membahas dan menyepakati rencana tindak prioritas dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hasil Musrenbang tersebut diintegrasikan ke dalam prioritas pembangunan daerah guna memastikan keterpaduan antara aspirasi masyarakat dan arah kebijakan pembangunan.

Dalam rangka penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026, telah diselenggarakan rangkaian Musrenbang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota. Hasil penelaahan terhadap daftar usulan kegiatan pembangunan dari Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.9. Hasil Penelaahan Usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Misi	Sasaran	Jumlah Usulan	Anggaran	Persen
Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif dan Berkelanjutan	Menguatnya keterikatan sosial antar warga dan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	16	2.725.000.000	1,82%
	Meningkatnya ketahanan pangan	55	7.774.924.000	5,18%
	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar dan perkotaan yang terintegrasi dan inklusif	518	84.691.287.701	56,46%
	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	57	6.919.394.186	4,61%
	Menurunnya resiko bencana	14	1.179.815.972	0,79%

Misi	Sasaran	Jumlah Usulan	Anggaran	Persen
Meningkatkan Kualitas SDM yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera	Kesehatan berkualitas untuk semua pada semua siklus kehidupan	155	15.765.802.505	10,51%
	Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan hak anak	45	3.758.815.028	2,51%
	Meningkatnya Kualitas Pemuda	49	8.818.777.709	5,88%
	Meningkatnya Literasi Masyarakat	4	525.000.000	0,35%
	Pendidikan berkualitas untuk semua	45	5.363.547.420	3,58%
Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi	Berkembangnya potensi unggulan daerah terutama sektor ekonomi kreatif, UMKM dan pariwisata	84	10.162.819.712	6,78%
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja berbasis penguatan IPTEK dan inovasi	24	2.306.117.749	1,54%
Total		1066	149.991.301.982	100,00%

Sumber: Bappelitbangda, Tahun 2025

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026

Pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang mencakup urusan wajib pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), urusan wajib non-pelayanan dasar, urusan pilihan, serta fungsi penunjang pemerintahan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan alokasi pendanaannya pada Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029 untuk periode pelaksanaan tahun 2026, yang dituangkan ke dalam RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026. Penyusunan pendanaan indikatif dilakukan untuk mendukung pencapaian target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah.

Adapun pagu indikatif per Perangkat Daerah untuk pelaksanaan urusan dan program Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1. Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	743.613.950.210
2	DINAS KESEHATAN	754.236.283.401
3	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	492.395.106.345
4	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	497.932.776.750
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	363.709.820.019,71
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	23.701.896.771
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	25.864.069.720
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15.035.170.188,29
9	DINAS SOSIAL	20.758.951.845
10	DINAS TENAGA KERJA	15.872.975.847
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	21.284.117.810
12	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	28.358.616.850
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	265.618.950.137
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	25.082.753.136
15	DINAS PERHUBUNGAN	117.064.121.158
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	63.919.176.158
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	23.741.852.960
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	31.084.382.749
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	118.888.128.240
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	16.160.259.643
21	DINAS PARIWISATA	21.330.947.878
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	22.530.794.319
23	SEKRETARIAT DAERAH	190.021.519.478
24	SEKRETARIAT DPRD	128.203.875.341
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	31.405.879.374
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	46.885.051.373
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	83.736.435.820
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	28.477.206.165
29	INSPEKTORAT	36.528.376.068
30	KECAMATAN CIPUTAT	36.795.280.152
31	KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	34.629.107.941
32	KECAMATAN PAMULANG	45.566.488.851

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
33	KECAMATAN SERPONG	39.328.025.489
34	KECAMATAN SERPONG UTARA	34.732.460.223
35	KECAMATAN PONDOK AREN	54.477.329.462
36	KECAMATAN SETU	30.747.802.728
37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27.070.956.961
		4.556.790.897.561

Sumber: Bappelitbangda, 2025

Tabel 5.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RKPD 2026
1	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.607.000.000
2	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	700.000.000
3	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	350.086.000
4	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	46.700.000
5	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.186.566.284
6	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	47.714.000
7	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.500.000.000
8	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	35.000.000
9	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	237.150.000
10	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	35.000.000
11	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.620.428.948

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RKPD 2026
12	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100.000.000
13	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	250.000.000
14	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.571.850.000
15	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	40.500.000
16	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.375.000.000
17	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	112.180.000
18	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	350.086.000
19	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	46.700.000
20	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	825.876.468
21	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	47.714.000
22	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.500.000.000
23	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	35.000.000
24	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	237.150.000
25	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	35.000.000

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RKPD 2026
26	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.620.428.948
27	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.000.000
28	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	250.000.000
29	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3.125.000.000
30	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	937.850.000
31	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	40.500.000
32	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.375.000.000
33	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	112.180.000
34	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	350.086.000
35	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	46.700.000
36	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	34.502.800
37	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	47.714.000
38	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.500.000.000
39	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.563.782.712
40	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.620.428.948

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RKPD 2026
41	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	100.000.000
42	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	250.000.000
43	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	209.650.000
44	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.227.600.000
45	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	112.180.000
46	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	326.187.016
47	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.500.000.000
48	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.620.428.948
49	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	-
50	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	283.528.284
51	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	267.180.000
52	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	329.206.684
53	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	15.224.000

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RKPD 2026
54	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	16.300.000
55	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	27.002.000
56	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	887.120.598
57	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	73.262.902
58	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	125.331.834
59	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	23.900.000
60	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	20.200.000
61	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	89.028.284
62	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10.467.332.000

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RKPD 2026
	Penataan Ruang					
63	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	UPT PENGELOLAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10.467.332.000
64	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-
65	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	6.585.000.000
66	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-
67	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	238.000.000
68	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	UPT PENGELOLAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-
69	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3.213.672.014

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RKPD 2026
70	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	UPT PENGELOLAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3.213.672.014
71	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	12.155.000.000
72	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	-
73	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	12.551.000.000
74	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	277.700.000
75	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2.977.262.986
76	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.206.055.413
77	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	80.000.000

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RKPD 2026
	Kawasan Pemukiman	bencana kabupaten / kota	PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
78	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	80.000.000
79	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	200.000.000
80	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	100.000.000
81	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	9.932.484
82	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	-
83	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	76.518.306
84	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	151.008.000
85	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	950.000.000

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RKPD 2026
86	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	220.738.830
87	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	861.700.000
		kebakaran				861.700.000
88	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	-
		kebakaran				#N/A
89	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	162.000.000
		kebakaran				162.000.000
90	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	-
		kebakaran				-
91	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	-
		kebakaran				-
92	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RKPD 2026
93	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.000.000
94	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000
95	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	300.000.000
96	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	7.000.000
97	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	158.400.000
98	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	7.000.000

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RKPD 2026
99	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	21.200.000
100	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7.000.000
101	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	725.000.000
102	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	341.690.698
103	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	104.607.204
104	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RKPD 2026
105	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.000.000
106	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000
107	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	300.000.000
108	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	7.000.000
109	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	158.400.000
110	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	7.000.000

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RKPD 2026
111	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	21.200.000
112	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7.000.000
113	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	725.000.000
114	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	341.690.698
115	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	104.607.204
116	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RKPD 2026
117	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.000.000
118	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000
119	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	300.000.000
120	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	7.000.000
121	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	158.400.000
122	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	7.000.000

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RKPD 2026
123	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	21.200.000
124	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7.000.000
125	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	725.000.000
126	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	341.690.698
127	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	104.607.204
128	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	-
129	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.000.000

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RKPD 2026
		gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti		Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
130	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000
131	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	300.000.000
132	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	7.000.000
133	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	158.400.000
134	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	7.000.000
135	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	21.200.000

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RKPD 2026
		pengemis terlantar di luar panti		Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
136	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7.000.000
137	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	725.000.000
138	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	341.690.698
139	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	104.607.204
140	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	-
141	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RKPD 2026
142	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	49.942.796
143	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	104.607.204
144	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	22.400.000

Tabel 5.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2026

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	73.344.000
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	102.110.400
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	151.008.000
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	26.142.770
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	950.000.000
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	220.738.830
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	35.844.470
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	102.394.000
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	148.050.000
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	95.650.000
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	12.155.000.000
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	12.551.000.000
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	277.700.000
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2.977.262.986

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10.467.332.000
			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	6.585.000.000
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	238.000.000
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3.213.672.014
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	50.000.000
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	50.000.000
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	50.000.000
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1.666.026.500
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	30.000.000
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	30.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	5.000.000
DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.788.226.550
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	37.284.100.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	6.240.000

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	6.240.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	89.028.284
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	20.200.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.157.335.861
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	23.900.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	125.331.834
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	15.880.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	632.010.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	27.002.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	21.680.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	73.262.902
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	887.120.598
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	283.528.284
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	267.180.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	16.300.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	15.224.000
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.566.674
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	23.703.074
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
			Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1.825.000.000
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	450.000.000
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	840.256.966
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	22.476.674
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.003.051
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	79.963.200
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.210.770.626
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	386.500.000
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.428.200.000
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	844.480.000

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	3.079.054.643
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	240.782.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.224.434.938
DINAS PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	309.000.000
			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	12.563.000
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	89.341.000
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	-
			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-
			Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan	-

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
			Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	126.221.900
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	27.070.000
			Pengendalian Program KKBPK	-
			Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	-
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	90.300.000
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2.520.000

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	22.800.000
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	21.839.000
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.738.006.138
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1.000.000.000
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	15.167.460.000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	209.650.000
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	103.528.948
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10.292.120.000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	-
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	2.228.886.000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	450.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.616.900.000
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	118.805.400.000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	235.000.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	558.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.875.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	400.000.000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	723.133.550

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	63.218.400.000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3.125.000.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	200.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	500.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.300.000.000
DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.350.000.000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	59.494.207
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.824.006.773
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	258.985.740
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	23.600.668.840
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.206.055.413
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	80.000.000
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	80.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	220.217.905.162
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	3.750.000.000

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	139.999.820
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	25.665.002.254
DINAS SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	60.000.000
			Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	-
			Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	-
			Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-
			Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	-
			Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	-
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	152.566.135
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	15.000.000

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	-
			Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	-
			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	-
			Rujukan Anak-Anak Terlantar	-
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	5.040.000.000
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	-
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	79.307.828
			Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	-
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	132.372.786
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	24.970.000
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	50.050.000
			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000
			Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	-
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.000.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	300.000.000
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	7.000.000
			Pemberian Layanan Kedaruratan	158.400.000
			Pemberian Layanan Rujukan	7.000.000
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	21.200.000
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7.000.000
			Penyediaan Alat Bantu	725.000.000
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan	1.050.000
			Penyediaan Permakanan	341.690.698
			Penyediaan Sandang	76.950.000
			Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	-
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	-
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	-
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-
			Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)	-
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	-
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	-
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	-

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
			Pemberian Layanan Kedaruratan	-
			Pemberian Layanan Rujukan	-
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	-
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-
			Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	-
			Penyediaan Alat Bantu	-
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	-
			Penyediaan Permakanan	-
			Penyediaan Sandang	-
DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7.400.000
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.044.500.000
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	318.628.607
			Perluasan Kesempatan Kerja	1.132.392.300
KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.280.000.000
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.229.800.000
KECAMATAN PAMULANG	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	200.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.040.000.000

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	400.000.000
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.391.869.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50.000.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.218.468.800
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	100.000.000
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.149.563.200
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	500.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200.000.000
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
KECAMATAN PONDOK AREN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.080.000.000
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	450.000.000
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.500.000.000
KECAMATAN SETU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.548.168.080
Grand Total				658.884.863.308

Tabel 5.4. Rencana Kerja dan Pendanaan Tematik Stunting Tahun 2026

INTERVENSI SPESIFIK/SENSITIF	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
Sensitif	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	50.000.200
Sensitif	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	12.155.000.000
Sensitif				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	12.551.000.000
Sensitif				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	277.700.000
Sensitif				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2.977.262.986
Sensitif		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10.467.332.000
Sensitif				Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-
Sensitif				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	6.585.000.000
Sensitif				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	238.000.000

INTERVENSI SPESIFIK/SENSITIF	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
Sensitif				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
Sensitif				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3.213.672.014
Spesifik	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	79.239.048
Spesifik			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	190.700.000
Spesifik			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	958.690.952
Spesifik		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.788.226.550
Spesifik				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	37.284.100.000
Spesifik				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	89.028.284
Spesifik				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	20.200.000
Spesifik				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.157.335.861
Spesifik				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	23.900.000

INTERVENSI SPESIFIK/SENSITIF	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
Spesifik				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	125.331.834
Spesifik				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.628.200.844
Spesifik				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	283.528.284
Spesifik				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	267.180.000
Spesifik				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	780.920.000
Spesifik				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.480.000
Sensitif	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1.825.000.000
Sensitif				Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	450.000.000
Sensitif		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.003.051
Sensitif				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	79.963.200
Sensitif		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.210.770.626
Sensitif		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-

INTERVENSI SPESIFIK/SENSITIF	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
Sensitif		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	-
Sensitif				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	-
Sensitif	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	10.400.000.000
Sensitif	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	12.563.000
Sensitif				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	126.221.900
Sensitif		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000
Sensitif			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	-
Sensitif			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	11.680.000

INTERVENSI SPESIFIK/SENSITIF	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
Sensitif			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	90.300.000
Sensitif				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2.520.000
Sensitif				Peningkatan Kesertaan KB Pria	
Sensitif				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	22.800.000
Sensitif				Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	21.839.000
Sensitif		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	9.720.000
Sensitif			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	5.961.000
Sensitif				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4.890.000
Sensitif				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	7.890.000
Sensitif				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-

INTERVENSI SPESIFIK/SENSITIF	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
Sensitif	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	77.180.000
Sensitif	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	220.217.905.162
Sensitif		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	25.665.002.254
Sensitif	DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	132.372.786
Spesifik	KECAMATAN CIPUTAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.625.000.000
Spesifik			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.351.516.993
Spesifik	KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.280.000.000
Spesifik			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.229.800.000
Spesifik	KECAMATAN PAMULANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.040.000.000

INTERVENSI SPESIFIK/SENSITIF	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
Spesifik			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.391.869.000
Spesifik	KECAMATAN PONDOK AREN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.080.000.000
Spesifik			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.500.000.000
Spesifik	KECAMATAN SERPONG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.362.000.000
Spesifik			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.257.188.071
Spesifik	KECAMATAN SERPONG UTARA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.523.862.680
Spesifik			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.058.401.260
Spesifik	KECAMATAN SETU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.780.000.000
Spesifik			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.548.168.080
	Grand Total				388.931.416.920

Tabel 5.5. Rencana Kerja dan Pendanaan Tematik Peningkatan Investasi Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
DINAS PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	26.395.330
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	-
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	88.895.620
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	5.132.368
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	15.000.000
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	50.000.000
			Pengawasan Penanaman Modal	60.000.000

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	40.000.000
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	640.000.000
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	-
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	-
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	-
			Pameran Dagang Nasional	-
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	599.999.999

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	59.494.207
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.824.006.773
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	-
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	-
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	-
Grand Total				4.458.924.297

Tabel 5.6. Rencana Kerja dan Pendanaan Tematik Peningkatan Kontribusi Sektor UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	844.480.000
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	3.079.054.643
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	240.782.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.224.434.938
DINAS PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	55.000.000
			Pengembangan Pendidikan	15.750.000
			Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	74.977.040
			Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	79.999.620
		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	200.000.000

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	309.000.000
			Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4.328.850.000
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	50.000.000
			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	-
KECAMATAN CIPUTAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	375.000.000
KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	694.818.719
KECAMATAN PONDOK AREN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.080.000.000
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	450.000.000
KECAMATAN SETU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	300.000.000
Grand Total				15.652.146.960

Tabel 5.7. Rencana Kerja dan Pendanaan Tematik Peningkatan Sektor Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
DINAS PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	4.675.000.000
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	-
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	-
			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	-
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	-
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	-
			Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	50.000.000
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-
			Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	76.000.000
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	150.000.000
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-
			Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-
Grand Total				5.001.000.000

Tabel 5.8. Rencana Kerja dan Pendanaan Tematik Pengarusutamaan Disabilitas Tahun 2026

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	102.394.000
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	4.599.432.243
DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	37.284.100.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	267.180.000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.488.405.000
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	11.475.000
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.738.006.138
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	46.780.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan	9.500.000

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
		Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	9.840.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	77.180.000
DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	50.050.000
			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.000.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	300.000.000
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	7.000.000
			Pemberian Layanan Kedaruratan	158.400.000
			Pemberian Layanan Rujukan	7.000.000
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	21.200.000

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7.000.000
			Penyediaan Alat Bantu	725.000.000
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan	1.050.000
			Penyediaan Permakanan	341.690.698
			Penyediaan Sandang	76.950.000
			Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	-
			Penyediaan Sandang	
DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	318.628.607
Grand Total				48.710.261.686

Tabel 5.9. Rencana Kerja dan Pendanaan Tematik Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2026

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	62.453.440
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	330.066.560
			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	57.480.000
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	60.826.976
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	478.859.480
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	299.034.000
			Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	75.000.000
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	243.739.750
			Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	164.801.030
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	2.573.131.800

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	2.416.611.020
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.994.480
Grand Total				**6.832.998.536**

Tabel 5.10. Rencana Kerja dan Pendanaan Tematik Pengurangan Titik Kemacetan Tahun 2026

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	70.000.000
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	500.100.000
			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	600.000.000
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	701.800.000
			Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	387.277.179
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	-
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	207.832.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	67.168.000
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	25.000.000
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.000.000
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	300.000.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	408.200.000
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.350.000.000
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.966.000.000
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	14.096.553.640
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.737.154.000
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	47.976.431.381
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	14.950.000
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	14.950.000
DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menuju Standar	82.998.297.940
			Pembangunan Jalan	71.895.797.921
			Pembangunan Jembatan	48.987.146.524
			Pemeliharaan Berkala Jalan	4.219.348.588
			Pemeliharaan Rutin Jalan	19.609.278.741
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	4.169.990.646
			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	4.105.979.726

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.405.669.662
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	960.221.200
Grand Total				312.925.147.148

Tabel 5.11. Rencana Kerja dan Pendanaan Tematik Pengelolaan Sampah dan Limbah Tahun 2026

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	250.560.000
			Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah	50.000.000
		Pengelolaan Sampah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	818.208.064
			Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	3.915.491.000
			Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	5.037.075.229
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	3.062.673.100
			Penanganan sampah melalui pengangkutan	8.350.003.219
			Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	100.000.000
			Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	-
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6.729.129.726
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.409.641.554
			Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	117.540.868.500
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	965.000.000
KECAMATAN PAMULANG	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000
KECAMATAN PONDOK AREN	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
KECAMATAN SERPONG	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-
KECAMATAN SETU	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000
Grand Total				**151.378.650.392**

Tabel 5.12. Rencana Kerja dan Pendanaan Tematik Ketahanan Pangan Tahun 2026

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	-
			Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	-
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.566.674
			Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	18.283.074
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	23.703.074
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-
			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-
			Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000
			Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	50.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-
			Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1.825.000.000
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	450.000.000

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	840.256.966
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	22.476.674
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	79.408.310
			Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	-
			Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	45.591.690
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	100.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	170.041.032
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.920.416
			Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	22.764.992

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.003.051
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	79.963.200
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	75.000.000
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.210.770.626
			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	35.000.000
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	386.500.000
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok Pangan	37.400.000
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	55.779.374
			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	23.703.074
			Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	23.703.074
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	51.164.356

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.428.200.000
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.206.800.000
KECAMATAN PONDOK AREN	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.080.000.000
Grand Total				**14.891.999.657**

Tabel 5.13. Rencana Kerja dan Pendanaan Tematik Peningkatan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Invensi dan Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	475.000.000
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	40.000.000
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	110.000.000
			Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	75.000.000
		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	250.000.000
			Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	50.000.000
Grand Total				1.000.000.000

Tabel 5.14. Rencana Kerja dan Pendanaan Tematik Penanganan Banjir Tahun 2026

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.832.075.023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	183.996.265.351
DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	4.681.675.100
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	66.310.351.996
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.997.901.000
			Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	8.484.106.001
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	4.260.850.640
			Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	5.603.514.466
			Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	1.810.792.797
			Pembangunan Polder/Kolam Retensi	33.085.702.000
			Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	1.872.097.450
			Pembangunan Tanggul Sungai	69.997.637.485
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	459.891.532
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2.004.598.500
Grand Total				391.397.459.341

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan disajikan dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 meliputi Indikator Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan Tahun 2026 disajikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator terseleksi. Sedangkan penentuan target sasaran dan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) tertuang dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 6.1. Target Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		Urusan Leading Sektor	Wali Data
			2025	2026		
Tujuan						
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,42-84,68	84,54-84,82		BPS
2	Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)	%	5,40-6,31	5,60-6,45		BPS
3	PDRB (ADHB) Per Kapita	Juta Rp	86,03-87,82	91,59-95,99		BPS
4	Kontribusi PDRB terhadap Provinsi Banten	%	13,01-13,08	13,10-13,15		BPS, diolah
5	Rasio Gini	Indeks	0,353-0,380	0,345-0,353		BPS
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,76-5,65	4,6-5,42	Urusan Tenaga Kerja	BPS
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86,5	87,5	Sekretariat Daerah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	48.23	48,52	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup
9	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	70,04	70,05		Dinas/ Badan Urusan Penelitian dan Pengembangan
10	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	18,45	19,02	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup
Sasaran						
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	12,04	12,19	Urusan Pendidikan	BPS, Dinas/Badan Urusan Pendidikan
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,12	15,35	Urusan Pendidikan	BPS, Dinas/Badan Urusan Pendidikan
3	Kemampuan Literasi SD	Skor	69,67	72,17	Urusan Pendidikan	BPS, Dinas/Badan Urusan Pendidikan
4	Kemampuan Literasi SMP	Skor	82,38	83,48	Urusan Pendidikan	BPS, Dinas/Badan Urusan Pendidikan

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		Urusan Leading Sektor	Wali Data
			2025	2026		
5	Kemampuan Numerasi SD	Skor	60,2	63,1	Urusan Pendidikan	BPS, Dinas/Badan Urusan Pendidikan
6	Kemampuan Numerasi SMP	Skor	71,11	72,61	Urusan Pendidikan	BPS, Dinas/Badan Urusan Pendidikan
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,21	76,65	Urusan Kesehatan	BPS
8	Tingkat Kemiskinan	%	1,91-2,25	1,84-2,10	Urusan Sosial	BPS
9	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	58,91	59,15	Urusan Sosial	Kementerian Sosial, Dinas/Badan Urusan Sosial
10	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	65,7	65,97	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas/Badan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, BPS
11	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,174	0,172	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas/Badan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS
12	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	73,05	73,1	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas/Badan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55,96	56	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	Dinas/Badan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
14	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	88,49	90,59	Urusan Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
15	Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa	%	69,6	69,7		BPS, diolah
16	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,11	3,19	Urusan Pariwisata	BPS, diolah
17	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	11,64	11,71	Urusan Pariwisata	BPS, diolah
18	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	52,4	52,8		BPS, diolah
19	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,15	2,68	Urusan Kopersai dan UMKM	BPS, diolah
20	Produktivitas tenaga kerja per total output (PDRB ADHK)	Juta Rp	127,96-129,10	135,12-137,42	Urusan Tenaga Kerja	BPS, diolah
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	60,5	61,46	Urusan Tenaga Kerja	Dinas/Badan Urusan Tenaga Kerja, BPS
22	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHB)	%	44	44,8		BPS, diolah
23	Nilai investasi (PMDN dan PMA)	Triliun Rp	8,7	9,39	Urusan Penanaman Modal	Dinas/Badan Urusan Penanaman Modal
24	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,25	4,26	Sekretariat Daerah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
25	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	49,87	49,92	Urusan Komunikasi	Kementerian Komunikasi dan Digital

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		Urusan Leading Sektor	Wali Data
			2025	2026		
					dan Informatika	
26	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Indeks	99	99	Unsur Keuangan	Dinas/Badan Unsur Keuangan
27	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	66,36	67,09	Urusan Arsip	ANRI
28	Rasio Pajak terhadap PDRB (ADHB)	%	1,92	1,98	Unsur Keuangan	Dinas/Badan Unsur Keuangan
29	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	Unsur Keuangan	Dinas/Badan Unsur Keuangan
30	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2	2,1	Unsur Keuangan	Dinas/Badan Unsur Keuangan
31	Nilai SAKIP	Nilai	70	72	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
32	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99,3	99,34	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
33	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80	81	Unsur Kepegawaian	Dinas/Badan Unsur Kepegawaian
34	Indeks BerAkhlak	Indeks	80,5	81	Unsur Kepegawaian	Dinas/Badan Unsur Kepegawaian
35	Indeks Sistem Merit	Indeks	330	334	Unsur Kepegawaian	Dinas/Badan Unsur Kepegawaian
36	Jumlah kerja sama antar Pemerintah Daerah	angka	5	6	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
37	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	77	78	Unsur Pengawasan	Dinas/Badan Unsur Pengawasan
38	Persentase kebijakan berbasis bukti	%	50	51	Unsur Penelitian dan Pengembangan	Dinas/Badan Unsur Penelitian dan Pengembangan
39	Indeks Inovasi daerah	Angka	52	54	Unsur Penelitian dan Pengembangan	Dinas/Badan Unsur Penelitian dan Pengembangan
40	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	3,29	3,29	Unsur Penelitian dan Pengembangan	Dinas/Badan Unsur Penelitian dan Pengembangan
41	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU)	%	2,96	1,35	Urusan Pangan	Dinas/Badan Urusan Pangan
42	Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,2	62,59	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
43	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	71	71,2	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup
44	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	34,93	35,43	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup
45	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	33,73	33,8	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup
46	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	97	97	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup
47	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	70	70	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		Urusan Leading Sektor	Wali Data
			2025	2026		
48	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8,3	8,31	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas/Badan Unsur Penelitian dan Pengembangan
49	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	21	22	Urusan Pekerjaan Umum dab Penataan Ruang	Dinas/Badan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
50	Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	%	97	97,5	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas/Badan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
51	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	16	18,7	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas/Badan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
52	Indeks Harmoni	Indeks	7,4	7,45	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik
53	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	53,1	54,1	Urusan Kebudayaan	Dinas/Badan Urusan Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek
54	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	77,5	78	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik, Kemendagri
55	Indeks Demokrasi	Indeks	86,5	87	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik
56	Indeks Rasa Aman	Angka	73,7	74,21	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Tabel 6.2. Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2026

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		Urusan Leading Sektor	Wali Data
			2025	2026		
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	89,5	90,5	Urusan Pangan	Dinas/ Badan Urusan Pangan
2	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU)	%	2,96	1,35	Urusan Pangan	Dinas/Badan Urusan Pangan
3	Konsumsi listrik per Kapita	kWh/kapita	3.217,00	3.330,00		BPS
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Konsumsi Air Minum Layak (BJP dan JP)	%	100	100	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas/Badan Urusan Pekerjaan Umum
5	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	21	22	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas/Badan Urusan Pekerjaan Umum
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	48.23	48,52	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		Urusan Leading Sektor	Wali Data
			2025	2026		
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	16	18,7	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas/Badan Urusan Pekerjaan Umum
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	97	97	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup
9	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	70	70	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup
10	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	18,45	19,02	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup
11	Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,2	62,59	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
12	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	71	71,2	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup
13	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	34,93	35,43	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup
14	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	33,73	33,8	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup
15	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,67	0,71	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
16	Kapasitas Air Baku	lt/detik	1.568,00	1.853,00	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas/Badan Urusan Pekerjaan Umum
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,42-84,68	84,54-84,82		BPS
2	Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)	%	5,40-6,31	5,60-6,45		BPS
3	PDRB (ADHB) Per Kapita	Juta Rp	86,03-87,82	91,59-95,99		BPS
4	Rasio Gini	Indeks	0,353-0,380	0,345-0,353		BPS
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,76-5,65	4,6-5,42	Urusan Tenaga Kerja	BPS
6	Tingkat Kemiskinan	%	1,91-2,25	1,84-2,10	Urusan Sosial	BPS
7	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	58,91	59,15		
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	0,25	0,23	Urusan Sosial	BPS
9	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,04	0,035	Urusan Sosial	BPS
10	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,21	76,65	Urusan Kesehatan	BPS
11	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	9	7,54	Urusan Kesehatan	Dinas/Badan Urusan Kesehatan
12	Jumlah Kematian Ibu	Orang	14	14	Urusan Kesehatan	Dinas/Badan Urusan Kesehatan
13	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis	%	95	95	Urusan Kesehatan	Dinas/Badan Urusan Kesehatan

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		Urusan Leading Sektor	Wali Data
			2025	2026		
14	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	%	90	90	Urusan Kesehatan	Dinas/Badan Urusan Kesehatan
15	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	100	100	Urusan Kesehatan	Dinas/Badan Urusan Kesehatan, BPJS Kesehatan
16	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	12,04	12,19	Urusan Pendidikan	BPS, Dinas/Badan Urusan Pendidikan
17	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,12	15,35	Urusan Pendidikan	BPS, Dinas/Badan Urusan Pendidikan
18	Kemampuan Literasi SD	Skor	69,67	72,17	Urusan Pendidikan	BPS, Dinas/Badan Urusan Pendidikan
19	Kemampuan Literasi SMP	Skor	82,38	83,48	Urusan Pendidikan	BPS, Dinas/Badan Urusan Pendidikan
20	Kemampuan Numerasi SD	Skor	60,2	63,1	Urusan Pendidikan	BPS, Dinas/Badan Urusan Pendidikan
21	Kemampuan Numerasi SMP	Skor	71,11	72,61	Urusan Pendidikan	BPS, Dinas/Badan Urusan Pendidikan
22	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	88,49	90,59	Urusan Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
23	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	62,32	64,71	Urusan Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	45	49,03	Urusan Tenaga Kerja	Dinas/Badan Urusan Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan
25	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	77,5	78	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik
26	Indeks Harmoni	Indeks	7,4	7,45	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik
27	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	53,1	54,1	Urusan Kebudayaan	Dinas/Badan Urusan Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek
28	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	73,05	73,1	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas/Badan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	65,7	65,97	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas/Badan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
30	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,174	0,172	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas/Badan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,53	94,64	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas/Badan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55,96	56	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	Dinas/Badan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
1	Angka Ketergantungan	Nilai	40,2	40,38		BPS, diolah
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,18	8,27		BPS, diolah
3	Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa	%	69,6	69,7		BPS, diolah
4	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,11	3,19		BPS, diolah

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		Urusan Leading Sektor	Wali Data
			2025	2026		
5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	11,64	11,71		BPS, diolah
6	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	52,4	52,8		BPS, diolah
7	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,15	2,68	Urusan Koperasi dan UMKM	BPS, diolah
8	Produktivitas tenaga kerja per total output (PDRB ADHK)	Juta Rp	127,96-129,10	135,12-137,42	Urusan Tenaga Kerja	BPS, diolah
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	60,5	61,46	Urusan Tenaga Kerja	Dinas/Badan Urusan Tenaga Kerja
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	43,40-43,70	44,10-44,80	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas/Badan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, BPS
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHB)	%	44	44,8		BPS, diolah
12	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan (kumulatif)	orang	71	119	Urusan Tenaga Kerja	Dinas/Badan Urusan Tenaga Kerja
13	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kota	unit	1	1	Urusan Tenaga Kerja	Dinas/Badan Urusan Tenaga Kerja
14	Indeks Inovasi daerah	Angka	52	54	Unsur Penelitian dan Pengembangan	Dinas/Badan Unsur Penelitian dan Pengembangan
15	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	3,29	3,29	Unsur Penelitian dan Pengembangan	Dinas/Badan Unsur Penelitian dan Pengembangan
16	Total Anggaran Belanja Litbang/Riset dan Inovasi	%	0,02	0,02	Unsur Penelitian dan Pengembangan	Dinas/Badan Unsur Penelitian dan Pengembangan
17	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	49,87	49,92	Urusan Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Digital
18	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	5,05	5,07	Sekretariat Daerah	Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS)
21	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8,3	8,31		Dinas/Badan Unsur Penelitian dan Pengembangan
22	Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	%	97	97,5	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas/Badan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	70,04	70,05		Dinas/ Badan Urusan Penelitian dan Pengembangan
24	Rasio Pajak terhadap PDRB (ADHB)	%	1,92	1,98	Unsur Keuangan	Dinas/Badan Unsur Keuangan
25	Nilai investasi (PMDN dan PMA)	Triliun Rp	8,7	9,39	Urusan Penanaman Modal	Dinas/Badan Urusan Penanaman Modal
26	Nilai ICOR	nilai	7,5	6		BPS, diolah
27	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi	%	65,39	66,24	Urusan Pendidikan	BPS, diolah

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		Urusan Leading Sektor	Wali Data
			2025	2026		
	Pendidikan Menengah ke atas					
28	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja	%	76,96	77,43	Urusan Tenaga Kerja	BPS, diolah
29	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	%	71,02	71,29	Urusan Tenaga Kerja	BPS, diolah
30	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Hotel Berbintang)	ribu orang	420,1	441,14	Urusan Pariwisata	Dinas/Badan Urusan Pariwisata
31	Proporsi Jumlah Usaha Mikro pada Level Kota	%	11,9	12,23	Urusan Koperasi dan UMKM	Dinas/Badan Urusan Koperasi dan UMKM
32	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	47	48	Urusan Koperasi dan UMKM	Dinas/Badan Urusan Koperasi dan UMKM
33	Kontribusi PDRB terhadap Provinsi Banten	%	13,01-13,08	13,1-13,15		BPS, diolah
34	Proporsi Kontribusi PDRB Kota Tangerang Selatan terhadap WM Jakarta /Jabodetabekjur	%	2,17	2,20-2,26		BPS, diolah
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86,5	87,5	Sekretariat Daerah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99,3	99,34	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,5	-	Urusan Komunikasi dan Informatika	Dinas/Badan Urusan Urusan Komunikasi dan Informatika
4	Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)	Indeks	-	2	Urusan Komunikasi dan Informatika	Dinas/Badan Urusan Urusan Komunikasi dan Informatika/ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Nilai	99	99	Unsur Keuangan	Dinas/Badan Unsur Keuangan
6	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,25	4,26	Sekretariat Daerah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	77	78	Unsur Pengawasan	Dinas/Badan Unsur Pengawasan
8	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
9	Capaian Aksi HAM	%	97,5	97,6	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
10	Indeks Demokrasi	Indeks	86,5	87	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik
11	Indeks Rasa Aman	Angka	73,7	74,21	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
12	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	4,31	4,33		Badan Riset Nasional

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		Urusan Leading Sektor	Wali Data
			2025	2026		
13	Return on Asset (ROA) BUMD	%	2	2.11	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah, BUMD
14	Jumlah kerja sama antar Pemerintah Daerah	angka	5	6	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
15	Indeks Institusi	Indeks	4,28	4,3		Badan Riset Nasional
16	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	80	81	Unsur Kepegawaian	Dinas/Badan Unsur Kepegawaian
17	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	Unsur Keuangan	Dinas/Badan Unsur Keuangan
18	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	66,36	67,09	Urusan Arsip	ANRI
19	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2	2,1	Unsur Keuangan	Dinas/Badan Unsur Keuangan
20	Nilai SAKIP	Nlai	70	72	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
21	Indeks BerAkhlak	Indeks	80,5	81	Unsur Kepegawaian	Dinas/Badan Unsur Kepegawaian
22	Indeks Sistem Merit	Indeks	330	334	Unsur Kepegawaian	Dinas/Badan Unsur Kepegawaian
23	Persentase kebijakan berbasis bukti	%	50	51	Unsur Penelitian dan Pengembangan	Dinas/Badan Unsur Penelitian dan Pengembangan
24	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,83	0,83	Sekretariat Daerah	BAZNAS

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

BAB VII
PENUTUP

RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029, yang dirumuskan dengan memperhatikan RKP dan RKPD Provinsi Banten. Penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 selanjutnya menjadi landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. RKPD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2026.

Akhir kata, pelaksanaan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan dalam melaksanakan prioritas kebijakan dan program pembangunan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan dan isu strategis daerah.

Tangerang Selatan, 11 Juli 2025

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

ttd

BENYAMIN DAVNIE